

BAB IV

PENUTUP

Setelah melakukan kajian atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, pada bagian akhir ini akan disajikan kesimpulan jawaban atas tujuan dasar dilakukannya penelitian. Selanjutnya akan dirumuskan secara singkat pula masukan atau rekomendasi untuk perbaikan dan pengembangan analisis performa media (*media performance*).

A. Kesimpulan

Melalui media massa, masyarakat dapat mengetahui perkembangan yang terjadi di sekitarnya. Tak terkecuali mengenai dinamika politik di Indonesia, dimana tema 100 Hari Pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu Kedua pernah menjadi sorotan pemberitaan. Posisi media massa pun (dalam penelitian ini yakni surat kabar harian) memegang peran penting sebagai sarana pemberitaan yang berimbang untuk mengawal kerja dan pengambilan kebijakan pemerintah yang memberikan dampak luas bagi masyarakat.

Peran penting itu menjadi dilema ketika ternyata surat kabar harus berkompromi dengan berbagai tantangan, baik dalam tubuh organisasi surat kabar maupun pengaruh dari lingkungan sosio-politik. Meskipun penelitian ini memiliki keterbatasan untuk mengetahui kendala internal pada masing-masing media, terlihat nyata adanya kendala pada performa kedua surat kabar harian yang menjadi obyek penelitian ini.

Analisis *media performance* yang digunakan dalam penelitian ini menyiratkan beratnya penerapan prinsip-prinsip normatif pemberitaan yang selama ini menjadi tolak ukur pemberitaan yang ideal. Berdasarkan tujuan penelitian ini, yakni mengetahui *media performance* pemberitaan 100 Hari Kinerja Kabinet Indonesia Bersatu Kedua dalam Harian Media Indonesia dan Seputar Indonesia, tidak satu pun di antara Media Indonesia dan Seputar Indonesia yang menampilkan performa media yang lebih baik secara signifikan dalam pengukuran. Skor kualitas kefaktualan dan keseimbangan pemberitaan menjadi catatan bagi kedua media, yang menunjukkan masih terdapatnya bias dalam pemberitaan.

B. Saran

Berangkat dari kesimpulan di atas, penulis mengemukakan beberapa masukan berikut ini sebagai pertimbangan lebih lanjut:

1. Riset performa media menggunakan perspektif jurnalistik dalam penelitian ini masih terbatas.

Dibutuhkan penelitian lanjutan dengan variabel yang lebih sesuai untuk menjawab lebih jauh kendala serta alasan internal media yang menyebabkan performa kedua media yang kurang maksimal dan perbedaan hasil yang tidak signifikan. Demikian pula pengukuran *tone* berita untuk mengetahui kecenderungan sikap tiap-tiap item berita yang dipilih sebagai sampel.

2. Pentingnya perbaikan performa pemberitaan bagi kedua media

Secara ekonomis, keberpihakan media pada salah satu perspektif akan menarik satu kelompok pembaca dengan perspektif serupa. Namun, performa

media merupakan bentuk pertanggungjawaban media kepada masyarakat. Sesuai dengan nafas analisis *media performance*, sudah saatnya media yang berada pada era kebebasan pers memberikan kebebasan pada masyarakat untuk memilih media yang berkomitmen pada profesionalitas. Penelitian ini bukan bermaksud mengecam, namun sebagai masukan bagi media-media untuk terus berbenah dan berkembang ke arah pemberitaan yang lebih baik.

3. Pentingnya literasi media bagi masyarakat

Performa kedua media yang belum cukup baik memerlukan kemampuan pembaca surat kabar harian untuk memahami dan mengkritisi informasi yang didupatkannya melalui media. Melalui kaca mata sosial-politik, tanpa kemampuan literasi media, pembaca akan cenderung mengolah informasi yang tidak tepat dan merepresentasikannya dalam pilihan politik yang tidak tepat pula. Semoga ke depannya, masyarakat informasi di Indonesia semakin cerdas dalam menyimak berita-berita yang menyangkut huru-hara dalam politik, ataupun mengenai isu kepentingan nasional.

Daftar Pustaka

Buku:

- Alexander, Alison, dan Jarice Hanson. 2009. *Taking Sides: Clashing Views in Mass Media and Society*. 10th edition. New York: McGraw Hill
- Ardial. 2009. *Komunikasi Politik*. Jakarta: Indeks
- Burton, Graeme. 2008. *Yang Tersembunyi di Balik Media*. Yogyakarta:Jalasutra
- Hamad, Ibnu. 2004. *Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa*. Jakarta: Granit
- Hill, David T. 1995. *The Press in The New Order Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Kawuryan, Megandaru. 2008. *Kamus Politik Modern*. Yogyakarta: Pura Pustaka
- Kriyantono, Rachmat. 2006. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Cetakan Kesatu. Jakarta: Kencana Prenada Media
- Kusumaningrat, Hikmat dan Purnama Kusumaningrat. 2006. *Jurnalistik: Teori dan Praktik*. Cetakan Kedua. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Lesmana, Tjipta. 2009. *Dari Soekarno Sampai SBY: Intrik dan Lobi Politik Para Penguasa*. Jakarta: Gramedia
- Martono, Nanang. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*. Jakarta: Rajawali Pers
- McQuail, Denis. 1995. *Media Performance: Mass Communication and The Public Interest*. London: Sage
- McQuail, Denis. 2000. *Mass Communication Theory*. London: Sage
- Muhtadi, Asep Saeful. 2008. *Komunikasi Politik Indonesia: Dinamika Islam Politik Pasca-Orde Baru*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Santana K, Septiawan. 2005. *Jurnalisme Kontemporer*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Severin, Werner J. dan James W. Tankard. 2005. *Teori Komunikasi: Sejarah, Metode, dan Terapan dalam Media Massa Edisi Kelima*. Cetakan Kesatu. Jakarta: Kencana Prenada Media

- Siregar, Ashadi. 1998. *Bagaimana Meliput dan Menulis Berita untuk Media Massa*. Yogyakarta: Kanisius
- Sudibyo, Agus. 2001. *Kabar-kabar Kebencian: Prasangka Agama di Media Massa*. Jakarta: Insitut Studi Arus Informasi (ISAI)
- Tim PWI. 1996. *Profil Pers Indonesia: 50 Tahun PWI Mengabdi*. Bambang Sadono SY, dkk (Ed.). Semarang: Citra Almamater
- Urbaningrum, Anas. 2010. *Revolusi Sunyi: Mengapa Partai Demokrat dan SBY Menang Pemilu 2009*. Jakarta: Teraju
- Wiguna, Guntur. 2010. *Profil Lengkap Kabinet Indonesia Bersatu II*. Yogyakarta: Media Pressindo
- Wimmer, Roger. D dan Joseph R. Dominick. 2003. *Mass Media Research: An Introduction*. 7th edition. USA: Wadsworth
- Yuda, Hanta AR. 2010. *Presidensialisme Setengah Hati: dari Dilema ke Kompromi*. Jakarta: Gramedia
- Jurnal:*
- Djadijono, M. 2008. "Dinamika Pemilu 2009 dan Ketidakpastian Hukum" dalam *Jurnal Analisis CSIS* vol. 37. No 3, September 2008. Hlm: 292-316
- Inggrit, Inri W. 2009. "Ambiguitas Media dalam Masyarakat: Pertarungan antara *As It Is* dan *As Ought To Be*" dalam *Jurnal Ilmiah SCRIPTURA*, Vol. 3, No. 1, Januari 2009. Hlm: 37-47, diakses Senin, 22 Februari 2010 (<http://puslit2.petra.ac.id/ejournal/index.php/iko/article/shop/17019/17792>)
- Swestin, Grace. 2008. "*When Media and Politics Colide: The Involvement of Indonesian Media Practitioners in Politics in The Wake of Democracy*" dalam *Jurnal Ilmiah SCRIPTURA*, Vol. 2, No. 2, Juli 2008. Hlm: 106-116, diakses Senin, 22 Februari 2010 (<http://puslit2.petra.ac.id/ejournal/index.php/iko/article/view/16944>)
- Artikel dalam Bunga Rampai:*
- Idris, Naswil dan Shelton A. Gunaratne. 2002. "Southeast Asia: Indonesia" Dalam Shelton A. Gunaratne (ed.). *Handbook of The Media in Asia*. second edition. London: Sage

- J.A, Denny. 2006. "Islam versus Nasionalis Sekuler" dalam Fransiskus Sudiarsis (ed.). *Membangun Demokrasi Sehari-hari: Opini di Media Indonesia*. Hlm: 3-8. Yogyakarta: LKiS
- Rahayu. 2006. "Potret Profesionalisme dan Kualitas Pemberitaan Surat Kabar Indonesia" dalam Rahayu (ed.). *Menyingkap Profesionalisme Kinerja Surat Kabar di Indonesia*. Hlm: 31-59. Jakarta: Krayon Grafika
- Tim Peneliti Dewan Pers. 2006. "Media Performance: Suatu Kerangka Analisis" dalam Rahayu (ed.). *Menyingkap Profesionalisme Kinerja Surat Kabar di Indonesia*. Hlm: 1-27. Jakarta: Krayon Grafika
- Wahyuni, Hermin Indah. 2004. "Relasi Media Massa Indonesia dengan Negara, Masyarakat, dan Pasar dalam Orde Reformasi" dalam Prajarto, Nunung (ed.). *Komunikasi, Negara, dan Masyarakat*. Hlm: 155-180. Yogyakarta: Fisipol UGM
- Willnat, Lars dan Annette J. Aw. 2004. "Political Communication in Asia: Chalengges and Opportunities" dalam Lynda Lee Kaid (ed.). *Handbook of Political Communication Research*. London: Lawrence Erlbaum Associates
- Tulisan Ilmiah Tidak Diterbitkan:*
- Jati, Brigitta Bestari Puspita. 2008. *Objektivitas Pemberitaan tentang Epidem Virus H5N1(Flu Burung) yang Melanda Indonesia dalam Pers Asing dan Pers Nasional (Studi Analisis Isi Pemberitaan tentang Epidem Virus H5N1(Flu Burung) yang Melanda Indonesia Ditinjau dari Sisi Objektivitas dalam Pers Asing International Herald Tribune dan Pers Nasional The Jakarta Post Periode Januari 2005-Desember 2006)*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- Hastunggoro, Willibordus Tatag. 2010. *Studi Analisis Isi Media Performance Pemberitaan Pertempuran di Jalur Gaza antara Tentara Israel dan Hamas dalam Harian Republika periode 28 Desember 2008-22 Januari 2009*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- Palentinus, Febrianto. 2010. *Kode Etik American Society of Newspaper Editor (ASNE) dalam Pemilu Presiden 2009 (Analisis Isi Pemberitaan Penolakan Hasil Rekapitulasi Suara Pemilu Presiden 2009 Ditinjau dari Sisi Etika*

Jurnalistik ASNE dalam SKH Kompas dan SKH Media Indonesia Periode 24 Juli 2009-13 Agustus 2009). Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Artikel dari Internet:

- _. 2009. "Sejuta Kertas Rencana dari Istana ke Istana dalam *mediaindonesia.com* Senin, 26 April 2010 diakses 28 April 2010 pukul 10:00 WIB (<http://www.mediaindonesia.com/read/2010/04/26/138395/68/11/Sejuta-Kertas-Rencana-dari-Istana-ke-Istana>)
- _. 2009. "Aburizal: Munas Golkar di Riau 4 Oktober" dalam *AntaraNews.com*, 3 Agustus 2009 (<http://www.antaraneews.com/berita/1250173818/aburizal-munas-golkar-di-riau-4-oktober>), diakses 14 Juni 2010 pukul 12.45 WIB
- _. 2009. "Century dan Golkar Putih" dalam *matanews.com*, 13 Desember 2009 (<http://matanews.com/2009/12/13/century-dan-golkar-putih/>) diakses 14 Juni 2010 pukul 13.00 WIB
- _. 2009. "Surya Paloh Janjikan Golkar Akan Independen" dalam *kompas.com*, 25 September 2009 diakses 12 Juni 2010 pukul 12.45 WIB (<http://nasional.kompas.com/read/2009/09/25/17391127/Surya.Paloh.Janjikan.Golkar.Akan.Independen.>)
- _. 2009. "Media Indonesia;Sejarah Singkat" dalam *mediaindonesia.com* diakses 12 Juni 2010 pukul 12.39 WIB (http://m.mediaindonesia.com/index.php/read/2009/02/23/38398/11/11/Sejarah_Singkat)
- Ibrahim, Anwar. 2009. "Leaders & Revolutionaries:Susilo Bambang Yudhoyono" dalam *The 2009 TIME 100 Issues* diakses 24 April 2010 pukul 13.10 WIB (http://www.time.com/time/specials/packages/article/0,28804,1894410_1893847_1893840,00.html)

Lampiran 1:

TABEL 1
Rekapitulasi Perolehan Suara Pilpres 2009

Kontestan	Jumlah Suara	Persentase Suara (%)
Megawati-Prabowo	32,548,105	26,79
SBY-Boediono	73.874.562	60,80
JK-Wiranto	15,081,814	12,41

Jumlah DPT berdasarkan SK 356/Kpts/KPU/Tahun 2009 : 176,411,434

Suara Sah : 121,504,481 Suara Tidak Sah : 6,479,174

Total Pengguna Hak Pilih : 127,983,655 Yang Tidak Menggunakan Hak Pilih : 48,427,779

Sumber: Urbaningrum (2010:355-358)

TABEL 2
Pengelompokan Parpol dan Media Cetak berdasarkan Orientasinya

	Ideologi/Dekat ke Islam	Ideologi/Dekat ke Kristen	Nasionalis-Sekuler	Pasar/Lokasi Daerah
Nama Parpol	PPP*, PKB*, PAN*, PBB, PK*	PDKB	PDIP, Golkar**, PKP	
Nama Media	Republika	Kompas, Suara Pembaruan	Media Indonesia, Rakyat Merdeka	Haluan, Kedaulatan Rakyat, Bali Pos, Jawa Pos, Fajar

Keterangan :

*PPP, PKB, PAN, PK (menjadi PKS) masuk dalam koalisi pemilu 2009

** Golkar masuk dalam koalisi Partai Demokrat pada pemilu 2009

Sumber: Hamad (2004:53)

TABEL 3
Populasi dan Sampel
pada Harian Media Indonesia dan Harian Seputar Indonesia

Harian	Sampel Periode 20 Oktober 2009 hingga 30 Januari 2010				Jumlah
	Oktober 2009	November 2009	Desember 2009	Januari 2010	
<i>MI</i>	5	9	6	16	36
<i>SI</i>	6	8	5	13	32
JUMLAH					68

Sumber : data olahan peneliti atas artikel Harian Media Indonesia dan Seputar Indonesia

TABEL 4
Uji Reliabilitas Dua Coder untuk Semua Sub Unit Analisis
pada Harian Media Indonesia dan Harian Seputar Indonesia

No	Sub Unit Analisis	N1	N2	M
1.	Letak intisari berita	68	68	65
2.	Jenis intisari berita	68	68	55
3.	Adanya kepadatan informasi (<i>density</i>)	68	68	60
4.	Adanya keluasan informasi (<i>breadth</i>)	68	68	58
5.	Adanya kedalaman informasi (<i>depth</i>)	68	68	62
6.	Adanya pengulangan frase atau parafrase	68	68	65
7.	Adanya penggunaan kalimat anak yang mendukung intisari	68	68	56

	berita			
8.	Adanya penggunaan istilah atau kata asing	68	68	60
9.	Adanya sumber rujukan yang jelas	68	68	64
10.	Adanya sumber rujukan anonim	68	68	68
11.	Adanya cek dan ricek terhadap berita yang ditulis	68	68	64
12.	Adanya kelalaian pencantuman sumber berita	68	68	67
13.	Adanya kesalahan pengutipan data narasumber	68	68	67
14.	Adanya sumber berita non-pemerintah	68	68	62
15.	Adanya sumber berita resmi dari pemerintah	68	68	62
16.	Adanya ketepatan penggunaan ejaan dan tanda baca	68	68	64
17.	Adanya kesesuaian judul dengan isi berita	68	68	67
18.	Adanya unsur "what"	68	68	68
19.	Adanya unsur "who"	68	68	68
20.	Adanya unsur "when"	68	68	62
21.	Adanya unsur "where"	68	68	64
22.	Adanya unsur "why"	68	68	58
23.	Adanya unsur "how"	68	68	58
24.	Adanya <i>proximity</i> psikografis	68	68	68
25.	Adanya <i>proximity</i> geografis	68	68	68
26.	Adanya aktualitas obyektif	68	68	67
27.	Adanya aktualitas subyektif	68	68	67
28.	Adanya <i>significance</i>	68	68	68
29.	Adanya <i>prominence</i>	68	68	68
30.	Adanya <i>magnitude</i>	68	68	66
31.	Adanya <i>source bias</i>	68	68	57
32.	Adanya <i>slant</i>	68	68	62
33.	Adanya keseimbangan representasi pro-kontra	68	68	56
34.	Adanya personalisasi tokoh	68	68	57
35.	Adanya aspek emosional wartawan	68	68	68
36.	Adanya dramatisasi	68	68	62
37.	Adanya stereotipe	68	68	64
38.	Adanya <i>juxtaposition</i>	68	68	66
39.	Adanya <i>linkages</i>	68	68	65
JUMLAH		2652	2652	2473

Sumber : data olahan peneliti

Keterangan :

$$CR = \frac{2 M}{N1 + N2}$$

$$CR = \frac{2 (2473)}{(2652 + 2652)}$$

$$CR = \frac{4946}{5304} = 0,93$$

Dengan demikian besar koefisien reliabilitas untuk kedua coder ialah 0,93.

TABEL 5
Source Bias pada Harian Media Indonesia

No	Judul Berita	Sumber Dominan
1.	Menjaga Stabilitas Memanjakan Sektor Riil (Kamis, 22 Oktober 2009)	Pemerintah
2.	Mimpi Negara Industri Maju dan Harmonisasi Kebijakan (Kamis, 22 Oktober 2009)	Pemerintah
3.	Tim Ekonomi Janjikan Percepatan Infrastruktur (Minggu, 25 Oktober 2009)	Pemerintah
4.	Depkeu Siapkan Fasilitas PPh untuk Industri Prioritas (Selasa, 3 November 2009)	Pemerintah
5.	Perombakan Lembaga Hukum Jadi Keniscayaan (Jumat, 6 November 2009)	Kontra Pem.
6.	Presiden Serukan Ganyang Mafia Hukum (Jumat, 6 November 2009)	Pemerintah
7.	Jalur Selat Sunda Masuk Program 100 Hari (Jumat, 13 November 2009)	Pemerintah
8.	Menko Perekonomian Buka Akses Kinerja 100 Hari (Sabtu, 14 November 2009)	Pemerintah
9.	Kemudahan Pembebasan Tanah Harus Tuntas 100 Hari (Jumat, 20 November 2009)	Pemerintah
10.	Dari Konservasi Alam Hingga Krisis Listrik (Kamis, 26 November 2009)	Kontra Pem.
11.	Program 100 Hari Ekonomi Masih 60% (Rabu, 2 Desember 2009)	Pemerintah
12.	Layanan Publik yang Kian Mencemaskan (Jumat, 4 Desember 2009)	Kontra Pem.
13.	Dikepung Skandal Bank <i>Century</i> (Jumat, 11 Desember 2009)	Kontra Pem.
14.	Program 100 Hari Tidak Realistis (Jumat, 11 Desember 2009)	Kontra Pem.
15.	Rencana Aksi Kementerian Perindustrian Mengecewakan (Jumat, 15 Januari 2010)	Kontra Pem.
16.	Industri Pertahanan Siap Dibangun (Kamis, 28 Januari 2010)	Pemerintah
17.	Seratus Hari ESDM Bukan Cuma Pemanis (Kamis, 28 Januari 2010)	Pemerintah
18.	Pertamina Dukung Kebijakan Energi Nasional (Kamis, 28 Januari 2010)	Pemerintah
19.	Pembenahan Layanan Kesehatan Terus Dilakukan (Kamis, 28 Januari 2010)	Pemerintah
20.	Menanti Sinergi Pendidikan dan Dunia Kerja (Kamis, 28 Januari 2010)	Pemerintah
21.	Swasembada Tergantung Dana (Kamis, 28 Januari 2010)	Pemerintah
22.	Percepatan Infrastruktur Kuatkan Daya Saing (Kamis, 28 Januari 2010)	Pemerintah
23.	Masih Jalan di Tempat (Kamis, 28 Januari 2010)	Kontra Pem.

Sumber: data olahan peneliti

TABEL 6
Source Bias pada Harian Seputar Indonesia

No	Judul Berita	Sumber Dominan
1.	Tim Ekonomi Mulai Konsolidasi (Jumat, 23 Oktober 2009)	Pemerintah
2.	SBY Ingatkan Tidak Ada Keputusan Wapres (Sabtu, 24 Oktober 2009)	Pemerintah
3.	Mendiknas Janji Berikan 10.000 Beasiswa (Sabtu, 31 Oktober 2009)	Pemerintah
4.	Depag Siapkan Antisipasi Aliran Sesat (Sabtu, 31 Oktober 2009)	Pemerintah
5.	Postur APBN 2010 Aman (Sabtu, 7 November 2009)	Pemerintah
6.	Kasus KPK-Century Berdampak Negatif Bagi SBY(Sabtu, 7 November 2009)	Kontra Pem.
7.	Kinerja Hatta Radjasa Ungguli Agung-Djoko Suyanto (Senin, 23 November 2009)	Pemerintah
8.	Kasus KPK-Polri Rusak Program 100 Hari (Senin, 23 November 2009)	Kontra Pem.
9.	Program 100 Hari Terganjil Dua "DC" (Jumat, 4 Desember 2009)	Kontra Pem.
10.	Pemerintah Akan Gratiskan Paspor TKI (Sabtu, 5 Desember 2009)	Pemerintah
11.	Akbar Berharap Tuntas 100 Hari (Senin, 14 Desember 2009)	Kontra Pem.
12.	Depbudpar Gelar Festival Sasando (Senin, 14 Desember 2009)	Pemerintah
13.	PDP Minta SBY Tegas Berantas Mafia Hukum (Rabu, 16 Desember 2009)	Kontra Pem.
14.	Program Depsos Jangan Basa-basi (Sabtu, 2 Januari 2010)	Pemerintah
15.	Menteri Kelautan Klaim Sukses 100 Hari (Jumat, 8 Januari 2010)	Pemerintah
16.	Mensos Klaim Program 100 Hari Sukses (Sabtu, 9 Januari 2010)	Pemerintah
17.	Mensos Fokus Tangani Anak Jalanan (Kamis, 14 Januari 2010)	Pemerintah
18.	100 Hari Bukan Ukuran Kinerja (Jumat, 15 Januari 2010)	Pemerintah
19.	Program 100 Hari Terpenuhi (Sabtu, 16 Januari 2010)	Pemerintah
20.	Ekonom Nilai Program 100 Hari Belum Substansial (Senin, 18 Januari 2010)	Kontra Pem.
21.	100 Hari Gagal Dilaksanakan (Senin, 25 Januari 2010)	Kontra Pem.
22.	Kepuasan Terhadap Kinerja Pemerintah Turun (Kamis, 28 Januari 2010)	Kontra Pem.
23.	PDIP Nilai Program 100 Hari Hanya Pencitraan (Jumat, 29 Januari 2010)	Kontra Pem.

Sumber: data olahan peneliti

TABEL 7
Skor *Media Performance* Harian Media Indonesia dan Seputar Indonesia
Untuk Semua Unit dan Sub Unit Analisis

Kelompok	Unit dan Sub Unit Analisis	Kategori Penilaian					Harian	
		Bagus	Cukup	Buruk	Sangat Buruk	Tidak Pantas	MI	SI
1.	Kefaktualan (<i>factualness</i>)	10,00-8,01	8,00-6,01	6,00-4,01	4,00-2,01	2,00-0,00	7,51	7,47
<i>1.1</i>	<i>Intisari berita (<i>mainpoint</i>)</i>	<i>2,00-1,61</i>	<i>1,60-1,21</i>	<i>1,20-0,81</i>	<i>0,80-0,41</i>	<i>0,40-0,00</i>	<i>1,7</i>	<i>1,97</i>
1.1.1	Letak intisari berita	1,00-0,81	0,80-0,61	0,60-0,41	0,40-0,21	0,20-0,00	0,89	1,00
1.1.2	Jenis intisari berita	1,00-0,81	0,80-0,61	0,60-0,41	0,40-0,21	0,20-0,00	0,81	0,97
<i>1.2</i>	<i>Nilai informasi</i>	<i>3,00-2,41</i>	<i>2,40-1,81</i>	<i>1,80-1,21</i>	<i>1,20-0,61</i>	<i>0,60-0,00</i>	<i>1,99</i>	<i>1,64</i>
1.2.1	Kepadatan informasi (<i>density</i>)	1,00-0,81	0,80-0,61	0,60-0,41	0,40-0,21	0,20-0,00	0,80	0,65
1.2.2	Keluasan informasi (<i>breadth</i>)	1,00-0,81	0,80-0,61	0,60-0,41	0,40-0,21	0,20-0,00	0,36	0,31
1.2.3	Kedalaman informasi (<i>depth</i>)	1,00-0,81	0,80-0,61	0,60-0,41	0,40-0,21	0,20-0,00	0,83	0,68
<i>1.3</i>	<i>Kekayaan informasi (<i>readability</i>)</i>	<i>3,00-2,41</i>	<i>2,40-1,81</i>	<i>1,80-1,21</i>	<i>1,20-0,61</i>	<i>0,60-0,00</i>	<i>1,88</i>	<i>2,23</i>
1.3.1	Pengulangan kalimat/parafrasa	1,00-0,81	0,80-0,61	0,60-0,41	0,40-0,21	0,20-0,00	0,88	0,96
1.3.2	Penggunaan anak kalimat	1,00-0,81	0,80-0,61	0,60-0,41	0,40-0,21	0,20-0,00	0,5	0,56
1.3.3	Penggunaan istilah-istilah asing	1,00-0,81	0,80-0,61	0,60-0,41	0,40-0,21	0,20-0,00	0,5	0,71
<i>1.4</i>	<i>Konformasi pada sumber (<i>checkability</i>)</i>	<i>2,00-1,61</i>	<i>1,60-1,21</i>	<i>1,20-0,81</i>	<i>0,80-0,41</i>	<i>0,40-0,00</i>	<i>1,94</i>	<i>1,90</i>
1.4.1	Sumber rujukan yang jelas	1,00-0,81	0,80-0,61	0,60-0,41	0,40-0,21	0,20-0,00	0,94	0,90
1.4.2	Sumber rujukan anonim	1,00-0,81	0,80-0,61	0,60-0,41	0,40-0,21	0,20-0,00	1,00	1,00
2.	Akurasi (<i>accuracy</i>)	6,00-4,81	4,80-3,61	3,60-2,41	2,40-1,21	1,20-0,00	5,29	5,54
<i>2.1</i>	<i>Verifikasi fakta</i>	<i>3,00-2,41</i>	<i>2,40-1,81</i>	<i>1,80-1,21</i>	<i>1,20-0,61</i>	<i>0,60-0,00</i>	<i>2,91</i>	<i>2,79</i>
2.1.1	Cek dan ricek terhadap berita	1,00-0,81	0,80-0,61	0,60-0,41	0,40-0,21	0,20-0,00	0,94	0,90
2.1.2	Kelalaian pencantuman sumber berita	1,00-0,81	0,80-0,61	0,60-0,41	0,40-0,21	0,20-0,00	0,97	0,93
2.1.3	Kesalahan pengutipan data narasumber	1,00-0,81	0,80-0,61	0,60-0,41	0,40-0,21	0,20-0,00	1,00	0,96
<i>2.2</i>	<i>Relevansi sumber berita</i>	<i>1,00-0,81</i>	<i>0,80-0,61</i>	<i>0,60-0,41</i>	<i>0,40-0,21</i>	<i>0,20-0,00</i>	<i>1,00</i>	<i>1,00</i>
<i>2.3.</i>	<i>Akurasi penyajian</i>	<i>2,00-1,61</i>	<i>1,60-1,21</i>	<i>1,20-0,81</i>	<i>0,80-0,41</i>	<i>0,40-0,00</i>	<i>1,38</i>	<i>1,75</i>

2.3.1.	Ketepatan penggunaan ejaan	1,00-0,81	0,80-0,61	0,60-0,41	0,40-0,21	0,20-0,00	0,38	0,75
2.3.2.	Kesesuaian judul dengan isi berita	1,00-0,81	0,80-0,61	0,60-0,41	0,40-0,21	0,20-0,00	1,00	1,00
3.	Kelengkapan Isi (<i>completeness</i>)	6,00-4,81	4,80-3,61	3,60-2,41	2,40-1,21	1,20-0,00	4,92	5,48
3.1.	<i>What</i>	1,00-0,81	0,80-0,61	0,60-0,41	0,40-0,21	0,20-0,00	1,00	1,00
3.2.	<i>Who</i>	1,00-0,81	0,80-0,61	0,60-0,41	0,40-0,21	0,20-0,00	1,00	1,00
3.3.	<i>When</i>	1,00-0,81	0,80-0,61	0,60-0,41	0,40-0,21	0,20-0,00	0,72	0,84
3.4.	<i>Where</i>	1,00-0,81	0,80-0,61	0,60-0,41	0,40-0,21	0,20-0,00	0,66	0,93
3.5.	<i>Why</i>	1,00-0,81	0,80-0,61	0,60-0,41	0,40-0,21	0,20-0,00	0,88	0,90
3.6.	<i>How</i>	1,00-0,81	0,80-0,61	0,60-0,41	0,40-0,21	0,20-0,00	0,66	0,81
4.	Relevansi (<i>relevance</i>)	5,00-4,01	4,00-3,01	3,00-2,01	2,00-1,01	1,00-0,00	4,91	4,53
4.1.	<i>Kedekatan (proximity)</i>	1,00-0,81	0,80-0,61	0,60-0,41	0,40-0,21	0,20-0,00	1,00	1,00
4.2.	<i>Aktualitas (timeliness)</i>	1,00-0,81	0,80-0,61	0,60-0,41	0,40-0,21	0,20-0,00	1,00	1,00
4.3.	<i>Significance</i>	1,00-0,81	0,80-0,61	0,60-0,41	0,40-0,21	0,20-0,00	1,00	1,00
4.4.	<i>Prominence</i>	1,00-0,81	0,80-0,61	0,60-0,41	0,40-0,21	0,20-0,00	1,00	1,00
4.5.	<i>Magnitude</i>	1,00-0,81	0,80-0,61	0,60-0,41	0,40-0,21	0,20-0,00	0,91	0,53
5.	Keseimbangan (<i>balance</i>)	3,00-2,41	2,40-1,81	1,80-1,21	1,20-0,61	0,60-0,00	1,60	1,62
5.1.	<i>Source bias</i>	1,00-0,81	0,80-0,61	0,60-0,41	0,40-0,21	0,20-0,00	0,36	0,31
5.2.	<i>Slant</i>	1,00-0,81	0,80-0,61	0,60-0,41	0,40-0,21	0,20-0,00	0,88	1,00
5.3.	<i>Representasi pro-kontra</i>	1,00-0,81	0,80-0,61	0,60-0,41	0,40-0,21	0,20-0,00	0,36	0,31
6.	Netralitas (<i>neutrality</i>)	6,00-4,81	4,80-3,61	3,60-2,41	2,40-1,21	1,20-0,00	5,2	5,19
6.1.	<i>Sensasionalisme</i>	3,00-2,41	2,40-1,81	1,80-1,21	1,20-0,61	0,60-0,00	2,38	2,36
6.1.1.	Personalisasi tokoh	1,00-0,81	0,80-0,61	0,60-0,41	0,40-0,21	0,20-0,00	0,72	0,46
6.1.2.	Aspek emosional	1,00-0,81	0,80-0,61	0,60-0,41	0,40-0,21	0,20-0,00	1,00	1,00
6.1.3.	Dramatisasi	1,00-0,81	0,80-0,61	0,60-0,41	0,40-0,21	0,20-0,00	0,66	0,90
6.2.	<i>Stereotipe</i>	1,00-0,81	0,80-0,61	0,60-0,41	0,40-0,21	0,20-0,00	0,91	0,93
6.3.	<i>Juxtaposition</i>	1,00-0,81	0,80-0,61	0,60-0,41	0,40-0,21	0,20-0,00	0,91	1,00
6.4.	<i>Linkages</i>	1,00-0,81	0,80-0,61	0,60-0,41	0,40-0,21	0,20-0,00	1,00	0,90
TOTAL		36,00-28,81	28,80-21,61	21,60-14,41	14,40-7,21	7,20-0,00	29,43	30,09

Sumber: data olahan peneliti

Keterangan :

Penyekoran dilakukan dengan menghitung total sub unit analisis pada setiap dimensi media performance, kemudian dirata-rata berdasarkan jumlah item berita yang diteliti pada setiap surat kabar harian. Setiap jawaban positif (yang diharapkan peneliti) akan mendapatkan nilai 1, sedangkan jawaban negatif mendapatkan nilai 0. Penyekoran maksimal untuk setiap dimensi media performance dilakukan dengan menjumlahkan semua sub unit analisis yang berada di dalamnya.

Misalkan, apabila pada Harian Media Indonesia terdapat 32 teks dari total 36 artikel yang meletakkan intisari berita pada awal teks (bernilai positif), maka skor yang didapatkan pada sub unit analisis tersebut merupakan hasil rata-rata antara jumlah jawaban positif dan jumlah item teks berita.

Lampiran 2:

Coding Sheet

Analisis Media Performance

100 Hari Kinerja Kabinet Indonesia Bersatu Kedua
 Harian Media Indonesia dan Seputar Indonesia
 periode 20 Oktober 2009 hingga 30 Januari 2010

Instruksi 1 : *Isilah data-data di bawah ini dengan huruf balok !*

Surat Kabar Harian : MEDIA INDONESIA / SEPUTAR INDONESIA
 Judul Berita : _____
 Tanggal Terbit : _____
 Nama Pengkoding : _____

Instruksi 2 : Pada bagian ini Anda dimohon untuk memberikan respon atas setiap pernyataan dengan memberikan tanda silang (X) pada pilihan yang telah disediakan. Berikan satu jawaban saja di setiap pernyataan.

ANDA SEKARANG DAPAT MEMULAI. *Terima kasih dan semoga berhasil !*

No.	Pernyataan	Awal	Tengah	Akhir
1.	Letak intisari berita (<i>main point</i>) pada tubuh teks berita			

No.	Pernyataan	Fakta	Opini	Fakta-Opini
2.	Jenis intisari berita (<i>main point</i>) pada tubuh teks berita terdiri atas			

No.	Pernyataan	Ya	Tdk
3.	Tersedia banyak fakta yang sesuai yang tersaji sebagai pendukung tema berita		
4.	Tersedia banyak keragaman (pro-kontra) informasi yang mendukung keluasan fakta dalam teks berita		
5.	Tersedia banyak fakta - fakta dan motif yang disajikan sebagai pendukung/latar belakang intisari berita		
6.	Terdapat pengulangan frase atau parafrase dalam teks berita yang dirasakan mengganggu pembaca		
7.	Terdapat anak kalimat dalam kalimat utama yang mendukung atau menjelaskan <i>main point</i> dalam teks berita		
8.	Terdapat penggunaan kata atau istilah khusus/asing dalam teks berita yang dapat membingungkan pembaca		
9.	Terdapat pernyataan narasumber atau sumber rujukan yang jelas identitasnya dan berkaitan dengan topik berita		
10.	Terdapat sumber rujukan yang anonim (identitas disamarkan) dalam teks berita		
11.	Terjadi cek dan ricek yang dilakukan oleh wartawan dalam teks berita berbentuk liputan khusus, tanggapan tokoh, ataupun pengakuan pernyataan atas pemberitaan		
12.	Terjadi kelalaian wartawan untuk mencantumkan rujukan berita/narasumber		
13.	Terjadi kesalahan pengutipan deksripsi (nama, gelar, institusi, alamat, dan sebagainya) dari narasumber berita oleh wartawan		
14.	Terdapat sumber berita non pemerintah yang diangkat wartawan		
15.	Terdapat berita resmi dari pemerintah yang diangkat wartawan dalam teks berita		
16.	Terdapat ketepatan penggunaan ejaan kata dan tanda baca dalam teks berita		
17.	Terdapat kesesuaian antara judul dengan isi berita yang disajikan wartawan		
18.	Terdapat unsur fakta yang menyatakan terjadinya suatu peristiwa dan berkaitan dengan hal-hal yang dilakukan para aktor dalam peristiwa pada teks berita		
19.	Terdapat unsur pernyataan adanya orang-orang yang terlibat dan dilibatkan dalam		

	peristiwa pada teks berita		
20.	Terdapat pernyataan mengenai unsur waktu terjadinya peristiwa kejadian pada teks berita		
21.	Terdapat pernyataan mengenai unsur tempat berlangsungnya peristiwa pada teks berita		
22.	Terdapat penjelasan mengenai unsur penyebab terjadinya peristiwa berita pada teks berita		
23.	Terdapat pernyataan mengenai yang memaparkan bagaimana situasi yang terjadi pada teks berita		
24.	Terdapat kedekatan pembaca secara emosional dan psikologis (keluarga, suku, agama, profesi, kebangsaan, dan sebagainya) dengan isi teks berita		
25.	Terdapat kedekatan antara cakupan distribusi media dengan pembaca teks berita		
26.	Peristiwa dalam teks berita baru saja terjadi		
27.	Peristiwa yang disajikan berhubungan dengan peristiwa lain yang baru saja terjadi		
28.	Tema berita memiliki pengaruh pada kondisi nasional pembaca		
29.	Terdapat keterlibatan tokoh terkemuka dalam sajian berita		
30.	Terdapat besaran peristiwa dalam bentuk angka berita seputar berita		
31.	Terdapat kecenderungan nada berita yang hanya mengangkat komentar dari satu sisi saja		
32.	Terdapat pujian yang memberikan gambaran positif ataupun negatif/kritikan seputar berita yang merupakan opini wartawan		
33.	Terdapat porsi alinea berita yang seimbang mengenai dihadapkannya pendapat pro-kontra dalam teks berita		
34.	Terdapat tokoh yang didominasi dan paling berpengaruh daripada tokoh lainnya dalam teks berita		
35.	Terjadi penonjolan aspek emosional-suka, benci, marah, sedih, gembira, ataupun opini penulis		
36.	Terjadi dramatisasi atau penulisan berita yang hiperbolik dan melebih-lebihkan suatu fakta (sangat, luar biasa) untuk memberi kesan dramatis		
37.	Terjadi penggunaan atribut kata tertentu yang berasosiasi pada tokoh atau kelompok dalam berita		
38.	Wartawan menyajikan dua hal yang tidak sebanding untuk menghasilkan kesan dramatis dalam berita		
39.	Wartawan membandingkan dua hal yang tidak berhubungan untuk menimbulkan efek sebab-akibat dalam berita		

Yogyakarta, _____

(Decoder)

TABEL 8
Pengelompokkan Pernyataan Unit Analisis

Dimensi	Unit Analisis	Kategorisasi	Pernyataan
1. Kefaktualan (<i>factualness</i>)	a. Intisari berita (<i>main point</i>)	a. Letak intisari berita	1
		b. Jenis intisari berita	2
	b. Nilai informasi (<i>informativity</i>)	a. Kepadatan informasi	3
		b. Keluasan informasi	4
		c. Kedalaman informasi	5
	c. Kekayaan informasi(<i>readability</i>)	a. Pengulangan frase atau parafrase	6
		b. Penggunaan kalimat anak	7
		c. Penggunaan istilah atau kata asing	8
	d. Konformasi pada sumber (<i>checkability</i>)	a. Sumber rujukan jelas	9
		b. Sumber rujukan anonim	10
2. Akurasi (<i>accuracy</i>)	a. Verifikasi fakta	a. Cek dan ricek berita	11
		b. Kesalahan pencantuman sumber berita	12
		c. Kesalahan pengutipan data narasumber	13
	b. Relevansi sumber berita	a. Sumber non pemerintah	14
		b. Narasumber pemerintah	15
	c. Akurasi penyajian	a. Ketepatan penggunaan ejaan kata dan tanda baca	16
		b. Kesesuaian judul dengan isi berita	17
3. Kelengkapan Isi (<i>completeness</i>)	Kelengkapan unsur 5W+1H	a. Unsur "what"	18
		b. Unsur "who"	19
		c. Unsur "when"	20
		d. Unsur "where"	21
		e. Unsur "why"	22
		f. Unsur "how"	23
4. Relevansi (<i>relevance</i>)	a. Kedekatan (<i>proximity</i>) psikografis	Kedekatan dengan emosi atau psikologis pembaca	24
	b. Kedekatan(<i>proximity</i>) geografis	Kedekatan geografis informasi dengan pembaca	25
	c. Aktualitas (<i>timeliness</i>)	a. Aktualitas obyektif	26
		b. Aktualitas subyektif	27
	d. <i>Significance</i>	Pengaruh pada kondisi nasional pembaca	28
	e. <i>Prominence</i>	Keterlibatan tokoh terkenal dalam sajian peristiwa	29
f. <i>Magnitude</i>	Sajian besaran peristiwa dalam bentuk angka	30	
5. Keseimbangan (<i>balance</i>)	a. <i>Source bias</i>	Adanya representasi satu sisi dalam pemberitaan	31
	b. <i>Slant</i>	Kritikan/pujian atau kritik berupa opini wartawan	32
	c. Representasi pro-kontra	Keseimbangan porsi alinea dalam representasi pro-kontra	33
6. Netralitas (<i>neutrality</i>)	a. Sensasionalisme	a. Personalisasi tokoh	34
		b. Aspek emosional	35
		c. Dramatisasi	36
	b. Stereotipe	Penggunaan asosiasi kata	37
	c. <i>Juxtaposition</i>	Pembandingan dua hal yang tidak	38

		sebanding	
	d. <i>Linkages</i>	Membandingkan dua hal yang tidak relevan	39

Sumber: data olahan peneliti



Lampiran 3:

Tabulasi Koding Penelitian 100 Hari Kinerja Kabinet Indonesia Bersatu Kedua

1) Tabulasi Koding Sub Unit Analisis "Letak Intisari Berita"

TABEL 1
Tabulasi Koding Sub Unit Analisis "Letak Intisari Berita"
dalam Harian Media Indonesia

No	Judul Berita	Decoder	Coder 1	Coder 2
1.	Menjaga Stabilitas Memanjakan Sektor Riil	awal	awal	awal
2.	Menekan Kemiskinan Hingga 9% di 2014	awal	awal	awal
3.	Mimpi Negara Industri Maju dan Harmonisasi Kebijakan	awal	awal	awal
4.	Tim Ekonomi Janjikan Percepatan Infrastruktur	awal	awal	awal
5.	National Summit Jadi Ajang Penajaman Program	awal	awal	awal
6.	Depkeu Siapkan Fasilitas PPh untuk Industri Prioritas	awal	awal	awal
7.	Mencari Tuan Rumah di Negeri Sendiri	tengah	tengah	awal
8.	Perombakan Lembaga Hukum Jadi Keniscayaan	awal	awal	awal
9.	Presiden Serukan Ganyang Mafia Hukum	awal	awal	awal
10.	Jalur Selat Sunda Masuk Program 100 Hari	awal	awal	awal
11.	Pemberantasan Mafia dan Pemerataan Ekonomi	awal	awal	awal
12.	Menko Perekonomian Buka Akses Kinerja 100 Hari	awal	awal	awal
13.	Kemudahan Pembebasan Tanah Harus Tuntas 100 Hari	awal	awal	awal
14.	Dari Konservasi Alam Hingga Krisis Listrik	awal	awal	awal
15.	Program 100 Hari Ekonomi Masih 60%	awal	awal	awal
16.	Setengah Hati Mencari Energi Pengganti	tengah	tengah	awal
17.	Layanan Publik yang Kian Mencemaskan	awal	awal	awal
18.	Reformasi Harus Dimulai Dari Kantor Presiden	awal	awal	awal
19.	Dikepung Skandal Bank Century	awal	awal	awal
20.	Program 100 Hari Tidak Realistis	awal	awal	awal
21.	Rencana Aksi Kementrian Perindustrian Mengecewakan	awal	awal	awal
22.	Rapor Biru Kementerian Energi	awal	awal	awal
23.	Rapor Menkeu dan Menperin Masih Merah	awal	awal	awal
24.	Industri Pertahanan Siap Dibangun	awal	awal	awal
25.	Menpora Harus Seriusi Cabang Prioritas	awal	awal	awal
26.	Seratus Hari ESDM Bukan Cuma Pemanis	tengah	awal	tengah
27.	Pertamina Dukung Kebijakan Energi Nasional	tengah	tengah	tengah
28.	Genjot Produksi Untuk Jamin Keamanan Pasokan Energi	awal	awal	awal
29.	Pembenahan Layanan Kesehatan Terus Dilakukan	awal	awal	awal
30.	Menanti Sinergi Pendidikan dan Dunia Kerja	awal	awal	awal
31.	Siaga Bencana Jadi Prioritas	awal	awal	awal
32.	Swasembada Tergantung Dana	awal	awal	awal
33.	Percepatan Infrastruktur Kuatkan Daya Saing	awal	awal	awal
34.	Tugas Berat Merumahkan Masyarakat	awal	awal	awal
35.	Keberhasilan KUR Tergantung Sosialisasi	awal	awal	awal

36.	Masih Jalan di Tempat	awal	awal	awal
-----	-----------------------	------	------	------

Sumber : *coding sheet*

TABEL 2
Tabulasi Koding Sub Unit Analisis “Letak Intisari Berita”
dalam Harian Seputar Indonesia

No	Judul Berita	Decoder	Coder 1	Coder 2
1.	Tim Ekonomi Mulai Konsolidasi	awal	awal	awal
2.	SBY Ingatkan Tidak Ada Keputusan Wapres	awal	awal	awal
3.	Tim Ekonomi Fokus Infrastruktur	awal	awal	awal
4.	Agenda 100 Hari Lebih Dipertajam	awal	awal	awal
5.	Mendiknas Janji Berikan 10.000 Beasiswa	awal	awal	awal
6.	Depag Siapkan Antisipasi Aliran Sesat	awal	awal	awal
7.	Anggaran Jangan Sampai Bengkak	awal	awal	awal
8.	SBY Prioritaskan 15 Program	awal	awal	awal
9.	SBY Deklarasikan Ganyang Mafia	awal	awal	awal
10.	Postur APBN 2010 Aman	awal	awal	awal
11.	Kasus KPK-Century Berdampak Negatif Bagi SBY	awal	awal	awal
12.	Kuntoro Rumuskan Tim Pemberantasan Mafia Hukum	awal	awal	awal
13.	Kinerja Hatta Rajasa Ungguli Agung-Djoko Suyanto	awal	awal	awal
14.	Kasus KPK-Polri Rusak Program 100 Hari	awal	awal	awal
15.	Program 100 Hari Terganjil Dua “DC”	awal	awal	awal
16.	Pemerintah Akan Gratiskan Paspor TKI	awal	awal	awal
17.	Akbar Berharap Tuntas 100 Hari	awal	awal	awal
18.	Depbudpar Gelar Festival Sasando	awal	awal	awal
19.	PDP Minta SBY Tegas Berantas Mafia Hukum	awal	awal	awal
20.	Program Depsos Jangan Basa-basi	awal	awal	awal
21.	Kasus Century Tak Ganggu 100 Hari	awal	awal	awal
22.	Menteri Kelautan Klaim Sukses 100 Hari	awal	awal	awal
23.	Mensos Klaim Program 100 Hari Sukses	awal	awal	awal
24.	Mensos Fokus Tangani Anak Jalanan	awal	awal	awal
25.	100 Hari Bukan Ukuran Kinerja	awal	awal	awal
26.	Program 100 Hari Terpenuhi	awal	awal	awal
27.	Ekonom Nilai Program 100 Hari Belum Substansial	awal	awal	awal
28.	100 Hari Gagal Dilaksanakan	awal	awal	awal
29.	Century Tenggelamkan Program 100 Hari	awal	awal	awal
30.	Satgas Angkat Citra Pemerintah	awal	awal	awal
31.	Kepuasan Terhadap Kinerja Pemerintah Turun	awal	awal	awal
32.	PDIP Nilai Program 100 Hari Hanya Pencitraan	awal	awal	awal

Sumber : *coding sheet*

2) Tabulasi Koding Sub Unit Analisis “Jenis Intisari Berita”

TABEL 3
Tabulasi Koding Sub Unit Analisis “Jenis Intisari Berita”
dalam Harian Media Indonesia

No	Judul Berita	Decoder	Coder 1	Coder 2
1.	Menjaga Stabilitas Memanjakan Sektor Riil	fakta	fakta	opini
2.	Menekan Kemiskinan Hingga 9% di 2014	fakta	fakta	fakta
3.	Mimpi Negara Industri Maju dan Harmonisasi Kebijakan	fakta-opini	fakta-opini	opini
4.	Tim Ekonomi Janjikan Percepatan Infrastruktur	fakta	fakta	fakta
5.	<i>National Summit</i> Jadi Ajang Penajaman Program	fakta	fakta	fakta
6.	Depkeu Siapkan Fasilitas PPh untuk Industri Prioritas	fakta-opini	fakta-opini	opini
7.	Mencari Tuan Rumah di Negeri Sendiri	fakta-opini	fakta-opini	fakta
8.	Perombakan Lembaga Hukum Jadi Keniscayaan	fakta	fakta	fakta
9.	Presiden Serukan Ganyang Mafia Hukum	fakta	fakta	fakta
10.	Jalur Selat Sunda Masuk Program 100 Hari	fakta	fakta	fakta
11.	Pemberantasan Mafia dan Pemerataan Ekonomi	fakta-opini	fakta-opini	opini
12.	Menko Perekonomian Buka Akses Kinerja 100 Hari	fakta	fakta	fakta
13.	Kemudahan Pembebasan Tanah Harus Tuntas 100 Hari	fakta	fakta	fakta
14.	Dari Konservasi Alam Hingga Krisis Listrik	fakta	fakta	fakta
15.	Program 100 Hari Ekonomi Masih 60%	fakta	fakta	fakta
16.	Setengah Hati Mencari Energi Pengganti	fakta	fakta	opini
17.	Layanan Publik yang Kian Mencemaskan	fakta-opini	fakta-opini	fakta
18.	Reformasi Harus Dimulai Dari Kantor Presiden	fakta	fakta	fakta
19.	Dikepung Skandal Bank <i>Century</i>	fakta-opini	fakta-opini	opini
20.	Program 100 Hari Tidak Realistis	fakta	fakta	fakta
21.	Rencana Aksi Kementrian Perindustrian Mengecewakan	fakta	fakta	fakta
22.	Rapor Biru Kementerian Energi	fakta	fakta	fakta
23.	Rapor Menkeu dan Menperin Masih Merah	fakta	fakta	fakta
24.	Industri Pertahanan Siap Dibangun	fakta	fakta	fakta
25.	Menpora Harus Seriusi Cabang Prioritas	fakta	fakta	fakta
26.	Seratus Hari ESDM Bukan Cuma Pemanis	fakta	opini	fakta
27.	Pertamina Dukung Kebijakan Energi Nasional	fakta	fakta	fakta
28.	Genjot Produksi Untuk Jamin Keamanan Pasokan Energi	fakta-opini	fakta-opini	fakta
29.	Pembenahan Layanan Kesehatan Terus Dilakukan	fakta-opini	fakta-opini	opini
30.	Menanti Sinergi Pendidikan dan Dunia Kerja	fakta	fakta	fakta
31.	Siaga Bencana Jadi Prioritas	fakta	fakta	fakta
32.	Swasembada Tergantung Dana	fakta	fakta	fakta

33.	Percepatan Infrastruktur Kuatkan Daya Saing	fakta	fakta	opini
34.	Tugas Berat Merumahkan Masyarakat	fakta	fakta	fakta
35.	Keberhasilan KUR Tergantung Sosialisasi	fakta	fakta	fakta
36.	Masih Jalan di Tempat	fakta- opini	fakta- opini	opini

Sumber : *coding sheet*

TABEL 4
Tabulasi Koding Sub Unit Analisis “Jenis Intisari Berita”
dalam Harian Seputar Indonesia

No	Judul Berita	Decoder	Coder 1	Coder 2
1.	Tim Ekonomi Mulai Konsolidasi	fakta	fakta	fakta
2.	SBY Ingatkan Tidak Ada Keputusan Wapres	fakta	fakta	fakta
3.	Tim Ekonomi Fokus Infrastruktur	fakta	fakta	fakta
4.	Agenda 100 Hari Lebih Dipertajam	fakta	fakta	fakta
5.	Mendiknas Janji Berikan 10.000 Beasiswa	fakta	fakta	fakta
6.	Depag Siapkan Antisipasi Aliran Sesat	fakta	fakta	fakta
7.	Anggaran Jangan Sampai Bengkok	fakta	fakta	fakta
8.	SBY Prioritaskan 15 Program	fakta	fakta	fakta
9.	SBY Deklarasikan Ganyang Mafia	fakta	fakta	fakta
10.	Postur APBN 2010 Aman	fakta	fakta	fakta
11.	Kasus KPK-Century Berdampak Negatif Bagi SBY	fakta	fakta	fakta
12.	Kuntoro Rumuskan Tim Pemberantasan Mafia Hukum	fakta	fakta	fakta
13.	Kinerja Hatta Rajasa Ungguli Agung-Djoko Suyanto	fakta	fakta	fakta
14.	Kasus KPK-Polri Rusak Program 100 Hari	Fakta- opini	Fakta- opini	fakta
15.	Program 100 Hari Terganjil Dua “DC”	fakta	fakta	fakta
16.	Pemerintah Akan Gratiskan Paspor TKI	fakta	fakta	fakta
17.	Akbar Berharap Tuntas 100 Hari	fakta	fakta	fakta
18.	Depbudpar Gelar Festival Sasando	fakta	fakta	fakta
19.	PDP Minta SBY Tegas Berantas Mafia Hukum	fakta	fakta	fakta
20.	Program Depsos Jangan Basa-basi	fakta	fakta	fakta
21.	Kasus Century Tak Ganggu 100 Hari	fakta	fakta	fakta
22.	Menteri Kelautan Klaim Sukses 100 Hari	fakta	fakta	fakta
23.	Mensos Klaim Program 100 Hari Sukses	fakta	fakta	fakta
24.	Mensos Fokus Tangani Anak Jalanan	fakta	fakta	fakta
25.	100 Hari Bukan Ukuran Kinerja	fakta	fakta	fakta
26.	Program 100 Hari Terpenuhi	fakta	fakta	fakta
27.	Ekonom Nilai Program 100 Hari Belum Substansial	fakta	fakta	fakta
28.	100 Hari Gagal Dilaksanakan	fakta	fakta	fakta
29.	Century Tenggelamkan Program 100 Hari	fakta	fakta	fakta
30.	Satgas Angkat Citra Pemerintah	fakta	fakta	fakta
31.	Kepuasan Terhadap Kinerja Pemerintah Turun	fakta	fakta	fakta
32.	PDIP Nilai Program 100 Hari Hanya Pencitraan	fakta	fakta	fakta

Sumber : *coding sheet*

3) Tabulasi Koding Sub Unit Analisis “Kepadatan Informasi (*Density*)”

TABEL 5
Tabulasi Koding Sub Unit Analisis “Kepadatan Informasi (*Density*)”
dalam Harian Media Indonesia

No	Judul Berita	Decoder	Coder 1	Coder 2
1.	Menjaga Stabilitas Memanjakan Sektor Riil	ya	ya	ya
2.	Menekan Kemiskinan Hingga 9% di 2014	ya	ya	ya
3.	Mimpi Negara Industri Maju dan Harmonisasi Kebijakan	ya	ya	ya
4.	Tim Ekonomi Janjikan Percepatan Infrastruktur	ya	ya	ya
5.	<i>National Summit</i> Jadi Ajang Penajaman Program	ya	ya	ya
6.	Depkeu Siapkan Fasilitas PPh untuk Industri Prioritas	ya	ya	ya
7.	Mencari Tuan Rumah di Negeri Sendiri	ya	ya	ya
8.	Perombakan Lembaga Hukum Jadi Keniscayaan	ya	ya	ya
9.	Presiden Serukan Ganyang Mafia Hukum	ya	ya	ya
10.	Jalur Selat Sunda Masuk Program 100 Hari	tidak	tidak	tidak
11.	Pemberantasan Mafia dan Pemerataan Ekonomi	ya	ya	ya
12.	Menko Perekonomian Buka Akses Kinerja 100 Hari	ya	ya	ya
13.	Kemudahan Pembebasan Tanah Harus Tuntas 100 Hari	tidak	tidak	tidak
14.	Dari Konservasi Alam Hingga Krisis Listrik	ya	ya	ya
15.	Program 100 Hari Ekonomi Masih 60%	tidak	tidak	tidak
16.	Setengah Hati Mencari Energi Pengganti	ya	ya	ya
17.	Layanan Publik yang Kian Mencemaskan	ya	ya	ya
18.	Reformasi Harus Dimulai Dari Kantor Presiden	ya	ya	ya
19.	Dikepung Skandal Bank <i>Century</i>	ya	ya	ya
20.	Program 100 Hari Tidak Realistis	tidak	tidak	tidak
21.	Rencana Aksi Kementrian Perindustrian Mengecewakan	tidak	tidak	tidak
22.	Rapor Biru Kementerian Energi	ya	ya	ya
23.	Rapor Menkeu dan Menperin Masih Merah	tidak	tidak	tidak
24.	Industri Pertahanan Siap Dibangun	ya	ya	ya
25.	Menpora Harus Seriusi Cabang Prioritas	ya	ya	ya
26.	Seratus Hari ESDM Bukan Cuma Pemanis	ya	ya	ya
27.	Pertamina Dukung Kebijakan Energi Nasional	ya	ya	ya
28.	Genjot Produksi Untuk Jamin Keamanan Pasokan Energi	ya	ya	ya
29.	Pembenahan Layanan Kesehatan Terus Dilakukan	tidak	tidak	ya
30.	Menanti Sinergi Pendidikan dan Dunia Kerja	ya	ya	tidak
31.	Siaga Bencana Jadi Prioritas	ya	ya	ya
32.	Swasembada Tergantung Dana	ya	ya	ya
33.	Percepatan Infrastruktur Kuatkan Daya Saing	ya	ya	ya
34.	Tugas Berat Merumahkan Masyarakat	ya	ya	ya
35.	Keberhasilan KUR Tergantung Sosialisasi	ya	ya	ya
36.	Masih Jalan di Tempat	ya	tidak	ya

Sumber : *coding sheet*

TABEL 6
Tabulasi Koding Sub Unit Analisis “Kepadatan Informasi (*Density*)”
dalam Harian Seputar Indonesia

No	Judul Berita	Decoder	Coder 1	Coder 2
1.	Tim Ekonomi Mulai Konsolidasi	ya	ya	ya
2.	SBY Ingatkan Tidak Ada Keputusan Wapres	ya	ya	ya
3.	Tim Ekonomi Fokus Infrastruktur	ya	ya	ya
4.	Agenda 100 Hari Lebih Dipertajam	ya	ya	ya
5.	Mendiknas Janji Berikan 10.000 Beasiswa	ya	ya	ya
6.	Depag Siapkan Antisipasi Aliran Sesat	tidak	tidak	tidak
7.	Anggaran Jangan Sampai Bengkok	ya	ya	ya
8.	SBY Prioritaskan 15 Program	ya	ya	ya
9.	SBY Deklarasikan Ganyang Mafia	ya	ya	ya
10.	Postur APBN 2010 Aman	ya	ya	ya
11.	Kasus KPK- <i>Century</i> Berdampak Negatif Bagi SBY	ya	ya	ya
12.	Kuntoro Rumuskan Tim Pemberantasan Mafia Hukum	tidak	tidak	tidak
13.	Kinerja Hatta Rajasa Ungguli Agung-Djoko Suyanto	ya	ya	ya
14.	Kasus KPK-Polri Rusak Program 100 Hari	tidak	tidak	ya
15.	Program 100 Hari Terganjil Dua “DC”	ya	ya	ya
16.	Pemerintah Akan Gratiskan Paspor TKI	ya	ya	ya
17.	Akbar Berharap Tuntas 100 Hari	tidak	tidak	ya
18.	Depbudpar Gelar Festival Sasando	tidak	tidak	ya
19.	PDP Minta SBY Tegas Berantas Mafia Hukum	tidak	tidak	tidak
20.	Program Depsos Jangan Basa-basi	tidak	tidak	tidak
21.	Kasus <i>Century</i> Tak Ganggu 100 Hari	ya	ya	ya
22.	Menteri Kelautan Klaim Sukses 100 Hari	tidak	tidak	tidak
23.	Mensos Klaim Program 100 Hari Sukses	tidak	tidak	tidak
24.	Mensos Fokus Tangani Anak Jalanan	ya	ya	ya
25.	100 Hari Bukan Ukuran Kinerja	ya	ya	ya
26.	Program 100 Hari Terpenuhi	ya	ya	ya
27.	Ekonom Nilai Program 100 Hari Belum Substansial	tidak	tidak	ya
28.	100 Hari Gagal Dilaksanakan	tidak	tidak	ya
29.	<i>Century</i> Tenggelman Program 100 Hari	ya	ya	ya
30.	Satgas Angkat Citra Pemerintah	ya	ya	ya
31.	Kepuasan Terhadap Kinerja Pemerintah Turun	ya	ya	ya
32.	PDIP Nilai Program 100 Hari Hanya Pencitraan	ya	ya	ya

Sumber : *coding sheet*

4) Tabulasi Koding Sub Unit Analisis “Keluasan Informasi (*Breadth*)”

TABEL 7
Tabulasi Koding Sub Unit Analisis “Keluasan Informasi (*Breadth*)”
dalam Harian Media Indonesia

No	Judul Berita	Decoder	Coder 1	Coder 2
1.	Menjaga Stabilitas Memanjakan Sektor Riil	tidak	tidak	tidak
2.	Menekan Kemiskinan Hingga 9% di 2014	ya	ya	tidak
3.	Mimpi Negara Industri Maju dan Harmonisasi Kebijakan	tidak	tidak	tidak
4.	Tim Ekonomi Janjikan Percepatan Infrastruktur	tidak	tidak	tidak
5.	<i>National Summit</i> Jadi Ajang Penajaman Program	ya	tidak	ya
6.	Depkeu Siapkan Fasilitas PPh untuk Industri Prioritas	tidak	tidak	tidak
7.	Mencari Tuan Rumah di Negeri Sendiri	ya	ya	ya
8.	Perombakan Lembaga Hukum Jadi Keniscayaan	tidak	tidak	ya
9.	Presiden Serukan Ganyang Mafia Hukum	tidak	tidak	tidak
10.	Jalur Selat Sunda Masuk Program 100 Hari	tidak	tidak	tidak
11.	Pemberantasan Mafia dan Pemerataan Ekonomi	ya	ya	ya
12.	Menko Perekonomian Buka Akses Kinerja 100 Hari	tidak	tidak	tidak
13.	Kemudahan Pembebasan Tanah Harus Tuntas 100 Hari	tidak	tidak	tidak
14.	Dari Konservasi Alam Hingga Krisis Listrik	tidak	tidak	ya
15.	Program 100 Hari Ekonomi Masih 60%	tidak	tidak	tidak
16.	Setengah Hati Mencari Energi Pengganti	ya	ya	ya
17.	Layanan Publik yang Kian Mencemaskan	tidak	tidak	tidak
18.	Reformasi Harus Dimulai Dari Kantor Presiden	ya	ya	ya
19.	Dikepung Skandal Bank <i>Century</i>	tidak	tidak	tidak
20.	Program 100 Hari Tidak Realistis	tidak	tidak	tidak
21.	Rencana Aksi Kementrian Perindustrian Mengecewakan	tidak	tidak	tidak
22.	Rapor Biru Kementerian Energi	ya	ya	tidak
23.	Rapor Menkeu dan Menperin Masih Merah	ya	ya	ya
24.	Industri Pertahanan Siap Dibangun	tidak	tidak	tidak
25.	Menpora Harus Seriusi Cabang Prioritas	ya	ya	ya
26.	Seratus Hari ESDM Bukan Cuma Pemanis	tidak	tidak	tidak
27.	Pertamina Dukung Kebijakan Energi Nasional	tidak	tidak	tidak
28.	Genjot Produksi Untuk Jamin Keamanan Pasokan Energi	ya	ya	ya
29.	Pembenahan Layanan Kesehatan Terus Dilakukan	tidak	tidak	tidak
30.	Menanti Sinergi Pendidikan dan Dunia Kerja	tidak	tidak	tidak
31.	Siaga Bencana Jadi Prioritas	ya	ya	ya
32.	Swasembada Tergantung Dana	tidak	ya	tidak
33.	Percepatan Infrastruktur Kuatkan Daya Saing	tidak	tidak	tidak
34.	Tugas Berat Merumahkan Masyarakat	ya	tidak	ya
35.	Keberhasilan KUR Tergantung Sosialisasi	ya	ya	ya
36.	Masih Jalan di Tempat	tidak	tidak	ya

Sumber : *coding sheet*

TABEL 8
Tabulasi Koding Sub Unit Analisis “Keluasan Informasi (*Breadth*)”
dalam Harian Seputar Indonesia

No	Judul Berita	Decoder	Coder 1	Coder 2
1.	Tim Ekonomi Mulai Konsolidasi	tidak	tidak	tidak
2.	SBY Ingatkan Tidak Ada Keputusan Wapres	tidak	tidak	tidak
3.	Tim Ekonomi Fokus Infrastruktur	ya	ya	tidak
4.	Agenda 100 Hari Lebih Dipertajam	ya	ya	ya
5.	Mendiknas Janji Berikan 10.000 Beasiswa	tidak	tidak	tidak
6.	Depag Siapkan Antisipasi Aliran Sesat	tidak	tidak	tidak
7.	Anggaran Jangan Sampai Bengkok	ya	ya	ya
8.	SBY Prioritaskan 15 Program	ya	ya	ya
9.	SBY Deklarasikan Ganyang Mafia	ya	ya	ya
10.	Postur APBN 2010 Aman	tidak	tidak	tidak
11.	Kasus KPK- <i>Century</i> Berdampak Negatif Bagi SBY	tidak	tidak	tidak
12.	Kuntoro Rumuskan Tim Pemberantasan Mafia Hukum	ya	ya	ya
13.	Kinerja Hatta Rajasa Ungguli Agung-Djoko Suyanto	tidak	tidak	tidak
14.	Kasus KPK-Polri Rusak Program 100 Hari	tidak	tidak	tidak
15.	Program 100 Hari Terganjil Dua “DC”	tidak	tidak	tidak
16.	Pemerintah Akan Gratiskan Paspor TKI	tidak	tidak	tidak
17.	Akbar Berharap Tuntas 100 Hari	tidak	tidak	tidak
18.	Depbudpar Gelar Festival Sasando	tidak	tidak	tidak
19.	PDP Minta SBY Tegas Berantas Mafia Hukum	tidak	tidak	tidak
20.	Program Depsos Jangan Basa-basi	tidak	tidak	tidak
21.	Kasus <i>Century</i> Tak Ganggu 100 Hari	ya	ya	ya
22.	Menteri Kelautan Klaim Sukses 100 Hari	tidak	tidak	tidak
23.	Mensos Klaim Program 100 Hari Sukses	tidak	tidak	tidak
24.	Mensos Fokus Tangani Anak Jalanan	tidak	ya	tidak
25.	100 Hari Bukan Ukuran Kinerja	tidak	tidak	tidak
26.	Program 100 Hari Terpenuhi	ya	tidak	ya
27.	Ekonom Nilai Program 100 Hari Belum Substansial	tidak	tidak	tidak
28.	100 Hari Gagal Dilaksanakan	tidak	tidak	tidak
29.	<i>Century</i> Tenggelamkan Program 100 Hari	ya	ya	ya
30.	Satgas Angkat Citra Pemerintah	ya	ya	tidak
31.	Kepuasan Terhadap Kinerja Pemerintah Turun	tidak	tidak	tidak
32.	PDIP Nilai Program 100 Hari Hanya Pencitraan	tidak	tidak	tidak

Sumber : *coding sheet*

5) Tabulasi Koding Sub Unit Analisis “Kedalaman Informasi (*Depth*)”

TABEL 9
Tabulasi Koding Sub Unit Analisis “Kedalaman Informasi (*Depth*)”
dalam Harian Media Indonesia

No	Judul Berita	Decoder	Coder 1	Coder 2
1.	Menjaga Stabilitas Memanjakan Sektor Riil	ya	ya	ya
2.	Menekan Kemiskinan Hingga 9% di 2014	ya	ya	ya
3.	Mimpi Negara Industri Maju dan Harmonisasi Kebijakan	ya	ya	ya
4.	Tim Ekonomi Janjikan Percepatan Infrastruktur	ya	ya	ya
5.	<i>National Summit</i> Jadi Ajang Penajaman Program	ya	ya	ya
6.	Depkeu Siapkan Fasilitas PPh untuk Industri Prioritas	ya	ya	ya
7.	Mencari Tuan Rumah di Negeri Sendiri	ya	ya	ya
8.	Perombakan Lembaga Hukum Jadi Keniscayaan	ya	ya	ya
9.	Presiden Serukan Ganyang Mafia Hukum	ya	ya	ya
10.	Jalur Selat Sunda Masuk Program 100 Hari	tidak	tidak	tidak
11.	Pemberantasan Mafia dan Pemerataan Ekonomi	ya	ya	ya
12.	Menko Perekonomian Buka Akses Kinerja 100 Hari	ya	ya	ya
13.	Kemudahan Pembebasan Tanah Harus Tuntas 100 Hari	ya	ya	tidak
14.	Dari Konservasi Alam Hingga Krisis Listrik	ya	ya	ya
15.	Program 100 Hari Ekonomi Masih 60%	tidak	tidak	tidak
16.	Setengah Hati Mencari Energi Pengganti	ya	ya	ya
17.	Layanan Publik yang Kian Mencemaskan	ya	ya	ya
18.	Reformasi Harus Dimulai Dari Kantor Presiden	ya	ya	ya
19.	Dikepung Skandal Bank <i>Century</i>	ya	ya	ya
20.	Program 100 Hari Tidak Realistis	tidak	tidak	tidak
21.	Rencana Aksi Kementrian Perindustrian Mengecewakan	tidak	tidak	tidak
22.	Rapor Biru Kementerian Energi	ya	ya	ya
23.	Rapor Menkeu dan Menperin Masih Merah	tidak	tidak	tidak
24.	Industri Pertahanan Siap Dibangun	ya	ya	ya
25.	Menpora Harus Seriusi Cabang Prioritas	ya	ya	ya
26.	Seratus Hari ESDM Bukan Cuma Pemanis	ya	ya	ya
27.	Pertamina Dukung Kebijakan Energi Nasional	ya	ya	ya
28.	Genjot Produksi Untuk Jamin Keamanan Pasokan Energi	ya	ya	ya
29.	Pembenahan Layanan Kesehatan Terus Dilakukan	ya	tidak	ya
30.	Menanti Sinergi Pendidikan dan Dunia Kerja	ya	ya	ya
31.	Siaga Bencana Jadi Prioritas	ya	ya	ya
32.	Swasembada Tergantung Dana	ya	ya	ya
33.	Percepatan Infrastruktur Kuatkan Daya Saing	ya	ya	ya
34.	Tugas Berat Merumahkan Masyarakat	ya	ya	ya
35.	Keberhasilan KUR Tergantung Sosialisasi	ya	ya	ya
36.	Masih Jalan di Tempat	tidak	tidak	tidak

Sumber : *coding sheet*

TABEL 10
Tabulasi Koding Sub Unit Analisis “Kedalaman Informasi (Depth)”
dalam Harian Seputar Indonesia

No	Judul Berita	Decoder	Coder 1	Coder 2
1.	Tim Ekonomi Mulai Konsolidasi	ya	ya	ya
2.	SBY Ingatkan Tidak Ada Keputusan Wapres	ya	ya	ya
3.	Tim Ekonomi Fokus Infrastruktur	ya	ya	ya
4.	Agenda 100 Hari Lebih Dipertajam	ya	ya	ya
5.	Mendiknas Janji Berikan 10.000 Beasiswa	ya	ya	ya
6.	Depag Siapkan Antisipasi Aliran Sesat	tidak	tidak	tidak
7.	Anggaran Jangan Sampai Bengkok	ya	ya	ya
8.	SBY Prioritaskan 15 Program	ya	ya	ya
9.	SBY Deklarasikan Ganyang Mafia	ya	ya	ya
10.	Postur APBN 2010 Aman	ya	ya	ya
11.	Kasus KPK-Century Berdampak Negatif Bagi SBY	ya	ya	ya
12.	Kuntoro Rumuskan Tim Pemberantasan Mafia Hukum	tidak	tidak	tidak
13.	Kinerja Hatta Rajasa Ungguli Agung-Djoko Suyanto	ya	ya	ya
14.	Kasus KPK-Polri Rusak Program 100 Hari	tidak	tidak	ya
15.	Program 100 Hari Terganjil Dua “DC”	ya	ya	ya
16.	Pemerintah Akan Gratiskan Paspor TKI	ya	ya	ya
17.	Akbar Berharap Tuntas 100 Hari	tidak	tidak	tidak
18.	Depbudpar Gelar Festival Sasando	tidak	tidak	ya
19.	PDP Minta SBY Tegas Berantas Mafia Hukum	tidak	tidak	tidak
20.	Program Depsos Jangan Basa-basi	ya	ya	ya
21.	Kasus Century Tak Ganggu 100 Hari	ya	ya	ya
22.	Menteri Kelautan Klaim Sukses 100 Hari	tidak	tidak	tidak
23.	Mensos Klaim Program 100 Hari Sukses	tidak	tidak	tidak
24.	Mensos Fokus Tangani Anak Jalanan	ya	ya	ya
25.	100 Hari Bukan Ukuran Kinerja	ya	ya	ya
26.	Program 100 Hari Terpenuhi	ya	ya	ya
27.	Ekonom Nilai Program 100 Hari Belum Substansial	tidak	tidak	ya
28.	100 Hari Gagal Dilaksanakan	tidak	tidak	ya
29.	Century Tenggelamkan Program 100 Hari	ya	ya	ya
30.	Satgas Angkat Citra Pemerintah	ya	ya	ya
31.	Kepuasan Terhadap Kinerja Pemerintah Turun	ya	ya	ya
32.	PDIP Nilai Program 100 Hari Hanya Pencitraan	ya	ya	ya

Sumber : coding sheet

6) Tabulasi Koding Sub Unit Analisis “Adanya Pengulangan Frase yang Mengganggu”

TABEL 11

Tabulasi Koding Sub Unit Analisis “Adanya Pengulangan Frase yang Mengganggu”
dalam Harian Media Indonesia

No	Judul Berita	Decoder	Coder 1	Coder 2
1.	Menjaga Stabilitas Memanjakan Sektor Riil	ya	ya	tidak
2.	Menekan Kemiskinan Hingga 9% di 2014	tidak	tidak	tidak
3.	Mimpi Negara Industri Maju dan Harmonisasi Kebijakan	tidak	tidak	tidak
4.	Tim Ekonomi Janjikan Percepatan Infrastruktur	tidak	tidak	tidak
5.	<i>National Summit</i> Jadi Ajang Penajaman Program	ya	ya	ya
6.	Depkeu Siapkan Fasilitas PPh untuk Industri Prioritas	tidak	tidak	tidak
7.	Mencari Tuan Rumah di Negeri Sendiri	tidak	tidak	tidak
8.	Perombakan Lembaga Hukum Jadi Keniscayaan	tidak	tidak	tidak
9.	Presiden Serukan Ganyang Mafia Hukum	ya	ya	tidak
10.	Jalur Selat Sunda Masuk Program 100 Hari	tidak	tidak	tidak
11.	Pemberantasan Mafia dan Pemerataan Ekonomi	ya	ya	ya
12.	Menko Perekonomian Buka Akses Kinerja 100 Hari	tidak	tidak	tidak
13.	Kemudahan Pembebasan Tanah Harus Tuntas 100 Hari	tidak	tidak	tidak
14.	Dari Konservasi Alam Hingga Krisis Listrik	tidak	tidak	tidak
15.	Program 100 Hari Ekonomi Masih 60%	tidak	tidak	tidak
16.	Setengah Hati Mencari Energi Pengganti	tidak	tidak	tidak
17.	Layanan Publik yang Kian Mencemaskan	tidak	tidak	tidak
18.	Reformasi Harus Dimulai Dari Kantor Presiden	tidak	tidak	tidak
19.	Dikepung Skandal Bank <i>Century</i>	tidak	tidak	tidak
20.	Program 100 Hari Tidak Realistis	tidak	tidak	tidak
21.	Rencana Aksi Kementrian Perindustrian Mengecewakan	tidak	tidak	tidak
22.	Rapor Biru Kementerian Energi	tidak	tidak	tidak
23.	Rapor Menkeu dan Menperin Masih Merah	tidak	tidak	tidak
24.	Industri Pertahanan Siap Dibangun	tidak	tidak	tidak
25.	Menpora Harus Seriusi Cabang Prioritas	tidak	tidak	tidak
26.	Seratus Hari ESDM Bukan Cuma Pemanis	tidak	tidak	tidak
27.	Pertamina Dukung Kebijakan Energi Nasional	tidak	tidak	tidak
28.	Genjot Produksi Untuk Jamin Keamanan Pasokan Energi	tidak	tidak	tidak
29.	Pembenahan Layanan Kesehatan Terus Dilakukan	tidak	tidak	tidak
30.	Menanti Sinergi Pendidikan dan Dunia Kerja	tidak	tidak	tidak
31.	Siaga Bencana Jadi Prioritas	tidak	tidak	tidak
32.	Swasembada Tergantung Dana	tidak	tidak	tidak
33.	Percepatan Infrastruktur Kuatkan Daya Saing	tidak	tidak	tidak
34.	Tugas Berat Merumahkan Masyarakat	tidak	tidak	tidak
35.	Keberhasilan KUR Tergantung Sosialisasi	tidak	tidak	tidak
36.	Masih Jalan di Tempat	tidak	tidak	tidak

Sumber : *coding sheet*

TABEL 12
Tabulasi Koding Sub Unit Analisis “Adanya Pengulangan Frase yang Mengganggu”
dalam Harian Seputar Indonesia

No	Judul Berita	Decoder	Coder 1	Coder 2
1.	Tim Ekonomi Mulai Konsolidasi	tidak	tidak	tidak
2.	SBY Ingatkan Tidak Ada Keputusan Wapres	tidak	tidak	tidak
3.	Tim Ekonomi Fokus Infrastruktur	tidak	tidak	tidak
4.	Agenda 100 Hari Lebih Dipertajam	tidak	tidak	tidak
5.	Mendiknas Janji Berikan 10.000 Beasiswa	ya	ya	tidak
6.	Depag Siapkan Antisipasi Aliran Sesat	tidak	tidak	tidak
7.	Anggaran Jangan Sampai Bengkak	tidak	tidak	tidak
8.	SBY Prioritaskan 15 Program	tidak	tidak	tidak
9.	SBY Deklarasikan Ganyang Mafia	tidak	tidak	tidak
10.	Postur APBN 2010 Aman	tidak	tidak	tidak
11.	Kasus KPK-Century Berdampak Negatif Bagi SBY	tidak	tidak	tidak
12.	Kuntoro Rumuskan Tim Pemberantasan Mafia Hukum	tidak	tidak	tidak
13.	Kinerja Hatta Rajasa Ungguli Agung-Djoko Suyanto	tidak	tidak	tidak
14.	Kasus KPK-Polri Rusak Program 100 Hari	tidak	tidak	tidak
15.	Program 100 Hari Terganjil Dua “DC”	tidak	tidak	tidak
16.	Pemerintah Akan Gratiskan Paspor TKI	tidak	tidak	tidak
17.	Akbar Berharap Tuntas 100 Hari	tidak	tidak	tidak
18.	Depbudpar Gelar Festival Sasando	tidak	tidak	tidak
19.	PDP Minta SBY Tegas Berantas Mafia Hukum	tidak	tidak	tidak
20.	Program Depsos Jangan Basa-basi	tidak	tidak	tidak
21.	Kasus Century Tak Ganggu 100 Hari	tidak	tidak	tidak
22.	Menteri Kelautan Klaim Sukses 100 Hari	tidak	tidak	tidak
23.	Mensos Klaim Program 100 Hari Sukses	tidak	tidak	tidak
24.	Mensos Fokus Tangani Anak Jalanan	tidak	tidak	tidak
25.	100 Hari Bukan Ukuran Kinerja	tidak	tidak	tidak
26.	Program 100 Hari Terpenuhi	tidak	tidak	tidak
27.	Ekonom Nilai Program 100 Hari Belum Substansial	tidak	tidak	tidak
28.	100 Hari Gagal Dilaksanakan	tidak	tidak	tidak
29.	Century Tenggelamkan Program 100 Hari	tidak	tidak	tidak
30.	Satgas Angkat Citra Pemerintah	tidak	tidak	tidak
31.	Kepuasan Terhadap Kinerja Pemerintah Turun	tidak	tidak	tidak
32.	PDIP Nilai Program 100 Hari Hanya Pencitraan	tidak	tidak	tidak

Sumber : coding sheet

7) Tabulasi Koding Sub Unit Analisis “Adanya Kalimat Anak yang Mendukung Intisari Berita”

TABEL 13
Tabulasi Koding Sub Unit Analisis “Kalimat Anak yang Mendukung Intisari Berita”
dalam Harian Media Indonesia

No	Judul Berita	Decoder	Coder 1	Coder 2
1.	Menjaga Stabilitas Memanjakan Sektor Riil	tidak	tidak	ya
2.	Menekan Kemiskinan Hingga 9% di 2014	ya	ya	ya
3.	Mimpi Negara Industri Maju dan Harmonisasi Kebijakan	tidak	tidak	ya
4.	Tim Ekonomi Janjikan Percepatan Infrastruktur	tidak	tidak	tidak
5.	<i>National Summit</i> Jadi Ajang Penajaman Program	ya	ya	ya
6.	Depkeu Siapkan Fasilitas PPh untuk Industri Prioritas	ya	ya	ya
7.	Mencari Tuan Rumah di Negeri Sendiri	ya	ya	ya
8.	Perombakan Lembaga Hukum Jadi Keniscayaan	ya	ya	ya
9.	Presiden Serukan Ganyang Mafia Hukum	ya	ya	ya
10.	Jalur Selat Sunda Masuk Program 100 Hari	ya	ya	ya
11.	Pemberantasan Mafia dan Pemerataan Ekonomi	ya	ya	ya
12.	Menko Perekonomian Buka Akses Kinerja 100 Hari	tidak	tidak	tidak
13.	Kemudahan Pembebasan Tanah Harus Tuntas 100 Hari	tidak	tidak	tidak
14.	Dari Konservasi Alam Hingga Krisis Listrik	ya	ya	ya
15.	Program 100 Hari Ekonomi Masih 60%	ya	tidak	ya
16.	Setengah Hati Mencari Energi Pengganti	tidak	tidak	tidak
17.	Layanan Publik yang Kian Mencemaskan	ya	ya	ya
18.	Reformasi Harus Dimulai Dari Kantor Presiden	ya	ya	ya
19.	Dikepung Skandal Bank <i>Century</i>	ya	ya	ya
20.	Program 100 Hari Tidak Realistis	ya	ya	ya
21.	Rencana Aksi Kementrian Perindustrian Mengecewakan	tidak	tidak	tidak
22.	Rapor Biru Kementerian Energi	tidak	tidak	tidak
23.	Rapor Menkeu dan Menperin Masih Merah	tidak	tidak	tidak
24.	Industri Pertahanan Siap Dibangun	tidak	tidak	tidak
25.	Menpora Harus Seriusi Cabang Prioritas	ya	ya	ya
26.	Seratus Hari ESDM Bukan Cuma Pemanis	tidak	tidak	tidak
27.	Pertamina Dukung Kebijakan Energi Nasional	tidak	tidak	tidak
28.	Genjot Produksi Untuk Jamin Keamanan Pasokan Energi	tidak	tidak	tidak
29.	Pembenahan Layanan Kesehatan Terus Dilakukan	tidak	tidak	tidak
30.	Menanti Sinergi Pendidikan dan Dunia Kerja	ya	ya	ya
31.	Siaga Bencana Jadi Prioritas	ya	ya	ya
32.	Swasembada Tergantung Dana	ya	ya	ya
33.	Percepatan Infrastruktur Kuatkan Daya Saing	tidak	ya	tidak
34.	Tugas Berat Merumahkan Masyarakat	tidak	tidak	tidak
35.	Keberhasilan KUR Tergantung Sosialisasi	tidak	tidak	tidak
36.	Masih Jalan di Tempat	tidak	tidak	tidak

Sumber : coding sheet

TABEL 14
Tabulasi Koding Sub Unit Analisis “Kalimat Anak yang Mendukung Intisari Berita dalam
Harian Seputar Indonesia

No	Judul Berita	Decoder	Coder 1	Coder 2
1.	Tim Ekonomi Mulai Konsolidasi	ya	ya	ya
2.	SBY Ingatkan Tidak Ada Keputusan Wapres	tidak	tidak	tidak
3.	Tim Ekonomi Fokus Infrastruktur	ya	ya	ya
4.	Agenda 100 Hari Lebih Dipertajam	tidak	tidak	tidak
5.	Mendiknas Janji Berikan 10.000 Beasiswa	tidak	tidak	ya
6.	Depag Siapkan Antisipasi Aliran Sesat	tidak	tidak	tidak
7.	Anggaran Jangan Sampai Bengkok	tidak	tidak	ya
8.	SBY Prioritaskan 15 Program	tidak	tidak	tidak
9.	SBY Deklarasikan Ganyang Mafia	ya	ya	ya
10.	Postur APBN 2010 Aman	ya	ya	tidak
11.	Kasus KPK-Century Berdampak Negatif Bagi SBY	tidak	tidak	tidak
12.	Kuntoro Rumuskan Tim Pemberantasan Mafia Hukum	ya	ya	ya
13.	Kinerja Hatta Rajasa Ungguli Agung-Djoko Suyanto	tidak	tidak	tidak
14.	Kasus KPK-Polri Rusak Program 100 Hari	ya	ya	ya
15.	Program 100 Hari Terganjil Dua “DC”	tidak	tidak	tidak
16.	Pemerintah Akan Gratiskan Paspor TKI	ya	ya	ya
17.	Akbar Berharap Tuntas 100 Hari	ya	ya	ya
18.	Depbudpar Gelar Festival Sasando	ya	tidak	ya
19.	PDP Minta SBY Tegas Berantas Mafia Hukum	ya	ya	ya
20.	Program Depsos Jangan Basa-basi	ya	ya	ya
21.	Kasus Century Tak Ganggu 100 Hari	ya	ya	ya
22.	Menteri Kelautan Klaim Sukses 100 Hari	ya	ya	ya
23.	Mensos Klaim Program 100 Hari Sukses	ya	tidak	ya
24.	Mensos Fokus Tangani Anak Jalanan	ya	ya	ya
25.	100 Hari Bukan Ukuran Kinerja	ya	ya	tidak
26.	Program 100 Hari Terpenuhi	tidak	tidak	ya
27.	Ekonom Nilai Program 100 Hari Belum Substansial	tidak	tidak	tidak
28.	100 Hari Gagal Dilaksanakan	tidak	tidak	ya
29.	Century Tenggelamkan Program 100 Hari	tidak	tidak	tidak
30.	Satgas Angkat Citra Pemerintah	ya	ya	ya
31.	Kepuasan Terhadap Kinerja Pemerintah Turun	tidak	tidak	tidak
32.	PDIP Nilai Program 100 Hari Hanya Pencitraan	ya	ya	ya

Sumber : coding sheet

8) Tabulasi Koding Sub Unit Analisis “Penggunaan Istilah Khusus yang Mengganggu”

TABEL 15

Tabulasi Koding Sub Unit Analisis “Penggunaan Istilah Khusus yang Mengganggu” dalam Harian Media Indonesia

No	Judul Berita	Decoder	Coder 1	Coder 2
1.	Menjaga Stabilitas Memanjakan Sektor Riil	tidak	tidak	tidak
2.	Menekan Kemiskinan Hingga 9% di 2014	tidak	tidak	tidak
3.	Mimpi Negara Industri Maju dan Harmonisasi Kebijakan	ya	tidak	ya
4.	Tim Ekonomi Janjikan Percepatan Infrastruktur	ya	ya	ya
5.	National Summit Jadi Ajang Penajaman Program	ya	ya	ya
6.	Depkeu Siapkan Fasilitas PPh untuk Industri Prioritas	tidak	tidak	tidak
7.	Mencari Tuan Rumah di Negeri Sendiri	ya	ya	ya
8.	Perombakan Lembaga Hukum Jadi Keniscayaan	tidak	tidak	tidak
9.	Presiden Serukan Ganyang Mafia Hukum	tidak	tidak	tidak
10.	Jalur Selat Sunda Masuk Program 100 Hari	tidak	tidak	tidak
11.	Pemherantasan Mafia dan Pemerataan Ekonomi	tidak	tidak	tidak
12.	Menko Perekonomian Buka Akses Kinerja 100 Hari	ya	ya	ya
13.	Kemudahan Pembebasan Tanah Harus Tuntas 100 Hari	ya	ya	ya
14.	Dari Konservasi Alam Hingga Krisis Listrik	tidak	tidak	tidak
15.	Program 100 Hari Ekonomi Masih 60%	tidak	tidak	tidak
16.	Setengah Hati Mencari Energi Pengganti	ya	ya	ya
17.	Layanan Publik yang Kian Mencemaskan	tidak	tidak	tidak
18.	Reformasi Harus Dimulai Dari Kantor Presiden	tidak	tidak	tidak
19.	Dikepung Skandal Bank Century	tidak	tidak	tidak
20.	Program 100 Hari Tidak Realistis	tidak	tidak	tidak
21.	Rencana Aksi Kementrian Perindustrian Mengecewakan	tidak	tidak	tidak
22.	Rapor Biru Kementerian Energi	ya	ya	ya
23.	Rapor Menkeu dan Menperin Masih Merah	ya	ya	ya
24.	Industri Pertahanan Siap Dibangun	ya	ya	tidak
25.	Menpora Harus Seriusi Cabang Prioritas	ya	tidak	ya
26.	Seratus Hari ESDM Bukan Cuma Pemanis	ya	ya	ya
27.	Pertamina Dukung Kebijakan Energi Nasional	ya	ya	ya
28.	Genjot Produksi Untuk Jamin Keamanan Pasokan Energi	ya	ya	tidak
29.	Pembenahan Layanan Kesehatan Terus Dilakukan	tidak	tidak	tidak
30.	Menanti Sinergi Pendidikan dan Dunia Kerja	ya	ya	ya
31.	Siaga Bencana Jadi Prioritas	ya	ya	ya
32.	Swasembada Tergantung Dana	ya	ya	ya
33.	Percepatan Infrastruktur Kuatkan Daya Saing	tidak	tidak	tidak
34.	Tugas Berat Merumahkan Masyarakat	ya	ya	tidak
35.	Keberhasilan KUR Tergantung Sosialisasi	tidak	tidak	tidak
36.	Masih Jalan di Tempat	tidak	tidak	tidak

Sumber : coding sheet

TABEL 16
Tabulasi Koding Sub Unit Analisis “Penggunaan Istilah Khusus yang Mengganggu”
dalam Harian Seputar Indonesia

No	Judul Berita	Decoder	Coder 1	Coder 2
1.	Tim Ekonomi Mulai Konsolidasi	ya	ya	tidak
2.	SBY Ingatkan Tidak Ada Keputusan Wapres	ya	ya	ya
3.	Tim Ekonomi Fokus Infrastruktur	tidak	tidak	tidak
4.	Agenda 100 Hari Lebih Dipertajam	tidak	tidak	tidak
5.	Mendiknas Janji Berikan 10.000 Beasiswa	tidak	tidak	tidak
6.	Depag Siapkan Antisipasi Aliran Sesat	tidak	tidak	tidak
7.	Anggaran Jangan Sampai Bengkok	tidak	tidak	tidak
8.	SBY Prioritaskan 15 Program	ya	ya	ya
9.	SBY Deklarasikan Ganyang Mafia	tidak	tidak	tidak
10.	Postur APBN 2010 Aman	tidak	tidak	tidak
11.	Kasus KPK-Century Berdampak Negatif Bagi SBY	tidak	tidak	tidak
12.	Kuntoro Rumuskan Tim Pemberantasan Mafia Hukum	tidak	tidak	tidak
13.	Kinerja Hatta Rajasa Ungguli Agung-Djoko Suyanto	ya	ya	tidak
14.	Kasus KPK-Polri Rusak Program 100 Hari	ya	ya	ya
15.	Program 100 Hari Terganjil Dua “DC”	ya	ya	ya
16.	Pemerintah Akan Gratiskan Paspor TKI	tidak	tidak	tidak
17.	Akbar Berharap Tuntas 100 Hari	tidak	tidak	tidak
18.	Depbudpar Gelar Festival Sasando	tidak	tidak	tidak
19.	PDP Minta SBY Tegas Berantas Mafia Hukum	tidak	tidak	tidak
20.	Program Depsos Jangan Basa-basi	tidak	tidak	tidak
21.	Kasus Century Tak Ganggu 100 Hari	tidak	tidak	tidak
22.	Menteri Kelautan Klaim Sukses 100 Hari	ya	ya	ya
23.	Mensos Klaim Program 100 Hari Sukses	tidak	tidak	tidak
24.	Mensos Fokus Tangani Anak Jalanan	tidak	tidak	tidak
25.	100 Hari Bukan Ukuran Kinerja	tidak	tidak	tidak
26.	Program 100 Hari Terpenuhi	ya	ya	ya
27.	Ekonom Nilai Program 100 Hari Belum Substansial	tidak	tidak	tidak
28.	100 Hari Gagal Dilaksanakan	tidak	tidak	tidak
29.	Century Tenggelamkan Program 100 Hari	tidak	tidak	tidak
30.	Satgas Angkat Citra Pemerintah	tidak	tidak	tidak
31.	Kepuasan Terhadap Kinerja Pemerintah Turun	ya	ya	tidak
32.	PDIP Nilai Program 100 Hari Hanya Pencitraan	tidak	tidak	tidak

Sumber : coding sheet

9) Tabulasi Koding Sub Unit Analisis “Sumber Rujukan yang Jelas”

TABEL 17
Tabulasi Koding Sub Unit Analisis “Sumber Rujukan yang Jelas”
dalam Harian Media Indonesia

No	Judul Berita	Decoder	Coder 1	Coder 2
1.	Menjaga Stabilitas Memanjakan Sektor Riil	ya	ya	ya
2.	Menekan Kemiskinan Hingga 9% di 2014	ya	ya	ya
3.	Mimpi Negara Industri Maju dan Harmonisasi Kebijakan	tidak	tidak	tidak
4.	Tim Ekonomi Janjikan Percepatan Infrastruktur	ya	ya	ya
5.	<i>National Summit</i> Jadi Ajang Penajaman Program	ya	ya	ya
6.	Depkeu Siapkan Fasilitas PPh untuk Industri Prioritas	ya	ya	ya
7.	Mencari Tuan Rumah di Negeri Sendiri	ya	ya	ya
8.	Perombakan Lembaga Hukum Jadi Keniscayaan	ya	ya	ya
9.	Presiden Serukan Ganyang Mafia Hukum	ya	ya	ya
10.	Jalur Selat Sunda Masuk Program 100 Hari	ya	ya	ya
11.	Pemberantasan Mafia dan Pemerataan Ekonomi	ya	ya	ya
12.	Menko Perekonomian Buka Akses Kinerja 100 Hari	ya	ya	ya
13.	Kemudahan Pembebasan Tanah Harus Tuntas 100 Hari	ya	ya	ya
14.	Dari Konservasi Alam Hingga Krisis Listrik	ya	ya	ya
15.	Program 100 Hari Ekonomi Masih 60%	ya	ya	ya
16.	Setengah Hati Mencari Energi Pengganti	ya	ya	tidak
17.	Layanan Publik yang Kian Mencemaskan	ya	ya	ya
18.	Reformasi Harus Dimulai Dari Kantor Presiden	ya	ya	ya
19.	Dikepung Skandal Bank <i>Century</i>	ya	ya	tidak
20.	Program 100 Hari Tidak Realistis	ya	ya	ya
21.	Rencana Aksi Kementrian Perindustrian Mengecewakan	ya	ya	ya
22.	Rapor Biru Kementerian Energi	ya	ya	ya
23.	Rapor Menkeu dan Menperin Masih Merah	ya	ya	ya
24.	Industri Pertahanan Siap Dibangun	ya	ya	ya
25.	Menpora Harus Seriusi Cabang Prioritas	ya	ya	ya
26.	Seratus Hari ESDM Bukan Cuma Pemanis	ya	ya	ya
27.	Pertamina Dukung Kebijakan Energi Nasional	ya	ya	ya
28.	Genjot Produksi Untuk Jamin Keamanan Pasokan Energi	ya	ya	ya
29.	Pembenahan Layanan Kesehatan Terus Dilakukan	ya	ya	ya
30.	Menanti Sinergi Pendidikan dan Dunia Kerja	ya	ya	ya
31.	Siaga Bencana Jadi Prioritas	ya	ya	ya
32.	Swasembada Tergantung Dana	ya	ya	ya
33.	Percepatan Infrastruktur Kuatkan Daya Saing	tidak	tidak	tidak
34.	Tugas Berat Merumahkan Masyarakat	ya	ya	ya
35.	Keberhasilan KUR Tergantung Sosialisasi	ya	ya	ya
36.	Masih Jalan di Tempat	ya	ya	ya

Sumber : coding sheet

TABEL 18
Tabulasi Koding Sub Unit Analisis “Sumber Rujukan yang Jelas”
dalam Harian Seputar Indonesia

No	Judul Berita	Decoder	Coder 1	Coder 2
1.	Tim Ekonomi Mulai Konsolidasi	ya	ya	ya
2.	SBY Ingatkan Tidak Ada Keputusan Wapres	ya	ya	ya
3.	Tim Ekonomi Fokus Infrastruktur	ya	ya	ya
4.	Agenda 100 Hari Lebih Dipertajam	ya	ya	ya
5.	Mendiknas Janji Berikan 10.000 Beasiswa	ya	ya	ya
6.	Depag Siapkan Antisipasi Aliran Sesat	ya	ya	ya
7.	Anggaran Jangan Sampai Bengkok	ya	ya	ya
8.	SBY Prioritaskan 15 Program	ya	ya	ya
9.	SBY Deklarasikan Ganyang Mafia	tidak	tidak	ya
10.	Postur APBN 2010 Aman	ya	ya	ya
11.	Kasus KPK-Century Berdampak Negatif Bagi SBY	ya	ya	ya
12.	Kuntoro Rumuskan Tim Pemberantasan Mafia Hukum	ya	ya	ya
13.	Kinerja Hatta Rajasa Ungguli Agung-Djoko Suyanto	ya	ya	ya
14.	Kasus KPK-Polri Rusak Program 100 Hari	ya	ya	ya
15.	Program 100 Hari Terganjil Dua “DC”	tidak	tidak	ya
16.	Pemerintah Akan Gratiskan Paspor TKI	ya	ya	ya
17.	Akbar Berharap Tuntas 100 Hari	ya	ya	ya
18.	Depbudpar Gelar Festival Sasando	ya	ya	ya
19.	PDP Minta SBY Tegas Berantas Mafia Hukum	ya	ya	ya
20.	Program Depsos Jangan Basa-basi	ya	ya	ya
21.	Kasus Century Tak Ganggu 100 Hari	ya	ya	ya
22.	Menteri Kelautan Klaim Sukses 100 Hari	ya	ya	ya
23.	Mensos Klaim Program 100 Hari Sukses	ya	ya	ya
24.	Mensos Fokus Tangani Anak Jalanan	ya	ya	ya
25.	100 Hari Bukan Ukuran Kinerja	ya	ya	ya
26.	Program 100 Hari Terpenuhi	ya	ya	ya
27.	Ekonom Nilai Program 100 Hari Belum Substansial	ya	ya	ya
28.	100 Hari Gagal Dilaksanakan	ya	ya	ya
29.	Century Tenggelamkan Program 100 Hari	ya	ya	ya
30.	Satgas Angkat Citra Pemerintah	ya	ya	ya
31.	Kepuasan Terhadap Kinerja Pemerintah Turun	ya	ya	ya
32.	PDIP Nilai Program 100 Hari Hanya Pencitraan	tidak	tidak	tidak

Sumber : *coding sheet*

10) Tabulasi Koding Sub Unit Analisis “Adanya Sumber Rujukan Anonim”

TABEL 19
Tabulasi Koding Sub Unit Analisis “Adanya Sumber Rujukan Anonim”
dalam Harian Media Indonesia

No	Judul Berita	Decoder	Coder 1	Coder 2
1.	Menjaga Stabilitas Memanjakan Sektor Riil	tidak	tidak	tidak
2.	Menekan Kemiskinan Hingga 9% di 2014	tidak	tidak	tidak
3.	Mimpi Negara Industri Maju dan Harmonisasi Kebijakan	tidak	tidak	tidak
4.	Tim Ekonomi Janjikan Percepatan Infrastruktur	tidak	tidak	tidak
5.	National Summit Jadi Ajang Penajaman Program	tidak	tidak	tidak
6.	Depkeu Siapkan Fasilitas PPh untuk Industri Prioritas	tidak	tidak	tidak
7.	Mencari Tuan Rumah di Negeri Sendiri	tidak	tidak	tidak
8.	Perombakan Lembaga Hukum Jadi Keniscayaan	tidak	tidak	tidak
9.	Presiden Serukan Ganyang Mafia Hukum	tidak	tidak	tidak
10.	Jalur Selat Sunda Masuk Program 100 Hari	tidak	tidak	tidak
11.	Pemberantasan Mafia dan Pemerataan Ekonomi	tidak	tidak	tidak
12.	Menko Perekonomian Buka Akses Kinerja 100 Hari	tidak	tidak	tidak
13.	Kemudahan Pembebasan Tanah Harus Tuntas 100 Hari	tidak	tidak	tidak
14.	Dari Konservasi Alam Hingga Krisis Listrik	tidak	tidak	tidak
15.	Program 100 Hari Ekonomi Masih 60%	tidak	tidak	tidak
16.	Setengah Hati Mencari Energi Pengganti	tidak	tidak	tidak
17.	Layanan Publik yang Kian Mencemaskan	tidak	tidak	tidak
18.	Reformasi Harus Dimulai Dari Kantor Presiden	tidak	tidak	tidak
19.	Dikepung Skandal Bank Century	tidak	tidak	tidak
20.	Program 100 Hari Tidak Realistis	tidak	tidak	tidak
21.	Rencana Aksi Kementrian Perindustrian Mengecewakan	tidak	tidak	tidak
22.	Rapor Biru Kementerian Energi	tidak	tidak	tidak
23.	Rapor Menkeu dan Menperin Masih Merah	tidak	tidak	tidak
24.	Industri Pertahanan Siap Dibangun	tidak	tidak	tidak
25.	Menpora Harus Seriusi Cabang Prioritas	tidak	tidak	tidak
26.	Seratus Hari ESDM Bukan Cuma Pemanis	tidak	tidak	tidak
27.	Pertamina Dukung Kebijakan Energi Nasional	tidak	tidak	tidak
28.	Genjot Produksi Untuk Jamin Keamanan Pasokan Energi	tidak	tidak	tidak
29.	Pembenahan Layanan Kesehatan Terus Dilakukan	tidak	tidak	tidak
30.	Menanti Sinergi Pendidikan dan Dunia Kerja	tidak	tidak	tidak
31.	Siaga Bencana Jadi Prioritas	tidak	tidak	tidak
32.	Swasembada Tergantung Dana	tidak	tidak	tidak
33.	Percepatan Infrastruktur Kuatkan Daya Saing	tidak	tidak	tidak
34.	Tugas Berat Merumahkan Masyarakat	tidak	tidak	tidak
35.	Keberhasilan KUR Tergantung Sosialisasi	tidak	tidak	tidak
36.	Masih Jalan di Tempat	tidak	tidak	tidak

Sumber : coding sheet

TABEL 20
Tabulasi Koding Sub Unit Analisis “Adanya Sumber Rujukan Anonim”
dalam Harian Seputar Indonesia

No	Judul Berita	Decoder	Coder 1	Coder 2
1.	Tim Ekonomi Mulai Konsolidasi	tidak	tidak	tidak
2.	SBY Ingatkan Tidak Ada Keputusan Wapres	tidak	tidak	tidak
3.	Tim Ekonomi Fokus Infrastruktur	tidak	tidak	tidak
4.	Agenda 100 Hari Lebih Dipertajam	tidak	tidak	tidak
5.	Mendiknas Janji Berikan 10.000 Beasiswa	tidak	tidak	tidak
6.	Depag Siapkan Antisipasi Aliran Sesat	tidak	tidak	tidak
7.	Anggaran Jangan Sampai Bengkok	tidak	tidak	tidak
8.	SBY Prioritaskan 15 Program	tidak	tidak	tidak
9.	SBY Deklarasikan Ganyang Mafia	tidak	tidak	tidak
10.	Postur APBN 2010 Aman	tidak	tidak	tidak
11.	Kasus KPK-Century Berdampak Negatif Bagi SBY	tidak	tidak	tidak
12.	Kuntoro Rumuskan Tim Pemberantasan Mafia Hukum	tidak	tidak	tidak
13.	Kinerja Hatta Rajasa Ungguli Agung-Djoko Suyanto	tidak	tidak	tidak
14.	Kasus KPK-Polri Rusak Program 100 Hari	tidak	tidak	tidak
15.	Program 100 Hari Terganjil Dua “DC”	tidak	tidak	tidak
16.	Pemerintah Akan Gratiskan Paspor TKI	tidak	tidak	tidak
17.	Akbar Berharap Tuntas 100 Hari	tidak	tidak	tidak
18.	Depbudpar Gelar Festival Sasando	tidak	tidak	tidak
19.	PDP Minta SBY Tegas Berantas Mafia Hukum	tidak	tidak	tidak
20.	Program Depsos Jangan Basa-basi	tidak	tidak	tidak
21.	Kasus Century Tak Ganggu 100 Hari	tidak	tidak	tidak
22.	Menteri Kelautan Klaim Sukses 100 Hari	tidak	tidak	tidak
23.	Mensos Klaim Program 100 Hari Sukses	tidak	tidak	tidak
24.	Mensos Fokus Tangani Anak Jalanan	tidak	tidak	tidak
25.	100 Hari Bukan Ukuran Kinerja	tidak	tidak	tidak
26.	Program 100 Hari Terpenuhi	tidak	tidak	tidak
27.	Ekonom Nilai Program 100 Hari Belum Substansial	tidak	tidak	tidak
28.	100 Hari Gagal Dilaksanakan	tidak	tidak	tidak
29.	Century Tenggelmkan Program 100 Hari	tidak	tidak	tidak
30.	Satgas Angkat Citra Pemerintah	tidak	tidak	tidak
31.	Kepuasan Terhadap Kinerja Pemerintah Turun	tidak	tidak	tidak
32.	PDIP Nilai Program 100 Hari Hanya Pencitraan	tidak	tidak	tidak

Sumber : coding sheet

11) Tabulasi Koding Sub Unit Analisis “Adanya Cek-Ricek oleh Wartawan”

TABEL 21

Tabulasi Koding Sub Unit Analisis “Adanya Cek-Ricek oleh Wartawan”
dalam Harian Media Indonesia

No	Judul Berita	Decoder	Coder 1	Coder 2
1.	Menjaga Stabilitas Memanjakan Sektor Riil	ya	ya	ya
2.	Menekan Kemiskinan Hingga 9% di 2014	ya	ya	ya
3.	Mimpi Negara Industri Maju dan Harmonisasi Kebijakan	tidak	tidak	tidak
4.	Tim Ekonomi Janjikan Percepatan Infrastruktur	ya	ya	ya
5.	National Summit Jadi Ajang Penajaman Program	ya	ya	ya
6.	Depkeu Siapkan Fasilitas PPh untuk Industri Prioritas	ya	ya	ya
7.	Mencari Tuan Rumah di Negeri Sendiri	ya	ya	ya
8.	Perombakan Lembaga Hukum Jadi Keniscayaan	ya	ya	ya
9.	Presiden Serukan Ganyang Mafia Hukum	ya	ya	ya
10.	Jalur Selat Sunda Masuk Program 100 Hari	ya	ya	ya
11.	Pemberantasan Mafia dan Pemerataan Ekonomi	ya	ya	ya
12.	Menko Perekonomian Buka Akses Kinerja 100 Hari	ya	ya	ya
13.	Kemudahan Pembebasan Tanah Harus Tuntas 100 Hari	ya	ya	ya
14.	Dari Konservasi Alam Hingga Krisis Listrik	ya	ya	ya
15.	Program 100 Hari Ekonomi Masih 60%	ya	ya	ya
16.	Setengah Hati Mencari Energi Pengganti	ya	ya	tidak
17.	Layanan Publik yang Kian Mencemaskan	ya	ya	ya
18.	Reformasi Harus Dimulai Dari Kantor Presiden	ya	ya	ya
19.	Dikepung Skandal Bank Century	ya	ya	tidak
20.	Program 100 Hari Tidak Realistis	ya	ya	ya
21.	Rencana Aksi Kementrian Perindustrian Mengecewakan	ya	ya	ya
22.	Rapor Biru Kementerian Energi	ya	ya	ya
23.	Rapor Menkeu dan Menperin Masih Merah	ya	ya	ya
24.	Industri Pertahanan Siap Dibangun	ya	ya	ya
25.	Menpora Harus Seriusi Cabang Prioritas	ya	ya	ya
26.	Seratus Hari ESDM Bukan Cuma Pemanis	ya	ya	ya
27.	Pertamina Dukung Kebijakan Energi Nasional	ya	ya	ya
28.	Genjot Produksi Untuk Jamin Keamanan Pasokan Energi	ya	ya	ya
29.	Pembenahan Layanan Kesehatan Terus Dilakukan	ya	ya	ya
30.	Menanti Sinergi Pendidikan dan Dunia Kerja	ya	ya	ya
31.	Siaga Bencana Jadi Prioritas	ya	ya	ya
32.	Swasembada Tergantung Dana	ya	ya	ya
33.	Percepatan Infrastruktur Kuatkan Daya Saing	tidak	tidak	tidak
34.	Tugas Berat Merumahkan Masyarakat	ya	ya	ya
35.	Keberhasilan KUR Tergantung Sosialisasi	ya	ya	ya
36.	Masih Jalan di Tempat	ya	ya	ya

Sumber : coding sheet

TABEL 22
Tabulasi Koding Sub Unit Analisis “Adanya Cek-Ricek oleh Wartawan”
dalam Harian Seputar Indonesia

No	Judul Berita	Decoder	Coder 1	Coder 2
1.	Tim Ekonomi Mulai Konsolidasi	ya	ya	ya
2.	SBY Ingatkan Tidak Ada Keputusan Wapres	ya	ya	ya
3.	Tim Ekonomi Fokus Infrastruktur	ya	ya	ya
4.	Agenda 100 Hari Lebih Dipertajam	ya	ya	ya
5.	Mendiknas Janji Berikan 10.000 Beasiswa	ya	ya	ya
6.	Depag Siapkan Antisipasi Aliran Sesat	ya	ya	ya
7.	Anggaran Jangan Sampai Bengkak	ya	ya	ya
8.	SBY Prioritaskan 15 Program	ya	ya	ya
9.	SBY Deklarasikan Ganyang Mafia	tidak	tidak	ya
10.	Postur APBN 2010 Aman	ya	ya	ya
11.	Kasus KPK-Century Berdampak Negatif Bagi SBY	ya	ya	ya
12.	Kuntoro Rumuskan Tim Pemberantasan Mafia Hukum	ya	ya	ya
13.	Kinerja Hatta Rajasa Ungguli Agung-Djoko Suyanto	ya	ya	ya
14.	Kasus KPK-Polri Rusak Program 100 Hari	ya	ya	ya
15.	Program 100 Hari Terganjil Dua “DC”	tidak	tidak	tidak
16.	Pemerintah Akan Gratiskan Paspor TKI	ya	ya	ya
17.	Akbar Berharap Tuntas 100 Hari	ya	ya	ya
18.	Depbudpar Gelar Festival Sasando	ya	ya	ya
19.	PDP Minta SBY Tegas Berantas Mafia Hukum	ya	ya	ya
20.	Program Depsos Jangan Basa-basi	ya	ya	ya
21.	Kasus Century Tak Ganggu 100 Hari	ya	ya	ya
22.	Menteri Kelautan Klaim Sukses 100 Hari	ya	ya	ya
23.	Mensos Klaim Program 100 Hari Sukses	ya	ya	ya
24.	Mensos Fokus Tangani Anak Jalanan	ya	ya	ya
25.	100 Hari Bukan Ukuran Kinerja	ya	ya	ya
26.	Program 100 Hari Terpenuhi	ya	ya	ya
27.	Ekonom Nilai Program 100 Hari Belum Substansial	ya	ya	ya
28.	100 Hari Gagal Dilaksanakan	ya	ya	ya
29.	Century Tenggelamkan Program 100 Hari	ya	ya	ya
30.	Satgas Angkat Citra Pemerintah	ya	ya	ya
31.	Kepuasan Terhadap Kinerja Pemerintah Turun	ya	ya	ya
32.	PDIP Nilai Program 100 Hari Hanya Pencitraan	tidak	tidak	ya

Sumber : *coding sheet*

12) Tabulasi Koding Sub Unit Analisis “Ada Kelalaian Mencantumkan Sumber”

TABEL 23

Tabulasi Koding Sub Unit Analisis “Ada Kelalaian Mencantumkan Sumber”
dalam Harian Media Indonesia

No	Judul Berita	Decoder	Coder 1	Coder 2
1.	Menjaga Stabilitas Memanjakan Sektor Riil	tidak	tidak	tidak
2.	Menekan Kemiskinan Hingga 9% di 2014	tidak	tidak	tidak
3.	Mimpi Negara Industri Maju dan Harmonisasi Kebijakan	tidak	tidak	tidak
4.	Tim Ekonomi Janjikan Percepatan Infrastruktur	tidak	tidak	tidak
5.	<i>National Summit</i> Jadi Ajang Penajaman Program	tidak	tidak	tidak
6.	Depkeu Siapkan Fasilitas PPh untuk Industri Prioritas	tidak	tidak	tidak
7.	Mencari Tuan Rumah di Negeri Sendiri	tidak	tidak	tidak
8.	Perombakan Lembaga Hukum Jadi Keniscayaan	tidak	tidak	tidak
9.	Presiden Serukan Ganyang Mafia Hukum	tidak	tidak	tidak
10.	Jalur Selat Sunda Masuk Program 100 Hari	tidak	tidak	tidak
11.	Pemberantasan Mafia dan Pemerataan Ekonomi	tidak	tidak	tidak
12.	Menko Perekonomian Buka Akses Kinerja 100 Hari	tidak	tidak	tidak
13.	Kemudahan Pembebasan Tanah Harus Tuntas 100 Hari	tidak	tidak	tidak
14.	Dari Konservasi Alam Hingga Krisis Listrik	tidak	tidak	tidak
15.	Program 100 Hari Ekonomi Masih 60%	tidak	tidak	tidak
16.	Setengah Hati Mencari Energi Pengganti	tidak	tidak	tidak
17.	Layanan Publik yang Kian Mencemaskan	tidak	tidak	tidak
18.	Reformasi Harus Dimulai Dari Kantor Presiden	tidak	tidak	tidak
19.	Dikepung Skandal Bank <i>Century</i>	tidak	tidak	tidak
20.	Program 100 Hari Tidak Realistis	tidak	tidak	tidak
21.	Rencana Aksi Kementrian Perindustrian Mengecewakan	tidak	tidak	tidak
22.	Rapor Biru Kementerian Energi	tidak	tidak	tidak
23.	Rapor Menkeu dan Menperin Masih Merah	tidak	tidak	tidak
24.	Industri Pertahanan Siap Dibangun	tidak	tidak	tidak
25.	Menpora Harus Seriusi Cabang Prioritas	tidak	tidak	tidak
26.	Seratus Hari ESDM Bukan Cuma Pemanis	tidak	tidak	tidak
27.	Pertamina Dukung Kebijakan Energi Nasional	tidak	tidak	tidak
28.	Genjot Produksi Untuk Jamin Keamanan Pasokan Energi	tidak	tidak	tidak
29.	Pembenahan Layanan Kesehatan Terus Dilakukan	tidak	tidak	tidak
30.	Menanti Sinergi Pendidikan dan Dunia Kerja	tidak	tidak	tidak
31.	Siaga Bencana Jadi Prioritas	tidak	tidak	tidak
32.	Swasembada Tergantung Dana	tidak	tidak	tidak
33.	Percepatan Infrastruktur Kuatkan Daya Saing	ya	ya	tidak
34.	Tugas Berat Merumahkan Masyarakat	tidak	tidak	tidak
35.	Keberhasilan KUR Tergantung Sosialisasi	tidak	tidak	tidak
36.	Masih Jalan di Tempat	tidak	tidak	tidak

Sumber : *coding sheet*

TABEL 24
Tabulasi Koding Sub Unit Analisis “Ada Kelalaian Mencantumkan Sumber”
dalam Harian Seputar Indonesia

No	Judul Berita	Decoder	Coder 1	Coder 2
1.	Tim Ekonomi Mulai Konsolidasi	tidak	tidak	tidak
2.	SBY Ingatkan Tidak Ada Keputusan Wapres	tidak	tidak	tidak
3.	Tim Ekonomi Fokus Infrastruktur	tidak	tidak	tidak
4.	Agenda 100 Hari Lebih Dipertajam	tidak	tidak	tidak
5.	Mendiknas Janji Berikan 10.000 Beasiswa	tidak	tidak	tidak
6.	Depag Siapkan Antisipasi Aliran Sesat	tidak	tidak	tidak
7.	Anggaran Jangan Sampai Bengkak	tidak	tidak	tidak
8.	SBY Prioritaskan 15 Program	tidak	tidak	tidak
9.	SBY Deklarasikan Ganyang Mafia	tidak	tidak	tidak
10.	Postur APBN 2010 Aman	tidak	tidak	tidak
11.	Kasus KPK-Century Berdampak Negatif Bagi SBY	tidak	tidak	tidak
12.	Kuntoro Rumuskan Tim Pemberantasan Mafia Hukum	tidak	tidak	tidak
13.	Kinerja Hatta Rajasa Ungguli Agung-Djoko Suyanto	tidak	tidak	tidak
14.	Kasus KPK-Polri Rusak Program 100 Hari	tidak	tidak	tidak
15.	Program 100 Hari Terganjil Dun “DC”	ya	ya	ya
16.	Pemerintah Akan Gratiskan Paspor TKI	tidak	tidak	tidak
17.	Akbar Berharap Tuntas 100 Hari	tidak	tidak	tidak
18.	Depbudpar Gelar Festival Sasando	tidak	tidak	tidak
19.	PDP Minta SBY Tegas Berantas Mafia Hukum	tidak	tidak	tidak
20.	Program Depsos Jangan Basa-basi	tidak	tidak	tidak
21.	Kasus Century Tak Ganggu 100 Hari	tidak	tidak	tidak
22.	Menteri Kelautan Klaim Sukses 100 Hari	tidak	tidak	tidak
23.	Mensos Klaim Program 100 Hari Sukses	tidak	tidak	tidak
24.	Mensos Fokus Tangani Anak Jalanan	tidak	tidak	tidak
25.	100 Hari Bukan Ukuran Kinerja	tidak	tidak	tidak
26.	Program 100 Hari Terpenuhi	tidak	tidak	tidak
27.	Ekonom Nilai Program 100 Hari Belum Substansial	tidak	tidak	tidak
28.	100 Hari Gagal Dilaksanakan	tidak	tidak	tidak
29.	Century Tenggelamkan Program 100 Hari	tidak	tidak	tidak
30.	Satgas Angkat Citra Pemerintah	tidak	tidak	tidak
31.	Kepuasan Terhadap Kinerja Pemerintah Turun	tidak	tidak	tidak
32.	PDIP Nilai Program 100 Hari Hanya Pencitraan	ya	ya	tidak

Sumber : coding sheet

13) Tabulasi Koding Sub Unit Analisis “Ada Kesalahan Pengutipan Nama Narasumber”

TABEL 25

Tabulasi Koding Sub Unit Analisis “Ada Kesalahan Pengutipan Nama Narasumber” dalam Harian Media Indonesia

No	Judul Berita	Decoder	Coder 1	Coder 2
1.	Menjaga Stabilitas Memanjakan Sektor Riil	tidak	tidak	tidak
2.	Menekan Kemiskinan Hingga 9% di 2014	tidak	tidak	tidak
3.	Mimpi Negara Industri Maju dan Harmonisasi Kebijakan	tidak	tidak	tidak
4.	Tim Ekonomi Janjikan Percepatan Infrastruktur	tidak	tidak	tidak
5.	National Summit Jadi Ajang Penajaman Program	tidak	tidak	tidak
6.	Depkeu Siapkan Fasilitas PPh untuk Industri Prioritas	tidak	tidak	tidak
7.	Mencari Tuan Rumah di Negeri Sendiri	tidak	tidak	tidak
8.	Perombakan Lembaga Hukum Jadi Keniscayaan	tidak	tidak	tidak
9.	Presiden Serukan Ganyang Mafia Hukum	tidak	tidak	tidak
10.	Jalur Selat Sunda Masuk Program 100 Hari	tidak	tidak	tidak
11.	Pemberantasan Mafia dan Pemerataan Ekonomi	tidak	tidak	tidak
12.	Menko Perekonomian Buka Akses Kinerja 100 Hari	tidak	tidak	tidak
13.	Kemudahan Pembebasan Tanah Harus Tuntas 100 Hari	tidak	tidak	tidak
14.	Dari Konservasi Alam Hingga Krisis Listrik	tidak	tidak	tidak
15.	Program 100 Hari Ekonomi Masih 60%	tidak	tidak	tidak
16.	Setengah Hati Mencari Energi Pengganti	tidak	tidak	tidak
17.	Layanan Publik yang Kian Mencemaskan	tidak	tidak	tidak
18.	Reformasi Harus Dimulai Dari Kantor Presiden	tidak	tidak	tidak
19.	Dikepung Skandal Bank Century	tidak	tidak	tidak
20.	Program 100 Hari Tidak Realistis	tidak	tidak	tidak
21.	Rencana Aksi Kementerian Perindustrian Mengecewakan	tidak	tidak	tidak
22.	Rapor Biru Kementerian Energi	tidak	tidak	tidak
23.	Rapor Menkeu dan Menperin Masih Merah	tidak	tidak	tidak
24.	Industri Pertahanan Siap Dibangun	tidak	tidak	tidak
25.	Menpora Harus Seriusi Cabang Prioritas	tidak	tidak	tidak
26.	Seratus Hari ESDM Bukan Cuma Pemanis	tidak	tidak	tidak
27.	Pertamina Dukung Kebijakan Energi Nasional	tidak	tidak	tidak
28.	Genjot Produksi Untuk Jamin Keamanan Pasokan Energi	tidak	tidak	tidak
29.	Pembenahan Layanan Kesehatan Terus Dilakukan	tidak	tidak	tidak
30.	Menanti Sinergi Pendidikan dan Dunia Kerja	tidak	tidak	tidak
31.	Siaga Bencana Jadi Prioritas	tidak	tidak	tidak
32.	Swasembada Tergantung Dana	tidak	tidak	tidak
33.	Percepatan Infrastruktur Kuatkan Daya Saing	tidak	tidak	tidak
34.	Tugas Berat Merumahkan Masyarakat	tidak	tidak	tidak
35.	Keberhasilan KUR Tergantung Sosialisasi	tidak	tidak	tidak
36.	Masih Jalan di Tempat	tidak	tidak	tidak

Sumber : coding sheet

TABEL 26
Tabulasi Koding Sub Unit Analisis “Ada Kesalahan Pengutipan Nama Narasumber”
dalam Harian Seputar Indonesia

No	Judul Berita	Decoder	Coder 1	Coder 2
1.	Tim Ekonomi Mulai Konsolidasi	tidak	tidak	tidak
2.	SBY Ingatkan Tidak Ada Keputusan Wapres	tidak	tidak	tidak
3.	Tim Ekonomi Fokus Infrastruktur	ya	ya	tidak
4.	Agenda 100 Hari Lebih Dipertajam	tidak	tidak	tidak
5.	Mendiknas Janji Berikan 10.000 Beasiswa	tidak	tidak	tidak
6.	Depag Siapkan Antisipasi Aliran Sesat	tidak	tidak	tidak
7.	Anggaran Jangan Sampai Bengkak	tidak	tidak	tidak
8.	SBY Prioritaskan 15 Program	tidak	tidak	tidak
9.	SBY Deklarasikan Ganyang Mafia	tidak	tidak	tidak
10.	Postur APBN 2010 Aman	tidak	tidak	tidak
11.	Kasus KPK-Century Berdampak Negatif Bagi SBY	tidak	tidak	tidak
12.	Kuntoro Rumuskan Tim Pemberantasan Mafia Hukum	tidak	tidak	tidak
13.	Kinerja Hatta Rajasa Ungguli Agung-Djoko Suyanto	tidak	tidak	tidak
14.	Kasus KPK-Polri Rusak Program 100 Hari	tidak	tidak	tidak
15.	Program 100 Hari Terganjil Dua “DC”	tidak	tidak	tidak
16.	Pemerintah Akan Gratiskan Paspor TKI	tidak	tidak	tidak
17.	Akbar Berharap Tuntas 100 Hari	tidak	tidak	tidak
18.	Depbudpar Gelar Festival Sasando	tidak	tidak	tidak
19.	PDP Minta SBY Tegas Berantas Mafia Hukum	tidak	tidak	tidak
20.	Program Depsos Jangan Basa-basi	tidak	tidak	tidak
21.	Kasus Century Tak Ganggu 100 Hari	tidak	tidak	tidak
22.	Menteri Kelautan Klaim Sukses 100 Hari	tidak	tidak	tidak
23.	Mensos Klaim Program 100 Hari Sukses	tidak	tidak	tidak
24.	Mensos Fokus Tangani Anak Jalanan	tidak	tidak	tidak
25.	100 Hari Bukan Ukuran Kinerja	tidak	tidak	tidak
26.	Program 100 Hari Terpenuhi	tidak	tidak	tidak
27.	Ekonom Nilai Program 100 Hari Belum Substansial	tidak	tidak	tidak
28.	100 Hari Gagal Dilaksanakan	tidak	tidak	tidak
29.	Century Tenggelman Program 100 Hari	tidak	tidak	tidak
30.	Satgas Angkat Citra Pemerintah	tidak	tidak	tidak
31.	Kepuasan Terhadap Kinerja Pemerintah Turun	tidak	tidak	tidak
32.	PDIP Nilai Program 100 Hari Hanya Pencitraan	tidak	tidak	tidak

Sumber : coding sheet

14) Tabulasi Koding Sub Unit Analisis “Sumber Berita Kompeten di Luar Pemerintah”

TABEL 27

Tabulasi Koding Sub Unit Analisis “Sumber Berita Kompeten di Luar Pemerintah”
dalam Harian Media Indonesia

No	Judul Berita	Decoder	Coder 1	Coder 2
1.	Menjaga Stabilitas Memanjakan Sektor Riil	tidak	tidak	tidak
2.	Menekan Kemiskinan Hingga 9% di 2014	ya	tidak	ya
3.	Mimpi Negara Industri Maju dan Harmonisasi Kebijakan	tidak	tidak	tidak
4.	Tim Ekonomi Janjikan Percepatan Infrastruktur	tidak	tidak	tidak
5.	National Summit Jadi Ajang Penajaman Program	ya	ya	ya
6.	Depkeu Siapkan Fasilitas PPh untuk Industri Prioritas	tidak	tidak	tidak
7.	Mencari Tuan Rumah di Negeri Sendiri	ya	ya	ya
8.	Perombakan Lembaga Hukum Jadi Keniscayaan	ya	ya	ya
9.	Presiden Serukan Ganyang Mafia Hukum	tidak	tidak	tidak
10.	Jalur Selat Sunda Masuk Program 100 Hari	tidak	tidak	tidak
11.	Pemberantasan Mafia dan Pemerataan Ekonomi	ya	ya	ya
12.	Menko Perekonomian Buka Akses Kinerja 100 Hari	tidak	tidak	tidak
13.	Kemudahan Pembebasan Tanah Harus Tuntas 100 Hari	ya	ya	ya
14.	Dari Konservasi Alam Hingga Krisis Listrik	ya	ya	ya
15.	Program 100 Hari Ekonomi Masih 60%	tidak	tidak	tidak
16.	Setengah Hati Mencari Energi Pengganti	ya	ya	ya
17.	Layanan Publik yang Kian Mencemaskan	ya	ya	ya
18.	Reformasi Harus Dimulai Dari Kantor Presiden	ya	ya	ya
19.	Dikepung Skandal Bank Century	ya	ya	ya
20.	Program 100 Hari Tidak Realistis	ya	ya	ya
21.	Rencana Aksi Kementerian Perindustrian Mengecewakan	tidak	tidak	tidak
22.	Rapor Biru Kementerian Energi	ya	ya	ya
23.	Rapor Menkeu dan Menperin Masih Merah	tidak	tidak	tidak
24.	Industri Pertahanan Siap Dibangun	tidak	tidak	tidak
25.	Menpora Harus Seriusi Cabang Prioritas	ya	tidak	ya
26.	Seratus Hari ESDM Bukan Cuma Pemanis	tidak	tidak	tidak
27.	Pertamina Dukung Kebijakan Energi Nasional	tidak	tidak	tidak
28.	Genjot Produksi Untuk Jamin Keamanan Pasokan Energi	tidak	tidak	tidak
29.	Pembenahan Layanan Kesehatan Terus Dilakukan	tidak	tidak	tidak
30.	Menanti Sinergi Pendidikan dan Dunia Kerja	ya	ya	ya
31.	Siaga Bencana Jadi Prioritas	ya	ya	ya
32.	Swasembada Tergantung Dana	tidak	tidak	tidak
33.	Percepatan Infrastruktur Kuatkan Daya Saing	tidak	tidak	tidak
34.	Tugas Berat Merumahkan Masyarakat	ya	ya	ya
35.	Keberhasilan KUR Tergantung Sosialisasi	ya	ya	tidak
36.	Masih Jalan di Tempat	ya	ya	ya

Sumber : coding sheet

TABEL 28
Tabulasi Koding Sub Unit Analisis “Sumber Berita Kompeten di Luar Pemerintah”
dalam Harian Seputar Indonesia

No	Judul Berita	Decoder	Coder 1	Coder 2
1.	Tim Ekonomi Mulai Konsolidasi	tidak	tidak	tidak
2.	SBY Ingatkan Tidak Ada Keputusan Wapres	ya	ya	tidak
3.	Tim Ekonomi Fokus Infrastruktur	ya	ya	ya
4.	Agenda 100 Hari Lebih Dipertajam	ya	ya	ya
5.	Mendiknas Janji Berikan 10.000 Beasiswa	tidak	tidak	tidak
6.	Depag Siapkan Antisipasi Aliran Sesat	tidak	tidak	tidak
7.	Anggaran Jangan Sampai Bengkak	ya	ya	ya
8.	SBY Prioritaskan 15 Program	ya	ya	ya
9.	SBY Deklarasikan Ganyang Mafia	ya	ya	ya
10.	Postur APBN 2010 Aman	tidak	tidak	tidak
11.	Kasus KPK-Century Berdampak Negatif Bagi SBY	ya	ya	ya
12.	Kuntoro Rumuskan Tim Pemberantasan Mafia Hukum	ya	ya	tidak
13.	Kinerja Hatta Rajasa Ungguli Agung-Djoko Suyanto	ya	ya	ya
14.	Kasus KPK-Polri Rusak Program 100 Hari	ya	ya	ya
15.	Program 100 Hari Terganjil Dua “DC”	tidak	tidak	tidak
16.	Pemerintah Akan Gratiskan Paspor TKI	tidak	tidak	tidak
17.	Akbar Berharap Tuntas 100 Hari	ya	ya	ya
18.	Depbudpar Gelar Festival Sasando	tidak	tidak	tidak
19.	PDP Minta SBY Tegas Berantas Mafia Hukum	ya	ya	ya
20.	Program Depsos Jangan Basa-basi	ya	ya	tidak
21.	Kasus Century Tak Ganggu 100 Hari	ya	ya	ya
22.	Menteri Kelautan Klaim Sukses 100 Hari	tidak	tidak	tidak
23.	Mensos Klaim Program 100 Hari Sukses	tidak	tidak	tidak
24.	Mensos Fokus Tangani Anak Jalanan	tidak	tidak	tidak
25.	100 Hari Bukan Ukuran Kinerja	tidak	tidak	tidak
26.	Program 100 Hari Terpenuhi	ya	ya	ya
27.	Ekonom Nilai Program 100 Hari Belum Substansial	ya	ya	ya
28.	100 Hari Gagal Dilaksanakan	ya	ya	ya
29.	Century Tenggelamkan Program 100 Hari	ya	ya	ya
30.	Satgas Angkat Citra Pemerintah	ya	ya	ya
31.	Kepuasan Terhadap Kinerja Pemerintah Turun	ya	ya	ya
32.	PDIP Nilai Program 100 Hari Hanya Pencitraan	ya	ya	ya

Sumber : *coding sheet*

15) Tabulasi Koding Sub Unit Analisis “Sumber Berita Kompeten dari Pemerintah”

TABEL 29

Tabulasi Koding Sub Unit Analisis “Sumber Berita Kompeten dari Pemerintah”
dalam Harian Media Indonesia

No	Judul Berita	Decoder	Coder 1	Coder 2
1.	Menjaga Stabilitas Memanjakan Sektor Riil	ya	ya	ya
2.	Menekan Kemiskinan Hingga 9% di 2014	ya	ya	ya
3.	Mimpi Negara Industri Maju dan Harmonisasi Kebijakan	ya	ya	ya
4.	Tim Ekonomi Janjikan Percepatan Infrastruktur	ya	ya	ya
5.	National Summit Jadi Ajang Penajaman Program	ya	ya	ya
6.	Depkeu Siapkan Fasilitas PPh untuk Industri Prioritas	ya	ya	ya
7.	Mencari Tuan Rumah di Negeri Sendiri	ya	ya	ya
8.	Perombakan Lembaga Hukum Jadi Keniscayaan	tidak	tidak	ya
9.	Presiden Serukan Ganyang Mafia Hukum	ya	ya	ya
10.	Jalur Selat Sunda Masuk Program 100 Hari	ya	ya	ya
11.	Pemberantasan Mafia dan Pemerataan Ekonomi	tidak	tidak	tidak
12.	Menko Perekonomian Buka Akses Kinerja 100 Hari	ya	ya	ya
13.	Kemudahan Pembebasan Tanah Harus Tuntas 100 Hari	ya	ya	ya
14.	Dari Konservasi Alam Hingga Krisis Listrik	tidak	tidak	tidak
15.	Program 100 Hari Ekonomi Masih 60%	ya	ya	ya
16.	Setengah Hati Mencari Energi Pengganti	ya	ya	ya
17.	Layanan Publik yang Kian Mencemaskan	tidak	tidak	tidak
18.	Reformasi Harus Dimulai Dari Kantor Presiden	ya	ya	ya
19.	Dikepung Skandal Bank Century	tidak	tidak	tidak
20.	Program 100 Hari Tidak Realistis	tidak	tidak	tidak
21.	Rencana Aksi Kementrian Perindustrian Mengecewakan	ya	ya	ya
22.	Rapor Biru Kementerian Energi	ya	ya	ya
23.	Rapor Menkeu dan Menperin Masih Merah	ya	ya	ya
24.	Industri Pertahanan Siap Dibangun	ya	ya	ya
25.	Menpora Harus Seriusi Cabang Prioritas	ya	ya	ya
26.	Seratus Hari ESDM Bukan Cuma Pemanis	ya	ya	ya
27.	Pertamina Dukung Kebijakan Energi Nasional	ya	ya	ya
28.	Genjot Produksi Untuk Jamin Keamanan Pasokan Energi	ya	ya	ya
29.	Pembenahan Layanan Kesehatan Terus Dilakukan	ya	ya	ya
30.	Menanti Sinergi Pendidikan dan Dunia Kerja	ya	ya	ya
31.	Siaga Bencana Jadi Prioritas	ya	ya	ya
32.	Swasembada Tergantung Dana	ya	ya	ya
33.	Percepatan Infrastruktur Kuatkan Daya Saing	ya	ya	ya
34.	Tugas Berat Merumahkan Masyarakat	ya	ya	ya
35.	Keberhasilan KUR Tergantung Sosialisasi	ya	ya	ya
36.	Masih Jalan di Tempat	tidak	tidak	ya

Sumber : coding sheet

TABEL 30
Tabulasi Koding Sub Unit Analisis “Sumber Berita Kompeten dari Pemerintah”
dalam Harian Seputar Indonesia

No	Judul Berita	Decoder	Coder 1	Coder 2
1.	Tim Ekonomi Mulai Konsolidasi	ya	ya	ya
2.	SBY Ingatkan Tidak Ada Keputusan Wapres	ya	ya	ya
3.	Tim Ekonomi Fokus Infrastruktur	ya	ya	ya
4.	Agenda 100 Hari Lebih Dipertajam	ya	ya	ya
5.	Mendiknas Janji Berikan 10.000 Beasiswa	ya	ya	ya
6.	Depag Siapkan Antisipasi Aliran Sesat	tidak	tidak	tidak
7.	Anggaran Jangan Sampai Bengkok	ya	ya	ya
8.	SBY Prioritaskan 15 Program	ya	ya	ya
9.	SBY Deklarasikan Ganyang Mafia	ya	ya	ya
10.	Postur APBN 2010 Aman	ya	ya	ya
11.	Kasus KPK-Century Berdampak Negatif Bagi SBY	tidak	tidak	ya
12.	Kuntoro Rumuskan Tim Pemberantasan Mafia Hukum	ya	ya	ya
13.	Kinerja Hatta Rajasa Ungguli Agung-Djoko Suyanto	tidak	tidak	ya
14.	Kasus KPK-Polri Rusak Program 100 Hari	tidak	tidak	tidak
15.	Program 100 Hari Terganjil Dua “DC”	tidak	tidak	tidak
16.	Pemerintah Akan Gratiskan Paspor TKI	ya	ya	ya
17.	Akbar Berharap Tuntas 100 Hari	tidak	tidak	tidak
18.	Depbudpar Gelar Festival Sasando	ya	ya	ya
19.	PDP Minta SBY Tegas Berantas Mafia Hukum	tidak	tidak	tidak
20.	Program Depsos Jangan Basa-basi	ya	tidak	ya
21.	Kasus Century Tak Ganggu 100 Hari	tidak	tidak	tidak
22.	Menteri Kelautan Klaim Sukses 100 Hari	ya	ya	ya
23.	Mensos Klaim Program 100 Hari Sukses	ya	ya	ya
24.	Mensos Fokus Tangani Anak Jalanan	ya	ya	ya
25.	100 Hari Bukan Ukuran Kinerja	tidak	tidak	tidak
26.	Program 100 Hari Terpenuhi	ya	ya	ya
27.	Ekonom Nilai Program 100 Hari Belum Substansial	tidak	tidak	tidak
28.	100 Hari Gagal Dilaksanakan	tidak	tidak	tidak
29.	Century Tenggelamkan Program 100 Hari	ya	ya	ya
30.	Satgas Angkat Citra Pemerintah	tidak	ya	tidak
31.	Kepuasan Terhadap Kinerja Pemerintah Turun	tidak	tidak	tidak
32.	PDIP Nilai Program 100 Hari Hanya Pencitraan	tidak	tidak	tidak

Sumber : coding sheet

16) Tabulasi Koding Sub Unit Analisis “Ketepatan Penggunaan EYD dan Tanda Baca”

TABEL 31

Tabulasi Koding Sub Unit Analisis “Ketepatan Penggunaan EYD dan Tanda Baca”
dalam Harian Media Indonesia

No	Judul Berita	Decoder	Coder 1	Coder 2
1.	Menjaga Stabilitas Memanjakan Sektor Riil	ya	ya	tidak
2.	Menekan Kemiskinan Hingga 9% di 2014	ya	ya	ya
3.	Mimpi Negara Industri Maju dan Harmonisasi Kebijakan	ya	ya	ya
4.	Tim Ekonomi Janjikan Percepatan Infrastruktur	ya	ya	ya
5.	National Summit Jadi Ajang Penajaman Program	ya	ya	ya
6.	Depkeu Siapkan Fasilitas PPh untuk Industri Prioritas	ya	ya	ya
7.	Mencari Tuan Rumah di Negeri Sendiri	ya	ya	ya
8.	Perombakan Lembaga Hukum Jadi Keniscayaan	ya	tidak	ya
9.	Presiden Serukan Ganyang Mafia Hukum	tidak	tidak	tidak
10.	Jalur Selat Sunda Masuk Program 100 Hari	tidak	tidak	tidak
11.	Pemberantasan Mafia dan Pemerataan Ekonomi	ya	ya	ya
12.	Menko Perekonomian Buka Akses Kinerja 100 Hari	tidak	tidak	tidak
13.	Kemudahan Pembebasan Tanah Harus Tuntas 100 Hari	ya	ya	ya
14.	Dari Konservasi Alam Hingga Krisis Listrik	tidak	tidak	tidak
15.	Program 100 Hari Ekonomi Masih 60%	tidak	tidak	tidak
16.	Setengah Hati Mencari Energi Pengganti	ya	ya	ya
17.	Layanan Publik yang Kian Mencemaskan	ya	ya	ya
18.	Reformasi Harus Dimulai Dari Kantor Presiden	tidak	tidak	tidak
19.	Dikepung Skandal Bank Century	tidak	tidak	tidak
20.	Program 100 Hari Tidak Realistis	tidak	tidak	tidak
21.	Rencana Aksi Kementerian Perindustrian Mengecewakan	tidak	tidak	tidak
22.	Rapor Biru Kementerian Energi	tidak	tidak	tidak
23.	Rapor Menkeu dan Menperin Masih Merah	tidak	tidak	tidak
24.	Industri Pertahanan Siap Dibangun	tidak	tidak	tidak
25.	Menpora Harus Seriusi Cabang Prioritas	tidak	tidak	tidak
26.	Seratus Hari ESDM Bukan Cuma Pemanis	tidak	tidak	tidak
27.	Pertamina Dukung Kebijakan Energi Nasional	tidak	tidak	tidak
28.	Genjot Produksi Untuk Jamin Keamanan Pasokan Energi	tidak	tidak	tidak
29.	Pembenahan Layanan Kesehatan Terus Dilakukan	tidak	tidak	tidak
30.	Menanti Sinergi Pendidikan dan Dunia Kerja	ya	ya	ya
31.	Siaga Bencana Jadi Prioritas	tidak	tidak	tidak
32.	Swasembada Tergantung Dana	tidak	tidak	tidak
33.	Percepatan Infrastruktur Kuatkan Daya Saing	ya	ya	ya
34.	Tugas Berat Merumahkan Masyarakat	tidak	tidak	tidak
35.	Keberhasilan KUR Tergantung Sosialisasi	tidak	tidak	tidak
36.	Masih Jalan di Tempat	tidak	tidak	tidak

Sumber : coding sheet

TABEL 32
Tabulasi Koding Sub Unit Analisis “Ketepatan Penggunaan EYD dan Tanda Baca”
dalam Harian Seputar Indonesia

No	Judul Berita	Decoder	Coder 1	Coder 2
1.	Tim Ekonomi Mulai Konsolidasi	ya	ya	ya
2.	SBY Ingatkan Tidak Ada Keputusan Wapres	ya	ya	ya
3.	Tim Ekonomi Fokus Infrastruktur	tidak	tidak	tidak
4.	Agenda 100 Hari Lebih Dipertajam	tidak	tidak	tidak
5.	Mendiknas Janji Berikan 10.000 Beasiswa	ya	ya	ya
6.	Depag Siapkan Antisipasi Aliran Sesat	ya	ya	ya
7.	Anggaran Jangan Sampai Bengkok	ya	ya	ya
8.	SBY Prioritaskan 15 Program	tidak	tidak	tidak
9.	SBY Deklarasikan Ganyang Mafia	ya	ya	ya
10.	Postur APBN 2010 Aman	tidak	tidak	tidak
11.	Kasus KPK-Century Berdampak Negatif Bagi SBY	ya	ya	ya
12.	Kuntoro Rumuskan Tim Pemberantasan Mafia Hukum	ya	ya	ya
13.	Kinerja Hatta Rajasa Ungguli Agung-Djoko Suyanto	ya	ya	ya
14.	Kasus KPK-Polri Rusak Program 100 Hari	tidak	ya	tidak
15.	Program 100 Hari Terganjil Dua “DC”	ya	ya	ya
16.	Pemerintah Akan Gratiskan Paspor TKI	ya	ya	ya
17.	Akbar Berharap Tuntas 100 Hari	ya	ya	ya
18.	Depbudpar Gelar Festival Sasando	ya	ya	ya
19.	PDP Minta SBY Tegas Berantas Mafia Hukum	ya	ya	ya
20.	Program Depsos Jangan Basa-basi	ya	ya	ya
21.	Kasus Century Tak Ganggu 100 Hari	ya	ya	ya
22.	Menteri Kelautan Klaim Sukses 100 Hari	ya	ya	ya
23.	Mensos Klaim Program 100 Hari Sukses	ya	ya	ya
24.	Mensos Fokus Tangani Anak Jalanan	ya	ya	ya
25.	100 Hari Bukan Ukuran Kinerja	ya	ya	ya
26.	Program 100 Hari Terpenuhi	tidak	tidak	tidak
27.	Ekonom Nilai Program 100 Hari Belum Substansial	tidak	tidak	tidak
28.	100 Hari Gagal Dilaksanakan	ya	ya	ya
29.	Century Tenggelamkan Program 100 Hari	ya	ya	ya
30.	Satgas Angkat Citra Pemerintah	ya	ya	ya
31.	Kepuasan Terhadap Kinerja Pemerintah Turun	ya	ya	ya
32.	PDIP Nilai Program 100 Hari Hanya Pencitraan	tidak	tidak	ya

Sumber : *coding sheet*

17) Tabulasi Koding Sub Unit Analisis “Kesesuaian Isi dengan Judul Berita”

TABEL 33
Tabulasi Koding Sub Unit Analisis “Kesesuaian Isi dengan Judul Berita”
dalam Harian Media Indonesia

No	Judul Berita	Decoder	Coder 1	Coder 2
1.	Menjaga Stabilitas Memanjakan Sektor Riil	ya	tidak	ya
2.	Menekan Kemiskinan Hingga 9% di 2014	ya	ya	ya
3.	Mimpi Negara Industri Maju dan Harmonisasi Kebijakan	ya	ya	ya
4.	Tim Ekonomi Janjikan Percepatan Infrastruktur	ya	ya	ya
5.	<i>National Summit</i> Jadi Ajang Penajaman Program	ya	ya	ya
6.	Depkeu Siapkan Fasilitas PPh untuk Industri Prioritas	ya	ya	ya
7.	Mencari Tuan Rumah di Negeri Sendiri	ya	ya	ya
8.	Perombakan Lembaga Hukum Jadi Keniscayaan	ya	ya	ya
9.	Presiden Serukan Ganyang Mafia Hukum	ya	ya	ya
10.	Jalur Selat Sunda Masuk Program 100 Hari	ya	ya	ya
11.	Pemberantasan Mafia dan Pemerataan Ekonomi	ya	ya	ya
12.	Menko Perekonomian Buka Akses Kinerja 100 Hari	ya	ya	ya
13.	Kemudahan Pembebasan Tanah Harus Tuntas 100 Hari	ya	ya	ya
14.	Dari Konservasi Alam Hingga Krisis Listrik	ya	ya	ya
15.	Program 100 Hari Ekonomi Masih 60%	ya	ya	ya
16.	Setengah Hati Mencari Energi Pengganti	ya	ya	ya
17.	Layanan Publik yang Kian Mencemaskan	ya	ya	ya
18.	Reformasi Harus Dimulai Dari Kantor Presiden	ya	ya	ya
19.	Dikepung Skandal Bank <i>Century</i>	ya	ya	ya
20.	Program 100 Hari Tidak Realistis	ya	ya	ya
21.	Rencana Aksi Kementrian Perindustrian Mengecewakan	ya	ya	ya
22.	Rapor Biru Kementerian Energi	ya	ya	ya
23.	Rapor Menkeu dan Menperin Masih Merah	ya	ya	ya
24.	Industri Pertahanan Siap Dibangun	ya	ya	ya
25.	Menpora Harus Seriusi Cabang Prioritas	ya	ya	ya
26.	Seratus Hari ESDM Bukan Cuma Pemanis	ya	ya	ya
27.	Pertamina Dukung Kebijakan Energi Nasional	ya	ya	ya
28.	Genjot Produksi Untuk Jamin Keamanan Pasokan Energi	ya	ya	ya
29.	Pembenahan Layanan Kesehatan Terus Dilakukan	ya	ya	ya
30.	Menanti Sinergi Pendidikan dan Dunia Kerja	ya	ya	ya
31.	Siaga Bencana Jadi Prioritas	ya	ya	ya
32.	Swasembada Tergantung Dana	ya	ya	ya
33.	Percepatan Infrastruktur Kuatkan Daya Saing	ya	ya	ya
34.	Tugas Berat Merumahkan Masyarakat	ya	ya	ya
35.	Keberhasilan KUR Tergantung Sosialisasi	ya	ya	ya
36.	Masih Jalan di Tempat	ya	ya	ya

Sumber : coding sheet

TABEL 34
Tabulasi Koding Sub Unit Analisis “Kesesuaian Isi dengan Judul Berita”
dalam Harian Seputar Indonesia

No	Judul Berita	Decoder	Coder 1	Coder 2
1.	Tim Ekonomi Mulai Konsolidasi	ya	ya	ya
2.	SBY Ingatkan Tidak Ada Keputusan Wapres	ya	ya	ya
3.	Tim Ekonomi Fokus Infrastruktur	ya	ya	ya
4.	Agenda 100 Hari Lebih Dipertajam	ya	ya	ya
5.	Mendiknas Janji Berikan 10.000 Beasiswa	ya	ya	ya
6.	Depag Siapkan Antisipasi Aliran Sesat	ya	ya	ya
7.	Anggaran Jangan Sampai Bengkak	ya	ya	ya
8.	SBY Prioritaskan 15 Program	ya	ya	ya
9.	SBY Deklarasikan Ganyang Mafia	ya	ya	ya
10.	Postur APBN 2010 Aman	ya	ya	ya
11.	Kasus KPK-Century Berdampak Negatif Bagi SBY	ya	ya	ya
12.	Kuntoro Rumuskan Tim Pemberantasan Mafia Hukum	ya	ya	ya
13.	Kinerja Hatta Rajasa Ungguli Agung-Djoko Suyanto	ya	ya	ya
14.	Kasus KPK-Polri Rusak Program 100 Hari	ya	ya	ya
15.	Program 100 Hari Terganjil Dua “DC”	ya	ya	ya
16.	Pemerintah Akan Gratiskan Paspor TKI	ya	ya	ya
17.	Akbar Berharap Tuntas 100 Hari	ya	ya	ya
18.	Depbudpar Gelar Festival Sasando	ya	ya	ya
19.	PDP Minta SBY Tegas Berantas Mafia Hukum	ya	ya	ya
20.	Program Depsos Jangan Basa-basi	ya	ya	ya
21.	Kasus Century Tak Ganggu 100 Hari	ya	ya	ya
22.	Menteri Kelautan Klaim Sukses 100 Hari	ya	ya	ya
23.	Mensos Klaim Program 100 Hari Sukses	ya	ya	ya
24.	Mensos Fokus Tangani Anak Jalanan	ya	ya	ya
25.	100 Hari Bukan Ukuran Kinerja	ya	ya	ya
26.	Program 100 Hari Terpenuhi	ya	ya	ya
27.	Ekonom Nilai Program 100 Hari Belum Substansial	ya	ya	ya
28.	100 Hari Gagal Dilaksanakan	ya	ya	ya
29.	Century Tenggelamkan Program 100 Hari	ya	ya	ya
30.	Satgas Angkat Citra Pemerintah	ya	ya	ya
31.	Kepuasan Terhadap Kinerja Pemerintah Turun	ya	ya	ya
32.	PDIP Nilai Program 100 Hari Hanya Pencitraan	ya	ya	ya

Sumber : coding sheet

18) Tabulasi Koding Sub Unit Analisis Unsur "What"

TABEL 35
Tabulasi Koding Sub Unit Analisis Unsur "What"
dalam Harian Media Indonesia

No	Judul Berita	Decoder	Coder 1	Coder 2
1.	Menjaga Stabilitas Memanjakan Sektor Riil	ya	ya	ya
2.	Menekan Kemiskinan Hingga 9% di 2014	ya	ya	ya
3.	Mimpi Negara Industri Maju dan Harmonisasi Kcbijakan	ya	ya	ya
4.	Tim Ekonomi Janjikan Percepatan Infrastruktur	ya	ya	ya
5.	National Summit Jadi Ajang Penajaman Program	ya	ya	ya
6.	Depkeu Siapkan Fasilitas PPh untuk Industri Prioritas	ya	ya	ya
7.	Mencari Tuan Rumah di Negeri Sendiri	ya	ya	ya
8.	Perombakan Lembaga Hukum Jadi Keniscayaan	ya	ya	ya
9.	Presiden Serukan Ganyang Mafia Hukum	ya	ya	ya
10.	Jalur Selat Sunda Masuk Program 100 Hari	ya	ya	ya
11.	Pemberantasan Mafia dan Pemerataan Ekonomi	ya	ya	ya
12.	Menko Perekonomian Buka Akses Kinerja 100 Hari	ya	ya	ya
13.	Kemudahan Pembebasan Tanah Harus Tuntas 100 Hari	ya	ya	ya
14.	Dari Konservasi Alam Hingga Krisis Listrik	ya	ya	ya
15.	Program 100 Hari Ekonomi Masih 60%	ya	ya	ya
16.	Setengah Hati Mencari Energi Pengganti	ya	ya	ya
17.	Layanan Publik yang Kian Mencemaskan	ya	ya	ya
18.	Reformasi Harus Dimulai Dari Kantor Presiden	ya	ya	ya
19.	Dikepung Skandal Bank Century	ya	ya	ya
20.	Program 100 Hari Tidak Realistis	ya	ya	ya
21.	Rencana Aksi Kementrian Perindustrian Mengecewakan	ya	ya	ya
22.	Rapor Biru Kementerian Energi	ya	ya	ya
23.	Rapor Menkeu dan Menperin Masih Merah	ya	ya	ya
24.	Industri Pertahanan Siap Dibangun	ya	ya	ya
25.	Menpora Harus Seriusi Cabang Prioritas	ya	ya	ya
26.	Seratus Hari ESDM Bukan Cuma Pemanis	ya	ya	ya
27.	Pertamina Dukung Kebijakan Energi Nasional	ya	ya	ya
28.	Genjot Produksi Untuk Jamin Keamanan Pasokan Energi	ya	ya	ya
29.	Pembenahan Layanan Kesehatan Terus Dilakukan	ya	ya	ya
30.	Menanti Sinergi Pendidikan dan Dunia Kerja	ya	ya	ya
31.	Siaga Bencana Jadi Prioritas	ya	ya	ya
32.	Swasembada Tergantung Dana	ya	ya	ya
33.	Percepatan Infrastruktur Kuatkan Daya Saing	ya	ya	ya
34.	Tugas Berat Merumahkan Masyarakat	ya	ya	ya
35.	Keberhasilan KUR Tergantung Sosialisasi	ya	ya	ya
36.	Masih Jalan di Tempat	ya	ya	ya

Sumber : coding sheet

TABEL 36
Tabulasi Koding Sub Unit Analisis Unsur “What”
dalam Harian Seputar Indonesia

No	Judul Berita	Decoder	Coder 1	Coder 2
1.	Tim Ekonomi Mulai Konsolidasi	ya	ya	ya
2.	SBY Ingatkan Tidak Ada Keputusan Wapres	ya	ya	ya
3.	Tim Ekonomi Fokus Infrastruktur	ya	ya	ya
4.	Agenda 100 Hari Lebih Dipertajam	ya	ya	ya
5.	Mendiknas Janji Berikan 10.000 Beasiswa	ya	ya	ya
6.	Depag Siapkan Antisipasi Aliran Sesat	ya	ya	ya
7.	Anggaran Jangan Sampai Bengkak	ya	ya	ya
8.	SBY Prioritaskan 15 Program	ya	ya	ya
9.	SBY Deklarasikan Ganyang Mafia	ya	ya	ya
10.	Postur APBN 2010 Aman	ya	ya	ya
11.	Kasus KPK-Century Berdampak Negatif Bagi SBY	ya	ya	ya
12.	Kuntoro Rumuskan Tim Pemberantasan Mafia Hukum	ya	ya	ya
13.	Kinerja Hatta Rajasa Ungguli Agung-Djoko Suyanto	ya	ya	ya
14.	Kasus KPK-Polri Rusak Program 100 Hari	ya	ya	ya
15.	Program 100 Hari Terganjil Dua “DC”	ya	ya	ya
16.	Pemerintah Akan Gratiskan Paspor TKI	ya	ya	ya
17.	Akbar Berharap Tuntas 100 Hari	ya	ya	ya
18.	Depbudpar Gelar Festival Sasando	ya	ya	ya
19.	PDP Minta SBY Tegas Berantas Mafia Hukum	ya	ya	ya
20.	Program Depsos Jangan Basa-basi	ya	ya	ya
21.	Kasus Century Tak Ganggu 100 Hari	ya	ya	ya
22.	Menteri Kelautan Klaim Sukses 100 Hari	ya	ya	ya
23.	Mensos Klaim Program 100 Hari Sukses	ya	ya	ya
24.	Mensos Fokus Tangani Anak Jalanan	ya	ya	ya
25.	100 Hari Bukan Ukuran Kinerja	ya	ya	ya
26.	Program 100 Hari Terpenuhi	ya	ya	ya
27.	Ekonom Nilai Program 100 Hari Belum Substansial	ya	ya	ya
28.	100 Hari Gagal Dilaksanakan	ya	ya	ya
29.	Century Tenggelamkan Program 100 Hari	ya	ya	ya
30.	Satgas Angkat Citra Pemerintah	ya	ya	ya
31.	Kepuasan Terhadap Kinerja Pemerintah Turun	ya	ya	ya
32.	PDIP Nilai Program 100 Hari Hanya Pencitraan	ya	ya	ya

Sumber : coding sheet

19) Tabulasi Koding Sub Unit Analisis Unsur “Who”

TABEL 37
Tabulasi Koding Sub Unit Analisis Unsur “Who”
dalam Harian Media Indonesia

No	Judul Berita	Decoder	Coder 1	Coder 2
1.	Menjaga Stabilitas Memanjakan Sektor Riil	ya	ya	ya
2.	Menekan Kemiskinan Hingga 9% di 2014	ya	ya	ya
3.	Mimpi Negara Industri Maju dan Harmonisasi Kebijakan	ya	ya	ya
4.	Tim Ekonomi Janjikan Percepatan Infrastruktur	ya	ya	ya
5.	National Summit Jadi Ajang Penajaman Program	ya	ya	ya
6.	Depkeu Siapkan Fasilitas PPh untuk Industri Prioritas	ya	ya	ya
7.	Mencari Tuan Rumah di Negeri Sendiri	ya	ya	ya
8.	Perombakan Lembaga Hukum Jadi Keniscayaan	ya	ya	ya
9.	Presiden Serukan Ganyang Mafia Hukum	ya	ya	ya
10.	Jalur Selat Sunda Masuk Program 100 Hari	ya	ya	ya
11.	Pemberantasan Mafia dan Pemerataan Ekonomi	ya	ya	ya
12.	Menko Perekonomian Buka Akses Kinerja 100 Hari	ya	ya	ya
13.	Kemudahan Pembebasan Tanah Ilarus Tuntas 100 Hari	ya	ya	ya
14.	Dari Konservasi Alam Hingga Krisis Listrik	ya	ya	ya
15.	Program 100 Hari Ekonomi Masih 60%	ya	ya	ya
16.	Setengah Hati Mencari Energi Pengganti	ya	ya	ya
17.	Layanan Publik yang Kian Mencemaskan	ya	ya	ya
18.	Reformasi Harus Dimulai Dari Kantor Presiden	ya	ya	ya
19.	Dikepung Skandal Bank Century	ya	ya	ya
20.	Program 100 Hari Tidak Realistis	ya	ya	ya
21.	Rencana Aksi Kementrian Perindustrian Mengecewakan	ya	ya	ya
22.	Rapor Biru Kementerian Energi	ya	ya	ya
23.	Rapor Menkeu dan Menperin Masih Merah	ya	ya	ya
24.	Industri Pertahanan Siap Dibangun	ya	ya	ya
25.	Menpora Harus Seriusi Cabang Prioritas	ya	ya	ya
26.	Seratus Hari ESDM Bukan Cuma Pemanis	ya	ya	ya
27.	Pertamina Dukung Kebijakan Energi Nasional	ya	ya	ya
28.	Genjot Produksi Untuk Jamin Keamanan Pasokan Energi	ya	ya	ya
29.	Pembenahan Layanan Kesehatan Terus Dilakukan	ya	ya	ya
30.	Menanti Sinergi Pendidikan dan Dunia Kerja	ya	ya	ya
31.	Siaga Bencana Jadi Prioritas	ya	ya	ya
32.	Swasembada Tergantung Dana	ya	ya	ya
33.	Percepatan Infrastruktur Kuatkan Daya Saing	ya	ya	ya
34.	Tugas Berat Merumahkan Masyarakat	ya	ya	ya
35.	Keberhasilan KUR Tergantung Sosialisasi	ya	ya	ya
36.	Masih Jalan di Tempat	ya	ya	ya

Sumber : coding sheet

TABEL 38
Tabulasi Koding Sub Unit Analisis Unsur “Who”
dalam Hari-hari Seputar Indonesia

No	Judul Berita	Decoder	Coder 1	Coder 2
1.	Tim Ekonomi Mulai Konsolidasi	ya	ya	ya
2.	SBY Ingatkan Tidak Ada Keputusan Wapres	ya	ya	ya
3.	Tim Ekonomi Fokus Infrastruktur	ya	ya	ya
4.	Agenda 100 Hari Lebih Dipertajam	ya	ya	ya
5.	Mendiknas Janji Berikan 10.000 Beasiswa	ya	ya	ya
6.	Depag Siapkan Antisipasi Aliran Sesat	ya	ya	ya
7.	Anggaran Jangan Sampai Bengkak	ya	ya	ya
8.	SBY Prioritaskan 15 Program	ya	ya	ya
9.	SBY Deklarasikan Ganyang Mafia	ya	ya	ya
10.	Postur APBN 2010 Aman	ya	ya	ya
11.	Kasus KPK-Century Berdampak Negatif Bagi SBY	ya	ya	ya
12.	Kuntoro Rumuskan Tim Pemberantasan Mafia Hukum	ya	ya	ya
13.	Kinerja Hatta Rajasa Ungguli Agung-Djoko Suyanto	ya	ya	ya
14.	Kasus KPK-Polri Rusak Program 100 Hari	ya	ya	ya
15.	Program 100 Hari Terganjil Dua “DC”	ya	ya	ya
16.	Pemerintah Akan Gratiskan Paspor TKI	ya	ya	ya
17.	Akbar Berharap Tuntas 100 Hari	ya	ya	ya
18.	Depbudpar Gelar Festival Sasando	ya	ya	ya
19.	PDP Minta SBY Tegas Berantas Mafia Hukum	ya	ya	ya
20.	Program Depsos Jangan Basa-basi	ya	ya	ya
21.	Kasus Century Tak Ganggu 100 Hari	ya	ya	ya
22.	Menteri Kelautan Klaim Sukses 100 Hari	ya	ya	ya
23.	Mensos Klaim Program 100 Hari Sukses	ya	ya	ya
24.	Mensos Fokus Tangani Anak Jalanan	ya	ya	ya
25.	100 Hari Bukan Ukuran Kinerja	ya	ya	ya
26.	Program 100 Hari Terpenuhi	ya	ya	ya
27.	Ekonom Nilai Program 100 Hari Belum Substansial	ya	ya	ya
28.	100 Hari Gagal Dilaksanakan	ya	ya	ya
29.	Century Tenggelamkan Program 100 Hari	ya	ya	ya
30.	Satgas Angkat Citra Pemerintah	ya	ya	ya
31.	Kepuasan Terhadap Kinerja Pemerintah Turun	ya	ya	ya
32.	PDIP Nilai Program 100 Hari Hanya Pencitraan	ya	ya	ya

Sumber : coding sheet

20) Tabulasi Koding Sub Unit Analisis Unsur “When”

TABEL 39
Tabulasi Koding Sub Unit Analisis Unsur “When”
dalam Harian Media Indonesia

No	Judul Berita	Decoder	Coder 1	Coder 2
1.	Menjaga Stabilitas Memanjakan Sektor Riil	ya	ya	ya
2.	Menekan Kemiskinan Hingga 9% di 2014	tidak	tidak	tidak
3.	Mimpi Negara Industri Maju dan Harmonisasi Kebijakan	tidak	tidak	ya
4.	Tim Ekonomi Janjikan Percepatan Infrastruktur	ya	ya	ya
5.	National Summit Jadi Ajang Penajaman Program	ya	ya	ya
6.	Depkeu Siapkan Fasilitas PPh untuk Industri Prioritas	ya	ya	ya
7.	Mencari Tuan Rumah di Negeri Sendiri	ya	ya	ya
8.	Perombakan Lembaga Hukum Jadi Keniscayaan	ya	ya	ya
9.	Presiden Serukan Ganyang Mafia Hukum	ya	ya	ya
10.	Jalur Selat Sunda Masuk Program 100 Hari	ya	ya	ya
11.	Pemberantasan Mafia dan Pemerataan Ekonomi	ya	ya	ya
12.	Menko Perekonomian Buka Akses Kinerja 100 Hari	ya	ya	ya
13.	Kemudahan Pembebasan Tanah Harus Tuntas 100 Hari	ya	ya	ya
14.	Dari Konservasi Alam Hingga Krisis Listrik	ya	ya	ya
15.	Program 100 Hari Ekonomi Masih 60%	ya	ya	ya
16.	Setengah Hati Mencari Energi Pengganti	tidak	tidak	tidak
17.	Layanan Publik yang Kian Mencemaskan	ya	ya	ya
18.	Reformasi Harus Dimulai Dari Kantor Presiden	ya	ya	ya
19.	Dikepung Skandal Bank Century	ya	ya	ya
20.	Program 100 Hari Tidak Realistis	ya	ya	ya
21.	Rencana Aksi Kementerian Perindustrian Mengecewakan	ya	ya	ya
22.	Rapor Biru Kementerian Energi	tidak	tidak	tidak
23.	Rapor Menkeu dan Menperin Masih Merah	ya	ya	ya
24.	Industri Pertahanan Siap Dibangun	ya	ya	ya
25.	Menpora Harus Seriusi Cabang Prioritas	tidak	ya	tidak
26.	Seratus Hari ESDM Bukan Cuma Pemanis	ya	ya	ya
27.	Pertamina Dukung Kebijakan Energi Nasional	ya	ya	ya
28.	Genjot Produksi Untuk Jamin Keamanan Pasokan Energi	ya	ya	ya
29.	Pembenahan Layanan Kesehatan Terus Dilakukan	tidak	tidak	tidak
30.	Menanti Sinergi Pendidikan dan Dunia Kerja	ya	ya	ya
31.	Siaga Bencana Jadi Prioritas	tidak	tidak	tidak
32.	Swasembada Tergantung Dana	ya	ya	ya
33.	Percepatan Infrastruktur Kuatkan Daya Saing	tidak	tidak	tidak
34.	Tugas Berat Merumahkan Masyarakat	tidak	tidak	tidak
35.	Keberhasilan KUR Tergantung Sosialisasi	ya	ya	tidak
36.	Masih Jalan di Tempat	tidak	tidak	tidak

Sumber : coding sheet

TABEL 40
Tabulasi Koding Sub Unit Analisis Unsur “When”
dalam Hari-hari Seputar Indonesia

No	Judul Berita	Decoder	Coder 1	Coder 2
1.	Tim Ekonomi Mulai Konsolidasi	ya	ya	ya
2.	SBY Ingatkan Tidak Ada Keputusan Wapres	ya	ya	ya
3.	Tim Ekonomi Fokus Infrastruktur	ya	ya	ya
4.	Agenda 100 Hari Lebih Dipertajam	ya	ya	ya
5.	Mendiknas Janji Berikan 10.000 Beasiswa	ya	ya	tidak
6.	Depag Siapkan Antisipasi Aliran Sesat	ya	ya	ya
7.	Anggaran Jangan Sampai Bengkok	ya	ya	ya
8.	SBY Prioritaskan 15 Program	ya	ya	ya
9.	SBY Deklarasikan Ganyang Mafia	ya	ya	ya
10.	Postur APBN 2010 Aman	ya	ya	ya
11.	Kasus KPK-Century Berdampak Negatif Bagi SBY	ya	ya	ya
12.	Kuntoro Rumuskan Tim Pemberantasan Mafia Hukum	ya	ya	ya
13.	Kinerja Hatta Rajasa Ungguli Agung-Djoko Suyanto	ya	ya	ya
14.	Kasus KPK-Polri Rusak Program 100 Hari	ya	ya	ya
15.	Program 100 Hari Terganjil Dua “DC”	tidak	ya	tidak
16.	Pemerintah Akan Gratiskan Paspor TKI	ya	ya	ya
17.	Akbar Berharap Tuntas 100 Hari	ya	ya	ya
18.	Depbudpar Gelar Festival Sasando	ya	ya	ya
19.	PDP Minta SBY Tegas Berantas Mafia Hukum	ya	ya	ya
20.	Program Depsos Jangan Basa-basi	tidak	tidak	tidak
21.	Kasus Century Tak Ganggu 100 Hari	ya	ya	ya
22.	Menteri Kelautan Klaim Sukses 100 Hari	tidak	tidak	tidak
23.	Mensos Klaim Program 100 Hari Sukses	tidak	tidak	tidak
24.	Mensos Fokus Tangani Anak Jalanan	ya	ya	ya
25.	100 Hari Bukan Ukuran Kinerja	ya	ya	ya
26.	Program 100 Hari Terpenuhi	ya	ya	ya
27.	Ekonom Nilai Program 100 Hari Belum Substansial	ya	ya	ya
28.	100 Hari Gagal Dilaksanakan	ya	ya	ya
29.	Century Tenggelamkan Program 100 Hari	ya	ya	ya
30.	Satgas Angkat Citra Pemerintah	ya	ya	ya
31.	Kepuasan Terhadap Kinerja Pemerintah Turun	tidak	tidak	ya
32.	PDIP Nilai Program 100 Hari Hanya Pencitraan	ya	ya	ya

Sumber : coding sheet

21) Tabulasi Koding Sub Unit Analisis Unsur “Where”

TABEL 41
Tabulasi Koding Sub Unit Analisis Unsur “Where”
dalam Harian Media Indonesia

No	Judul Berita	Decoder	Coder 1	Coder 2
1.	Menjaga Stabilitas Memanjakan Sektor Riil	ya	ya	ya
2.	Menekan Kemiskinan Hingga 9% di 2014	tidak	tidak	tidak
3.	Mimpi Negara Industri Maju dan Harmonisasi Kebijakan	ya	ya	ya
4.	Tim Ekonomi Janjikan Percepatan Infrastruktur	ya	ya	ya
5.	National Summit Jadi Ajang Penajaman Program	ya	ya	ya
6.	Depkeu Siapkan Fasilitas PPh untuk Industri Prioritas	ya	ya	ya
7.	Mencari Tuan Rumah di Negeri Sendiri	ya	ya	ya
8.	Peromhakan Lembaga Hukum Jadi Keniscayaan	ya	ya	ya
9.	Presiden Serukan Ganyang Mafia Hukum	ya	ya	ya
10.	Jalur Selat Sunda Masuk Program 100 Hari	ya	ya	ya
11.	Pemberantasan Mafia dan Pemerataan Ekonomi	ya	ya	ya
12.	Menko Perekonomian Buka Akses Kinerja 100 Hari	ya	ya	ya
13.	Kemudahan Pembebasan Tanah Harus Tuntas 100 Hari	ya	ya	ya
14.	Dari Konservasi Alam Hingga Krisis Listrik	ya	ya	ya
15.	Program 100 Hari Ekonomi Masih 60%	ya	ya	ya
16.	Setengah Hati Mencari Energi Pengganti	tidak	tidak	tidak
17.	Layanan Publik yang Kian Mencemaskan	ya	ya	ya
18.	Reformasi Harus Dimulai Dari Kantor Presiden	ya	ya	ya
19.	Dikepung Skandal Bank Century	tidak	tidak	tidak
20.	Program 100 Hari Tidak Realistis	ya	ya	ya
21.	Rencana Aksi Kementerian Perindustrian Mengecewakan	ya	ya	ya
22.	Rapor Biru Kementerian Energi	tidak	tidak	ya
23.	Rapor Menkeu dan Menperin Masih Merah	ya	ya	ya
24.	Industri Pertahanan Siap Dibangun	ya	ya	ya
25.	Menpora Harus Seriusi Cabang Prioritas	ya	ya	ya
26.	Seratus Hari ESDM Bukan Cuma Pemanis	ya	ya	ya
27.	Pertamina Dukung Kebijakan Energi Nasional	tidak	tidak	tidak
28.	Genjot Produksi Untuk Jamin Keamanan Pasokan Energi	ya	ya	ya
29.	Pembenahan Layanan Kesehatan Terus Dilakukan	tidak	tidak	tidak
30.	Menanti Sinergi Pendidikan dan Dunia Kerja	tidak	tidak	tidak
31.	Siaga Bencana Jadi Prioritas	tidak	tidak	tidak
32.	Swasembada Tergantung Dana	ya	tidak	ya
33.	Percepatan Infrastruktur Kuatkan Daya Saing	tidak	tidak	tidak
34.	Tugas Berat Merumahkan Masyarakat	tidak	tidak	tidak
35.	Keberhasilan KUR Tergantung Sosialisasi	tidak	tidak	tidak
36.	Masih Jalan di Tempat	tidak	tidak	tidak

Sumber : coding sheet

TABEL 42
Tabulasi Koding Sub Unit Analisis Unsur “Where”
dalam Harian Seputar Indonesia

No	Judul Berita	Decoder	Coder 1	Coder 2
1.	Tim Ekonomi Mulai Konsolidasi	ya	ya	ya
2.	SBY Ingatkan Tidak Ada Keputusan Wapres	ya	ya	ya
3.	Tim Ekonomi Fokus Infrastruktur	ya	ya	ya
4.	Agenda 100 Hari Lebih Dipertajam	ya	tidak	ya
5.	Mendiknas Janji Berikan 10.000 Beasiswa	ya	ya	ya
6.	Depag Siapkan Antisipasi Aliran Sesat	ya	ya	ya
7.	Anggaran Jangan Sampai Bengkok	ya	ya	ya
8.	SBY Prioritaskan 15 Program	ya	ya	ya
9.	SBY Deklarasikan Ganyang Mafia	tidak	tidak	tidak
10.	Postur APBN 2010 Aman	ya	ya	ya
11.	Kasus KPK-Century Berdampak Negatif Bagi SBY	ya	ya	ya
12.	Kuntoro Rumuskan Tim Pemberantasan Mafia Hukum	ya	ya	ya
13.	Kinerja Hatta Rajasa Ungguli Agung-Djoko Suyanto	ya	ya	ya
14.	Kasus KPK-Polri Rusak Program 100 Hari	ya	ya	ya
15.	Program 100 Hari Terganjil Dua “DC”	tidak	ya	tidak
16.	Pemerintah Akan Gratiskan Paspor TKI	ya	ya	ya
17.	Akbar Berharap Tuntas 100 Hari	ya	ya	ya
18.	Depbudpar Gelar Festival Sasando	ya	ya	ya
19.	PDP Minta SBY Tegas Berantas Mafia Hukum	ya	ya	ya
20.	Program Depsos Jangan Basa-basi	ya	ya	ya
21.	Kasus Century Tak Ganggu 100 Hari	ya	ya	ya
22.	Menteri Kelautan Klaim Sukses 100 Hari	ya	ya	ya
23.	Mensos Klaim Program 100 Hari Sukses	ya	ya	ya
24.	Mensos Fokus Tangani Anak Jalanan	ya	ya	ya
25.	100 Hari Bukan Ukuran Kinerja	ya	ya	ya
26.	Program 100 Hari Terpenuhi	ya	ya	ya
27.	Ekonom Nilai Program 100 Hari Belum Substansial	ya	ya	ya
28.	100 Hari Gagal Dilaksanakan	ya	ya	ya
29.	Century Tenggelamkan Program 100 Hari	ya	ya	ya
30.	Satgas Angkat Citra Pemerintah	ya	ya	ya
31.	Kepuasan Terhadap Kinerja Pemerintah Turun	ya	ya	ya
32.	PDIP Nilai Program 100 Hari Hanya Pencitraan	ya	ya	ya

Sumber : coding sheet

22) Tabulasi Koding Sub Unit Analisis Unsur “Why”

TABEL 43
Tabulasi Koding Sub Unit Analisis Unsur “Why”
dalam Harian Media Indonesia

No	Judul Berita	Decoder	Coder 1	Coder 2
1.	Menjaga Stabilitas Memanjakan Sektor Riil	ya	ya	ya
2.	Menekan Kemiskinan Hingga 9% di 2014	ya	ya	tidak
3.	Mimpi Negara Industri Maju dan Harmonisasi Kebijakan	ya	ya	tidak
4.	Tim Ekonomi Janjikan Percepatan Infrastruktur	ya	ya	ya
5.	<i>National Summit</i> Jadi Ajang Penajaman Program	ya	ya	ya
6.	Depkeu Siapkan Fasilitas PPh untuk Industri Prioritas	ya	ya	ya
7.	Mencari Tuan Rumah di Negeri Sendiri	ya	ya	ya
8.	Perombakan Lembaga Hukum Jadi Keniscayaan	ya	ya	ya
9.	Presiden Serukan Ganyang Mafia Hukum	ya	ya	ya
10.	Jalur Selat Sunda Masuk Program 100 Hari	tidak	tidak	ya
11.	Pemberantasan Mafia dan Pemerataan Ekonomi	ya	ya	tidak
12.	Menko Perekonomian Buka Akses Kinerja 100 Hari	tidak	tidak	ya
13.	Kemudahan Pembebasan Tanah Harus Tuntas 100 Hari	ya	ya	ya
14.	Dari Konservasi Alam Hingga Krisis Listrik	ya	ya	ya
15.	Program 100 Hari Ekonomi Masih 60%	ya	ya	ya
16.	Setengah Hati Mencari Energi Pengganti	ya	ya	ya
17.	Layanan Publik yang Kian Mencemaskan	ya	ya	ya
18.	Reformasi Harus Dimulai Dari Kantor Presiden	tidak	tidak	tidak
19.	Dikepung Skandal Bank <i>Century</i>	ya	ya	tidak
20.	Program 100 Hari Tidak Realistis	ya	ya	ya
21.	Rencana Aksi Kementrian Perindustrian Mengecewakan	tidak	tidak	tidak
22.	Rapor Biru Kementerian Energi	ya	ya	ya
23.	Rapor Menkeu dan Menperin Masih Merah	ya	ya	ya
24.	Industri Pertahanan Siap Dibangun	ya	ya	ya
25.	Menpora Harus Seriusi Cabang Prioritas	ya	ya	ya
26.	Seratus Hari ESDM Bukan Cuma Pemanis	ya	ya	ya
27.	Pertamina Dukung Kebijakan Energi Nasional	ya	tidak	ya
28.	Genjot Produksi Untuk Jamin Keamanan Pasokan Energi	ya	ya	ya
29.	Pembenahan Layanan Kesehatan Terus Dilakukan	ya	tidak	ya
30.	Menanti Sinergi Pendidikan dan Dunia Kerja	ya	ya	ya
31.	Siaga Bencana Jadi Prioritas	ya	ya	ya
32.	Swasembada Tergantung Dana	ya	ya	ya
33.	Percepatan Infrastruktur Kuatkan Daya Saing	ya	ya	tidak
34.	Tugas Berat Merumahkan Masyarakat	ya	ya	ya
35.	Keberhasilan KUR Tergantung Sosialisasi	ya	ya	ya
36.	Masih Jalan di Tempat	ya	ya	ya

Sumber : coding sheet

TABEL 44
 Tabulasi Koding Sub Unit Analisis Unsur “Why”
 dalam Harian Seputar Indonesia

No	Judul Berita	Decoder	Coder 1	Coder 2
1.	Tim Ekonomi Mulai Konsolidasi	ya	ya	ya
2.	SBY Ingatkan Tidak Ada Keputusan Wapres	ya	ya	ya
3.	Tim Ekonomi Fokus Infrastruktur	ya	ya	ya
4.	Agenda 100 Hari Lebih Dipertajam	ya	ya	ya
5.	Mendiknas Janji Berikan 10.000 Beasiswa	ya	ya	ya
6.	Depag Siapkan Antisipasi Aliran Sesat	ya	ya	ya
7.	Anggaran Jangan Sampai Bengkok	ya	ya	ya
8.	SBY Prioritaskan 15 Program	tidak	tidak	ya
9.	SBY Deklarasikan Ganyang Mafia	ya	ya	ya
10.	Postur APBN 2010 Aman	ya	ya	ya
11.	Kasus KPK-Century Berdampak Negatif Bagi SBY	ya	ya	ya
12.	Kuntoro Rumuskan Tim Pemberantasan Mafia Hukum	ya	ya	ya
13.	Kinerja Hatta Rajasa Ungguli Agung-Djoko Suyanto	ya	ya	ya
14.	Kasus KPK-Polri Rusak Program 100 Hari	ya	ya	ya
15.	Program 100 Hari Terganjil Dua “DC”	ya	ya	ya
16.	Pemerintah Akan Gratiskan Paspor TKI	ya	ya	ya
17.	Akbar Berharap Tuntas 100 Hari	ya	ya	ya
18.	Depbudpar Gelar Festival Sasando	ya	tidak	tidak
19.	PDP Minta SBY Tegas Berantas Mafia Hukum	ya	ya	ya
20.	Program Depsos Jangan Basa-basi	tidak	tidak	tidak
21.	Kasus Century Tak Ganggu 100 Hari	ya	ya	ya
22.	Menteri Kelautan Klaim Sukses 100 Hari	ya	ya	ya
23.	Mensos Klaim Program 100 Hari Sukses	ya	ya	ya
24.	Mensos Fokus Tangani Anak Jalanan	ya	ya	ya
25.	100 Hari Bukan Ukuran Kinerja	ya	ya	ya
26.	Program 100 Hari Terpenuhi	ya	ya	ya
27.	Ekonom Nilai Program 100 Hari Belum Substansial	ya	ya	ya
28.	100 Hari Gagal Dilaksanakan	ya	ya	ya
29.	Century Tenggelamkan Program 100 Hari	ya	ya	ya
30.	Satgas Angkat Citra Pemerintah	ya	ya	ya
31.	Kepuasan Terhadap Kinerja Pemerintah Turun	ya	ya	ya
32.	PDIP Nilai Program 100 Hari Hanya Pencitraan	ya	ya	ya

Sumber : coding sheet

23) Tabulasi Koding Sub Unit Analisis Unsur "How"

TABEL 45
 Tabulasi Koding Sub Unit Analisis Unsur "How"
 dalam Harian Media Indonesia

No	Judul Berita	Decoder	Coder 1	Coder 2
1.	Menjaga Stabilitas Memanjakan Sektor Riil	ya	ya	ya
2.	Menekan Kemiskinan Hingga 9% di 2014	tidak	tidak	ya
3.	Mimpi Negara Industri Maju dan Harmonisasi Kebijakan	ya	ya	tidak
4.	Tim Ekonomi Janjikan Percepatan Infrastruktur	ya	ya	tidak
5.	National Summit Jadi Ajang Penajaman Program	ya	ya	ya
6.	Depkeu Siapkan Fasilitas PPh untuk Industri Prioritas	ya	ya	ya
7.	Mencari Tuan Rumah di Negeri Sendiri	ya	ya	ya
8.	Perombakan Lembaga Hukum Jadi Keniscayaan	ya	ya	ya
9.	Presiden Serukan Ganyang Mafia Hukum	tidak	tidak	tidak
10.	Jalur Selat Sunda Masuk Program 100 Hari	ya	ya	tidak
11.	Pemberantasan Mafia dan Pemerataan Ekonomi	tidak	tidak	tidak
12.	Menko Perekonomian Buka Akses Kinerja 100 Hari	ya	ya	ya
13.	Kemudahan Pembebasan Tanah Harus Tuntas 100 Hari	tidak	tidak	tidak
14.	Dari Konservasi Alam Hingga Krisis Listrik	ya	ya	ya
15.	Program 100 Hari Ekonomi Masih 60%	tidak	tidak	tidak
16.	Setengah Hati Mencari Energi Pengganti	ya	ya	ya
17.	Layanan Publik yang Kian Mencemaskan	ya	ya	ya
18.	Reformasi Harus Dimulai Dari Kantor Presiden	tidak	tidak	tidak
19.	Dikepung Skandal Bank Century	ya	ya	ya
20.	Program 100 Hari Tidak Realistis	tidak	tidak	tidak
21.	Rencana Aksi Kementrian Perindustrian Mengecewakan	tidak	tidak	tidak
22.	Rapor Biru Kementerian Energi	ya	ya	ya
23.	Rapor Menkeu dan Menperin Masih Merah	tidak	tidak	tidak
24.	Industri Pertahanan Siap Dibangun	ya	ya	ya
25.	Menpora Harus Seriusi Cabang Prioritas	tidak	tidak	tidak
26.	Seratus Hari ESDM Bukan Cuma Pemanis	tidak	tidak	tidak
27.	Pertamina Dukung Kebijakan Energi Nasional	ya	ya	tidak
28.	Genjot Produksi Untuk Jamin Keamanan Pasokan Energi	tidak	tidak	ya
29.	Pembenahan Layanan Kesehatan Terus Dilakukan	ya	tidak	ya
30.	Menanti Sinergi Pendidikan dan Dunia Kerja	ya	ya	ya
31.	Siaga Bencana Jadi Prioritas	ya	ya	ya
32.	Swasembada Tergantung Dana	ya	ya	ya
33.	Percepatan Infrastruktur Kuatkan Daya Saing	ya	ya	ya
34.	Tugas Berat Merumahkan Masyarakat	ya	ya	ya
35.	Keberhasilan KUR Tergantung Sosialisasi	ya	ya	ya
36.	Masih Jalan di Tempat	ya	ya	ya

Sumber : coding sheet

TABEL 46
Tabulasi Koding Sub Unit Analisis Unsur “How”
dalam Harian Seputar Indonesia

No	Judul Berita	Decoder	Coder 1	Coder 2
1.	Tim Ekonomi Mulai Konsolidasi	ya	ya	ya
2.	SBY Ingatkan Tidak Ada Keputusan Wapres	ya	ya	ya
3.	Tim Ekonomi Fokus Infrastruktur	ya	ya	ya
4.	Agenda 100 Hari Lebih Dipertajam	ya	ya	ya
5.	Mendiknas Janji Berikan 10.000 Beasiswa	ya	ya	ya
6.	Depag Siapkan Antisipasi Aliran Sesat	ya	ya	ya
7.	Anggaran Jangan Sampai Bengkok	tidak	tidak	ya
8.	SBY Prioritaskan 15 Program	ya	ya	ya
9.	SBY Deklarasikan Ganyang Mafia	ya	ya	ya
10.	Postur APBN 2010 Aman	ya	ya	ya
11.	Kasus KPK-Century Berdampak Negatif Bagi SBY	ya	ya	ya
12.	Kuntoro Rumuskan Tim Pemberantasan Mafia Hukum	ya	ya	ya
13.	Kinerja Hatta Rajasa Ungguli Agung-Djoko Suyanto	tidak	tidak	tidak
14.	Kasus KPK-Polri Rusak Program 100 Hari	ya	ya	ya
15.	Program 100 Hari Terganjil Dua “DC”	tidak	tidak	tidak
16.	Pemerintah Akan Gratiskan Paspor TKI	ya	ya	tidak
17.	Akbar Berharap Tuntas 100 Hari	tidak	tidak	tidak
18.	Depbudpar Gelar Festival Sasando	tidak	ya	tidak
19.	PDP Minta SBY Tegas Berantas Mafia Hukum	ya	ya	ya
20.	Program Depsos Jangan Basa-basi	tidak	tidak	tidak
21.	Kasus Century Tak Ganggu 100 Hari	ya	ya	ya
22.	Menteri Kelautan Klaim Sukses 100 Hari	ya	ya	ya
23.	Mensos Klaim Program 100 Hari Sukses	ya	ya	ya
24.	Mensos Fokus Tangani Anak Jalanan	ya	ya	ya
25.	100 Hari Bukan Ukuran Kinerja	ya	ya	ya
26.	Program 100 Hari Terpenuhi	ya	ya	ya
27.	Ekonom Nilai Program 100 Hari Belum Substansial	ya	ya	ya
28.	100 Hari Gagal Dilaksanakan	ya	ya	ya
29.	Century Tenggelamkan Program 100 Hari	ya	ya	ya
30.	Satgas Angkat Citra Pemerintah	ya	ya	ya
31.	Kepuasan Terhadap Kinerja Pemerintah Turun	ya	ya	ya
32.	PDIP Nilai Program 100 Hari Hanya Pencitraan	ya	ya	ya

Sumber : coding sheet

24) Tabulasi Koding Sub Unit Analisis “Kedekatan Psikografis”

TABEL 47
Tabulasi Koding Sub Unit Analisis “Kedekatan Psikografis”
dalam Harian Media Indonesia

No	Judul Berita	Decoder	Coder 1	Coder 2
1.	Menjaga Stabilitas Memanjakan Sektor Riil	tidak	tidak	tidak
2.	Menekan Kemiskinan Hingga 9% di 2014	tidak	tidak	tidak
3.	Mimpi Negara Industri Maju dan Harmonisasi Kebijakan	tidak	tidak	tidak
4.	Tim Ekonomi Janjikan Percepatan Infrastruktur	tidak	tidak	tidak
5.	National Summit Jadi Ajang Penajaman Program	tidak	tidak	tidak
6.	Depkeu Siapkan Fasilitas PPH untuk Industri Prioritas	tidak	tidak	tidak
7.	Mencari Tuan Rumah di Negeri Sendiri	tidak	tidak	tidak
8.	Perombakan Lembaga Hukum Jadi Keniscayaan	tidak	tidak	tidak
9.	Presiden Serukan Ganyang Mafia Hukum	tidak	tidak	tidak
10.	Jalur Selat Sunda Masuk Program 100 Hari	tidak	tidak	tidak
11.	Pemberantasan Mafia dan Pemerataan Ekonomi	tidak	tidak	tidak
12.	Menko Perekonomian Buka Akses Kinerja 100 Hari	tidak	tidak	tidak
13.	Kemudahan Pembebasan Tanah Harus Tuntas 100 Hari	tidak	tidak	tidak
14.	Dari Konservasi Alam Hingga Krisis Listrik	tidak	tidak	tidak
15.	Program 100 Hari Ekonomi Masih 60%	tidak	tidak	tidak
16.	Setengah Hati Mencari Energi Pengganti	tidak	tidak	tidak
17.	Layanan Publik yang Kian Mencemaskan	tidak	tidak	tidak
18.	Reformasi Harus Dimulai Dari Kantor Presiden	tidak	tidak	tidak
19.	Dikepung Skandal Bank Century	tidak	tidak	tidak
20.	Program 100 Hari Tidak Realistis	tidak	tidak	tidak
21.	Rencana Aksi Kementrian Perindustrian Mengecewakan	tidak	tidak	tidak
22.	Rapor Biru Kementerian Energi	tidak	tidak	tidak
23.	Rapor Menkeu dan Menperin Masih Merah	tidak	tidak	tidak
24.	Industri Pertahanan Siap Dibangun	tidak	tidak	tidak
25.	Menpora Harus Seriusi Cabang Prioritas	tidak	tidak	tidak
26.	Seratus Hari ESDM Bukan Cuma Pemanis	tidak	tidak	tidak
27.	Pertamina Dukung Kebijakan Energi Nasional	tidak	tidak	tidak
28.	Genjot Produksi Untuk Jamin Keamanan Pasokan Energi	tidak	tidak	tidak
29.	Pembenahan Layanan Kesehatan Terus Dilakukan	tidak	tidak	tidak
30.	Menanti Sinergi Pendidikan dan Dunia Kerja	tidak	tidak	tidak
31.	Siaga Bencana Jadi Prioritas	tidak	tidak	tidak
32.	Swasembada Tergantung Dana	tidak	tidak	tidak
33.	Percepatan Infrastruktur Kuatkan Daya Saing	tidak	tidak	tidak
34.	Tugas Berat Merumahkan Masyarakat	tidak	tidak	tidak
35.	Keberhasilan KUR Tergantung Sosialisasi	tidak	tidak	tidak
36.	Masih Jalan di Tempat	tidak	tidak	tidak

Sumber : coding sheet

TABEL 48
Tabulasi Koding Sub Unit Analisis “Kedekatan Psikografis”
dalam Harian Seputar Indonesia

No	Judul Berita	Decoder	Coder 1	Coder 2
1.	Tim Ekonomi Mulai Konsolidasi	tidak	tidak	tidak
2.	SBY Ingatkan Tidak Ada Keputusan Wapres	tidak	tidak	tidak
3.	Tim Ekonomi Fokus Infrastruktur	tidak	tidak	tidak
4.	Agenda 100 Hari Lebih Dipertajam	tidak	tidak	tidak
5.	Mendiknas Janji Berikan 10.000 Beasiswa	tidak	tidak	tidak
6.	Depag Siapkan Antisipasi Aliran Sesat	tidak	tidak	tidak
7.	Anggaran Jangan Sampai Bengkok	tidak	tidak	tidak
8.	SBY Prioritaskan 15 Program	tidak	tidak	tidak
9.	SBY Deklarasikan Ganyang Mafia	tidak	tidak	tidak
10.	Postur APBN 2010 Aman	tidak	tidak	tidak
11.	Kasus KPK-Century Berdampak Negatif Bagi SBY	tidak	tidak	tidak
12.	Kuntoro Rumuskan Tim Pemberantasan Mafia Hukum	tidak	tidak	tidak
13.	Kinerja Hatta Rajasa Ungguli Agung-Djoko Suyanto	tidak	tidak	tidak
14.	Kasus KPK-Polri Rusak Program 100 Hari	tidak	tidak	tidak
15.	Program 100 Hari Terganjil Dua “DC”	tidak	tidak	tidak
16.	Pemerintah Akan Gratiskan Paspor TKI	tidak	tidak	tidak
17.	Akbar Berharap Tuntas 100 Hari	tidak	tidak	tidak
18.	Depbudpar Gelar Festival Sasando	tidak	tidak	tidak
19.	PDP Minta SBY Tegas Berantas Mafia Hukum	tidak	tidak	tidak
20.	Program Depsos Jangan Basa-basi	tidak	tidak	tidak
21.	Kasus Century Tak Ganggu 100 Hari	tidak	tidak	tidak
22.	Menteri Kelautan Klaim Sukses 100 Hari	tidak	tidak	tidak
23.	Mensos Klaim Program 100 Hari Sukses	tidak	tidak	tidak
24.	Mensos Fokus Tangani Anak Jalanan	tidak	tidak	tidak
25.	100 Hari Bukan Ukuran Kinerja	tidak	tidak	tidak
26.	Program 100 Hari Terpenuhi	tidak	tidak	tidak
27.	Ekonom Nilai Program 100 Hari Belum Substansial	tidak	tidak	tidak
28.	100 Hari Gagal Dilaksanakan	tidak	tidak	tidak
29.	Century Tenggelamkan Program 100 Hari	tidak	tidak	tidak
30.	Satgas Angkat Citra Pemerintah	tidak	tidak	tidak
31.	Kepuasan Terhadap Kinerja Pemerintah Turun	tidak	tidak	tidak
32.	PDIP Nilai Program 100 Hari Hanya Pencitraan	tidak	tidak	tidak

Sumber : *coding sheet*

25) Tabulasi Koding Sub Unit Analisis “Kedekatan Geografis”

TABEL 49
Tabulasi Koding Sub Unit Analisis “Kedekatan Geografis”
dalam Harian Media Indonesia

No	Judul Berita	Decoder	Coder 1	Coder 2
1.	Menjaga Stabilitas Memanjakan Sektor Riil	ya	ya	ya
2.	Menekan Kemiskinan Hingga 9% di 2014	ya	ya	ya
3.	Mimpi Negara Industri Maju dan Harmonisasi Kebijakan	ya	ya	ya
4.	Tim Ekonomi Janjikan Percepatan Infrastruktur	ya	ya	ya
5.	<i>National Summit</i> Jadi Ajang Penajaman Program	ya	ya	ya
6.	Depkeu Siapkan Fasilitas PPh untuk Industri Prioritas	ya	ya	ya
7.	Mencari Tuan Rumah di Negeri Sendiri	ya	ya	ya
8.	Perombakan Lembaga Hukum Jadi Keniscayaan	ya	ya	ya
9.	Presiden Serukan Ganyang Mafia Hukum	ya	ya	ya
10.	Jalur Selat Sunda Masuk Program 100 Hari	ya	ya	ya
11.	Pemberantasan Mafia dan Pemerataan Ekonomi	ya	ya	ya
12.	Menko Perekonomian Buka Akses Kinerja 100 Hari	ya	ya	ya
13.	Kemudahan Pembebasan Tanah Harus Tuntas 100 Hari	ya	ya	ya
14.	Dari Konservasi Alam Hingga Krisis Listrik	ya	ya	ya
15.	Program 100 Hari Ekonomi Masih 60%	ya	ya	ya
16.	Setengah Hati Mencari Energi Pengganti	ya	ya	ya
17.	Layanan Publik yang Kian Mencemaskan	ya	ya	ya
18.	Reformasi Harus Dimulai Dari Kantor Presiden	ya	ya	ya
19.	Dikepung Skandal Bank <i>Century</i>	ya	ya	ya
20.	Program 100 Hari Tidak Realistis	ya	ya	ya
21.	Rencana Aksi Kementrian Perindustrian Mengecewakan	ya	ya	ya
22.	Rapor Biru Kementerian Energi	ya	ya	ya
23.	Rapor Menkeu dan Menperin Masih Merah	ya	ya	ya
24.	Industri Pertahanan Siap Dibangun	ya	ya	ya
25.	Menpora Harus Seriusi Cabang Prioritas	ya	ya	ya
26.	Seratus Hari ESDM Bukan Cuma Pemanis	ya	ya	ya
27.	Pertamina Dukung Kebijakan Energi Nasional	ya	ya	ya
28.	Genjot Produksi Untuk Jamin Keamanan Pasokan Energi	ya	ya	ya
29.	Pembenahan Layanan Kesehatan Terus Dilakukan	ya	ya	ya
30.	Menanti Sinergi Pendidikan dan Dunia Kerja	ya	ya	ya
31.	Siaga Bencana Jadi Prioritas	ya	ya	ya
32.	Swasembada Tergantung Dana	ya	ya	ya
33.	Percepatan Infrastruktur Kuatkan Daya Saing	ya	ya	ya
34.	Tugas Berat Merumahkan Masyarakat	ya	ya	ya
35.	Keberhasilan KUR Tergantung Sosialisasi	ya	ya	ya
36.	Masih Jalan di Tempat	ya	ya	ya

Sumber : *coding sheet*

TABEL 50
Tabulasi Koding Sub Unit Analisis “Kedekatan Geografis”
dalam Harian Seputar Indonesia

No	Judul Berita	Decoder	Coder 1	Coder 2
1.	Tim Ekonomi Mulai Konsolidasi	ya	ya	ya
2.	SBY Ingatkan Tidak Ada Keputusan Wapres	ya	ya	ya
3.	Tim Ekonomi Fokus Infrastruktur	ya	ya	ya
4.	Agenda 100 Hari Lebih Dipertajam	ya	ya	ya
5.	Mendiknas Janji Berikan 10.000 Beasiswa	ya	ya	ya
6.	Depag Siapkan Antisipasi Aliran Sesat	ya	ya	ya
7.	Anggaran Jangan Sampai Bengkak	ya	ya	ya
8.	SBY Prioritaskan 15 Program	ya	ya	ya
9.	SBY Deklarasikan Ganyang Mafia	ya	ya	ya
10.	Postur APBN 2010 Aman	ya	ya	ya
11.	Kasus KPK-Century Berdampak Negatif Bagi SBY	ya	ya	ya
12.	Kuntoro Rumuskan Tim Pemberantasan Mafia Hukum	ya	ya	ya
13.	Kinerja Hatta Rajasa Ungguli Agung-Djoko Suyanto	ya	ya	ya
14.	Kasus KPK-Polri Rusak Program 100 Hari	ya	ya	ya
15.	Program 100 Hari Terganjil Dua “DC”	ya	ya	ya
16.	Pemerintah Akan Gratiskan Paspor TKI	ya	ya	ya
17.	Akbar Berharap Tuntas 100 Hari	ya	ya	ya
18.	Depbudpar Gelar Festival Sasando	ya	ya	ya
19.	PDP Minta SBY Tegas Berantas Mafia Hukum	ya	ya	ya
20.	Program Depsos Jangan Basa-basi	ya	ya	ya
21.	Kasus Century Tak Ganggu 100 Hari	ya	ya	ya
22.	Menteri Kelautan Klaim Sukses 100 Hari	ya	ya	ya
23.	Mensos Klaim Program 100 Hari Sukses	ya	ya	ya
24.	Mensos Fokus Tangani Anak Jalanan	ya	ya	ya
25.	100 Hari Bukan Ukuran Kinerja	ya	ya	ya
26.	Program 100 Hari Terpenuhi	ya	ya	ya
27.	Ekonom Nilai Program 100 Hari Belum Substansial	ya	ya	ya
28.	100 Hari Gagal Dilaksanakan	ya	ya	ya
29.	Century Tenggelamkan Program 100 Hari	ya	ya	ya
30.	Satgas Angkat Citra Pemerintah	ya	ya	ya
31.	Kepuasan Terhadap Kinerja Pemerintah Turun	ya	ya	ya
32.	PDIP Nilai Program 100 Hari Hanya Pencitraan	ya	ya	ya

Sumber : *coding sheet*

26) Tabulasi Koding Sub Unit Analisis “Aktualitas Objektif”

TABEL 51

Tabulasi Koding Sub Unit Analisis “Aktualitas Objektif”
dalam Harian Media Indonesia

No	Judul Berita	Decoder	Coder 1	Coder 2
1.	Menjaga Stabilitas Memanjakan Sektor Riil	ya	ya	ya
2.	Menekan Kemiskinan Hingga 9% di 2014	ya	ya	ya
3.	Mimpi Negara Industri Maju dan Harmonisasi Kebijakan	ya	ya	ya
4.	Tim Ekonomi Janjikan Percepatan Infrastruktur	ya	ya	ya
5.	<i>National Summit</i> Jadi Ajang Penajaman Program	ya	ya	ya
6.	Depkeu Siapkan Fasilitas PPh untuk Industri Prioritas	ya	ya	ya
7.	Mencari Tuan Rumah di Negeri Sendiri	tidak	tidak	ya
8.	Perombakan Lembaga Hukum Jadi Keniscayaan	ya	ya	ya
9.	Presiden Serukan Ganyang Mafia Hukum	ya	ya	ya
10.	Jalur Selat Sunda Masuk Program 100 Hari	ya	ya	ya
11.	Pemberantasan Mafia dan Pemerataan Ekonomi	ya	ya	ya
12.	Menko Perckonomian Buka Akses Kinerja 100 Hari	ya	ya	ya
13.	Kemudahan Pembebasan Tanah Harus Tuntas 100 Hari	ya	ya	ya
14.	Dari Konservasi Alam Hingga Krisis Listrik	ya	ya	ya
15.	Program 100 Hari Ekonomi Masih 60%	ya	ya	ya
16.	Setengah Hati Mencari Energi Pengganti	ya	ya	ya
17.	Layanan Publik yang Kian Mencemaskan	ya	ya	ya
18.	Reformasi Harus Dimulai Dari Kantor Presiden	ya	ya	ya
19.	Dikepung Skandal Bank <i>Century</i>	ya	ya	ya
20.	Program 100 Hari Tidak Realistis	ya	ya	ya
21.	Rencana Aksi Kementrian Perindustrian Mengecewakan	ya	ya	ya
22.	Rapor Biru Kementerian Energi	ya	ya	ya
23.	Rapor Menkeu dan Menperin Masih Merah	ya	ya	ya
24.	Industri Pertahanan Siap Dibangun	ya	ya	ya
25.	Menpora Harus Seriusi Cabang Prioritas	ya	ya	ya
26.	Seratus Hari ESDM Bukan Cuma Pemanis	ya	ya	ya
27.	Pertamina Dukung Kebijakan Energi Nasional	ya	ya	ya
28.	Genjot Produksi Untuk Jamin Keamanan Pasokan Energi	ya	ya	ya
29.	Pembenahan Layanan Kesehatan Terus Dilakukan	ya	ya	ya
30.	Menanti Sinergi Pendidikan dan Dunia Kerja	ya	ya	ya
31.	Siaga Bencana Jadi Prioritas	ya	ya	ya
32.	Swasembada Tergantung Dana	ya	ya	ya
33.	Percepatan Infrastruktur Kuatkan Daya Saing	ya	ya	ya
34.	Tugas Berat Merumahkan Masyarakat	ya	ya	ya
35.	Keberhasilan KUR Tergantung Sosialisasi	ya	ya	ya
36.	Masih Jalan di Tempat	ya	ya	ya

Sumber : *coding sheet*

TABEL 52
Tabulasi Koding Sub Unit Analisis “Aktualitas Objektif”
dalam Harian Seputar Indonesia

No	Judul Berita	Decoder	Coder 1	Coder 2
1.	Tim Ekonomi Mulai Konsolidasi	ya	ya	ya
2.	SBY Ingatkan Tidak Ada Keputusan Wapres	ya	ya	ya
3.	Tim Ekonomi Fokus Infrastruktur	ya	ya	ya
4.	Agenda 100 Hari Lebih Dipertajam	ya	ya	ya
5.	Mendiknas Janji Berikan 10.000 Beasiswa	ya	ya	ya
6.	Depag Siapkan Antisipasi Aliran Sesat	ya	ya	ya
7.	Anggaran Jangan Sampai Bengkak	ya	ya	ya
8.	SBY Prioritaskan 15 Program	ya	ya	ya
9.	SBY Deklarasikan Ganyang Mafia	ya	ya	ya
10.	Postur APBN 2010 Aman	ya	ya	ya
11.	Kasus KPK-Century Berdampak Negatif Bagi SBY	ya	ya	ya
12.	Kuntoro Rumuskan Tim Pemberantasan Mafia Hukum	ya	ya	ya
13.	Kinerja Hatta Rajasa Ungguli Agung-Djoko Suyanto	ya	ya	ya
14.	Kasus KPK-Polri Rusak Program 100 Hari	ya	ya	ya
15.	Program 100 Hari Terganjil Dua “DC”	ya	ya	ya
16.	Pemerintah Akan Gratiskan Paspor TKI	ya	ya	ya
17.	Akbar Berharap Tuntas 100 Hari	ya	ya	ya
18.	Depbudpar Gelar Festival Sasando	ya	ya	ya
19.	PDP Minta SBY Tegas Berantas Mafia Hukum	ya	ya	ya
20.	Program Depsos Jangan Basa-basi	ya	ya	ya
21.	Kasus Century Tak Ganggu 100 Hari	ya	ya	ya
22.	Menteri Kelautan Klaim Sukses 100 Hari	ya	ya	ya
23.	Mensos Klaim Program 100 Hari Sukses	ya	ya	ya
24.	Mensos Fokus Tangani Anak Jalanan	ya	ya	ya
25.	100 Hari Bukan Ukuran Kinerja	ya	ya	ya
26.	Program 100 Hari Terpenuhi	ya	ya	ya
27.	Ekonom Nilai Program 100 Hari Belum Substansial	ya	ya	ya
28.	100 Hari Gagal Dilaksanakan	ya	ya	ya
29.	Century Tenggelamkan Program 100 Hari	ya	ya	ya
30.	Satgas Angkat Citra Pemerintah	ya	ya	ya
31.	Kepuasan Terhadap Kinerja Pemerintah Turun	ya	ya	ya
32.	PDIP Nilai Program 100 Hari Hanya Pencitraan	ya	ya	ya

Sumber : coding sheet

27) Tabulasi Koding Sub Unit Analisis “Aktualitas Subjektif”

TABEL 53
Tabulasi Koding Sub Unit Analisis “Aktualitas Subjektif”
dalam Harian Media Indonesia

No	Judul Berita	Decoder	Coder 1	Coder 2
1.	Menjaga Stabilitas Memanjakan Sektor Riil	tidak	tidak	tidak
2.	Menekan Kemiskinan Hingga 9% di 2014	tidak	tidak	tidak
3.	Mimpi Negara Industri Maju dan Harmonisasi Kebijakan	tidak	tidak	tidak
4.	Tim Ekonomi Janjikan Percepatan Infrastruktur	tidak	tidak	tidak
5.	<i>National Summit</i> Jadi Ajang Penajaman Program	tidak	tidak	tidak
6.	Depkeu Siapkan Fasilitas PPh untuk Industri Prioritas	tidak	tidak	tidak
7.	Mencari Tuan Rumah di Negeri Sendiri	ya	ya	tidak
8.	Perombakan Lembaga Hukum Jadi Keniscayaan	tidak	tidak	tidak
9.	Presiden Serukan Ganyang Mafia Hukum	tidak	tidak	tidak
10.	Jalur Selat Sunda Masuk Program 100 Hari	tidak	tidak	tidak
11.	Pemberantasan Mafia dan Pemerataan Ekonomi	tidak	tidak	tidak
12.	Menko Perekonomian Buka Akses Kinerja 100 Hari	tidak	tidak	tidak
13.	Kemudahan Pembebasan Tanah Harus Tuntas 100 Hari	tidak	tidak	tidak
14.	Dari Konservasi Alam Hingga Krisis Listrik	tidak	tidak	tidak
15.	Program 100 Hari Ekonomi Masih 60%	tidak	tidak	tidak
16.	Setengah Hati Mencari Energi Pengganti	tidak	tidak	tidak
17.	Layanan Publik yang Kian Mencemaskan	tidak	tidak	tidak
18.	Reformasi Harus Dimulai Dari Kantor Presiden	tidak	tidak	tidak
19.	Dikepung Skandal Bank <i>Century</i>	tidak	tidak	tidak
20.	Program 100 Hari Tidak Realistis	tidak	tidak	tidak
21.	Rencana Aksi Kementerian Perindustrian Mengecewakan	tidak	tidak	tidak
22.	Rapor Biru Kementerian Energi	tidak	tidak	tidak
23.	Rapor Menkeu dan Menperin Masih Merah	tidak	tidak	tidak
24.	Industri Pertahanan Siap Dibangun	tidak	tidak	tidak
25.	Menpora Harus Seriusi Cabang Prioritas	tidak	tidak	tidak
26.	Seratus Hari ESDM Bukan Cuma Pemanis	tidak	tidak	tidak
27.	Pertamina Dukung Kebijakan Energi Nasional	tidak	tidak	tidak
28.	Genjot Produksi Untuk Jamin Keamanan Pasokan Energi	tidak	tidak	tidak
29.	Pembenahan Layanan Kesehatan Terus Dilakukan	tidak	tidak	tidak
30.	Menanti Sinergi Pendidikan dan Dunia Kerja	tidak	tidak	tidak
31.	Siaga Bencana Jadi Prioritas	tidak	tidak	tidak
32.	Swasembada Tergantung Dana	tidak	tidak	tidak
33.	Percepatan Infrastruktur Kuatkan Daya Saing	tidak	tidak	tidak
34.	Tugas Berat Merumahkan Masyarakat	tidak	tidak	tidak
35.	Keberhasilan KUR Tergantung Sosialisasi	tidak	tidak	tidak
36.	Masih Jalan di Tempat	tidak	tidak	tidak

Sumber : *coding sheet*

TABEL 54
Tabulasi Koding Sub Unit Analisis “Aktualitas Subjektif”
dalam Harian Seputar Indonesia

No	Judul Berita	Decoder	Coder 1	Coder 2
1.	Tim Ekonomi Mulai Konsolidasi	tidak	tidak	tidak
2.	SBY Ingatkan Tidak Ada Keputusan Wapres	tidak	tidak	tidak
3.	Tim Ekonomi Fokus Infrastruktur	tidak	tidak	tidak
4.	Agenda 100 Hari Lebih Dipertajam	tidak	tidak	tidak
5.	Mendiknas Janji Berikan 10.000 Beasiswa	tidak	tidak	tidak
6.	Depag Siapkan Antisipasi Aliran Sesat	tidak	tidak	tidak
7.	Anggaran Jangan Sampai Bengkak	tidak	tidak	tidak
8.	SBY Prioritaskan 15 Program	tidak	tidak	tidak
9.	SBY Deklarasikan Ganyang Mafia	tidak	tidak	tidak
10.	Postur APBN 2010 Aman	tidak	tidak	tidak
11.	Kasus KPK-Century Berdampak Negatif Bagi SBY	tidak	tidak	tidak
12.	Kuntoro Rumuskan Tim Pemberantasan Mafia Hukum	tidak	tidak	tidak
13.	Kinerja Hatta Rajasa Ungguli Agung-Djoko Suyanto	tidak	tidak	tidak
14.	Kasus KPK-Polri Rusak Program 100 Hari	tidak	tidak	tidak
15.	Program 100 Hari Terganjil Dua “DC”	tidak	tidak	tidak
16.	Pemerintah Akan Gratiskan Paspor TKI	tidak	tidak	tidak
17.	Akbar Berharap Tuntas 100 Hari	tidak	tidak	tidak
18.	Depbudpar Gelar Festival Sasando	tidak	tidak	tidak
19.	PDP Minta SBY Tegas Berantas Mafia Hukum	tidak	tidak	tidak
20.	Program Depsos Jangan Basa-basi	tidak	tidak	tidak
21.	Kasus Century Tak Ganggu 100 Hari	tidak	tidak	tidak
22.	Menteri Kelautan Klaim Sukses 100 Hari	tidak	tidak	tidak
23.	Mensos Klaim Program 100 Hari Sukses	tidak	tidak	tidak
24.	Mensos Fokus Tangani Anak Jalanan	tidak	tidak	tidak
25.	100 Hari Bukan Ukuran Kinerja	tidak	tidak	tidak
26.	Program 100 Hari Terpenuhi	tidak	tidak	tidak
27.	Ekonom Nilai Program 100 Hari Belum Substansial	tidak	tidak	tidak
28.	100 Hari Gagal Dilaksanakan	tidak	tidak	tidak
29.	Century Tenggelamkan Program 100 Hari	tidak	tidak	tidak
30.	Satgas Angkat Citra Pemerintah	tidak	tidak	tidak
31.	Kepuasan Terhadap Kinerja Pemerintah Turun	tidak	tidak	tidak
32.	PDIP Nilai Program 100 Hari Hanya Pencitraan	tidak	tidak	tidak

Sumber : *coding sheet*

28) Tabulasi Koding Sub Unit Analisis “Significance”

TABEL 55
 Tabulasi Koding Sub Unit Analisis “Significance”
 dalam Harian Media Indonesia

No	Judul Berita	Decoder	Coder 1	Coder 2
1.	Menjaga Stabilitas Memanjakan Sektor Riil	ya	ya	ya
2.	Menekan Kemiskinan Hingga 9% di 2014	ya	ya	ya
3.	Mimpi Negara Industri Maju dan Harmonisasi Kebijakan	ya	ya	ya
4.	Tim Ekonomi Janjikan Percepatan Infrastruktur	ya	ya	ya
5.	National Summit Jadi Ajang Penajaman Program	ya	ya	ya
6.	Depkeu Siapkan Fasilitas PPh untuk Industri Prioritas	ya	ya	ya
7.	Mencari Tuan Rumah di Negeri Sendiri	ya	ya	ya
8.	Perombakan Lembaga Hukum Jadi Keniscayaan	ya	ya	ya
9.	Presiden Serukan Ganyang Mafia Hukum	ya	ya	ya
10.	Jalur Selat Sunda Masuk Program 100 Hari	ya	ya	ya
11.	Pemberantasan Mafia dan Pemerataan Ekonomi	ya	ya	ya
12.	Menko Perekonomian Buka Akses Kinerja 100 Hari	ya	ya	ya
13.	Kemudahan Pembebasan Tanah Harus Tuntas 100 Hari	ya	ya	ya
14.	Dari Konservasi Alam Hingga Krisis Listrik	ya	ya	ya
15.	Program 100 Hari Ekonomi Masih 60%	ya	ya	ya
16.	Setengah Hati Mencari Energi Pengganti	ya	ya	ya
17.	Layanan Publik yang Kian Mencemaskan	ya	ya	ya
18.	Reformasi Harus Dimulai Dari Kantor Presiden	ya	ya	ya
19.	Dikepung Skandal Bank Century	ya	ya	ya
20.	Program 100 Hari Tidak Realistis	ya	ya	ya
21.	Rencana Aksi Kementrian Perindustrian Mengecewakan	ya	ya	ya
22.	Rapor Biru Kementerian Energi	ya	ya	ya
23.	Rapor Menkeu dan Menperin Masih Merah	ya	ya	ya
24.	Industri Pertahanan Siap Dibangun	ya	ya	ya
25.	Menpora Harus Seriusi Cabang Prioritas	ya	ya	ya
26.	Seratus Hari ESDM Bukan Cuma Pemanis	ya	ya	ya
27.	Pertamina Dukung Kebijakan Energi Nasional	ya	ya	ya
28.	Genjot Produksi Untuk Jamin Keamanan Pasokan Energi	ya	ya	ya
29.	Pembenahan Layanan Kesehatan Terus Dilakukan	ya	ya	ya
30.	Menanti Sinergi Pendidikan dan Dunia Kerja	ya	ya	ya
31.	Siaga Bencana Jadi Prioritas	ya	ya	ya
32.	Swasembada Tergantung Dana	ya	ya	ya
33.	Percepatan Infrastruktur Kuatkan Daya Saing	ya	ya	ya
34.	Tugas Berat Merumahkan Masyarakat	ya	ya	ya
35.	Keberhasilan KUR Tergantung Sosialisasi	ya	ya	ya
36.	Masih Jalan di Tempat	ya	ya	ya

Sumber : coding sheet

TABEL 56
Tabulasi Koding Sub Unit Analisis “Significance”
dalam Harian Seputar Indonesia

No	Judul Berita	Decoder	Coder 1	Coder 2
1.	Tim Ekonomi Mulai Konsolidasi	ya	ya	ya
2.	SBY Ingatkan Tidak Ada Keputusan Wapres	ya	ya	ya
3.	Tim Ekonomi Fokus Infrastruktur	ya	ya	ya
4.	Agenda 100 Hari Lebih Dipertajam	ya	ya	ya
5.	Mendiknas Janji Berikan 10.000 Beasiswa	ya	ya	ya
6.	Depag Siapkan Antisipasi Aliran Sesat	ya	ya	ya
7.	Anggaran Jangan Sampai Bengkak	ya	ya	ya
8.	SBY Prioritaskan 15 Program	ya	ya	ya
9.	SBY Deklarasikan Ganyang Mafia	ya	ya	ya
10.	Postur APBN 2010 Aman	ya	ya	ya
11.	Kasus KPK-Century Berdampak Negatif Bagi SBY	ya	ya	ya
12.	Kuntoro Rumuskan Tim Pemberantasan Mafia Hukum	ya	ya	ya
13.	Kincirja Hatta Rajasa Ungguli Agung-Djoko Suyanto	ya	ya	ya
14.	Kasus KPK-Polri Rusak Program 100 Hari	ya	ya	ya
15.	Program 100 Hari Terganjil Dua “DC”	ya	ya	ya
16.	Pemerintah Akan Gratiskan Paspor TKI	ya	ya	ya
17.	Akbar Berharap Tuntas 100 Hari	ya	ya	ya
18.	Depbudpar Gelar Festival Sasando	ya	ya	ya
19.	PDP Minta SBY Tegas Berantas Mafia Hukum	ya	ya	ya
20.	Program Depsos Jangan Basa-basi	ya	ya	ya
21.	Kasus Century Tak Ganggu 100 Hari	ya	ya	ya
22.	Menteri Kelautan Klaim Sukses 100 Hari	ya	ya	ya
23.	Mensos Klaim Program 100 Hari Sukses	ya	ya	ya
24.	Mensos Fokus Tangani Anak Jalanan	ya	ya	ya
25.	100 Hari Bukan Ukuran Kinerja	ya	ya	ya
26.	Program 100 Hari Terpenuhi	ya	ya	ya
27.	Ekonom Nilai Program 100 Hari Belum Substansial	ya	ya	ya
28.	100 Hari Gagal Dilaksanakan	ya	ya	ya
29.	Century Tenggelamkan Program 100 Hari	ya	ya	ya
30.	Satgas Angkat Citra Pemerintah	ya	ya	ya
31.	Kepuasan Terhadap Kinerja Pemerintah Turun	ya	ya	ya
32.	PDIP Nilai Program 100 Hari Hanya Pencitraan	ya	ya	ya

Sumber : coding sheet

29) Tabulasi Koding Sub Unit Analisis “Prominence”

TABEL 57
 Tabulasi Koding Sub Unit Analisis “Prominence”
 dalam Harian Media Indonesia

No	Judul Berita	Decoder	Coder 1	Coder 2
1.	Menjaga Stabilitas Memanjakan Sektor Riil	ya	ya	ya
2.	Menekan Kemiskinan Hingga 9% di 2014	ya	ya	ya
3.	Mimpi Negara Industri Maju dan Harmonisasi Kebijakan	ya	ya	ya
4.	Tim Ekonomi Janjikan Percepatan Infrastruktur	ya	ya	ya
5.	National Summit Jadi Ajang Penajaman Program	ya	ya	ya
6.	Depkeu Siapkan Fasilitas PPh untuk Industri Prioritas	ya	ya	ya
7.	Mencari Tuan Rumah di Negeri Sendiri	ya	ya	ya
8.	Perombakan Lembaga Hukum Jadi Keniscayaan	ya	ya	ya
9.	Presiden Scrukan Ganyang Mafia Hukum	ya	ya	ya
10.	Jalur Selat Sunda Masuk Program 100 Hari	ya	ya	ya
11.	Pemberantasan Mafia dan Pemerataan Ekonomi	ya	ya	ya
12.	Menko Perekonomian Buka Akses Kinerja 100 Hari	ya	ya	ya
13.	Kemudahan Pembebasan Tanah Harus Tuntas 100 Hari	ya	ya	ya
14.	Dari Konservasi Alam Hingga Krisis Listrik	ya	ya	ya
15.	Program 100 Hari Ekonomi Masih 60%	ya	ya	ya
16.	Setengah Hati Mencari Energi Pengganti	ya	ya	ya
17.	Layanan Publik yang Kian Mencemaskan	ya	ya	ya
18.	Reformasi Harus Dimulai Dari Kantor Presiden	ya	ya	ya
19.	Dikepung Skandal Bank Century	ya	ya	ya
20.	Program 100 Hari Tidak Realistis	ya	ya	ya
21.	Rencana Aksi Kementrian Perindustrian Mengecewakan	ya	ya	ya
22.	Rapor Biru Kementerian Energi	ya	ya	ya
23.	Rapor Menkeu dan Menperin Masih Merah	ya	ya	ya
24.	Industri Pertahanan Siap Dibangun	ya	ya	ya
25.	Menpora Harus Seriusi Cabang Prioritas	ya	ya	ya
26.	Seratus Hari ESDM Bukan Cuma Pemanis	ya	ya	ya
27.	Pertamina Dukung Kebijakan Energi Nasional	ya	ya	ya
28.	Genjot Produksi Untuk Jamin Keamanan Pasokan Energi	ya	ya	ya
29.	Pembenahan Layanan Kesehatan Terus Dilakukan	ya	ya	ya
30.	Menanti Sinergi Pendidikan dan Dunia Kerja	ya	ya	ya
31.	Siaga Bencana Jadi Prioritas	ya	ya	ya
32.	Swasembada Tergantung Dana	ya	ya	ya
33.	Percepatan Infrastruktur Kuatkan Daya Saing	ya	ya	ya
34.	Tugas Berat Merumahkan Masyarakat	ya	ya	ya
35.	Keberhasilan KUR Tergantung Sosialisasi	ya	ya	ya
36.	Masih Jalan di Tempat	ya	ya	ya

Sumber : coding sheet

TABEL 58
Tabulasi Koding Sub Unit Analisis “Prominence”
dalam Harian Seputar Indonesia

No	Judul Berita	Decoder	Coder 1	Coder 2
1.	Tim Ekonomi Mulai Konsolidasi	ya	ya	ya
2.	SBY Ingatkan Tidak Ada Keputusan Wapres	ya	ya	ya
3.	Tim Ekonomi Fokus Infrastruktur	ya	ya	ya
4.	Agenda 100 Hari Lebih Dipertajam	ya	ya	ya
5.	Mendiknas Janji Berikan 10.000 Beasiswa	ya	ya	ya
6.	Depag Siapkan Antisipasi Aliran Sesat	ya	ya	ya
7.	Anggaran Jangan Sampai Bengkok	ya	ya	ya
8.	SBY Prioritaskan 15 Program	ya	ya	ya
9.	SBY Deklarasikan Ganyang Mafia	ya	ya	ya
10.	Postur APBN 2010 Aman	ya	ya	ya
11.	Kasus KPK-Century Berdampak Negatif Bagi SBY	ya	ya	ya
12.	Kuntoro Rumuskan Tim Pemberantasan Mafia Hukum	ya	ya	ya
13.	Kinerja Hatta Rajasa Ungguli Agung-Djoko Suyanto	ya	ya	ya
14.	Kasus KPK-Polri Rusak Program 100 Hari	ya	ya	ya
15.	Program 100 Hari Terganjil Dua “DC”	ya	ya	ya
16.	Pemerintah Akan Gratiskan Paspor TKI	ya	ya	ya
17.	Akbar Berharap Tuntas 100 Hari	ya	ya	ya
18.	Depbudpar Gelar Festival Sasando	ya	ya	ya
19.	PDP Minta SBY Tegas Berantas Mafia Hukum	ya	ya	ya
20.	Program Depsos Jangan Basa-basi	ya	ya	ya
21.	Kasus Century Tak Ganggu 100 Hari	ya	ya	ya
22.	Menteri Kelautan Klaim Sukses 100 Hari	ya	ya	ya
23.	Mensos Klaim Program 100 Hari Sukses	ya	ya	ya
24.	Mensos Fokus Tangani Anak Jalanan	ya	ya	ya
25.	100 Hari Bukan Ukuran Kinerja	ya	ya	ya
26.	Program 100 Hari Terpenuhi	ya	ya	ya
27.	Ekonom Nilai Program 100 Hari Belum Substansial	ya	ya	ya
28.	100 Hari Gagal Dilaksanakan	ya	ya	ya
29.	Century Tenggelamkan Program 100 Hari	ya	ya	ya
30.	Satgas Angkat Citra Pemerintah	ya	ya	ya
31.	Kepuasan Terhadap Kinerja Pemerintah Turun	ya	ya	ya
32.	PDIP Nilai Program 100 Hari Hanya Pencitraan	ya	ya	ya

Sumber : coding sheet

30) Tabulasi Koding Sub Unit Analisis “Magnitude”

TABEL 59
 Tabulasi Koding Sub Unit Analisis “Magnitude”
 dalam Harian Media Indonesia

No	Judul Berita	Decoder	Coder 1	Coder 2
1.	Menjaga Stabilitas Memanjakan Sektor Riil	ya	ya	ya
2.	Menekan Kemiskinan Hingga 9% di 2014	ya	ya	ya
3.	Mimpi Negara Industri Maju dan Harmonisasi Kebijakan	ya	ya	ya
4.	Tim Ekonomi Janjikan Percepatan Infrastruktur	ya	ya	ya
5.	National Summit Jadi Ajang Penajaman Program	ya	ya	ya
6.	Depkeu Siapkan Fasilitas PPh untuk Industri Prioritas	ya	ya	ya
7.	Mencari Tuan Rumah di Negeri Sendiri	ya	ya	ya
8.	Perombakan Lembaga Hukum Jadi Keniscayaan	ya	ya	ya
9.	Presiden Serukan Ganyang Mafia Hukum	ya	ya	ya
10.	Jalur Selat Sunda Masuk Program 100 Hari	tidak	tidak	tidak
11.	Pemberantasan Mafia dan Pemerataan Ekonomi	tidak	tidak	tidak
12.	Menko Perekonomian Buka Akses Kinerja 100 Hari	ya	ya	ya
13.	Kemudahan Pembebasan Tanah Harus Tuntas 100 Hari	ya	ya	ya
14.	Dari Konservasi Alam Hingga Krisis Listrik	ya	ya	ya
15.	Program 100 Hari Ekonomi Masih 60%	ya	ya	ya
16.	Setengah Hati Mencari Energi Pengganti	ya	ya	ya
17.	Layanan Publik yang Kian Mencemaskan	ya	ya	ya
18.	Reformasi Harus Dimulai Dari Kantor Presiden	ya	ya	ya
19.	Dikepung Skandal Bank Century	ya	ya	ya
20.	Program 100 Hari Tidak Realistis	ya	ya	tidak
21.	Rencana Aksi Kementerian Perindustrian Mengecewakan	ya	ya	ya
22.	Rapor Biru Kementerian Energi	ya	ya	ya
23.	Rapor Menkeu dan Menperin Masih Merah	tidak	tidak	tidak
24.	Industri Pertahanan Siap Dibangun	ya	ya	ya
25.	Menpora Harus Seriusi Cabang Prioritas	ya	ya	ya
26.	Seratus Hari ESDM Bukan Cuma Pemanis	ya	ya	ya
27.	Pertamina Dukung Kebijakan Energi Nasional	ya	ya	ya
28.	Genjot Produksi Untuk Jamin Keamanan Pasokan Energi	ya	ya	ya
29.	Pembenahan Layanan Kesehatan Terus Dilakukan	ya	ya	ya
30.	Menanti Sinergi Pendidikan dan Dunia Kerja	ya	ya	ya
31.	Siaga Bencana Jadi Prioritas	ya	ya	ya
32.	Swasembada Tergantung Dana	ya	ya	ya
33.	Percepatan Infrastruktur Kuatkan Daya Saing	ya	ya	ya
34.	Tugas Berat Merumahkan Masyarakat	ya	ya	ya
35.	Keberhasilan KUR Tergantung Sosialisasi	ya	ya	ya
36.	Masih Jalan di Tempat	ya	ya	ya

Sumber : coding sheet

TABEL 60
Tabulasi Koding Sub Unit Analisis “Magnitude”
dalam Harian Seputar Indonesia

No	Judul Berita	Decoder	Coder 1	Coder 2
1.	Tim Ekonomi Mulai Konsolidasi	tidak	tidak	tidak
2.	SBY Ingatkan Tidak Ada Keputusan Wapres	tidak	tidak	tidak
3.	Tim Ekonomi Fokus Infrastruktur	ya	ya	ya
4.	Agenda 100 Hari Lebih Dipertajam	tidak	tidak	tidak
5.	Mendiknas Janji Berikan 10.000 Beasiswa	ya	ya	ya
6.	Depag Siapkan Antisipasi Aliran Sesat	ya	ya	ya
7.	Anggaran Jangan Sampai Bengkok	tidak	tidak	tidak
8.	SBY Prioritaskan 15 Program	ya	ya	ya
9.	SBY Deklarasikan Ganyang Mafia	tidak	tidak	tidak
10.	Postur APBN 2010 Aman	ya	ya	ya
11.	Kasus KPK-Century Berdampak Negatif Bagi SBY	ya	ya	ya
12.	Kuntoro Rumuskan Tim Pemberantasan Mafia Hukum	tidak	tidak	tidak
13.	Kinerja Hatta Rajasa Ungguli Agung-Djoko Suyanto	ya	ya	ya
14.	Kasus KPK-Polri Rusak Program 100 Hari	tidak	tidak	tidak
15.	Program 100 Hari Terganjil Dua “DC”	ya	ya	tidak
16.	Pemerintah Akan Gratiskan Paspor TKI	tidak	tidak	tidak
17.	Akbar Berharap Tuntas 100 Hari	tidak	tidak	tidak
18.	Depbudpar Gelar Festival Sasando	ya	ya	ya
19.	PDP Minta SBY Tegas Berantas Mafia Hukum	tidak	tidak	tidak
20.	Program Depsos Jangan Basa-basi	tidak	tidak	tidak
21.	Kasus Century Tak Ganggu 100 Hari	tidak	tidak	tidak
22.	Menteri Kelautan Klaim Sukses 100 Hari	ya	ya	ya
23.	Mensos Klaim Program 100 Hari Sukses	ya	ya	ya
24.	Mensos Fokus Tangani Anak Jalanan	ya	ya	ya
25.	100 Hari Bukan Ukuran Kinerja	ya	ya	ya
26.	Program 100 Hari Terpenuhi	ya	ya	ya
27.	Ekonom Nilai Program 100 Hari Belum Substansial	tidak	tidak	tidak
28.	100 Hari Gagal Dilaksanakan	tidak	tidak	tidak
29.	Century Tenggelamkan Program 100 Hari	ya	ya	ya
30.	Satgas Angkat Citra Pemerintah	tidak	tidak	tidak
31.	Kepuasan Terhadap Kinerja Pemerintah Turun	ya	ya	ya
32.	PDIP Nilai Program 100 Hari Hanya Pencitraan	ya	ya	tidak

Sumber : coding sheet

31) Tabulasi Koding Sub Unit Analisis "Source Bias"

TABEL 61
 Tabulasi Koding Sub Unit Analisis "Source Bias"
 dalam Harian Media Indonesia

No	Judul Berita	Decoder	Coder 1	Coder 2
1.	Menjaga Stabilitas Memanjakan Sektor Riil	ya	ya	ya
2.	Menekan Kemiskinan Hingga 9% di 2014	tidak	tidak	ya
3.	Mimpi Negara Industri Maju dan Harmonisasi Kebijakan	ya	ya	ya
4.	Tim Ekonomi Janjikan Percepatan Infrastruktur	ya	ya	ya
5.	National Summit Jadi Ajang Penajaman Program	tidak	tidak	tidak
6.	Depkeu Siapkan Fasilitas PPh untuk Industri Prioritas	ya	ya	ya
7.	Mencari Tuan Rumah di Negeri Sendiri	tidak	tidak	ya
8.	Perombakan Lembaga Hukum Jadi Keniscayaan	ya	ya	tidak
9.	Presiden Serukan Ganyang Mafia Hukum	ya	ya	ya
10.	Jalur Selat Sunda Masuk Program 100 Hari	ya	ya	ya
11.	Pemberantasan Mafia dan Pemerataan Ekonomi	tidak	tidak	tidak
12.	Menko Perekonomian Buka Akses Kinerja 100 Hari	ya	ya	ya
13.	Kemudahan Pembebasan Tanah Harus Tuntas 100 Hari	ya	ya	ya
14.	Dari Konservasi Alam Hingga Krisis Listrik	ya	ya	tidak
15.	Program 100 Hari Ekonomi Masih 60%	ya	ya	ya
16.	Setengah Hati Mencari Energi Pengganti	tidak	tidak	ya
17.	Layanan Publik yang Kian Mencemaskan	ya	ya	ya
18.	Reformasi Harus Dimulai Dari Kantor Presiden	tidak	ya	tidak
19.	Dikepung Skandal Bank Century	ya	ya	ya
20.	Program 100 Hari Tidak Realistis	ya	ya	ya
21.	Rencana Aksi Kementrian Perindustrian Mengecewakan	ya	ya	ya
22.	Rapor Biru Kementerian Energi	tidak	tidak	tidak
23.	Rapor Menkeu dan Menperin Masih Merah	tidak	tidak	ya
24.	Industri Pertahanan Siap Dibangun	ya	ya	ya
25.	Menpora Harus Seriusi Cabang Prioritas	tidak	tidak	ya
26.	Seratus Hari ESDM Bukan Cuma Pemanis	ya	ya	ya
27.	Pertamina Dukung Kebijakan Energi Nasional	ya	ya	ya
28.	Genjot Produksi Untuk Jamin Keamanan Pasokan Energi	tidak	tidak	tidak
29.	Pembenahan Layanan Kesehatan Terus Dilakukan	ya	ya	ya
30.	Menanti Sinergi Pendidikan dan Dunia Kerja	ya	ya	ya
31.	Siaga Bencana Jadi Prioritas	tidak	tidak	tidak
32.	Swasembada Tergantung Dana	ya	tidak	ya
33.	Percepatan Infrastruktur Kuatkan Daya Saing	ya	ya	ya
34.	Tugas Berat Merumahkan Masyarakat	tidak	tidak	tidak
35.	Keberhasilan KUR Tergantung Sosialisasi	tidak	tidak	tidak
36.	Masih Jalan di Tempat	ya	ya	ya

Sumber : coding sheet

TABEL 62
Tabulasi Koding Sub Unit Analisis “Source Bias”
dalam Harian Seputar Indonesia

No	Judul Berita	Decoder	Coder 1	Coder 2
1.	Tim Ekonomi Mulai Konsolidasi	ya	ya	ya
2.	SBY Ingatkan Tidak Ada Keputusan Wapres	ya	ya	ya
3.	Tim Ekonomi Fokus Infrastruktur	tidak	tidak	ya
4.	Agenda 100 Hari Lebih Dipertajam	tidak	tidak	tidak
5.	Mendiknas Janji Berikan 10.000 Beasiswa	ya	ya	ya
6.	Depag Siapkan Antisipasi Aliran Sesat	ya	ya	ya
7.	Anggaran Jangan Sampai Bengkak	tidak	tidak	tidak
8.	SBY Prioritaskan 15 Program	tidak	tidak	tidak
9.	SBY Deklarasikan Ganyang Mafia	tidak	tidak	tidak
10.	Postur APBN 2010 Aman	ya	ya	ya
11.	Kasus KPK-Century Berdampak Negatif Bagi SBY	ya	ya	ya
12.	Kuntoro Rumuskan Tim Pemberantasan Mafia Hukum	tidak	tidak	tidak
13.	Kinerja Hatta Rajasa Ungguli Agung-Djoko Suyanto	ya	ya	ya
14.	Kasus KPK-Polri Rusak Program 100 Hari	ya	ya	ya
15.	Program 100 Hari Terganjil Dua “DC”	ya	ya	ya
16.	Pemerintah Akan Gratiskan Paspor TKI	ya	ya	ya
17.	Akbar Berharap Tuntas 100 Hari	ya	ya	ya
18.	Depbudpar Gelar Festival Sasando	ya	ya	ya
19.	PDP Minta SBY Tegas Berantas Mafia Hukum	ya	ya	ya
20.	Program Depsos Jangan Basa-basi	ya	ya	ya
21.	Kasus Century Tak Ganggu 100 Hari	tidak	tidak	tidak
22.	Menteri Kelautan Klaim Sukses 100 Hari	ya	ya	ya
23.	Mensos Klaim Program 100 Hari Sukses	ya	ya	ya
24.	Mensos Fokus Tangani Anak Jalanan	ya	tidak	ya
25.	100 Hari Bukan Ukuran Kinerja	ya	ya	tidak
26.	Program 100 Hari Terpenuhi	ya	ya	tidak
27.	Ekonom Nilai Program 100 Hari Belum Substansial	ya	ya	ya
28.	100 Hari Gagal Dilaksanakan	ya	ya	ya
29.	Century Tenggelamkan Program 100 Hari	tidak	tidak	tidak
30.	Satgas Angkat Citra Pemerintah	tidak	tidak	ya
31.	Kepuasan Terhadap Kinerja Pemerintah Turun	ya	ya	ya
32.	PDIP Nilai Program 100 Hari Hanya Pencitraan	ya	ya	ya

Sumber : coding sheet

32) Tabulasi Koding Sub Unit Analisis “Slant”

TABEL 63
Tabulasi Koding Sub Unit Analisis “Slant”
 dalam Harian Media Indonesia

No	Judul Berita	Decoder	Coder 1	Coder 2
1.	Menjaga Stabilitas Memanjakan Sektor Riil	ya	ya	ya
2.	Menekan Kemiskinan Hingga 9% di 2014	tidak	tidak	tidak
3.	Mimpi Negara Industri Maju dan Harmonisasi Kebijakan	tidak	tidak	tidak
4.	Tim Ekonomi Janjikan Percepatan Infrastruktur	tidak	tidak	tidak
5.	<i>National Summit</i> Jadi Ajang Penajaman Program	tidak	tidak	tidak
6.	Depkeu Siapkan Fasilitas PPh untuk Industri Prioritas	tidak	tidak	tidak
7.	Mencari Tuan Rumah di Negeri Sendiri	tidak	tidak	tidak
8.	Perombakan Lembaga Hukum Jadi Keniscayaan	tidak	tidak	tidak
9.	Presiden Serukan Ganyang Mafia Hukum	tidak	tidak	tidak
10.	Jalur Selat Sunda Masuk Program 100 Hari	tidak	tidak	tidak
11.	Pemberantasan Mafia dan Pemerataan Ekonomi	ya	ya	tidak
12.	Menko Perekonomian Buka Akses Kinerja 100 Hari	tidak	tidak	tidak
13.	Kemudahan Pembebasan Tanah Harus Tuntas 100 Hari	tidak	tidak	tidak
14.	Dari Konservasi Alam Hingga Krisis Listrik	tidak	tidak	tidak
15.	Program 100 Hari Ekonomi Masih 60%	tidak	tidak	tidak
16.	Setengah Hati Mencari Energi Pengganti	tidak	tidak	tidak
17.	Layanan Publik yang Kian Mencemaskan	ya	ya	tidak
18.	Reformasi Harus Dimulai Dari Kantor Presiden	tidak	tidak	tidak
19.	Dikepung Skandal Bank <i>Century</i>	tidak	tidak	ya
20.	Program 100 Hari Tidak Realistis	tidak	tidak	tidak
21.	Rencana Aksi Kementrian Perindustrian Mengecewakan	tidak	tidak	tidak
22.	Rapor Biru Kementerian Energi	tidak	tidak	ya
23.	Rapor Menkeu dan Menperin Masih Merah	tidak	tidak	tidak
24.	Industri Pertahanan Siap Dibangun	tidak	tidak	tidak
25.	Menpora Harus Seriusi Cabang Prioritas	tidak	tidak	tidak
26.	Seratus Hari ESDM Bukan Cuma Pemanis	tidak	tidak	ya
27.	Pertamina Dukung Kebijakan Energi Nasional	tidak	tidak	tidak
28.	Genjot Produksi Untuk Jamin Keamanan Pasokan Energi	tidak	tidak	tidak
29.	Pembenahan Layanan Kesehatan Terus Dilakukan	ya	ya	ya
30.	Menanti Sinergi Pendidikan dan Dunia Kerja	tidak	tidak	tidak
31.	Siaga Bencana Jadi Prioritas	tidak	tidak	tidak
32.	Swasembada Tergantung Dana	tidak	tidak	tidak
33.	Percepatan Infrastruktur Kuatkan Daya Saing	tidak	tidak	tidak
34.	Tugas Berat Merumahkan Masyarakat	tidak	tidak	tidak
35.	Keberhasilan KUR Tergantung Sosialisasi	tidak	tidak	tidak
36.	Masih Jalan di Tempat	tidak	tidak	tidak

Sumber : coding sheet

TABEL 64
Tabulasi Koding Sub Unit Analisis “Slamf”
dalam Harian Seputar Indonesia

No	Judul Berita	Decoder	Coder 1	Coder 2
1.	Tim Ekonomi Mulai Konsolidasi	tidak	tidak	tidak
2.	SBY Ingatkan Tidak Ada Keputusan Wapres	tidak	tidak	tidak
3.	Tim Ekonomi Fokus Infrastruktur	tidak	tidak	tidak
4.	Agenda 100 Hari Lebih Dipertajam	tidak	tidak	tidak
5.	Mendiknas Janji Berikan 10.000 Beasiswa	tidak	tidak	tidak
6.	Depag Siapkan Antisipasi Aliran Sesat	tidak	tidak	tidak
7.	Anggaran Jangan Sampai Bengkok	tidak	tidak	tidak
8.	SBY Prioritaskan 15 Program	tidak	tidak	tidak
9.	SBY Deklarasikan Ganyang Mafia	tidak	tidak	tidak
10.	Postur APBN 2010 Aman	tidak	tidak	tidak
11.	Kasus KPK-Century Berdampak Negatif Bagi SBY	tidak	tidak	tidak
12.	Kuntoro Rumuskan Tim Pemberantasan Mafia Hukum	tidak	tidak	tidak
13.	Kinerja Hatta Rajasa Ungguli Agung-Djoko Suyanto	tidak	tidak	tidak
14.	Kasus KPK-Polri Rusak Program 100 Hari	tidak	tidak	tidak
15.	Program 100 Hari Terganjil Dua “DC”	tidak	tidak	ya
16.	Pemerintah Akan Gratiskan Paspor TKI	tidak	tidak	tidak
17.	Akbar Berharap Tuntas 100 Hari	tidak	tidak	tidak
18.	Depbudpar Gelar Festival Sasando	tidak	tidak	tidak
19.	PDP Minta SBY Tegas Berantas Mafia Hukum	tidak	tidak	tidak
20.	Program Depsos Jangan Basa-basi	tidak	tidak	tidak
21.	Kasus Century Tak Ganggu 100 Hari	tidak	tidak	tidak
22.	Menteri Kelautan Klaim Sukses 100 Hari	tidak	tidak	tidak
23.	Mensos Klaim Program 100 Hari Sukses	tidak	tidak	tidak
24.	Mensos Fokus Tangani Anak Jalanan	tidak	tidak	tidak
25.	100 Hari Bukan Ukuran Kinerja	tidak	tidak	tidak
26.	Program 100 Hari Terpenuhi	tidak	tidak	tidak
27.	Ekonom Nilai Program 100 Hari Belum Substansial	tidak	tidak	tidak
28.	100 Hari Gagal Dilaksanakan	tidak	tidak	tidak
29.	Century Tenggelamkan Program 100 Hari	tidak	tidak	tidak
30.	Satgas Angkat Citra Pemerintah	tidak	tidak	tidak
31.	Kepuasan Terhadap Kinerja Pemerintah Turun	tidak	tidak	tidak
32.	PDIP Nilai Program 100 Hari Hanya Pencitraan	tidak	tidak	tidak

Sumber : coding sheet

33) Tabulasi Koding Sub Unit Analisis “Representasi Pro-kontra”

TABEL 65

Tabulasi Koding Sub Unit Analisis “Representasi Pro-kontra”
dalam Harian Seputar Indonesia dalam Harian Media Indonesia

No	Judul Berita	Decoder	Coder 1	Coder 2
1.	Menjaga Stabilitas Memanjakan Sektor Riil	tidak	tidak	tidak
2.	Menekan Kemiskinan Hingga 9% di 2014	ya	ya	tidak
3.	Mimpi Negara Industri Maju dan Harmonisasi Kebijakan	tidak	tidak	tidak
4.	Tim Ekonomi Janjikan Percepatan Infrastruktur	tidak	tidak	tidak
5.	<i>National Summit</i> Jadi Ajang Penajaman Program	ya	tidak	ya
6.	Depkeu Siapkan Fasilitas PPh untuk Industri Prioritas	tidak	tidak	tidak
7.	Mencari Tuan Rumah di Negeri Sendiri	ya	ya	ya
8.	Perombakan Lembaga Hukum Jadi Keniscayaan	tidak	tidak	ya
9.	Presiden Serukan Ganyang Mafia Hukum	tidak	tidak	tidak
10.	Jalur Selat Sunda Masuk Program 100 Hari	tidak	tidak	tidak
11.	Pemberantasan Mafia dan Pemerataan Ekonomi	ya	ya	ya
12.	Menko Perekonomian Buka Akses Kinerja 100 Hari	tidak	tidak	tidak
13.	Kemudahan Pembebasan Tanah Harus Tuntas 100 Hari	tidak	tidak	tidak
14.	Dari Konservasi Alam Hingga Krisis Listrik	tidak	tidak	ya
15.	Program 100 Hari Ekonomi Masih 60%	tidak	tidak	tidak
16.	Setengah Hati Mencari Energi Pengganti	ya	ya	ya
17.	Layanan Publik yang Kian Mencemaskan	tidak	tidak	tidak
18.	Reformasi Harus Dimulai Dari Kantor Presiden	ya	ya	ya
19.	Dikepung Skandal Bank <i>Century</i>	tidak	tidak	tidak
20.	Program 100 Hari Tidak Realistis	tidak	tidak	tidak
21.	Rencana Aksi Kementrian Perindustrian Mengecewakan	tidak	tidak	tidak
22.	Rapor Biru Kementerian Energi	ya	ya	ya
23.	Rapor Menkeu dan Menperin Masih Merah	ya	ya	ya
24.	Industri Pertahanan Siap Dibangun	tidak	tidak	tidak
25.	Menpora Harus Seriusi Cabang Prioritas	ya	ya	ya
26.	Seratus Hari ESDM Bukan Cuma Pemanis	tidak	tidak	tidak
27.	Pertamina Dukung Kebijakan Energi Nasional	tidak	tidak	tidak
28.	Genjot Produksi Untuk Jamin Keamanan Pasokan Energi	ya	ya	ya
29.	Pembenahan Layanan Kesehatan Terus Dilakukan	tidak	tidak	tidak
30.	Menanti Sinergi Pendidikan dan Dunia Kerja	tidak	tidak	tidak
31.	Siaga Bencana Jadi Prioritas	ya	ya	ya
32.	Swasembada Tergantung Dana	tidak	ya	tidak
33.	Percepatan Infrastruktur Kuatkan Daya Saing	tidak	tidak	tidak
34.	Tugas Berat Merumahkan Masyarakat	ya	tidak	ya
35.	Keberhasilan KUR Tergantung Sosialisasi	ya	ya	ya
36.	Masih Jalan di Tempat	tidak	tidak	ya

Sumber : *coding sheet*

TABEL 66
Tabulasi Koding Sub Unit Analisis “Representasi Pro-kontra”
dalam Harian Seputar Indonesia

No	Judul Berita	Decoder	Coder 1	Coder 2
1.	Tim Ekonomi Mulai Konsolidasi	tidak	tidak	tidak
2.	SBY Ingatkan Tidak Ada Keputusan Wapres	tidak	tidak	tidak
3.	Tim Ekonomi Fokus Infrastruktur	ya	ya	tidak
4.	Agenda 100 Hari Lebih Dipertajam	ya	ya	ya
5.	Mendiknas Janji Berikan 10.000 Beasiswa	tidak	tidak	tidak
6.	Depag Siapkan Antisipasi Aliran Sesat	tidak	tidak	tidak
7.	Anggaran Jangan Sampai Bengkok	ya	ya	ya
8.	SBY Prioritaskan 15 Program	ya	ya	ya
9.	SBY Deklarasikan Ganyang Mafia	ya	ya	ya
10.	Postur APBN 2010 Aman	tidak	tidak	tidak
11.	Kasus KPK-Century Berdampak Negatif Bagi SBY	tidak	tidak	tidak
12.	Kuntoro Rumuskan Tim Pemberantasan Mafia Hukum	ya	ya	ya
13.	Kinerja Hatta Rajasa Ungguli Agung-Djoko Suyanto	tidak	tidak	tidak
14.	Kasus KPK-Polri Rusak Program 100 Hari	tidak	tidak	tidak
15.	Program 100 Hari Terganjil Dua “DC”	tidak	tidak	tidak
16.	Pemerintah Akan Gratiskan Paspor TKI	tidak	tidak	tidak
17.	Akbar Berharap Tuntas 100 Hari	tidak	tidak	tidak
18.	Depbudpar Gelar Festival Sasando	tidak	tidak	tidak
19.	PDP Minta SBY Tegas Berantas Mafia Hukum	tidak	tidak	tidak
20.	Program Depsos Jangan Basa-basi	tidak	tidak	tidak
21.	Kasus Century Tak Ganggu 100 Hari	ya	ya	ya
22.	Menteri Kelautan Klaim Sukses 100 Hari	tidak	tidak	tidak
23.	Mensos Klaim Program 100 Hari Sukses	tidak	tidak	tidak
24.	Mensos Fokus Tangani Anak Jalanan	tidak	ya	tidak
25.	100 Hari Bukan Ukuran Kinerja	tidak	tidak	tidak
26.	Program 100 Hari Terpenuhi	tidak	tidak	ya
27.	Ekonom Nilai Program 100 Hari Belum Substansial	tidak	tidak	tidak
28.	100 Hari Gagal Dilaksanakan	tidak	tidak	tidak
29.	Century Tenggelamkan Program 100 Hari	ya	ya	tidak
30.	Satgas Angkat Citra Pemerintah	ya	ya	tidak
31.	Kepuasan Terhadap Kinerja Pemerintah Turun	tidak	tidak	tidak
32.	PDIP Nilai Program 100 Hari Hanya Pencitraan	tidak	tidak	tidak

Sumber : coding sheet

34) Tabulasi Koding Sub Unit Analisis “Personalisasi Tokoh”

TABEL 67

Tabulasi Koding Sub Unit Analisis “Personalisasi Tokoh”
dalam Harian Media Indonesia

No	Judul Berita	Decoder	Coder 1	Coder 2
1.	Menjaga Stabilitas Memanjakan Sektor Riil	ya	ya	ya
2.	Menekan Kemiskinan Hingga 9% di 2014	tidak	tidak	ya
3.	Mimpi Negara Industri Maju dan Harmonisasi Kebijakan	tidak	tidak	tidak
4.	Tim Ekonomi Janjikan Percepatan Infrastruktur	tidak	tidak	tidak
5.	<i>National Summit</i> Jadi Ajang Penajaman Program	ya	ya	ya
6.	Depkeu Siapkan Fasilitas PPh untuk Industri Prioritas	tidak	tidak	tidak
7.	Mencari Tuan Rumah di Negeri Sendiri	tidak	tidak	tidak
8.	Perombakan Lembaga Hukum Jadi Keniscayaan	ya	ya	tidak
9.	Presiden Serukan Ganyang Mafia Hukum	ya	ya	ya
10.	Jalur Selat Sunda Masuk Program 100 Hari	tidak	tidak	tidak
11.	Pemberantasan Mafia dan Pemerataan Ekonomi	tidak	tidak	tidak
12.	Menko Perekonomian Buka Akses Kinerja 100 Hari	tidak	tidak	tidak
13.	Kemudahan Pembebasan Tanah Harus Tuntas 100 Hari	tidak	tidak	tidak
14.	Dari Konservasi Alam Hingga Krisis Listrik	tidak	tidak	tidak
15.	Program 100 Hari Ekonomi Masih 60%	ya	ya	tidak
16.	Setengah Hati Mencari Energi Pengganti	tidak	tidak	tidak
17.	Layanan Publik yang Kian Mencemaskan	tidak	tidak	tidak
18.	Reformasi Harus Dimulai Dari Kantor Presiden	tidak	tidak	tidak
19.	Dikepung Skandal Bank <i>Century</i>	tidak	tidak	tidak
20.	Program 100 Hari Tidak Realistis	ya	ya	tidak
21.	Rencana Aksi Kementrian Perindustrian Mengecewakan	tidak	tidak	tidak
22.	Rapor Biru Kementerian Energi	tidak	tidak	tidak
23.	Rapor Menkeu dan Menperin Masih Merah	tidak	tidak	tidak
24.	Industri Pertahanan Siap Dibangun	ya	ya	ya
25.	Menpora Harus Seriusi Cabang Prioritas	tidak	tidak	tidak
26.	Seratus Hari ESDM Bukan Cuma Pemanis	ya	ya	ya
27.	Pertamina Dukung Kebijakan Energi Nasional	tidak	tidak	tidak
28.	Genjot Produksi Untuk Jamin Keamanan Pasokan Energi	tidak	tidak	tidak
29.	Pembenahan Layanan Kesehatan Terus Dilakukan	tidak	ya	ya
30.	Menanti Sinergi Pendidikan dan Dunia Kerja	tidak	tidak	tidak
31.	Siaga Bencana Jadi Prioritas	tidak	tidak	tidak
32.	Swasembada Tergantung Dana	ya	ya	ya
33.	Percepatan Infrastruktur Kuatkan Daya Saing	tidak	tidak	tidak
34.	Tugas Berat Merumahkan Masyarakat	tidak	tidak	tidak
35.	Keberhasilan KUR Tergantung Sosialisasi	tidak	tidak	tidak
36.	Masih Jalan di Tempat	tidak	ya	tidak

Sumber : coding sheet

TABEL 68
Tabulasi Koding Sub Unit Analisis “Personalisasi Tokoh”
dalam Harian Seputar Indonesia

No	Judul Berita	Decoder	Coder 1	Coder 2
1.	Tim Ekonomi Mulai Konsolidasi	tidak	tidak	tidak
2.	SBY Ingatkan Tidak Ada Keputusan Wapres	ya	ya	ya
3.	Tim Ekonomi Fokus Infrastruktur	tidak	tidak	tidak
4.	Agenda 100 Hari Lebih Dipertajam	tidak	tidak	tidak
5.	Mendiknas Janji Berikan 10.000 Beasiswa	tidak	tidak	tidak
6.	Depag Siapkan Antisipasi Aliran Sesat	ya	ya	ya
7.	Anggaran Jangan Sampai Bengkak	tidak	tidak	tidak
8.	SBY Prioritaskan 15 Program	ya	ya	ya
9.	SBY Deklarasikan Ganyang Mafia	ya	ya	ya
10.	Postur APBN 2010 Aman	tidak	tidak	tidak
11.	Kasus KPK-Century Berdampak Negatif Bagi SBY	tidak	tidak	tidak
12.	Kuntoro Rumuskan Tim Pemberantasan Mafia Hukum	tidak	tidak	tidak
13.	Kinerja Hatta Rajasa Ungguli Agung-Djoko Suyanto	ya	ya	tidak
14.	Kasus KPK-Polri Rusak Program 100 Hari	ya	ya	ya
15.	Program 100 Hari Terganjil Dua “DC”	ya	ya	ya
16.	Pemerintah Akan Gratiskan Paspor TKI	tidak	tidak	tidak
17.	Akbar Berharap Tuntas 100 Hari	tidak	ya	ya
18.	Depbudpar Gelar Festival Sasando	ya	ya	ya
19.	PDP Minta SBY Tegas Berantas Mafia Hukum	ya	ya	ya
20.	Program Depsos Jangan Basa-basi	ya	ya	ya
21.	Kasus Century Tak Ganggu 100 Hari	tidak	tidak	tidak
22.	Menteri Kelautan Klaim Sukses 100 Hari	ya	ya	ya
23.	Mensos Klaim Program 100 Hari Sukses	ya	ya	ya
24.	Mensos Fokus Tangani Anak Jalanan	ya	ya	ya
25.	100 Hari Bukan Ukuran Kinerja	ya	ya	tidak
26.	Program 100 Hari Terpenuhi	tidak	ya	tidak
27.	Ekonom Nilai Program 100 Hari Belum Substansial	ya	ya	ya
28.	100 Hari Gagal Dilaksanakan	ya	ya	ya
29.	Century Tenggelamkan Program 100 Hari	tidak	ya	tidak
30.	Satgas Angkat Citra Pemerintah	tidak	ya	tidak
31.	Kepuasan Terhadap Kinerja Pemerintah Turun	tidak	ya	tidak
32.	PDIP Nilai Program 100 Hari Hanya Pencitraan	tidak	ya	tidak

Sumber : coding sheet

35) Tabulasi Koding Sub Unit Analisis “Penonjolan Aspek Emosional”

TABEL 69

Tabulasi Koding Sub Unit Analisis “Penonjolan Aspek Emosional”
dalam Harian Media Indonesia

No	Judul Berita	Decoder	Coder 1	Coder 2
1.	Menjaga Stabilitas Memanjakan Sektor Riil	tidak	tidak	tidak
2.	Menekan Kemiskinan Hingga 9% di 2014	tidak	tidak	tidak
3.	Mimpi Negara Industri Maju dan Harmonisasi Kebijakan	tidak	tidak	tidak
4.	Tim Ekonomi Janjikan Percepatan Infrastruktur	tidak	tidak	tidak
5.	<i>National Summit</i> Jadi Ajang Penajaman Program	tidak	tidak	tidak
6.	Depkeu Siapkan Fasilitas PPh untuk Industri Prioritas	tidak	tidak	tidak
7.	Mencari Tuan Rumah di Negeri Sendiri	tidak	tidak	tidak
8.	Perombakan Lembaga Hukum Jadi Keniscayaan	tidak	tidak	tidak
9.	Presiden Serukan Ganyang Mafia Hukum	tidak	tidak	tidak
10.	Jalur Selat Sunda Masuk Program 100 Hari	tidak	tidak	tidak
11.	Pemberantasan Mafia dan Pemerataan Ekonomi	tidak	tidak	tidak
12.	Menko Perekonomian Buka Akses Kinerja 100 Hari	tidak	tidak	tidak
13.	Kemudahan Pembebasan Tanah Harus Tuntas 100 Hari	tidak	tidak	tidak
14.	Dari Konservasi Alam Hingga Krisis Listrik	tidak	tidak	tidak
15.	Program 100 Hari Ekonomi Masih 60%	tidak	tidak	tidak
16.	Setengah Hati Mencari Energi Pengganti	tidak	tidak	tidak
17.	Layanan Publik yang Kian Mencemaskan	tidak	tidak	tidak
18.	Reformasi Harus Dimulai Dari Kantor Presiden	tidak	tidak	tidak
19.	Dikepung Skandal Bank <i>Century</i>	tidak	tidak	tidak
20.	Program 100 Hari Tidak Realistis	tidak	tidak	tidak
21.	Rencana Aksi Kementrian Perindustrian Mengecewakan	tidak	tidak	tidak
22.	Rapor Biru Kementerian Energi	tidak	tidak	tidak
23.	Rapor Menkeu dan Menperin Masih Merah	tidak	tidak	tidak
24.	Industri Pertahanan Siap Dibangun	tidak	tidak	tidak
25.	Menpora Harus Seriusi Cabang Prioritas	tidak	tidak	tidak
26.	Seratus Hari ESDM Bukan Cuma Pemanis	tidak	tidak	tidak
27.	Pertamina Dukung Kebijakan Energi Nasional	tidak	tidak	tidak
28.	Genjot Produksi Untuk Jamin Keamanan Pasokan Energi	tidak	tidak	tidak
29.	Pembenahan Layanan Kesehatan Terus Dilakukan	tidak	tidak	tidak
30.	Menanti Sinergi Pendidikan dan Dunia Kerja	tidak	tidak	tidak
31.	Siaga Bencana Jadi Prioritas	tidak	tidak	tidak
32.	Swasembada Tergantung Dana	tidak	tidak	tidak
33.	Percepatan Infrastruktur Kuatkan Daya Saing	tidak	tidak	tidak
34.	Tugas Berat Merumahkan Masyarakat	tidak	tidak	tidak
35.	Keberhasilan KUR Tergantung Sosialisasi	tidak	tidak	tidak
36.	Masih Jalan di Tempat	tidak	tidak	tidak

Sumber : *coding sheet*

TABEL 70
Tabulasi Koding Sub Unit Analisis “Penonjolan Aspek Emosional”
dalam Harian Seputar Indonesia

No	Judul Berita	Decoder	Coder 1	Coder 2
1.	Tim Ekonomi Mulai Konsolidasi	tidak	tidak	tidak
2.	SBY Ingatkan Tidak Ada Keputusan Wapres	tidak	tidak	tidak
3.	Tim Ekonomi Fokus Infrastruktur	tidak	tidak	tidak
4.	Agenda 100 Hari Lebih Dipertajam	tidak	tidak	tidak
5.	Mendiknas Janji Berikan 10.000 Beasiswa	tidak	tidak	tidak
6.	Depag Siapkan Antisipasi Aliran Sesat	tidak	tidak	tidak
7.	Anggaran Jangan Sampai Bengkak	tidak	tidak	tidak
8.	SBY Prioritaskan 15 Program	tidak	tidak	tidak
9.	SBY Deklarasikan Ganyang Mafia	tidak	tidak	tidak
10.	Postur APBN 2010 Aman	tidak	tidak	tidak
11.	Kasus KPK-Century Berdampak Negatif Bagi SBY	tidak	tidak	tidak
12.	Kuntoro Rumuskan Tim Pemberantasan Mafia Hukum	tidak	tidak	tidak
13.	Kinerja Hatta Rajasa Ungguli Agung-Djoko Suyanto	tidak	tidak	tidak
14.	Kasus KPK-Polri Rusak Program 100 Hari	tidak	tidak	tidak
15.	Program 100 Hari Terganjil Dua “DC”	tidak	tidak	tidak
16.	Pemerintah Akan Gratiskan Paspor TKI	tidak	tidak	tidak
17.	Akbar Berharap Tuntas 100 Hari	tidak	tidak	tidak
18.	Depbudpar Gelar Festival Sasando	tidak	tidak	tidak
19.	PDP Minta SBY Tegas Berantas Mafia Hukum	tidak	tidak	tidak
20.	Program Depsos Jangan Basa-basi	tidak	tidak	tidak
21.	Kasus Century Tak Ganggu 100 Hari	tidak	tidak	tidak
22.	Menteri Kelautan Klaim Sukses 100 Hari	tidak	tidak	tidak
23.	Mensos Klaim Program 100 Hari Sukses	tidak	tidak	tidak
24.	Mensos Fokus Tangani Anak Jalanan	tidak	tidak	tidak
25.	100 Hari Bukan Ukuran Kinerja	tidak	tidak	tidak
26.	Program 100 Hari Terpenuhi	tidak	tidak	tidak
27.	Ekonom Nilai Program 100 Hari Belum Substansial	tidak	tidak	tidak
28.	100 Hari Gagal Dilaksanakan	tidak	tidak	tidak
29.	Century Tenggelamkan Program 100 Hari	tidak	tidak	tidak
30.	Satgas Angkat Citra Pemerintah	tidak	tidak	tidak
31.	Kepuasan Terhadap Kinerja Pemerintah Turun	tidak	tidak	tidak
32.	PDIP Nilai Program 100 Hari Hanya Pencitraan	tidak	tidak	tidak

Sumber : coding sheet

36) Tabulasi Koding Sub Unit Analisis “Dramatisasi”

TABEL 71
Tabulasi Koding Sub Unit Analisis “Dramatisasi”
dalam Harian Media Indonesia

No	Judul Berita	Decoder	Coder 1	Coder 2
1.	Menjaga Stabilitas Memanjakan Sektor Riil	ya	ya	ya
2.	Menekan Kemiskinan Hingga 9% di 2014	ya	ya	tidak
3.	Mimpi Negara Industri Maju dan Harmonisasi Kebijakan	tidak	tidak	tidak
4.	Tim Ekonomi Janjikan Percepatan Infrastruktur	tidak	tidak	tidak
5.	National Summit Jadi Ajang Penajaman Program	tidak	tidak	tidak
6.	Depkeu Siapkan Fasilitas PPh untuk Industri Prioritas	ya	ya	tidak
7.	Mencari Tuan Rumah di Negeri Sendiri	ya	ya	ya
8.	Perombakan Lembaga Hukum Jadi Keniscayaan	ya	ya	ya
9.	Presiden Serukan Ganyang Mafia Hukum	tidak	tidak	tidak
10.	Jalur Selat Sunda Masuk Program 100 Hari	tidak	tidak	tidak
11.	Pemberantasan Mafia dan Pemerataan Ekonomi	ya	ya	ya
12.	Menko Perekonomian Buka Akses Kinerja 100 Hari	tidak	tidak	tidak
13.	Kemudahan Pembebasan Tanah Harus Tuntas 100 Hari	ya	tidak	ya
14.	Dari Konservasi Alam Hingga Krisis Listrik	tidak	tidak	tidak
15.	Program 100 Hari Ekonomi Masih 60%	tidak	tidak	tidak
16.	Setengah Hati Mencari Energi Pengganti	ya	ya	ya
17.	Layanan Publik yang Kian Mencemaskan	ya	ya	ya
18.	Reformasi Harus Dimulai Dari Kantor Presiden	tidak	tidak	tidak
19.	Dikepung Skandal Bank Century	ya	ya	ya
20.	Program 100 Hari Tidak Realistis	ya	tidak	ya
21.	Rencana Aksi Kementrian Perindustrian Mengecewakan	tidak	tidak	tidak
22.	Rapor Biru Kementerian Energi	tidak	tidak	tidak
23.	Rapor Menkeu dan Menperin Masih Merah	tidak	tidak	tidak
24.	Industri Pertahanan Siap Dibangun	tidak	tidak	tidak
25.	Menpora Harus Seriusi Cabang Prioritas	tidak	tidak	tidak
26.	Seratus Hari ESDM Bukan Cuma Pemanis	ya	ya	tidak
27.	Pertamina Dukung Kebijakan Energi Nasional	tidak	tidak	tidak
28.	Genjot Produksi Untuk Jamin Keamanan Pasokan Energi	tidak	tidak	tidak
29.	Pembenahan Layanan Kesehatan Terus Dilakukan	tidak	tidak	tidak
30.	Menanti Sinergi Pendidikan dan Dunia Kerja	tidak	tidak	tidak
31.	Siaga Bencana Jadi Prioritas	tidak	tidak	tidak
32.	Swasembada Tergantung Dana	tidak	tidak	tidak
33.	Percepatan Infrastruktur Kuatkan Daya Saing	tidak	tidak	tidak
34.	Tugas Berat Merumahkan Masyarakat	tidak	tidak	tidak
35.	Keberhasilan KUR Tergantung Sosialisasi	tidak	tidak	tidak
36.	Masih Jalan di Tempat	tidak	tidak	tidak

Sumber : coding sheet

TABEL 72
Tabulasi Koding Sub Unit Analisis “Dramatisasi”
dalam Hariian Seputar Indonesia

No	Judul Berita	Decoder	Coder 1	Coder 2
1.	Tim Ekonomi Mulai Konsolidasi	tidak	tidak	tidak
2.	SBY Ingatkan Tidak Ada Keputusan Wapres	tidak	tidak	tidak
3.	Tim Ekonomi Fokus Infrastruktur	tidak	tidak	tidak
4.	Agenda 100 Hari Lebih Dipertajam	tidak	tidak	tidak
5.	Mendiknas Janji Berikan 10.000 Beasiswa	tidak	tidak	tidak
6.	Depag Siapkan Antisipasi Aliran Sesat	tidak	tidak	tidak
7.	Anggaran Jangan Sampai Bengkak	tidak	tidak	tidak
8.	SBY Prioritaskan 15 Program	ya	ya	ya
9.	SBY Deklarasikan Ganyang Mafia	tidak	tidak	tidak
10.	Postur APBN 2010 Aman	tidak	tidak	tidak
11.	Kasus KPK-Century Berdampak Negatif Bagi SBY	tidak	tidak	tidak
12.	Kuntoro Rumuskan Tim Pemberantasan Mafia Hukum	tidak	tidak	tidak
13.	Kinerja Hatta Rajasa Ungguli Agung-Djoko Suyanto	tidak	tidak	tidak
14.	Kasus KPK-Polri Rusak Program 100 Hari	tidak	tidak	tidak
15.	Program 100 Hari Terganjil Dua “DC”	tidak	tidak	tidak
16.	Pemerintah Akan Gratiskan Paspor TKI	tidak	tidak	tidak
17.	Akbar Berharap Tuntas 100 Hari	ya	tidak	ya
18.	Depbudpar Gelar Festival Sasando	tidak	tidak	tidak
19.	PDP Minta SBY Tegas Berantas Mafia Hukum	tidak	tidak	tidak
20.	Program Depsos Jangan Basa-basi	tidak	tidak	tidak
21.	Kasus Century Tak Ganggu 100 Hari	tidak	tidak	tidak
22.	Menteri Kelautan Klaim Sukses 100 Hari	tidak	tidak	tidak
23.	Mensos Klaim Program 100 Hari Sukses	tidak	tidak	tidak
24.	Mensos Fokus Tangani Anak Jalanan	tidak	tidak	tidak
25.	100 Hari Bukan Ukuran Kinerja	tidak	tidak	tidak
26.	Program 100 Hari Terpenuhi	tidak	tidak	tidak
27.	Ekonom Nilai Program 100 Hari Belum Substansial	ya	ya	ya
28.	100 Hari Gagal Dilaksanakan	tidak	tidak	tidak
29.	Century Tenggelamkan Program 100 Hari	tidak	tidak	tidak
30.	Satgas Angkat Citra Pemerintah	tidak	tidak	tidak
31.	Kepuasan Terhadap Kinerja Pemerintah Turun	tidak	tidak	tidak
32.	PDIP Nilai Program 100 Hari Hanya Pencitraan	tidak	tidak	tidak

Sumber : coding sheet

37) Tabulasi Koding Sub Unit Analisis “Stereotipe”

TABEL 73
Tabulasi Koding Sub Unit Analisis “Stereotipe”
dalam Harian Media Indonesia

No	Judul Berita	Decoder	Coder 1	Coder 2
1.	Menjaga Stabilitas Memanjakan Sektor Riil	tidak	tidak	tidak
2.	Menekan Kemiskinan Hingga 9% di 2014	tidak	tidak	tidak
3.	Mimpi Negara Industri Maju dan Harmonisasi Kebijakan	tidak	tidak	tidak
4.	Tim Ekonomi Janjikan Percepatan Infrastruktur	tidak	tidak	tidak
5.	National Summit Jadi Ajang Penajaman Program	tidak	tidak	tidak
6.	Depkeu Siapkan Fasilitas PPh untuk Industri Prioritas	tidak	tidak	tidak
7.	Mencari Tuan Rumah di Negeri Sendiri	tidak	tidak	tidak
8.	Perombakan Lembaga Hukum Jadi Keniscayaan	ya	ya	ya
9.	Presiden Serukan Ganyang Mafia Hukum	ya	ya	ya
10.	Jalur Selat Sunda Masuk Program 100 Hari	tidak	tidak	tidak
11.	Pemberantasan Mafia dan Pemerataan Ekonomi	tidak	tidak	tidak
12.	Menko Perekonomian Buka Akses Kinerja 100 Hari	tidak	tidak	tidak
13.	Kemudahan Pembebasan Tanah Harus Tuntas 100 Hari	tidak	tidak	tidak
14.	Dari Konservasi Alam Hingga Krisis Listrik	tidak	tidak	tidak
15.	Program 100 Hari Ekonomi Masih 60%	tidak	tidak	tidak
16.	Setengah Hati Mencari Energi Pengganti	tidak	ya	ya
17.	Layanan Publik yang Kian Mencemaskan	tidak	ya	tidak
18.	Reformasi Harus Dimulai Dari Kantor Presiden	tidak	tidak	tidak
19.	Dikepung Skandal Bank Century	tidak	tidak	tidak
20.	Program 100 Hari Tidak Realistis	tidak	tidak	tidak
21.	Rencana Aksi Kementrian Perindustrian Mengecewakan	tidak	tidak	tidak
22.	Rapor Biru Kementerian Energi	tidak	tidak	tidak
23.	Rapor Menkeu dan Menperin Masih Merah	tidak	tidak	tidak
24.	Industri Pertahanan Siap Dibangun	tidak	tidak	tidak
25.	Menpora Harus Seriusi Cabang Prioritas	tidak	tidak	tidak
26.	Seratus Hari ESDM Bukan Cuma Pemanis	tidak	tidak	tidak
27.	Pertamina Dukung Kebijakan Energi Nasional	tidak	tidak	tidak
28.	Genjot Produksi Untuk Jamin Keamanan Pasokan Energi	tidak	tidak	tidak
29.	Pembenahan Layanan Kesehatan Terus Dilakukan	tidak	tidak	tidak
30.	Menanti Sinergi Pendidikan dan Dunia Kerja	tidak	tidak	tidak
31.	Siaga Bencana Jadi Prioritas	tidak	tidak	tidak
32.	Swasembada Tergantung Dana	tidak	tidak	tidak
33.	Percepatan Infrastruktur Kuatkan Daya Saing	tidak	tidak	tidak
34.	Tugas Berat Merumahkan Masyarakat	tidak	tidak	tidak
35.	Keberhasilan KUR Tergantung Sosialisasi	tidak	tidak	tidak
36.	Masih Jalan di Tempat	tidak	tidak	tidak

Sumber : coding sheet

TABEL 74
Tabulasi Koding Sub Unit Analisis “Stereotipe”
dalam Harian Seputar Indonesia

No	Judul Berita	Decoder	Coder 1	Coder 2
1.	Tim Ekonomi Mulai Konsolidasi	tidak	tidak	tidak
2.	SBY Ingatkan Tidak Ada Keputusan Wapres	tidak	tidak	tidak
3.	Tim Ekonomi Fokus Infrastruktur	tidak	tidak	tidak
4.	Agenda 100 Hari Lebih Dipertajam	tidak	tidak	tidak
5.	Mendiknas Janji Berikan 10.000 Beasiswa	tidak	tidak	tidak
6.	Depag Siapkan Antisipasi Aliran Sesat	ya	ya	tidak
7.	Anggaran Jangan Sampai Bengkok	tidak	tidak	tidak
8.	SBY Prioritaskan 15 Program	ya	ya	tidak
9.	SBY Deklarasikan Ganyang Mafia	tidak	tidak	tidak
10.	Postur APBN 2010 Aman	tidak	tidak	tidak
11.	Kasus KPK-Century Berdampak Negatif Bagi SBY	tidak	tidak	ya
12.	Kuntoro Rumuskan Tim Pemberantasan Mafia Hukum	tidak	tidak	tidak
13.	Kinerja Hatta Rajasa Ungguli Agung-Djoko Suyanto	tidak	tidak	tidak
14.	Kasus KPK-Polri Rusak Program 100 Hari	tidak	tidak	tidak
15.	Program 100 Hari Terganjil Dua “DC”	tidak	tidak	tidak
16.	Pemerintah Akan Gratiskan Paspor TKI	tidak	tidak	tidak
17.	Akbar Berharap Tuntas 100 Hari	tidak	tidak	tidak
18.	Depbudpar Gelar Festival Sasando	tidak	tidak	tidak
19.	PDP Minta SBY Tegas Berantas Mafia Hukum	tidak	tidak	tidak
20.	Program Depsos Jangan Basa-basi	tidak	tidak	tidak
21.	Kasus Century Tak Ganggu 100 Hari	tidak	tidak	tidak
22.	Menteri Kelautan Klaim Sukses 100 Hari	tidak	tidak	tidak
23.	Mensos Klaim Program 100 Hari Sukses	tidak	tidak	tidak
24.	Mensos Fokus Tangani Anak Jalanan	tidak	tidak	tidak
25.	100 Hari Bukan Ukuran Kinerja	tidak	tidak	tidak
26.	Program 100 Hari Terpenuhi	tidak	tidak	tidak
27.	Ekonom Nilai Program 100 Hari Belum Substansial	tidak	tidak	tidak
28.	100 Hari Gagal Dilaksanakan	tidak	tidak	tidak
29.	Century Tenggelamkan Program 100 Hari	tidak	tidak	tidak
30.	Satgas Angkat Citra Pemerintah	tidak	tidak	tidak
31.	Kepuasan Terhadap Kinerja Pemerintah Turun	tidak	tidak	tidak
32.	PDIP Nilai Program 100 Hari Hanya Pencitraan	tidak	tidak	tidak

Sumber : *coding sheet*

38) Tabulasi Koding Sub Unit Analisis “*Juxtaposition*”

TABEL 75
Tabulasi Koding Sub Unit Analisis “*Juxtaposition*”
dalam Harian Media Indonesia

No	Judul Berita	Decoder	Coder 1	Coder 2
1.	Menjaga Stabilitas Memanjakan Sektor Riil	tidak	tidak	tidak
2.	Menekan Kemiskinan Hingga 9% di 2014	tidak	tidak	tidak
3.	Mimpi Negara Industri Maju dan Harmonisasi Kebijakan	tidak	tidak	tidak
4.	Tim Ekonomi Janjikan Percepatan Infrastruktur	tidak	tidak	tidak
5.	<i>National Summit</i> Jadi Ajang Penajaman Program	tidak	tidak	tidak
6.	Depkeu Siapkan Fasilitas PPh untuk Industri Prioritas	tidak	tidak	tidak
7.	Mencari Tuan Rumah di Negeri Sendiri	ya	ya	ya
8.	Perombakan Lembaga Hukum Jadi Keniscayaan	tidak	tidak	tidak
9.	Presiden Serukan Ganyang Mafia Hukum	tidak	tidak	tidak
10.	Jalur Selat Sunda Masuk Program 100 Hari	tidak	tidak	tidak
11.	Pemberantasan Mafia dan Pemerataan Ekonomi	tidak	ya	tidak
12.	Menko Perekonomian Buka Akses Kinerja 100 Hari	tidak	tidak	tidak
13.	Kemudahan Pembebasan Tanah Harus Tuntas 100 Hari	tidak	tidak	tidak
14.	Dari Konservasi Alam Hingga Krisis Listrik	tidak	tidak	tidak
15.	Program 100 Hari Ekonomi Masih 60%	tidak	tidak	tidak
16.	Setengah Hati Mencari Energi Pengganti	tidak	tidak	tidak
17.	Layanan Publik yang Kian Mencemaskan	tidak	tidak	tidak
18.	Reformasi Harus Dimulai Dari Kantor Presiden	tidak	tidak	tidak
19.	Dikepung Skandal Bank <i>Century</i>	ya	ya	ya
20.	Program 100 Hari Tidak Realistis	tidak	tidak	tidak
21.	Rencana Aksi Kementrian Perindustrian Mengecewakan	tidak	tidak	tidak
22.	Rapor Biru Kementerian Energi	ya	ya	tidak
23.	Rapor Menkeu dan Menperin Masih Merah	tidak	tidak	tidak
24.	Industri Pertahanan Siap Dibangun	tidak	tidak	tidak
25.	Menpora Harus Seriusi Cabang Prioritas	tidak	tidak	tidak
26.	Seratus Hari ESDM Bukan Cuma Pemanis	tidak	tidak	tidak
27.	Pertamina Dukung Kebijakan Energi Nasional	tidak	tidak	tidak
28.	Genjot Produksi Untuk Jamin Keamanan Pasokan Energi	tidak	tidak	tidak
29.	Pembenahan Layanan Kesehatan Terus Dilakukan	tidak	tidak	tidak
30.	Menanti Sinergi Pendidikan dan Dunia Kerja	tidak	tidak	tidak
31.	Siaga Bencana Jadi Prioritas	tidak	tidak	tidak
32.	Swasembada Tergantung Dana	tidak	tidak	tidak
33.	Percepatan Infrastruktur Kuatkan Daya Saing	tidak	tidak	tidak
34.	Tugas Berat Merumahkan Masyarakat	tidak	tidak	tidak
35.	Keberhasilan KUR Tergantung Sosialisasi	tidak	tidak	tidak
36.	Masih Jalan di Tempat	tidak	tidak	tidak

Sumber : *coding sheet*

TABEL 76
Tabulasi Koding Sub Unit Analisis “Juxtaposition”
dalam Hariian Seputar Indonesia

No	Judul Berita	Decoder	Coder 1	Coder 2
1.	Tim Ekonomi Mulai Konsolidasi	tidak	tidak	tidak
2.	SBY Ingatkan Tidak Ada Keputusan Wapres	tidak	tidak	tidak
3.	Tim Ekonomi Fokus Infrastruktur	tidak	tidak	tidak
4.	Agenda 100 Hari Lebih Dipertajam	tidak	tidak	tidak
5.	Mendiknas Janji Berikan 10.000 Beasiswa	tidak	tidak	tidak
6.	Depag Siapkan Antisipasi Aliran Sesat	tidak	tidak	tidak
7.	Anggaran Jangan Sampai Bengkok	tidak	tidak	tidak
8.	SBY Prioritaskan 15 Program	tidak	tidak	tidak
9.	SBY Deklarasikan Ganyang Mafia	tidak	tidak	tidak
10.	Postur APBN 2010 Aman	tidak	tidak	tidak
11.	Kasus KPK-Century Berdampak Negatif Bagi SBY	tidak	tidak	tidak
12.	Kuntoro Rumuskan Tim Pemberantasan Mafia Hukum	tidak	tidak	tidak
13.	Kinerja Hatta Rajasa Ungguli Agung-Djoko Suyanto	tidak	tidak	tidak
14.	Kasus KPK-Polri Rusak Program 100 Hari	tidak	tidak	tidak
15.	Program 100 Hari Terganjil Dua “DC”	tidak	tidak	tidak
16.	Pemerintah Akan Gratiskan Paspor TKI	tidak	tidak	tidak
17.	Akbar Berharap Tuntas 100 Hari	tidak	tidak	tidak
18.	Depbudpar Gelar Festival Sasando	tidak	tidak	tidak
19.	PDP Minta SBY Tegas Berantas Mafia Hukum	tidak	tidak	tidak
20.	Program Depsos Jangan Basa-basi	tidak	tidak	tidak
21.	Kasus Century Tak Ganggu 100 Hari	tidak	tidak	tidak
22.	Menteri Kelautan Klaim Sukses 100 Hari	tidak	tidak	tidak
23.	Mensos Klaim Program 100 Hari Sukses	tidak	tidak	tidak
24.	Mensos Fokus Tangani Anak Jalanan	tidak	tidak	tidak
25.	100 Hari Bukan Ukuran Kinerja	tidak	tidak	tidak
26.	Program 100 Hari Terpenuhi	tidak	tidak	tidak
27.	Ekonom Nilai Program 100 Hari Belum Substansial	tidak	tidak	tidak
28.	100 Hari Gagal Dilaksanakan	tidak	tidak	tidak
29.	Century Tenggelamkan Program 100 Hari	tidak	tidak	tidak
30.	Satgas Angkat Citra Pemerintah	tidak	tidak	tidak
31.	Kepuasan Terhadap Kinerja Pemerintah Turun	tidak	tidak	tidak
32.	PDIP Nilai Program 100 Hari Hanya Pencitraan	tidak	tidak	tidak

Sumber : coding sheet

39) Tabulasi Koding Sub Unit Analisis “Linkages”

TABEL 77
 Tabulasi Koding Sub Unit Analisis “Linkages”
 dalam Harian Media Indonesia

No	Judul Berita	Decoder	Coder 1	Coder 2
1.	Menjaga Stabilitas Memanjakan Sektor Riil	tidak	tidak	tidak
2.	Menekan Kemiskinan Hingga 9% di 2014	tidak	tidak	tidak
3.	Mimpi Negara Industri Maju dan Harmonisasi Kebijakan	tidak	tidak	tidak
4.	Tim Ekonomi Janjikan Percepatan Infrastruktur	tidak	tidak	tidak
5.	National Summit Jadi Ajang Penajaman Program	tidak	tidak	tidak
6.	Depkeu Siapkan Fasilitas PPh untuk Industri Prioritas	tidak	tidak	tidak
7.	Mencari Tuan Rumah di Negeri Sendiri	tidak	tidak	tidak
8.	Perombakan Lembaga Hukum Jadi Keniscayaan	tidak	tidak	tidak
9.	Presiden Serukan Ganyang Mafia Hukum	tidak	tidak	tidak
10.	Jalur Selat Sunda Masuk Program 100 Hari	tidak	tidak	tidak
11.	Pemberantasan Mafia dan Pemerataan Ekonomi	tidak	tidak	tidak
12.	Menko Perekonomian Buka Akses Kinerja 100 Hari	tidak	tidak	tidak
13.	Kemudahan Pembebasan Tanah Harus Tuntas 100 Hari	tidak	tidak	tidak
14.	Dari Konservasi Alam Hingga Krisis Listrik	tidak	tidak	tidak
15.	Program 100 Hari Ekonomi Masih 60%	tidak	tidak	tidak
16.	Setengah Hati Mencari Energi Pengganti	tidak	tidak	tidak
17.	Layanan Publik yang Kian Mencemaskan	tidak	tidak	tidak
18.	Reformasi Harus Dimulai Dari Kantor Presiden	tidak	tidak	tidak
19.	Dikepung Skandal Bank Century	tidak	tidak	tidak
20.	Program 100 Hari Tidak Realistis	tidak	tidak	tidak
21.	Rencana Aksi Kementrian Perindustrian Mengecewakan	tidak	tidak	tidak
22.	Rapor Biru Kementerian Energi	tidak	tidak	tidak
23.	Rapor Menkeu dan Menperin Masih Merah	tidak	tidak	tidak
24.	Industri Pertahanan Siap Dibangun	tidak	tidak	tidak
25.	Menpora Harus Seriusi Cabang Prioritas	tidak	tidak	tidak
26.	Seratus Hari ESDM Bukan Cuma Pemanis	tidak	tidak	tidak
27.	Pertamina Dukung Kebijakan Energi Nasional	tidak	tidak	tidak
28.	Genjot Produksi Untuk Jamin Keamanan Pasokan Energi	tidak	tidak	tidak
29.	Pembenahan Layanan Kesehatan Terus Dilakukan	tidak	tidak	tidak
30.	Menanti Sinergi Pendidikan dan Dunia Kerja	tidak	tidak	tidak
31.	Siaga Bencana Jadi Prioritas	tidak	tidak	tidak
32.	Swasembada Tergantung Dana	tidak	tidak	tidak
33.	Percepatan Infrastruktur Kuatkan Daya Saing	tidak	tidak	tidak
34.	Tugas Berat Merumahkan Masyarakat	tidak	tidak	tidak
35.	Keberhasilan KUR Tergantung Sosialisasi	tidak	tidak	tidak
36.	Masih Jalan di Tempat	ya	tidak	ya

Sumber : coding sheet

TABEL 78
Tabulasi Koding Sub Unit Analisis “Linkages”
dalam Harian Seputar Indonesia

No	Judul Berita	Decoder	Coder 1	Coder 2
1.	Tim Ekonomi Mulai Konsolidasi	tidak	tidak	tidak
2.	SBY Ingatkan Tidak Ada Keputusan Wapres	tidak	tidak	tidak
3.	Tim Ekonomi Fokus Infrastruktur	tidak	tidak	tidak
4.	Agenda 100 Hari Lebih Dipertajam	tidak	tidak	tidak
5.	Mendiknas Janji Berikan 10.000 Beasiswa	tidak	tidak	tidak
6.	Depag Siapkan Antisipasi Aliran Sesat	tidak	tidak	tidak
7.	Anggaran Jangan Sampai Bengkok	tidak	tidak	tidak
8.	SBY Prioritaskan 15 Program	ya	ya	tidak
9.	SBY Deklarasikan Ganyang Mafia	tidak	tidak	tidak
10.	Postur APBN 2010 Aman	tidak	tidak	tidak
11.	Kasus KPK-Century Berdampak Negatif Bagi SBY	tidak	tidak	tidak
12.	Kuntoro Rumuskan Tim Pemberantasan Mafia Hukum	tidak	tidak	tidak
13.	Kinerja Hatta Rajasa Ungguli Agung-Djoko Suyanto	tidak	tidak	tidak
14.	Kasus KPK-Polri Rusak Program 100 Hari	tidak	tidak	tidak
15.	Program 100 Hari Terganjil Dua “DC”	ya	ya	ya
16.	Pemerintah Akan Gratiskan Paspor TKI	tidak	tidak	tidak
17.	Akbar Berharap Tuntas 100 Hari	tidak	tidak	tidak
18.	Depbudpar Gelar Festival Sasando	tidak	tidak	tidak
19.	PDP Minta SBY Tegas Berantas Mafia Hukum	ya	ya	tidak
20.	Program Depsos Jangan Basa-basi	tidak	tidak	tidak
21.	Kasus Century Tak Ganggu 100 Hari	tidak	tidak	tidak
22.	Menteri Kelautan Klaim Sukses 100 Hari	tidak	tidak	tidak
23.	Mensos Klaim Program 100 Hari Sukses	tidak	tidak	tidak
24.	Mensos Fokus Tangani Anak Jalanan	tidak	tidak	tidak
25.	100 Hari Bukan Ukuran Kinerja	tidak	tidak	tidak
26.	Program 100 Hari Terpenuhi	tidak	tidak	tidak
27.	Ekonom Nilai Program 100 Hari Belum Substansial	tidak	tidak	tidak
28.	100 Hari Gagal Dilaksanakan	tidak	tidak	tidak
29.	Century Tenggelamkan Program 100 Hari	tidak	tidak	tidak
30.	Satgas Angkat Citra Pemerintah	tidak	tidak	tidak
31.	Kepuasan Terhadap Kinerja Pemerintah Turun	tidak	tidak	tidak
32.	PDIP Nilai Program 100 Hari Hanya Pencitraan	tidak	tidak	tidak

Sumber : coding sheet

Lampiran 4:

Uji Reliabilitas Penelitian 100 Hari Kinerja Kabinet Indonesia Bersatu Kedua

1. Uji Reliabilitas Sub Unit Analisis “Letak Intisari Berita pada Teks Berita”

1.1. Uji Reliabilitas antara Coder 1 dan Peneliti

Pada sub unit analisis ini, antara *coder* 1 dan peneliti diperoleh persamaan jawaban (M) berjumlah 67 teks berita. Langkah pertama yang dilakukan ialah menemukan koefisien reliabilitas dengan rumus Holsti, yaitu:

$$CR (\text{coeficient reliability}) = \frac{2 M}{N1 + N2} = \frac{2 (67)}{(68 + 68)} = \frac{(134)}{(136)} = 0,99$$

Setelah koefisien reliabilitas diperoleh, langkah selanjutnya adalah mencari indeks reliabilitas (*index of reliability*) dengan rumus Scott untuk memperkuat hasil penelitian. Dalam rumus ini, besar koefisien reliabilitas disebut sebagai *observed agreement* (persetujuan yang diperoleh dari penelitian).

TABEL 1
Uji Reliabilitas
Sub Unit Analisis “Letak Intisari Berita pada Teks Berita”
Antara Coder 1 dan Peneliti

Kategori	Frekuensi (f) n = 136	Proporsi dari Total Berita	Kuadrat Proporsi
Di awal	129	0,95	0,9025
Di tengah	7	0,05	0,0025
Di akhir	0	0	0
Jumlah			0,91

Sumber: *coding sheet*

Besar indeks reliabilitas yang diperoleh antara *coder* 1 dan peneliti ialah:

$$Pi = \frac{(\% \text{ Observed Agreement} - \% \text{ Expected Agreement})}{(1 - \% \text{ Expected Agreement})}, \text{ maka}$$

$$Pi = \frac{(0,99 - 0,91)}{(1 - 0,91)} = \frac{0,08}{0,09} = 0,89$$

Dengan demikian besar nilai keterandalan atau indeks reliabilitas yang diperoleh antara *coder* 1 dan peneliti pada sub unit analisis “letak intisari berita (*main point*) pada tubuh teks berita” ialah 89%.

1.2. Uji Reliabilitas antara Coder 2 dan Peneliti

Untuk sub unit analisis “letak intisari berita pada teks berita” pada *coder* 2 dan peneliti diperoleh persamaan jawaban (M) sejumlah 66 teks berita. Dengan menggunakan rumus Holsti, yaitu:

$$CR (\text{coeficient reliability}) = \frac{2 M}{N1 + N2} = \frac{2 (66)}{(68 + 68)} = \frac{(132)}{(136)} = 0,97$$

Setelah koefisien reliabilitas didapatkan maka langkah selanjutnya adalah mencari *index of reliability* dengan rumus Scott.

TABEL 2
Uji Reliabilitas
Sub Unit Analisis “Letak Intisari Berita pada Teks Berita”
Antara *Coder 2* dan Peneliti

Kategori	Frekuensi (f) n = 136	Proporsi dari Total Berita	Kuadrat Proporsi
Di awal	130	0,96	0,9216
Di tengah	6	0,04	0,0016
Di akhir	0	0	0
Jumlah			0,92

Sumber: *coding sheet*

Nilai keterandalan yang diperoleh antara *coder 2* dan peneliti ialah:

$$Pi = \frac{(0,97 - 0,92)}{(1 - 0,92)} = \frac{0,05}{0,08} = 0,63$$

Nilai keterandalan yang diperoleh antara *coder 2* dan peneliti pada sub unit analisis “letak intisari berita pada teks berita” ialah 63%.

Dari kedua penghitungan di atas, maka dapat diperoleh tingkat reliabilitas rata-rata, yakni:

$$Pi \text{ rata - rata} = \frac{Pi \text{ pertama} + Pi \text{ kedua}}{2} = \frac{(0,89 + 0,63)}{2} = \frac{1,52}{2} = 0,76$$

Dengan demikian, tingkat reliabilitas rata-rata yang diperoleh dari kedua *coder* untuk sub unit analisis “letak intisari berita pada teks berita” ialah 76%.

2. Uji Reliabilitas Sub Unit Analisis “Jenis Intisari Berita pada Teks Berita”

2.1. Uji Reliabilitas antara *Coder 1* dan Peneliti

Untuk sub unit analisis ini antara keduanya diperoleh persamaan (M) sejumlah 67 teks berita. Langkah pertama yang dilakukan ialah metode uji reliabilitas dengan rumus dari Ole R. Holsti, yaitu:

$$CR (\text{coeficient reliability}) = \frac{2 M}{N1 + N2} = \frac{2 (67)}{(68 + 68)} = \frac{(134)}{(136)} = 0,98$$

Setelah koefisien reliabilitas didapatkan maka langkah selanjutnya adalah mencari *index of reliability* dengan rumus yang dikembangkan Scott.

TABEL 3
Uji Reliabilitas
Sub Unit Analisis “Jenis Intisari Berita pada Teks Berita”
Antara Coder 1 dan Peneliti

Kategori	Frekuensi (f) n = 136	Proporsi dari Total Berita	Kuadrat Proporsi
Fakta	117	0,86	0,74
Opini	1	0,01	0,0001
Fakta-opini	18	0,13	0,0169
Jumlah			0,76

Sumber: *coding sheet*

Nilai keterandalan yang diperoleh antara *coder 1* dan peneliti ialah:

$$P_i = \frac{(0,98 - 0,76)}{(1 - 0,76)} = \frac{0,22}{0,24} = 0,92$$

Nilai keterandalan yang diperoleh antara *coder 1* dan peneliti pada sub unit analisis “jenis intisari berita” ialah 92%.

2.2. Uji Reliabilitas antara *Coder 2* dan Peneliti

Untuk sub unit analisis “jenis intisari berita pada teks berita” antara keduanya diperoleh persamaan (M) yakni 56 teks berita.

$$CR \text{ (coeficient reliability)} = \frac{2 M}{N_1 + N_2} = \frac{2 (56)}{(68 + 68)} = \frac{(112)}{(136)} = 0,82$$

Setelah koefisien reliabilitas didapatkan maka langkah selanjutnya adalah mencari *index of reliability* dengan rumus yang dikembangkan Scott.

TABEL 4
Uji Reliabilitas
Sub Unit Analisis “Jenis Intisari Berita pada Teks Berita”
Antara Coder 2 dan Peneliti

Kategori	Frekuensi (f) n = 136	Proporsi dari Total Berita	Kuadrat Proporsi
Fakta	117	0,86	0,74
Opini	9	0,07	0,0049
Fakta-opini	10	0,07	0,0049
Jumlah			0,75

Sumber: *coding sheet*

$$P_i = \frac{(0,82 - 0,75)}{(1 - 0,75)} = \frac{0,07}{0,52} = 0,28$$

Nilai keterandalan yang diperoleh antara *coder 2* dan peneliti pada sub unit analisis “jenis intisari berita” ialah 28%.

Dari kedua penghitungan di atas, maka dapat diperoleh tingkat reliabilitas rata-rata, yakni:

$$Pi \text{ rata - rata} = \frac{Pi \text{ pertama} + Pi \text{ kedua}}{2} = \frac{(0,92 + 0,28)}{2} = \frac{1,20}{2} = 0,60$$

Dengan demikian, tingkat reliabilitas rata-rata yang diperoleh dari kedua *coder* untuk sub unit analisis “jenis intisari berita” adalah 60%.

3. Uji Reliabilitas untuk Sub Unit Analisis “Kepadatan Informasi (*Density*)”

3.1. Uji Reliabilitas antara *Coder* 1 dan Peneliti

Untuk uji reliabilitas sub unit analisis “kepadatan informasi” antara *coder* 1 dan peneliti diperoleh persamaan (M) yakni 67 teks berita. Langkah pertama yang dilakukan ialah metode uji reliabilitas dengan rumus dari Ole R. Holsti, yaitu:

$$CR \text{ (coeficient reliability)} = \frac{2 M}{N1 + N2} = \frac{2 (67)}{(68 + 68)} = \frac{(134)}{(136)} = 0,99$$

Setelah koefisien reliabilitas didapatkan maka langkah selanjutnya adalah mencari *index of reliability* dengan rumus yang dikembangkan Scott.

TABEL 5
Uji Reliabilitas
Sub Unit Analisis “Kepadatan Informasi (*Density*)”
Antara *Coder* 1 dan Peneliti

Kategori	Frekuensi (f) n = 136	Proporsi dari Total Berita	Kuadrat Proporsi
Ya	99	0,73	0,53
Tidak	37	0,27	0,07
Jumlah			0,60

Sumber: *coding sheet*

$$Pi = \frac{(0,99-0,60)}{(1-0,60)} = \frac{0,39}{0,40} = 0,98$$

Nilai keterandalan yang diperoleh antara *coder* 1 dan peneliti pada sub unit analisis “kepadatan informasi” ialah 98%.

3.2. Uji Reliabilitas antara *Coder* 2 dan Peneliti

Untuk sub unit analisis “kepadatan informasi” antara *coder* 2 dan peneliti diperoleh persamaan (M) yakni 61 teks berita. Langkah pertama yang dilakukan ialah metode uji reliabilitas dengan rumus dari Ole R. Holsti:

$$CR \text{ (coeficient reliability)} = \frac{2 M}{N1 + N2} = \frac{2 (61)}{(68 + 68)} = \frac{(122)}{(136)} = 0,90$$

Setelah koefisien reliabilitas didapatkan maka langkah selanjutnya adalah mencari *index of reliability* dengan rumus yang dikembangkan Scott. Hal ini dilakukan untuk memperkuat hasil uji reliabilitas di atas.

TABEL 6
Uji Reliabilitas
Sub Unit Analisis “Kepadatan Informasi (*Density*)”
Antara *Coder* 2 dan Peneliti

Kategori	Frekuensi (f) n = 136	Proporsi dari Total Berita	Kuadrat Proporsi
Ya	105	0,77	0,59
Tidak	31	0,23	0,05
Jumlah			0,64

Sumber: *coding sheet*

$$P_i = \frac{(0,90 - 0,64)}{(1 - 0,64)} = \frac{0,26}{0,36} = 0,72$$

Nilai keterandalan yang diperoleh antara *coder* 2 dan peneliti pada sub unit analisis “kepadatan informasi” ialah 72%.

Tingkat reliabilitas rata-rata:

$$P_i \text{ rata-rata} = \frac{P_i \text{ pertama} + P_i \text{ kedua}}{2} = \frac{(0,98 + 0,72)}{2} = \frac{1,70}{2} = 0,85$$

Dengan demikian, tingkat reliabilitas rata-rata yang diperoleh dari kedua *coder* untuk sub unit analisis “kepadatan informasi (*density*)” adalah 85%.

4. Uji Reliabilitas Sub Unit Analisis “Keluasan Informasi (*Breadth*)”

4.1. Uji Reliabilitas antara *Coder* 1 dan Peneliti

Untuk uji reliabilitas sub unit analisis “keluasan informasi” antara *coder* 1 dan peneliti diperoleh persamaan (M) yakni 63 teks berita. Langkah pertama yang dilakukan ialah metode uji reliabilitas dengan rumus dari Ole R. Holsti, yaitu:

$$CR \text{ (coefficient reliability)} = \frac{2M}{N_1 + N_2} = \frac{2(63)}{(68 + 68)} = \frac{(126)}{(136)} = 0,93$$

Setelah koefisien reliabilitas didapatkan maka langkah selanjutnya adalah mencari *index of reliability* dengan rumus yang dikembangkan Scott.

TABEL 7
Uji Reliabilitas
Sub Unit Analisis “Keluasan Informasi (*Breadth*)”
Antara *Coder* 1 dan Peneliti

Kategori	Frekuensi (f) n = 136	Proporsi dari Total Berita	Kuadrat Proporsi
Ya	45	0,33	0,11
Tidak	91	0,67	0,45
Jumlah			0,56

Sumber: *coding sheet*

$$P_i = \frac{(0,93 - 0,56)}{(1 - 0,56)} = \frac{0,37}{0,44} = 0,84$$

Nilai keterandalan yang diperoleh antara *coder* 1 dan peneliti pada sub unit analisis “keluasan informasi” ialah 84%.

4.2. Uji Reliabilitas antara *Coder* 2 dan Peneliti

Untuk sub unit analisis “keluasan informasi” antara *coder* 2 dan peneliti diperoleh persamaan (M) yakni 61 teks berita. Langkah pertama yang dilakukan ialah metode uji reliabilitas dengan rumus dari Ole R. Holsti:

$$CR \text{ (coeficient reliability)} = \frac{2 M}{N_1 + N_2} = \frac{2 (61)}{(68 + 68)} = \frac{(122)}{(136)} = 0,90$$

Setelah koefisien reliabilitas didapatkan maka langkah selanjutnya adalah mencari *index of reliability* dengan rumus yang dikembangkan Scott.

TABEL 8
Uji Reliabilitas
Sub Unit Analisis “Keluasan Informasi (*Breadth*)”
Antara *Coder* 2 dan Peneliti

Kategori	Frekuensi (f) n = 136	Proporsi dari Total Berita	Kuadrat Proporsi
Ya	45	0,33	0,11
Tidak	91	0,67	0,45
Jumlah			0,56

Sumber: *coding sheet*

$$P_i = \frac{(0,90 - 0,56)}{(1 - 0,56)} = \frac{0,34}{0,44} = 0,77$$

Nilai keterandalan yang diperoleh antara *coder* 2 dan peneliti pada sub unit analisis “keluasan informasi” ialah 77%.

Dari kedua penghitungan di atas, maka dapat diperoleh tingkat reliabilitas rata-rata, yakni:

$$P_i \text{ rata - rata} = \frac{P_i \text{ pertama} + P_i \text{ kedua}}{2} = \frac{(0,84 + 0,77)}{2} = \frac{1,61}{2} = 0,81$$

Dengan demikian, tingkat reliabilitas rata-rata yang diperoleh dari kedua *coder* untuk sub unit analisis “keluasan informasi” adalah 81%.

5. Uji Reliabilitas Sub Unit Analisis “Kedalaman Informasi (*Depth*)”

5.1. Uji Reliabilitas antara *Coder* 1 dan Peneliti

Untuk uji reliabilitas sub unit analisis “kedalaman informasi” antara *coder* 1 dan peneliti diperoleh persamaan (M) yakni 67 teks berita. Langkah pertama yang dilakukan ialah metode uji reliabilitas dengan rumus dari Ole R. Holsti, yaitu:

$$CR (\text{coefficient reliability}) = \frac{2 M}{N1 + N2} = \frac{2 (67)}{(68 + 68)} = \frac{(134)}{(136)} = 0,99$$

Setelah koefisien reliabilitas didapatkan maka langkah selanjutnya adalah mencari *index of reliability* dengan rumus yang dikembangkan Scott.

TABEL 9
Uji Reliabilitas
Sub Unit Analisis “Kedalaman Informasi (*Depth*)”
Antara *Coder* 1 dan Peneliti

Kategori	Frekuensi (f) n = 136	Proporsi dari Total Berita	Kuadrat Proporsi
Ya	103	0,76	0,58
Tidak	33	0,24	0,06
Jumlah			0,64

Sumber: *coding sheet*

$$Pi = \frac{(0,99 - 0,64)}{(1 - 0,64)} = \frac{0,35}{0,36} = 0,97$$

Nilai keterandalan yang diperoleh antara *coder* 1 dan peneliti pada sub unit analisis “kedalaman informasi” ialah 97%.

5.2. Uji Reliabilitas antara *Coder* 2 dan Peneliti

Untuk sub unit analisis “kedalaman informasi” antara *coder* 2 dan peneliti diperoleh persamaan (M) yakni 63 teks berita.

$$CR (\text{coefficient reliability}) = \frac{2 M}{N1 + N2} = \frac{2 (63)}{(68 + 68)} = \frac{(126)}{(136)} = 0,93$$

Setelah koefisien reliabilitas didapatkan maka langkah selanjutnya adalah mencari *index of reliability* dengan rumus yang dikembangkan Scott.

TABEL 10
Uji Reliabilitas
Sub Unit Analisis “Kedalaman Informasi (*Depth*)”
Antara *Coder* 2 dan Peneliti

Kategori	Frekuensi (f) n = 136	Proporsi dari Total Berita	Kuadrat Proporsi
Ya	107	0,79	0,62
Tidak	29	0,21	0,04
Jumlah			0,66

Sumber: *coding sheet*

$$Pi = \frac{(0,93 - 0,66)}{(1 - 0,66)} = \frac{0,27}{0,34} = 0,79$$

Nilai keterandalan yang diperoleh antara *coder* 2 dan peneliti pada sub unit analisis “kedalaman informasi” ialah 79%.

Dari kedua penghitungan di atas, maka dapat diperoleh tingkat reliabilitas rata-rata, yakni:

$$Pi \text{ rata - rata} = \frac{Pi \text{ pertama} + Pi \text{ kedua}}{2} = \frac{(0,97 + 0,79)}{2} = \frac{1,76}{2} = 0,88$$

Dengan demikian, tingkat reliabilitas rata-rata yang diperoleh dari kedua *coder* untuk sub unit analisis “kedalaman informasi (*depth*)” adalah 88%.

6. Uji Reliabilitas Sub Unit Analisis “Adanya Pengulangan Frase yang Mengganggu pada Teks Berita”

6.1. Uji Reliabilitas antara *Coder* 1 dan Peneliti

Untuk uji reliabilitas sub unit analisis “adanya pengulangan frase yang mengganggu pada teks berita” antara *coder* 1 dan peneliti diperoleh persamaan (M) yakni 68 teks berita.

$$CR \text{ (coeficient reliability)} = \frac{2 M}{N1 + N2} = \frac{2 (68)}{(68 + 68)} = \frac{(136)}{(136)} = 1$$

Setelah koefisien reliabilitas didapatkan maka langkah selanjutnya adalah mencari *index of reliability* dengan rumus yang dikembangkan Scott.

TABEL 11
Uji Reliabilitas
Sub Unit Analisis “Adanya Pengulangan Frase yang Mengganggu”
Antara *Coder* 1 dan Peneliti

Kategori	Frekuensi (f) n = 136	Proporsi dari Total Berita	Kuadrat Proporsi
Ya	10	0,07	0,0049
Tidak	126	0,93	0,8649
Jumlah			0,87

Sumber: *coding sheet*

$$Pi = \frac{(1 - 0,87)}{(1 - 0,87)} = \frac{0,13}{0,13} = 1$$

Nilai keterandalan yang diperoleh antara *coder* 1 dan peneliti pada sub unit analisis “adanya pengulangan frase yang mengganggu pada teks berita” ialah 100%.

6.2. Uji Reliabilitas antara *Coder* 2 dan Peneliti

Untuk sub unit analisis “adanya pengulangan frase yang mengganggu pada teks berita” antara *coder* 2 dan peneliti diperoleh persamaan (M) sejumlah 65 teks berita. Dengan menggunakan rumus dari Ole R. Holsti, yaitu:

$$CR \text{ (coeficient reliability)} = \frac{2 M}{N1 + N2} = \frac{2 (65)}{(68 + 68)} = \frac{(130)}{(136)} = 0,96$$

Setelah koefisien reliabilitas didapatkan maka langkah selanjutnya adalah mencari *index of reliability* dengan rumus yang dikembangkan Scott.

TABEL 12
Uji Reliabilitas
Sub Unit Analisis “Adanya Pengulangan Frase yang Mengganggu”
Antara Coder 2 dan Peneliti

Kategori	Frekuensi (f) n = 136	Proporsi dari Total Berita	Kuadrat Proporsi
Ya	7	0,05	0,0025
Tidak	129	0,95	0,9025
Jumlah			0,91

Sumber: coding sheet

$$P_i = \frac{(0,96 - 0,91)}{(1 - 0,91)} = \frac{0,05}{0,09} = 0,56$$

Nilai keterandalan yang diperoleh antara coder 2 dan peneliti pada sub unit analisis ini ialah 56%.

Dari kedua penghitungan di atas, maka dapat diperoleh tingkat reliabilitas rata-rata, yakni:

$$P_i \text{ rata - rata} = \frac{P_i \text{ pertama} + P_i \text{ kedua}}{2} = \frac{(1 + 0,56)}{2} = \frac{1,56}{2} = 0,78$$

Dengan demikian, tingkat reliabilitas rata-rata yang diperoleh dari kedua coder untuk sub unit analisis “adanya pengulangan frase yang mengganggu pada teks berita” adalah 78%.

7. Uji Reliabilitas Sub Unit “Adanya Kalimat Anak yang Mendukung Intisari Berita”

7.1. Uji Reliabilitas antara Coder 1 dan Peneliti

Untuk sub unit analisis “adanya kalimat anak yang mendukung intisari berita” antara coder 1 dan peneliti diperoleh persamaan (M) yakni 64 teks berita. Langkah pertama yang dilakukan ialah metode uji reliabilitas dengan rumus dari Ole R. Holsti, yaitu:

$$CR \text{ (coeficient reliability)} = \frac{2 M}{N_1 + N_2} = \frac{2 (64)}{(68 + 68)} = \frac{(128)}{(136)} = 0,94$$

Langkah selanjutnya mencari *index of reliability* dengan rumus Scott.

TABEL 13
Uji Reliabilitas
Sub Unit Analisis “Adanya Kalimat Anak yang Mendukung Intisari Berita”
Antara Coder 1 dan Peneliti

Kategori	Frekuensi (f) n = 136	Proporsi dari Total Berita	Kuadrat Proporsi
Ya	70	0,51	0,26
Tidak	66	0,49	0,24
Jumlah			0,50

Sumber: coding sheet

$$P_i = \frac{(0,94 - 0,50)}{(1 - 0,50)} = \frac{0,44}{0,50} = 0,88$$

Nilai keterandalan yang diperoleh antara *coder* 1 dan peneliti pada sub unit analisis “adanya kalimat anak yang mendukung intisari berita” ialah 88%.

7.2. Uji Reliabilitas antara *Coder* 2 dan Peneliti

Untuk sub unit analisis “adanya kalimat anak yang mendukung intisari berita” antara *coder* 2 dan peneliti diperoleh persamaan (M) yakni 60 teks berita. Langkah pertama yang dilakukan ialah metode uji reliabilitas dengan rumus dari Ole R. Holsti:

$$CR \text{ (coeficient reliability)} = \frac{2 M}{N_1 + N_2} = \frac{2 (60)}{(68 + 68)} = \frac{(120)}{(136)} = 0,88$$

Setelah koefisien reliabilitas didapatkan maka langkah selanjutnya adalah mencari *index of reliability* dengan rumus yang dikembangkan Scott.

TABEL 14
Uji Reliabilitas
Sub Unit Analisis “Adanya Kalimat Anak yang Mendukung Intisari Berita”
Antara *Coder* 2 dan Peneliti

Kategori	Frekuensi (f) n = 136	Proporsi dari Total Berita	Kuadrat Proporsi
Ya	77	0,57	0,32
Tidak	59	0,43	0,18
Jumlah			0,50

Sumber: *coding sheet*

$$P_i = \frac{(0,88 - 0,50)}{(1 - 0,50)} = \frac{0,38}{0,50} = 0,76$$

Nilai keterandalan yang diperoleh antara *coder* 2 dan dan peneliti pada sub unit analisis “adanya kalimat anak yang mendukung intisari berita” ialah 76%.

Dari kedua penghitungan di atas, maka dapat diperoleh tingkat reliabilitas rata-rata, yakni:

$$P_i \text{ rata - rata} = \frac{P_i \text{ pertama} + P_i \text{ kedua}}{2} = \frac{(0,88 + 0,76)}{2} = \frac{1,64}{2} = 0,82$$

Dengan demikian, tingkat reliabilitas rata-rata yang diperoleh dari kedua *coder* untuk sub unit analisis “adanya kalimat anak yang mendukung intisari berita” adalah 82%.

8. Uji Reliabilitas Sub Unit Analisis “Adanya Penggunaan Istilah Khusus atau Asing yang Mengganggu”

8.1. Uji Reliabilitas antara *Coder* 1 dan Peneliti

Untuk sub unit analisis “adanya penggunaan istilah khusus atau asing yang mengganggu” antara *coder* 1 dan peneliti diperoleh persamaan (M) yakni 66 teks berita.

Langkah pertama yang dilakukan ialah metode uji reliabilitas dengan rumus dari Ole R. Holsti:

$$CR \text{ (coefficient reliability)} = \frac{2 M}{N1 + N2} = \frac{2 (66)}{(68 + 68)} = \frac{(132)}{(136)} = 0,97$$

Setelah koefisien reliabilitas didapatkan maka langkah selanjutnya adalah mencari *index of reliability* dengan rumus yang dikembangkan Scott.

TABEL 15
Uji Reliabilitas
Sub Unit Analisis “Adanya Penggunaan Istilah Khusus yang Mengganggu”
Antara *Coder 1* dan Peneliti

Kategori	Frekuensi (f) n = 136	Proporsi dari Total Berita	Kuadrat Proporsi
Ya	52	0,38	0,1444
Tidak	84	0,62	0,3844
Jumlah			0,53

Sumber: *coding sheet*

$$Pi = \frac{(0,97-0,53)}{(1-0,53)} = \frac{0,44}{0,47} = 0,94$$

Nilai keterandalan yang diperoleh antara *coder 1* dan peneliti pada sub unit analisis “adanya penggunaan istilah khusus atau asing yang mengganggu” ialah 94%.

8.2. Uji Reliabilitas antara *Coder 2* dan Peneliti

Untuk sub unit analisis “adanya penggunaan istilah khusus atau asing yang mengganggu” antara *coder 2* dan peneliti diperoleh persamaan (M) yakni 62 teks berita. Langkah pertama yang dilakukan ialah metode uji reliabilitas dengan rumus dari Ole R. Holsti:

$$CR \text{ (coefficient reliability)} = \frac{2 M}{N1 + N2} = \frac{2 (62)}{(68 + 68)} = \frac{(124)}{(136)} = 0,91$$

Setelah koefisien reliabilitas didapatkan maka langkah selanjutnya adalah mencari *index of reliability* dengan rumus yang dikembangkan Scott.

TABEL 16
Uji Reliabilitas
Sub Unit Analisis “Adanya Penggunaan Istilah Khusus yang Mengganggu”
Antara *Coder 2* dan Peneliti

Kategori	Frekuensi (f) n = 136	Proporsi dari Total Berita	Kuadrat Proporsi
Ya	48	0,35	0,12
Tidak	88	0,65	0,42
Jumlah			0,54

Sumber: *coding sheet*

$$P_i = \frac{(0,91-0,54)}{(1-0,54)} = \frac{0,37}{0,46} = 0,80$$

Nilai keterandalan yang diperoleh antara *coder* 2 dan peneliti pada sub unit analisis “adanya penggunaan istilah khusus atau asing yang mengganggu” ialah 80%.

Dari kedua penghitungan di atas, maka dapat diperoleh tingkat reliabilitas rata-rata, yakni:

$$P_i \text{ rata-rata} = \frac{P_i \text{ pertama} + P_i \text{ kedua}}{2} = \frac{(0,94 + 0,80)}{2} = \frac{1,74}{2} = 0,87$$

Dengan demikian, tingkat reliabilitas rata-rata yang diperoleh dari kedua *coder* untuk sub unit analisis “adanya penggunaan istilah khusus atau asing yang mengganggu” adalah 87%.

9. Uji Reliabilitas Sub Unit Analisis “Adanya Sumber Rujukan yang Jelas”

9.1. Uji Reliabilitas antara *Coder* 1 dan Peneliti

Untuk sub unit analisis “adanya sumber rujukan yang jelas” antara *coder* 1 dan peneliti diperoleh persamaan jawaban (M) sejumlah 68 teks berita. *CR* (*coeficient reliability*) =

$$\frac{2M}{N_1+N_2} = \frac{2(68)}{(68+68)} = \frac{(136)}{(136)} = 1$$

Setelah koefisien reliabilitas didapatkan maka langkah selanjutnya adalah mencari *index of reliability* dengan rumus yang dikembangkan Scott.

TABEL 17
Uji Reliabilitas
Sub Unit Analisis “Adanya Sumber Rujukan yang Jelas”
Antara *Coder* 1 dan Peneliti

Kategori	Frekuensi (f) n = 136	Proporsi dari Total Berita	Kuadrat Proporsi
Ya	126	0,93	0,8649
Tidak	10	0,07	0,0049
Jumlah			0,87

Sumber: *coding sheet*

$$P_i = \frac{(1 - 0,87)}{(1 - 0,87)} = \frac{0,13}{0,13} = 1$$

Nilai keterandalan yang diperoleh antara *coder* 1 dan peneliti pada sub unit analisis “adanya sumber rujukan yang jelas” ialah 100%.

9.2. Uji Reliabilitas antara *Coder* 2 dan Peneliti

Untuk sub unit analisis “adanya sumber rujukan yang jelas” antara *coder* 2 dan peneliti diperoleh persamaan (M) sejumlah 64 teks berita. Dengan menggunakan rumus dari Ole R. Holsti, yaitu:

$$CR \text{ (coefficient reliability)} = \frac{2 M}{N1 + N2} = \frac{2 (64)}{(68 + 68)} = \frac{(128)}{(136)} = 0,94$$

Setelah koefisien reliabilitas didapatkan maka langkah selanjutnya adalah mencari *index of reliability* dengan rumus yang dikembangkan Scott.

TABEL 18
Uji Reliabilitas
Sub Unit Analisis “Adanya Sumber Rujukan yang Jelas”
Antara *Coder* 2 dan Peneliti

Kategori	Frekuensi (f) n = 136	Proporsi dari Total Berita	Kuadrat Proporsi
Ya	126	0,93	0,8649
Tidak	10	0,07	0,0049
Jumlah			0,87

Sumber: *coding sheet*

$$P_i = \frac{(0,94 - 0,87)}{(1 - 0,87)} = \frac{0,07}{0,13} = 0,54$$

Nilai keterandalan yang diperoleh antara *coder* 2 dan peneliti pada sub unit analisis “adanya sumber rujukan yang jelas” ialah 54%.

Dari kedua penghitungan di atas, maka dapat diperoleh tingkat reliabilitas rata-rata, yakni:

$$P_i \text{ rata - rata} = \frac{P_i \text{ pertama} + P_i \text{ kedua}}{2} = \frac{(1 + 0,54)}{2} = 0,77$$

Dengan demikian, tingkat reliabilitas rata-rata yang diperoleh dari kedua *coder* untuk sub unit analisis “adanya sumber rujukan yang jelas” adalah 77%.

10. Uji Reliabilitas Sub Unit Analisis “Adanya Sumber Rujukan Anonim”

10.1. Uji Reliabilitas antara *Coder* 1 dan Peneliti

Untuk sub unit analisis “adanya sumber rujukan yang anonim” antara *coder* 1 dan peneliti diperoleh persamaan (M) sejumlah 68 teks berita. Langkah pertama yang dilakukan ialah metode uji reliabilitas dengan rumus dari Ole R. Holsti, yaitu:

$$CR \text{ (coefficient reliability)} = \frac{2 M}{N1+N2} = \frac{2 (68)}{(68 + 68)} = \frac{(136)}{(136)} = 1$$

Setelah koefisien reliabilitas didapatkan maka langkah selanjutnya adalah mencari *index of reliability* dengan rumus yang dikembangkan Scott.

TABEL 19
Uji Reliabilitas
Sub Unit Analisis “Adanya Sumber Rujukan yang Anonim”
Antara Coder 1 dan Peneliti

Kategori	Frekuensi (f) n = 136	Proporsi dari Total Berita	Kuadrat Proporsi
Ya	0	0	0
Tidak	136	1	1
Jumlah			1

Sumber: *coding sheet*

$$P_i = \frac{(1 - 1)}{(1 - 1)} = \frac{0}{0} = 1$$

Nilai keterandalan yang diperoleh antara *coder* 1 dan peneliti pada sub unit analisis “adanya sumber rujukan yang anonim” ialah 100%.

10.2. Uji Reliabilitas antara *Coder* 2 dan Peneliti

Untuk sub unit analisis “adanya sumber rujukan yang anonim” antara *coder* 2 dan peneliti diperoleh persamaan (M) sejumlah 68 teks berita. Dengan menggunakan rumus dari Ole R. Holsti, yaitu:

$$CR \text{ (coeficient reliability)} = \frac{2 M}{N_1 + N_2} = \frac{2 (68)}{(68 + 68)} = \frac{(136)}{(136)} = 1$$

Setelah koefisien reliabilitas didapatkan maka langkah selanjutnya adalah mencari *index of reliability* dengan rumus yang dikembangkan Scott.

TABEL 20
Uji Reliabilitas
Sub Unit Analisis “Adanya Sumber Rujukan yang Anonim”
Antara Coder 2 dan Peneliti

Kategori	Frekuensi (f) n = 136	Proporsi dari Total Berita	Kuadrat Proporsi
Ya	0	0	0
Tidak	136	1	1
Jumlah			1

Sumber: *coding sheet*

$$P_i = \frac{(1 - 1)}{(1 - 1)} = \frac{0}{0} = 1$$

Nilai keterandalan yang diperoleh antara *coder* 2 dan peneliti pada sub unit analisis “adanya sumber rujukan yang anonim” ialah 100%.

Dari kedua penghitungan di atas, maka dapat diperoleh tingkat reliabilitas rata-rata, yakni:

$$Pi \text{ rata - rata} = \frac{Pi \text{ pertama} + Pi \text{ kedua}}{2} = \frac{(1 + 1)}{2} = 1$$

Dengan demikian, tingkat reliabilitas rata-rata yang diperoleh dari kedua *coder* untuk sub unit analisis “adanya sumber rujukan yang anonim” adalah 100%.

11. Uji Reliabilitas Sub Unit Analisis “Adanya Cek-Ricek oleh Wartawan”

11.1. Uji Reliabilitas antara *Coder* 1 dan Peneliti

Untuk sub unit analisis “adanya cek dan ricek berita oleh wartawan” antara *coder* 1 dan peneliti diperoleh persamaan (M) sejumlah 68 teks berita. Langkah pertama yang dilakukan ialah metode uji reliabilitas dengan rumus dari Ole R. Holsti, yaitu:

$$CR \text{ (coeficient reliability)} = \frac{2 M}{N1 + N2} = \frac{2 (68)}{(68 + 68)} = \frac{(136)}{(136)} = 1$$

Setelah koefisien reliabilitas didapatkan maka langkah selanjutnya adalah mencari *index of reliability* dengan rumus yang dikembangkan Scott.

TABEL 21
Uji Reliabilitas
Sub Unit Analisis “Adanya Cek-Ricek Oleh Wartawan”
Antara *Coder* 1 dan Peneliti

Kategori	Frekuensi (f) n = 136	Proporsi dari Total Berita	Kuadrat Proporsi
Ya	126	0,93	0,8649
Tidak	10	0,07	0,0049
Jumlah			0,87

Sumber: *coding sheet*

$$Pi = \frac{(1 - 0,87)}{(1 - 0,87)} = \frac{0,13}{0,13} = 1$$

Nilai keterandalan yang diperoleh antara *coder* 1 dan peneliti pada sub unit analisis “adanya cek dan ricek berita oleh wartawan” ialah 100%.

11.2. Uji Reliabilitas antara *Coder* 2 dan Peneliti

Untuk sub unit analisis “adanya cek dan ricek berita oleh wartawan” antara *coder* 2 dan peneliti diperoleh persamaan (M) sejumlah 64 teks berita. Dengan menggunakan rumus dari Ole R. Holsti, yaitu:

$$CR \text{ (coeficient reliability)} = \frac{2 M}{N1 + N2} = \frac{2 (64)}{(68 + 68)} = \frac{(128)}{(136)} = 0,94$$

Setelah koefisien reliabilitas didapatkan maka langkah selanjutnya adalah mencari *index of reliability* dengan rumus yang dikembangkan Scott.

TABEL 22
Uji Reliabilitas
Sub Unit Analisis “Adanya Cek-Ricek oleh Wartawan”
Antara Coder 2 dan Peneliti

Kategori	Frekuensi (f) n = 136	Proporsi dari Total Berita	Kuadrat Proporsi
Ya	126	0,93	0,8649
Tidak	10	0,07	0,0049
Jumlah			0,87

Sumber: coding sheet

$$P_i = \frac{(0,94 - 0,87)}{(1 - 0,87)} = \frac{0,07}{0,13} = 0,54$$

Nilai keterandalan yang diperoleh antara *coder* 2 dan peneliti pada sub unit analisis “adanya cek dan ricek berita oleh wartawan” ialah 54%.

$$P_i \text{ rata - rata} = \frac{P_i \text{ pertama} + P_i \text{ kedua}}{2} = \frac{(1 + 0,54)}{2} = \frac{1,54}{2} = 0,77$$

Dengan demikian, tingkat reliabilitas rata-rata yang diperoleh dari kedua *coder* untuk sub unit analisis “adanya cek dan ricek berita oleh wartawan” adalah 77%.

12. Uji Reliabilitas Sub Unit Analisis “Ada Kelalaian Mencantumkan Sumber”

12.1. Uji Reliabilitas antara Coder 1 dan Peneliti

Untuk sub unit analisis “adanya kelalaian mencantumkan sumber berita” antara *coder* 1 dan peneliti diperoleh persamaan (M) sejumlah 68 teks berita. Langkah pertama yang dilakukan ialah metode uji reliabilitas dengan rumus dari Ole R. Holsti, yaitu:

$$CR \text{ (coeficient reliability)} = \frac{2M}{N_1 + N_2} = \frac{2(68)}{(68 + 68)} = \frac{(136)}{(136)} = 1$$

Setelah koefisien reliabilitas didapatkan maka langkah selanjutnya adalah mencari *index of reliability* dengan rumus yang dikembangkan Scott.

TABEL 23
Uji Reliabilitas
Sub Unit Analisis “Ada Kelalaian Mencantumkan Sumber”
Antara Coder 1 dan Peneliti

Kategori	Frekuensi (f) n = 136	Proporsi dari Total Berita	Kuadrat Proporsi
Ya	6	0,04	0,0016
Tidak	130	0,96	0,92
Jumlah			0,92

Sumber: coding sheet

$$P_i = \frac{(1 - 0,92)}{(1 - 0,92)} = \frac{0,08}{0,08} = 1$$

Nilai keterandalan atau indeks reliabilitas yang diperoleh antara *coder* 1 dan peneliti pada sub unit analisis “adanya kelalaian mencantumkan sumber berita” ialah 1 atau 100%.

12.2. Uji Reliabilitas antara *Coder* 2 dan Peneliti

Untuk sub unit analisis “adanya kelalaian mencantumkan sumber berita” antara *coder* 2 dan peneliti diperoleh persamaan (M) sejumlah 66 teks berita. Dengan menggunakan rumus dari Ole R. Holsti, yaitu:

$$CR \text{ (coeficient reliability)} = \frac{2 M}{N1 + N2} = \frac{2 (66)}{(68 + 68)} = \frac{(124)}{(136)} = 0,97$$

Setelah koefisien reliabilitas didapatkan maka langkah selanjutnya adalah mencari *index of reliability* dengan rumus yang dikembangkan Scott.

TABEL 24
Uji Reliabilitas
Sub Unit Analisis “Ada Kelalaian Mencantumkan Sumber”
Antara *Coder* 2 dan Peneliti

Kategori	Frekuensi (f) n = 136	Proporsi dari Total Berita	Kuadrat Proporsi
Ya	4	0,03	0,0009
Tidak	132	0,97	0,94
Jumlah			0,94

Sumber: *coding sheet*

$$P_i = \frac{(0,97-0,94)}{(1-0,94)} = \frac{0,03}{0,06} = 0,50$$

Nilai keterandalan yang diperoleh antara *coder* 2 dan peneliti pada sub unit analisis “adanya kelalaian mencantumkan sumber berita” ialah 50%.

Dari kedua penghitungan di atas, maka dapat diperoleh tingkat reliabilitas rata-rata, yakni:

$$P_i \text{ rata - rata} = \frac{P_i \text{ pertama} + P_i \text{ kedua}}{2} = \frac{(1 + 0,50)}{2} = \frac{1,50}{2} = 0,75$$

Dengan demikian, tingkat reliabilitas rata-rata yang diperoleh dari kedua *coder* untuk sub unit analisis “adanya kelalaian mencantumkan sumber berita” adalah 75%.

13. Uji Reliabilitas Sub Unit Analisis “Adanya Kesalahan Pengutipan Nama Narasumber”

13.1. Uji Reliabilitas antara *Coder* 1 dan Peneliti

Untuk sub unit analisis “adanya kesalahan pengutipan nama narasumber” antara *coder* 1 dan peneliti diperoleh persamaan (M) sejumlah 68 teks berita. Langkah pertama yang dilakukan ialah metode uji reliabilitas dengan rumus dari Ole R. Holsti, yaitu:

$$CR \text{ (coeficient reliability)} = \frac{2 M}{N1+N2} = \frac{2 (68)}{(68 +68)} = \frac{(136)}{(136)} = 1$$

Setelah koefisien reliabilitas didapatkan maka langkah selanjutnya adalah mencari *index of reliability* dengan rumus yang dikembangkan Scott.

TABEL 25
Uji Reliabilitas
Sub Unit Analisis “Adanya Kesalahan Pengutipan Nama Narasumber”
Antara *Coder 1* dan Peneliti

Kategori	Frekuensi (f) n = 136	Proporsi dari Total Berita	Kuadrat Proporsi
Ya	2	0,01	0,0001
Tidak	134	0,99	0,98
Jumlah			0,98

Sumber: *coding sheet*

$$P_i = \frac{(1-0,98)}{(1-0,98)} = \frac{0,02}{0,02} = 1$$

Nilai keterandalan yang diperoleh antara *coder 1* dan peneliti pada sub unit analisis “adanya kesalahan pengutipan nama narasumber” ialah 100%.

13.2. Uji Reliabilitas antara *Coder 2* dan Peneliti

Untuk sub unit analisis “adanya kesalahan pengutipan nama narasumber” antara *coder 2* dan peneliti diperoleh persamaan (M) sejumlah 67 teks berita. Dengan menggunakan rumus dari Ole R. Holsti, yaitu:

$$CR \text{ (coeficient reliability)} = \frac{2 M}{N_1 + N_2} = \frac{2 (67)}{(68 + 68)} = \frac{(134)}{(136)} = 0,99$$

Setelah koefisien reliabilitas didapatkan maka langkah selanjutnya adalah mencari *index of reliability* dengan rumus yang dikembangkan Scott.

TABEL 26
Uji Reliabilitas
Sub Unit Analisis “Adanya Kesalahan Pengutipan Nama Narasumber”
Antara *Coder 2* dan Peneliti

Sub Unit	Frekuensi (f) n = 136	Proporsi dari Total Berita	Kuadrat Proporsi
Ya	1	0,01	0,0001
Tidak	135	0,99	0,98
Jumlah			0,98

Sumber: *coding sheet*

$$P_i = \frac{(0,99 - 0,98)}{(1 - 0,98)} = \frac{0,01}{0,02} = 0,50$$

Nilai keterandalan yang diperoleh antara *coder 2* dan peneliti pada sub unit analisis “adanya kesalahan pengutipan nama narasumber” ialah 50%.

Dari kedua penghitungan di atas, maka dapat diperoleh tingkat reliabilitas rata-rata, yakni:

$$Pi \text{ rata-rata} = \frac{Pi \text{ pertama} + Pi \text{ kedua}}{2} = \frac{(1 + 0,50)}{2} = 0,75$$

Dengan demikian, tingkat reliabilitas rata-rata yang diperoleh dari kedua *coder* untuk sub unit analisis “adanya kesalahan pengutipan nama narasumber” adalah 75%.

14. Uji Reliabilitas Sub Unit Analisis “Adanya Sumber Berita Kompeten di Luar Pemerintah”

14.1. Uji Reliabilitas antara *Coder* 1 dan Peneliti

Untuk sub unit analisis “adanya sumber berita kompeten di luar pemerintah” antara *coder* 1 dan peneliti diperoleh persamaan (M) sejumlah 66 teks berita. Langkah pertama yang dilakukan ialah metode uji reliabilitas dengan rumus dari Ole R. Holsti:

$$CR \text{ (coefficient reliability)} = \frac{2M}{N1+N2} = \frac{2(66)}{(68+68)} = \frac{(132)}{(136)} = 0,97$$

Setelah koefisien reliabilitas didapatkan maka langkah selanjutnya adalah mencari *index of reliability* dengan rumus yang dikembangkan Scott.

TABEL 27
Uji Reliabilitas
Sub Unit Analisis “Adanya Sumber Berita Kompeten di Luar Pemerintah”
Antara *Coder* 1 dan Peneliti

Kategori	Frekuensi (f) n = 136	Proporsi dari Total Berita	Kuadrat Proporsi
Ya	78	0,57	0,32
Tidak	58	0,43	0,18
Jumlah			0,50

Sumber: *coding sheet*

$$Pi = \frac{(0,97-0,50)}{(1-0,50)} = \frac{0,47}{0,50} = 0,94$$

Nilai keterandalan yang diperoleh antara *coder* 1 dan peneliti pada sub unit analisis “adanya sumber berita di luar pemerintah” ialah 94%.

14.2. Uji Reliabilitas antara *Coder* 2 dan Peneliti

Untuk sub unit analisis “adanya sumber berita di luar pemerintah” antara *coder* 2 dan peneliti diperoleh persamaan (M) yakni 64 teks berita. Langkah pertama yang dilakukan ialah metode uji reliabilitas dengan rumus dari Ole R. Holsti:

$$CR \text{ (coefficient reliability)} = \frac{2M}{N1+N2} = \frac{2(64)}{(68+68)} = \frac{(128)}{(136)} = 0,94$$

Setelah koefisien reliabilitas didapatkan maka langkah selanjutnya adalah mencari *index of reliability* dengan rumus yang dikembangkan Scott.

TABEL 28
Uji Reliabilitas
Sub Unit Analisis “Adanya Sumber Berita Kompeten di Luar Pemerintah”
Antara Coder 2 dan Peneliti

Kategori	Frekuensi (f) n = 136	Proporsi dari Total Berita	Kuadrat Proporsi
Ya	76	0,56	0,31
Tidak	60	0,44	0,19
Jumlah			0,50

Sumber: *coding sheet*

$$P_i = \frac{(0,94 - 0,50)}{(1 - 0,50)} = \frac{0,44}{0,50} = 0,88$$

Nilai keterandalan yang diperoleh antara *coder 2* dan dan peneliti pada sub unit analisis “adanya sumber berita di luar pemerintah” ialah 88%.

Dari kedua penghitungan di atas, maka dapat diperoleh tingkat reliabilitas rata-rata, yakni:

$$P_i \text{ rata - rata} = \frac{P_i \text{ pertama} + P_i \text{ kedua}}{2} = \frac{(0,94 + 0,88)}{2} = \frac{1,82}{2} = 0,91$$

Dengan demikian, tingkat reliabilitas rata-rata yang diperoleh dari kedua *coder* untuk sub unit analisis “adanya sumber berita di luar pemerintah” adalah 91%.

15. Uji Reliabilitas Sub Unit ”Adanya Sumber Berita Resmi dari Pemerintah”

15.1. Uji Reliabilitas antara *Coder 1* dan Peneliti

Untuk sub unit analisis “adanya sumber resmi berita dari pemerintah” antara *coder 1* dan peneliti diperoleh persamaan (M) sejumlah 66 teks berita. Langkah pertama yang dilakukan ialah metode uji reliabilitas dengan rumus dari Ole R. Holsti, dengan menggunakan data nominal dalam bentuk presentase pada tingkat persamaan atas sub unit yang digunakan, yaitu:

$$CR \text{ (coeficient reliability)} = \frac{2 M}{N_1 + N_2} = \frac{2 (66)}{(68 + 68)} = \frac{(132)}{(136)} = 0,97$$

Setelah koefisien reliabilitas didapatkan maka langkah selanjutnya adalah mencari *index of reliability* dengan rumus yang dikembangkan Scott.

TABEL 29
Uji Reliabilitas
Sub Unit Analisis “Adanya Sumber Berita dari Pemerintah”
Antara Coder 1 dan Peneliti

Kategori	Frekuensi (f) n = 136	Proporsi dari Total Berita	Kuadrat Proporsi
Ya	94	0,69	0,48
Tidak	42	0,31	0,10
Jumlah			0,58

Sumber: *coding sheet*

$$P_i = \frac{(0,97 - 0,58)}{(1 - 0,58)} = \frac{0,39}{0,42} = 0,93$$

Nilai keterandalan yang diperoleh antara *coder* 1 dan peneliti pada sub unit analisis “adanya sumber berita dari pemerintah” ialah 93%.

15.2. Uji Reliabilitas antara *Coder* 2 dan Peneliti

Untuk sub unit analisis “adanya sumber berita dari pemerintah” antara *coder* 2 dan peneliti diperoleh persamaan (M) yakni 64 teks berita. Langkah pertama yang dilakukan ialah metode uji reliabilitas dengan rumus dari Ole R. Holsti,:

$$CR \text{ (coeficient reliability)} = \frac{2 M}{N_1 + N_2} = \frac{2 (64)}{(68 + 68)} = \frac{(128)}{(136)} = 0,94$$

Setelah koefisien reliabilitas didapatkan maka langkah selanjutnya adalah mencari *index of reliability* dengan rumus yang dikembangkan Scott. Hal ini dilakukan untuk memperkuat hasil uji reliabilitas di atas.

TABEL 30
Uji Reliabilitas
Sub Unit Analisis “Adanya Sumber Berita dari Pemerintah”
Antara Coder 2 dan Peneliti

Sub Unit	Frekuensi (f) n = 136	Proporsi dari Total Berita	Kuadrat Proporsi
Ya	98	0,72	0,52
Tidak	38	0,28	0,08
Jumlah			0,60

Sumber: *coding sheet*

$$P_i = \frac{(0,94 - 0,60)}{(1 - 0,60)} = \frac{0,34}{0,40} = 0,85$$

Nilai keterandalan yang diperoleh antara *coder* 2 dan dan peneliti pada sub unit analisis “adanya sumber berita dari pemerintah” ialah 85%.

Dari kedua penghitungan di atas, maka dapat diperoleh tingkat reliabilitas rata-rata, yakni:

$$P_i \text{ rata - rata} = \frac{P_i \text{ pertama} + P_i \text{ kedua}}{2} = \frac{(0,93 + 0,85)}{2} = \frac{1,78}{2} = 0,89$$

Dengan demikian, tingkat reliabilitas rata-rata yang diperoleh dari kedua *coder* untuk sub unit analisis “adanya sumber berita dari pemerintah” adalah 89%.

16. Uji Reliabilitas untuk Sub Unit Analisis “Ketepatan Penggunaan Ejaan dan Tanda Baca ”

16.1. Uji Reliabilitas antara *Coder* 1 dan Peneliti

Untuk sub unit analisis “ketepatan penggunaan ejaan dan tanda baca” antara *coder* 1 dan peneliti diperoleh persamaan (M) yakni 66 teks berita. Langkah pertama yang dilakukan ialah metode uji reliabilitas dengan rumus dari Ole R. Holsti:

$$CR \text{ (coeficient reliability)} = \frac{2 M}{N_1 + N_2} = \frac{2 (66)}{(68 + 68)} = \frac{(132)}{(136)} = 0,97$$

Setelah koefisien reliabilitas didapatkan maka langkah selanjutnya adalah mencari *index of reliability* dengan rumus yang dikembangkan Scott.

TABEL 31
Uji Reliabilitas
Sub Unit Analisis “Ketepatan Penggunaan Ejaan dan Tanda Baca”
Antara *Coder* 1 dan Peneliti

Kategori	Frekuensi (f) n = 136	Proporsi dari Total Berita	Kuadrat Proporsi
Ya	74	0,54	0,29
Tidak	62	0,46	0,21
Jumlah			0,50

Sumber: *coding sheet*

$$P_i = \frac{(0,97 - 0,50)}{(1 - 0,50)} = \frac{0,47}{0,50} = 0,94$$

Nilai keterandalan yang diperoleh antara *coder* 1 dan peneliti pada sub unit analisis “ketepatan penggunaan ejaan dan tanda baca” ialah 94%.

16.2. Uji Reliabilitas antara *Coder* 2 dan Peneliti

Untuk sub unit analisis “ketepatan penggunaan ejaan dan tanda baca” antara *coder* 2 dan peneliti diperoleh persamaan (M) yakni 66 teks berita. Langkah pertama yang dilakukan ialah metode uji reliabilitas dengan rumus dari Ole R. Holsti,:

$$CR \text{ (coeficient reliability)} = \frac{2 M}{N_1 + N_2} = \frac{2 (66)}{(68 + 68)} = \frac{(132)}{(136)} = 0,97$$

Setelah koefisien reliabilitas didapatkan maka langkah selanjutnya adalah mencari *index of reliability* dengan rumus yang dikembangkan Scott.

TABEL 32
Uji Reliabilitas
Sub Unit Analisis “Ketepatan Penggunaan Ejaan dan Tanda Baca”
Antara Coder 2 dan Peneliti

Kategori	Frekuensi (f) n = 136	Proporsi dari Total Berita	Kuadrat Proporsi
Ya	76	0,56	0,31
Tidak	60	0,44	0,19
Jumlah			0,50

Sumber: coding sheet

$$P_i = \frac{(0,97 - 0,50)}{(1 - 0,50)} = \frac{0,47}{0,50} = 0,94$$

Nilai keterandalan yang diperoleh antara *coder 2* dan peneliti pada sub unit analisis “ketepatan penggunaan ejaan dan tanda baca” ialah 94 %.

Dari kedua penghitungan diperoleh tingkat reliabilitas rata-rata, yakni:

$$P_i \text{ rata - rata} = \frac{P_i \text{ pertama} + P_i \text{ kedua}}{2} = \frac{(0,94 + 0,94)}{2} = 0,94$$

Dengan demikian, tingkat reliabilitas rata-rata yang diperoleh dari kedua *coder* untuk sub unit analisis “ketepatan penggunaan ejaan dan tanda baca” adalah 94%.

17 Uji Reliabilitas Sub Unit Analisis “Kesesuaian Judul dengan Isi Berita”

17.1. Uji Reliabilitas antara *Coder 1* dan Peneliti

Untuk sub unit analisis “kesesuaian judul dengan isi berita” antara *coder 1* dan peneliti diperoleh persamaan (M) sejumlah 67 teks berita. Langkah pertama yang dilakukan ialah metode uji reliabilitas dengan rumus dari Ole R. Holsti:

$$CR \text{ (coeficient reliability)} = \frac{2M}{N_1 + N_2} = \frac{2(67)}{(68 + 68)} = \frac{(134)}{(136)} = 0,99$$

Setelah koefisien reliabilitas didapatkan maka langkah selanjutnya adalah mencari *index of reliability* dengan rumus yang dikembangkan Scott.

TABEL 33
Uji Reliabilitas
Sub Unit Analisis “Kesesuaian Judul dengan Isi Berita”
Antara Coder 1 dan Peneliti

Kategori	Frekuensi (f) n = 136	Proporsi dari Total Berita	Kuadrat Proporsi
Ya	135	0,99	0,98
Tidak	1	0,01	0,0001
Jumlah			0,98

Sumber: coding sheet

$$P_i = \frac{(0,99 - 0,98)}{(1 - 0,98)} = \frac{0,01}{0,02} = 0,50$$

Nilai keterandalan yang diperoleh antara *coder* 1 dan peneliti pada sub unit analisis “kesesuaian judul dengan isi berita” ialah 50%.

17.2. Uji Reliabilitas antara *Coder* 2 dan Peneliti

Untuk sub unit analisis “kesesuaian judul dengan isi berita” antara *coder* 2 dan peneliti diperoleh persamaan (M) sejumlah 68 teks berita. Dengan menggunakan rumus dari Ole R. Holsti, yaitu:

$$CR \text{ (coefficient reliability)} = \frac{2 M}{N_1 + N_2} = \frac{2 (68)}{(68 + 68)} = \frac{(136)}{(136)} = 1$$

Setelah koefisien reliabilitas didapatkan maka langkah selanjutnya adalah mencari *index of reliability* dengan rumus yang dikembangkan Scott.

TABEL 34
Uji Reliabilitas
Sub Unit Analisis “Kesesuaian Judul dengan Isi Berita”
Antara *Coder* 2 dan Peneliti

Kategori	Frekuensi (f) n = 136	Proporsi dari Total Berita	Kuadrat Proporsi
Ya	136	1	1
Tidak	0	0	0
Jumlah			1

Sumber: *coding sheet*

$$P_i = \frac{(1 - 1)}{(1 - 1)} = \frac{0}{0} = 1$$

Nilai keterandalan yang diperoleh antara *coder* 2 dan peneliti pada sub unit analisis “kesesuaian judul dengan isi berita” ialah 100%.

Dari kedua penghitungan di atas, maka dapat diperoleh tingkat reliabilitas rata-rata, yakni:

$$P_i \text{ rata - rata} = \frac{P_i \text{ pertama} + P_i \text{ kedua}}{2} = \frac{(0,50 + 1)}{2} = 0,75$$

Dengan demikian, tingkat reliabilitas rata-rata yang diperoleh dari kedua *coder* untuk sub unit analisis “kesesuaian judul dengan isi berita” adalah 75%.

B.18. Uji Reliabilitas untuk Sub Unit Analisis Unsur “*What*”

B.18.1. Uji Reliabilitas antara *Coder* 1 dan Peneliti

Untuk sub unit analisis unsur “*what*” antara *coder* 1 dan peneliti diperoleh persamaan (M) sejumlah 68 teks berita. Langkah pertama yang dilakukan ialah metode uji reliabilitas dengan rumus dari Ole R. Holsti:

$$CR \text{ (coeficient reliability)} = \frac{2 M}{N1+N2} = \frac{2 (68)}{(68 +68)} = \frac{(136)}{(136)} = 1$$

Setelah koefisien reliabilitas didapatkan maka langkah selanjutnya adalah mencari *index of reliability* dengan rumus yang dikembangkan Scott. Hasil yang diperoleh dari rumus di atas disebut *observed agreement* (persetujuan yang diperoleh dari penelitian).

TABEL 35
Uji Reliabilitas
Sub Unit Analisis Unsur “What”
Antara Coder 1 dan Peneliti

Kategori	Frekuensi (f) n = 136	Proporsi dari Total Berita	Kuadrat Proporsi
Ya	136	1	1
Tidak	0	0	0
Jumlah			1

Sumber: *coding sheet*

$$P_i = \frac{(1-1)}{(1-1)} = \frac{0}{0} = 1$$

Nilai keterandalan yang diperoleh antara *coder* 1 dan peneliti pada sub unit analisis unsur “what” ialah 100%.

B.18.2. Uji Reliabilitas antara Coder 2 dan Peneliti

Untuk sub unit analisis unsur “what” antara *coder* 2 dan peneliti diperoleh persamaan (M) sejumlah 68 teks berita. Dengan menggunakan rumus dari Ole R. Holsti, yaitu:

$$CR \text{ (coeficient reliability)} = \frac{2 M}{N1 + N2} = \frac{2 (68)}{(68 + 68)} = \frac{(136)}{(136)} = 1$$

Setelah koefisien reliabilitas didapatkan maka langkah selanjutnya adalah mencari *index of reliability* dengan rumus yang dikembangkan Scott. Hal ini dilakukan untuk memperkuat hasil uji reliabilitas di atas.

TABEL 36
Uji Reliabilitas
Sub Unit Analisis Unsur “What”
Antara Coder 2 dan Peneliti

Kategori	Frekuensi (f) n=136	Proporsi dari Total Berita	Kuadrat Proporsi
Ya	136	1	1
Tidak	0	0	0
Jumlah			1

Sumber: *coding sheet*

$$P_i = \frac{(1-1)}{(1-1)} = \frac{0}{0} = 1$$

Nilai keterandalan yang diperoleh antara *coder* 2 dan peneliti pada sub unit analisis unsur “*what*” ialah 100 %.

Dari kedua penghitungan di atas, maka dapat diperoleh tingkat reliabilitas rata-rata, yakni:

$$Pi \text{ rata - rata} = \frac{Pi \text{ pertama} + Pi \text{ kedua}}{2} = \frac{(1 + 1)}{2} = 1$$

Dengan demikian, tingkat reliabilitas rata-rata yang diperoleh dari kedua *coder* untuk sub unit analisis unsur “*what*” adalah 100%.

19. Uji Reliabilitas untuk Sub Unit Analisis Unsur “*Who*”

19.1. Uji Reliabilitas antara *Coder* 1 dan Peneliti

Untuk sub unit analisis unsur “*who*” antara *coder* 1 dan peneliti diperoleh persamaan (M) sejumlah 68 teks berita. Langkah pertama yang dilakukan ialah metode uji reliabilitas dengan rumus dari Ole R. Holsti, yaitu:

$$CR \text{ (coeficient reliability)} = \frac{2 M}{N1+N2} = \frac{2 (68)}{(68 +68)} = \frac{(136)}{(136)} = 1$$

Setelah koefisien reliabilitas didapatkan maka langkah selanjutnya adalah mencari *index of reliability* dengan rumus yang dikembangkan Scott.

TABEL 37
Uji Reliabilitas
Sub Unit Analisis Unsur “*Who*”
Antara *Coder* 1 dan Peneliti

Kategori	Frekuensi (f) n = 136	Proporsi dari Total Berita	Kuadrat Proporsi
Ya	136	1	1
Tidak	0	0	0
Jumlah			1

Sumber: *coding sheet*

$$Pi = \frac{(1-1)}{(1-1)} = \frac{0}{0} = 1$$

Nilai keterandalan yang diperoleh antara *coder* 1 dan peneliti pada sub unit analisis unsur “*who*” ialah 100%.

19.2. Uji Reliabilitas antara *Coder* 2 dan Peneliti

Untuk Sub Unit analisis unsur “*who*” antara *coder* 2 dan peneliti diperoleh persamaan (M) sejumlah 68 teks berita. Dengan menggunakan rumus dari Ole R. Holsti, yaitu:

$$CR \text{ (coeficient reliability)} = \frac{2 M}{N1 + N2} = \frac{2 (68)}{(68 + 68)} = \frac{(136)}{(136)} = 1$$

Setelah koefisien reliabilitas didapatkan maka langkah selanjutnya adalah mencari *index of reliability* dengan rumus yang dikembangkan Scott. Hal ini dilakukan untuk memperkuat hasil uji reliabilitas di atas.

TABEL 38
Uji Reliabilitas
Sub Unit Analisis Unsur “Who”
Antara Coder 2 dan Peneliti

Kategori	Frekuensi (f) n = 136	Proporsi dari Total Berita	Kuadrat Proporsi
Ya	136	1	1
Tidak	0	0	0
Jumlah			1

Sumber: coding sheet

$$P_i = \frac{(1-1)}{(1-1)} = \frac{0}{0} = 1$$

Nilai keterandalan yang diperoleh antara coder 2 dan peneliti pada sub unit analisis unsur “who” ialah 100%.

Dari kedua penghitungan di atas, maka dapat diperoleh tingkat reliabilitas rata-rata, yakni:

$$P_i \text{ rata - rata} = \frac{P_i \text{ pertama} + P_i \text{ kedua}}{2} = \frac{(1 + 1)}{2} = 1$$

Dengan demikian, tingkat reliabilitas rata-rata yang diperoleh dari kedua coder untuk sub unit analisis unsur “who” adalah 100%.

20. Uji Reliabilitas untuk Sub Unit Analisis Unsur “When”

20.1. Uji Reliabilitas antara Coder 1 dan Peneliti

Untuk sub unit analisis unsur “when” antara coder 1 dan peneliti diperoleh persamaan (M) sejumlah 66 teks berita. Langkah pertama yang dilakukan ialah metode uji reliabilitas dengan rumus dari Ole R. Holsti, yaitu:

$$CR \text{ (coeficient reliability)} = \frac{2M}{N_1+N_2} = \frac{2(66)}{(68+68)} = \frac{(132)}{(136)} = 0,97$$

Setelah koefisien reliabilitas didapatkan maka langkah selanjutnya adalah mencari *index of reliability* dengan rumus yang dikembangkan Scott. Hasil yang diperoleh dari rumus di atas disebut *observed agreement* (persetujuan yang diperoleh dari penelitian).

TABEL 39
Uji Reliabilitas
Sub Unit Analisis Unsur “When”
Antara Coder 1 dan Peneliti

Kategori	Frekuensi (f) n = 136	Proporsi dari Total Berita	Kuadrat Proporsi
Ya	108	0,79	0,62
Tidak	28	0,21	0,04
Jumlah			0,66

Sumber: coding sheet

$$P_i = \frac{(0,97 - 0,66)}{(1 - 0,66)} = \frac{0,31}{0,34} = 0,91$$

Nilai keterandalan yang diperoleh antara *coder 1* dan peneliti pada sub unit analisis unsur “when” ialah 91%.

20.2. Uji Reliabilitas antara *Coder 2* dan Peneliti

Untuk sub unit analisis unsur “when” antara *coder 2* dan peneliti diperoleh persamaan (M) sejumlah 64 teks berita. Dengan menggunakan rumus dari Ole R. Holsti, yaitu:

$$CR \text{ (coefficient reliability)} = \frac{2 M}{N_1 + N_2} = \frac{2 (64)}{(68 + 68)} = \frac{(128)}{(136)} = 0,94$$

Setelah koefisien reliabilitas didapatkan maka langkah selanjutnya adalah mencari *index of reliability* dengan rumus yang dikembangkan Scott.

TABEL 40
Uji Reliabilitas
Sub Unit Analisis Unsur “When”
Antara Coder 2 dan Peneliti

Kategori	Frekuensi (f) n = 136	Proporsi dari Total Berita	Kuadrat Proporsi
Ya	106	0,78	0,61
Tidak	30	0,22	0,05
Jumlah			0,66

Sumber: coding sheet

$$P_i = \frac{(0,94 - 0,66)}{(1 - 0,66)} = \frac{0,28}{0,34} = 0,82$$

Nilai keterandalan yang diperoleh antara *coder 2* dan peneliti pada sub unit analisis unsur “when” ialah 82%.

Dari kedua penghitungan di atas, maka dapat diperoleh tingkat reliabilitas rata-rata, yakni:

$$P_i \text{ rata - rata} = \frac{P_i \text{ pertama} + P_i \text{ kedua}}{2} = \frac{(0,91 + 0,82)}{2} = \frac{1,73}{2} = 0,87$$

Dengan demikian, tingkat reliabilitas rata-rata yang diperoleh dari kedua *coder* untuk sub unit analisis unsur “*when*” adalah 87%.

21. Uji Reliabilitas untuk Sub Unit Analisis Unsur “*Where*”

21.1. Uji Reliabilitas antara *Coder* 1 dan Peneliti

Untuk sub unit analisis unsur “*where*” antara *coder* 1 dan peneliti diperoleh persamaan (M) sejumlah 65 teks berita. Langkah pertama yang dilakukan ialah metode uji reliabilitas dengan rumus dari Ole R. Holsti, yaitu:

$$CR \text{ (coeficient reliability)} = \frac{2 M}{N1+N2} = \frac{2 (65)}{(68 + 68)} = \frac{(130)}{(136)} = 0,96$$

Setelah koefisien reliabilitas didapatkan maka langkah selanjutnya adalah mencari *index of reliability* dengan rumus yang dikembangkan Scott.

TABEL 41
Uji Reliabilitas
Sub Unit Analisis Unsur “*Where*”
Antara *Coder* 1 dan Peneliti

Kategori	Frekuensi (f) n = 136	Proporsi dari Total Berita	Kuadrat Proporsi
Ya	107	0,79	0,62
Tidak	29	0,21	0,04
Jumlah			0,66

Sumber: *coding sheet*

$$Pi = \frac{(0,96-0,66)}{(1-0,66)} = \frac{0,30}{0,34} = 0,88$$

Nilai keterandalan yang diperoleh antara *coder* 1 dan peneliti pada sub unit analisis unsur “*where*” ialah 88%.

21.2. Uji Reliabilitas antara *Coder* 2 dan Peneliti

Untuk sub unit analisis unsur “*where*” antara *coder* 2 dan peneliti diperoleh persamaan (M) sejumlah 67 teks berita. Dengan menggunakan rumus dari Ole R. Holsti, yaitu:

$$CR \text{ (coeficient reliability)} = \frac{2 M}{N1 + N2} = \frac{2 (67)}{(68 + 68)} = \frac{(134)}{(136)} = 0,99$$

Setelah koefisien reliabilitas didapatkan maka langkah selanjutnya adalah mencari *index of reliability* dengan rumus yang dikembangkan Scott. Hal ini dilakukan untuk memperkuat hasil uji reliabilitas di atas.

TABEL 42
Uji Reliabilitas
Sub Unit Analisis Unsur “Where”
Antara Coder 2 dan Peneliti

Kategori	Frekuensi (f) n = 136	Proporsi dari Total Berita	Kuadrat Proporsi
Ya	109	0,80	0,64
Tidak	27	0,20	0,04
Jumlah			0,68

Sumber: coding sheet

$$P_i = \frac{(0,99 - 0,68)}{(1 - 0,68)} = \frac{0,31}{0,32} = 0,97$$

Nilai keterandalan yang diperoleh antara *coder 2* dan peneliti pada sub unit analisis unsur “where” ialah 97%.

Dari kedua penghitungan di atas, maka dapat diperoleh tingkat reliabilitas rata-rata, yakni:

$$P_i \text{ rata-rata} = \frac{P_i \text{ pertama} + P_i \text{ kedua}}{2} = \frac{(0,88 + 0,97)}{2} = \frac{1,85}{2} = 0,93$$

Dengan demikian, tingkat reliabilitas rata-rata yang diperoleh dari kedua *coder* untuk sub unit analisis unsur “where” adalah 93%.

22. Uji Reliabilitas untuk Sub Unit Analisis Unsur “Why”

22.1. Uji Reliabilitas antara Coder 1 dan Peneliti

Untuk sub unit analisis unsur “why” antara *coder 1* dan peneliti diperoleh persamaan (M) sejumlah 65 teks berita. Langkah pertama yang dilakukan ialah metode uji reliabilitas dengan rumus dari Ole R. Holsti, yaitu:

$$CR \text{ (coefficient reliability)} = \frac{2M}{N_1 + N_2} = \frac{2(65)}{(68 + 68)} = \frac{(130)}{(136)} = 0,96$$

Setelah koefisien reliabilitas didapatkan selanjutnya mencari *index of reliability*.

TABEL 43
Uji Reliabilitas
Sub Unit Analisis Unsur “Why”
Antara Coder 1 dan Peneliti

Kategori	Frekuensi (f) n = 136	Proporsi dari Total Berita	Kuadrat Proporsi
Ya	121	0,89	0,79
Tidak	15	0,11	0,01
Jumlah			0,80

Sumber: coding sheet

$$P_i = \frac{(0,96-0,80)}{(1-0,80)} = \frac{0,16}{0,20} = 0,80$$

Nilai keterandalan yang diperoleh antara *coder* 1 dan peneliti pada sub unit analisis unsur “*why*” ialah 80%.

22.2. Uji Reliabilitas antara *Coder* 2 dan Peneliti

Untuk sub unit analisis unsur “*why*” antara *coder* 2 dan peneliti diperoleh persamaan (M) sejumlah 59 teks berita. Dengan menggunakan rumus dari Ole R. Holsti, yaitu:

$$CR \text{ (coeficient reliability)} = \frac{2 M}{N_1 + N_2} = \frac{2 (59)}{(68 + 68)} = \frac{(118)}{(136)} = 0,87$$

Setelah koefisien reliabilitas didapatkan maka langkah selanjutnya adalah mencari *index of reliability* dengan rumus yang dikembangkan Scott.

TABEL 44
Uji Reliabilitas
Sub Unit Analisis Unsur “*Why*”
Antara *Coder* 2 dan Peneliti

Kategori	Frekuensi (f) n = 136	Proporsi dari Total Berita	Kuadrat Proporsi
Ya	121	0,89	0,79
Tidak	15	0,11	0,01
Jumlah			0,80

Sumber: *coding sheet*

$$P_i = \frac{(0,87-0,80)}{(1-0,80)} = \frac{0,07}{0,20} = 0,35$$

Nilai keterandalan yang diperoleh antara *coder* 2 dan peneliti pada sub unit analisis unsur “*why*” ialah 35%.

Dari kedua penghitungan di atas, maka dapat diperoleh tingkat reliabilitas rata-rata, yakni:

$$P_i \text{ rata - rata} = \frac{P_i \text{ pertama} + P_i \text{ kedua}}{2} = \frac{(0,80 + 0,35)}{2} = \frac{1,15}{2} = 0,58$$

Dengan demikian, tingkat reliabilitas rata-rata yang diperoleh dari kedua *coder* untuk sub unit analisis unsur “*why*” adalah 58%.

23. Uji Reliabilitas untuk Sub Unit Analisis Unsur “*How*”

23.1. Uji Reliabilitas antara *Coder* 1 dan Peneliti

Untuk sub unit analisis unsur “*how*” antara *coder* 1 dan peneliti diperoleh persamaan (M) sejumlah 66 teks berita. Langkah pertama yang dilakukan ialah metode uji reliabilitas dengan rumus dari Ole R. Holsti, yaitu:

$$CR \text{ (coeficient reliability)} = \frac{2 M}{N_1 + N_2} = \frac{2 (66)}{(68 + 68)} = \frac{(132)}{(136)} = 0,97$$

Setelah koefisien reliabilitas didapatkan maka langkah selanjutnya adalah mencari *index of reliability* dengan rumus yang dikembangkan Scott. Hal ini dilakukan untuk memperkuat hasil uji reliabilitas di atas.

TABEL 45
Uji Reliabilitas
Sub Unit Analisis Unsur "How"
Antara Coder 1 dan Peneliti

Kategori	Frekuensi (f) n = 136	Proporsi dari Total Berita	Kuadrat Proporsi
Ya	100	0,74	0,55
Tidak	36	0,26	0,07
Jumlah			0,62

Sumber: coding sheet

$$P_i = \frac{(0,97-0,62)}{(1-0,62)} = \frac{0,35}{0,38} = 0,92$$

Nilai keterandalan yang diperoleh antara *coder 1* dan peneliti pada sub unit analisis unsur "how" ialah 92%.

23.2. Uji Reliabilitas antara Coder 2 dan Peneliti

Untuk sub unit analisis unsur "how" antara *coder 2* dan peneliti diperoleh persamaan (M) sejumlah 60 teks berita. Dengan menggunakan rumus dari Ole R. Holsti, yaitu:

$$CR \text{ (coefficient reliability)} = \frac{2 M}{N_1 + N_2} = \frac{2 (60)}{(68 + 68)} = \frac{(120)}{(136)} = 0,88$$

Setelah koefisien reliabilitas didapatkan maka langkah selanjutnya adalah mencari *index of reliability* dengan rumus yang dikembangkan Scott.

TABEL 46
Uji Reliabilitas
Sub Unit Analisis Unsur "How"
Antara Coder 2 dan Peneliti

Kategori	Frekuensi (f) n = 136	Proporsi dari Total Berita	Kuadrat Proporsi
Ya	98	0,72	0,52
Tidak	38	0,28	0,08
Jumlah			0,60

Sumber: coding sheet

$$P_i = \frac{(0,88-0,6)}{(1-0,6)} = \frac{0,28}{0,4} = 0,70$$

Nilai keterandalan yang diperoleh antara *coder 2* dan peneliti pada sub unit analisis unsur "how" ialah 70%.

Dari kedua penghitungan di atas, maka dapat diperoleh tingkat reliabilitas rata-rata, yakni:

$$P_i \text{ rata-rata} = \frac{P_i \text{ pertama} + P_i \text{ kedua}}{2} = \frac{(0,92 + 0,70)}{2} = \frac{1,62}{2} = 0,81$$

Dengan demikian, tingkat reliabilitas rata-rata yang diperoleh dari kedua *coder* untuk sub unit analisis unsur “*how*” adalah 81%.

24. Uji Reliabilitas untuk Sub Unit Analisis “Kedekatan (*proximity*) Psikografis”

24.1. Uji Reliabilitas antara *Coder* 1 dan Peneliti

Untuk sub unit analisis “kedekatan psikografis” antara *coder* 1 dan peneliti diperoleh persamaan (M) sejumlah 68 teks berita. Langkah pertama yang dilakukan ialah metode uji reliabilitas dengan rumus dari Ole R. Holsti, yaitu:

$$CR \text{ (coeficient reliability)} = \frac{2 M}{N_1 + N_2} = \frac{2 (68)}{(68 + 68)} = \frac{(136)}{(136)} = 1$$

Setelah koefisien reliabilitas didapatkan maka langkah selanjutnya adalah mencari *index of reliability* dengan rumus yang dikembangkan Scott.

TABEL 47
Uji Reliabilitas
Sub Unit Analisis “Kedekatan Psikografis”
Antara *Coder* 1 dan Peneliti

Kategori	Frekuensi Persetujuan (f) n = 136	Proporsi dari Total Berita	Kuadrat Proporsi
Ya	0	0	0
Tidak	136	1	1
Jumlah			1

Sumber: *coding sheet*

$$P_i = \frac{(1-1)}{(1-1)} = \frac{0}{0} = 1$$

Nilai keterandalan yang diperoleh antara *coder* 1 dan peneliti pada sub unit analisis “kedekatan psikografis” ialah 100 %.

24.2. Uji Reliabilitas antara *Coder* 2 dan Peneliti

Untuk sub unit analisis “kedekatan psikografis” antara *coder* 2 dan peneliti diperoleh persamaan (M) sejumlah 68 teks berita. Dengan menggunakan rumus dari Ole R. Holsti, yaitu:

$$CR \text{ (coeficient reliability)} = \frac{2 M}{N_1 + N_2} = \frac{2 (68)}{(68 + 68)} = \frac{(136)}{(136)} = 1$$

Setelah koefisien reliabilitas didapatkan maka langkah selanjutnya adalah mencari *index of reliability* dengan rumus yang dikembangkan Scott.

TABEL 48
Uji Reliabilitas
Sub Unit Analisis “Kedekatan Psikografis”
Antara Coder 2 dan Peneliti

Kategori	Frekuensi Persetujuan (f) n = 136	Proporsi dari Total Berita	Kuadrat Proporsi
Ya	0	0	0
Tidak	136	1	1
Jumlah			1

Sumber: *coding sheet*

$$P_i = \frac{(1-1)}{(1-1)} = \frac{0}{0} = 1$$

Nilai keterandalan yang diperoleh antara *coder 2* dan peneliti pada sub unit analisis “kedekatan psikografis” ialah 100 %. Dari kedua perolehan indeks reliabilitas itu, maka dapat diperoleh tingkat reliabilitas rata-rata, yakni:

$$P_i \text{ rata - rata} = \frac{P_i \text{ pertama} + P_i \text{ kedua}}{2} = \frac{(1 + 1)}{2} = 1$$

Dengan demikian, tingkat reliabilitas rata-rata yang diperoleh dari kedua *coder* untuk sub unit analisis “kedekatan psikografis” adalah 1 atau 100%.

25. Uji Reliabilitas untuk Sub Unit Analisis “Kedekatan Geografis”

25.1. Uji Reliabilitas antara *Coder 1* dan Peneliti

Untuk sub unit analisis “kedekatan geografis” antara *coder 1* dan peneliti diperoleh persamaan (M) sejumlah 68 teks berita. Langkah pertama yang dilakukan ialah metode uji reliabilitas dengan rumus dari Ole R. Holsti:

$$CR \text{ (coeficient reliability)} = \frac{2 M}{N1 + N2} = \frac{2 (68)}{(68 + 68)} = \frac{(136)}{(136)} = 1$$

Setelah koefisien reliabilitas didapatkan maka langkah selanjutnya adalah mencari *index of reliability* dengan rumus yang dikembangkan Scott.

TABEL 49
Uji Reliabilitas
Sub Unit Analisis “Kedekatan Geografis”
Antara Coder 1 dan Peneliti

Kategori	Frekuensi Persetujuan (f) n = 136	Proporsi dari Total Berita	Kuadrat Proporsi
Ya	136	1	1
Tidak	0	0	0
Jumlah			1

Sumber: *coding sheet*

$$P_i = \frac{(1-1)}{(1-1)} = \frac{0}{0} = 1$$

Nilai keterandalan yang diperoleh antara *coder* 1 dan peneliti pada sub unit analisis “kedekatan geografis” ialah 100 %.

25.2. Uji Reliabilitas antara *Coder* 2 dan Peneliti

Untuk sub unit analisis “kedekatan geografis” antara *coder* 2 dan peneliti diperoleh persamaan (M) sejumlah 68 teks berita. Dengan menggunakan rumus dari Ole R. Holsti, yaitu:

$$CR \text{ (coefficient reliability)} = \frac{2 M}{N_1 + N_2} = \frac{2 (68)}{(68 + 68)} = \frac{(136)}{(136)} = 1$$

Setelah koefisien reliabilitas didapatkan maka langkah selanjutnya adalah mencari *index of reliability* dengan rumus yang dikembangkan Scott.

TABEL 50
Uji Reliabilitas
Sub Unit Analisis “Kedekatan Geografis”
Antara *Coder* 2 dan Peneliti

Kategori	Frekuensi Persetujuan (f) n = 136	Proporsi dari Total Berita	Kuadrat Proporsi
Ya	136	1	1
Tidak	0	0	0
Jumlah			1

Sumber: *coding sheet*

$$P_i = \frac{(1-1)}{(1-1)} = \frac{0}{0} = 1$$

Nilai keterandalan yang diperoleh antara *coder* 2 dan peneliti pada sub unit analisis “kedekatan geografis” ialah 100 %.

Dari kedua penghitungan di atas, maka dapat diperoleh tingkat reliabilitas rata-rata, yakni:

$$P_i \text{ rata - rata} = \frac{P_i \text{ pertama} + P_i \text{ kedua}}{2} = \frac{(1 + 1)}{2} = 1$$

Dengan demikian, tingkat reliabilitas rata-rata yang diperoleh dari kedua *coder* untuk sub unit analisis “kedekatan geografis” adalah 1 atau 100%.

26. Uji Reliabilitas untuk Sub Unit Analisis “Aktualitas Obyektif”

26.1. Uji Reliabilitas antara *Coder* 1 dan Peneliti

Untuk sub unit analisis “aktualitas obyektif” antara *coder* 1 dan peneliti diperoleh persamaan (M) sejumlah 68 teks berita. Langkah pertama yang dilakukan ialah metode uji reliabilitas dengan rumus dari Ole R. Holsti, yaitu:

$$CR (\text{coeficient reliability}) = \frac{2 M}{N1+N2} = \frac{2 (68)}{(68 +68)} = \frac{(136)}{(136)} = 1$$

Setelah koefisien reliabilitas didapatkan maka langkah selanjutnya adalah mencari *index of reliability* dengan rumus yang dikembangkan Scott. Hasil yang diperoleh dari rumus di atas disebut *observed agreement* (persetujuan yang diperoleh dari penelitian).

TABEL 51
Uji Reliabilitas
Sub Unit Analisis “Aktualitas Objektif”
Antara Coder 1 dan Peneliti

Kategori	Frekuensi Persetujuan (f) n = 136	Proporsi dari Total Berita	Kuadrat Proporsi
Ya	134	0,99	0,98
Tidak	2	0,01	0,0001
Jumlah			0,98

Sumber: *coding sheet*

$$Pi = \frac{(1-0,98)}{(1-0,98)} = \frac{0,02}{0,02} = 1$$

Nilai keterandalan yang diperoleh antara *coder 1* dan peneliti pada sub unit analisis “aktualitas objektif” ialah 100%.

26.2. Uji Reliabilitas antara Coder 2 dan Peneliti

Untuk sub unit analisis “aktualitas objektif” antara *coder 2* dan peneliti diperoleh persamaan (M) sejumlah 67 teks berita. Dengan menggunakan rumus Holsti, yaitu:

$$CR (\text{coeficient reliability}) = \frac{2 M}{N1 + N2} = \frac{2 (67)}{(68 + 68)} = \frac{(134)}{(136)} = 0,99$$

Setelah koefisien reliabilitas didapatkan maka langkah selanjutnya adalah mencari *index of reliability* dengan rumus yang dikembangkan Scott. Penggunaan rumus Scott ini dilakukan untuk memperkuat uji reliabilitas.

TABEL 52
Uji Reliabilitas
Sub Unit Analisis “Aktualitas Objektif”
Antara Coder 2 dan Peneliti

Kategori	Frekuensi Persetujuan (f) n = 136	Proporsi dari Total Berita	Kuadrat Proporsi
Ya	135	0,99	0,98
Tidak	1	0,01	0,0001
Jumlah			0,98

Sumber: *coding sheet*

$$Pi = \frac{(0,99-0,98)}{(1-0,98)} = \frac{0,01}{0,02} = 0,5$$

Nilai keterandalan atau indeks reliabilitas yang diperoleh antara *coder 2* dan peneliti pada sub unit analisis “aktualitas objektif” ialah 50 %.

Dari kedua penghitungan di atas, maka dapat diperoleh tingkat reliabilitas rata-rata, yakni:

$$P_i \text{ rata-rata} = \frac{P_i \text{ pertama} + P_i \text{ kedua}}{2} = \frac{(1 + 0,50)}{2} = \frac{1,50}{2} = 0,75$$

Dengan demikian, tingkat reliabilitas rata-rata yang diperoleh dari *coder 1* dan *coder 2* atas sub unit analisis “aktualitas objektif” adalah 75%.

27. Uji Reliabilitas untuk Sub Unit Analisis “Aktualitas Subyektif”

27.1. Uji Reliabilitas antara *Coder 1* dan Peneliti

Untuk sub unit analisis “aktualitas subyektif” antara *coder 1* dan peneliti diperoleh persamaan (M) sejumlah 68 teks berita. Langkah pertama yang dilakukan ialah metode uji reliabilitas dengan rumus dari Ole R. Holsti:

$$CR \text{ (coeficient reliability)} = \frac{2M}{N_1 + N_2} = \frac{2(68)}{(68 + 68)} = \frac{(136)}{(136)} = 1$$

Setelah koefisien reliabilitas didapatkan maka langkah selanjutnya adalah mencari *index of reliability* dengan rumus yang dikembangkan Scott. Rumus ini digunakan untuk memperkuat uji reliabilitas.

TABEL 53
Uji Reliabilitas
Sub Unit Analisis “Aktualitas Subyektif”
Antara *Coder 1* dan Peneliti

Kategori	Frekuensi Persetujuan (f) n = 136	Proporsi dari Total Berita	Kuadrat Proporsi
Ya	2	0,01	0,0001
Tidak	134	0,99	0,98
Jumlah			0,98

Sumber: *coding sheet*

$$P_i = \frac{(1-0,98)}{(1-0,98)} = \frac{0,02}{0,02} = 1$$

Nilai keterandalan yang diperoleh antara *coder 1* dan peneliti pada sub unit analisis “aktualitas subyektif” ialah 100%.

27.2. Uji Reliabilitas antara *Coder 2* dan Peneliti

Untuk sub unit analisis “aktualitas subjektif” antara *coder 2* dan peneliti diperoleh persamaan (M) sejumlah 67 teks berita. Dengan menggunakan rumus dari Ole R. Holsti, yaitu:

$$CR (\text{coeficient reliability}) = \frac{2 M}{N_1 + N_2} = \frac{2 (67)}{(68 + 68)} = \frac{(134)}{(136)} = 0,99$$

Setelah koefisien reliabilitas didapatkan maka langkah selanjutnya adalah mencari *index of reliability* dengan rumus yang dikembangkan Scott.

TABEL 54
Uji Reliabilitas
Sub Unit Analisis “Aktualitas Subyektif”
Antara *Coder 2* dan Peneliti

Kategori	Frekuensi Persetujuan (f) n = 136	Proporsi dari Total Berita	Kuadrat Proporsi
Ya	1	0,01	0,0001
Tidak	135	0,99	0,98
Jumlah			0,98

Sumber: *coding sheet*

$$P_i = \frac{(0,99 - 0,98)}{(1 - 0,98)} = \frac{0,01}{0,02} = 0,50$$

Nilai keterandalan yang diperoleh antara *coder 2* dan peneliti pada sub unit analisis “aktualitas subyektif” ialah 50%.

Dari kedua penghitungan di atas, maka dapat diperoleh tingkat reliabilitas rata-rata, yakni:

$$P_i \text{ rata - rata} = \frac{P_i \text{ pertama} + P_i \text{ kedua}}{2} = \frac{(1 + 0,50)}{2} = \frac{1,50}{2} = 0,75$$

Dengan demikian, tingkat reliabilitas rata-rata yang diperoleh dari kedua *coder* untuk sub unit analisis “aktualitas subyektif” adalah 75%.

28. Uji Reliabilitas untuk Sub Unit Analisis “Significance”

28.1. Uji Reliabilitas antara *Coder 1* dan Peneliti

Untuk sub unit analisis “*significance*” antara *coder 1* dan peneliti diperoleh persamaan (M) sejumlah 68 teks berita. Langkah pertama yang dilakukan ialah metode uji reliabilitas dengan rumus dari Ole R. Holsti:

$$CR (\text{coeficient reliability}) = \frac{2 M}{N_1 + N_2} = \frac{2 (68)}{(68 + 68)} = \frac{(136)}{(136)} = 1$$

Setelah koefisien reliabilitas didapatkan maka langkah selanjutnya adalah mencari *index of reliability* dengan rumus yang dikembangkan Scott. Rumus ini digunakan untuk memperkuat uji reliabilitas.

TABEL 55
Uji Reliabilitas
Sub Unit Analisis “Significance”
Antara Coder 1 dan Peneliti

Kategori	Frekuensi Persetujuan (f) n = 136	Proporsi dari Total Berita	Kuadrat Proporsi
Ya	136	1	1
Tidak	0	0	0
Jumlah			1

Sumber: coding sheet

$$P_i = \frac{(1-1)}{(1-1)} = \frac{0}{0} = 1$$

Nilai keterandalan yang diperoleh antara *coder* 1 dan peneliti pada sub unit analisis “*significance*” ialah 100%.

28.2. Uji Reliabilitas antara Coder 2 dan Peneliti

Untuk sub unit analisis “*significance*” antara *coder* 2 dan peneliti diperoleh persamaan (M) sejumlah 68 teks berita. Besar koefisien reliabilitas, yaitu:

$$CR \text{ (coeficient reliability)} = \frac{2 M}{N_1 + N_2} = \frac{2 (68)}{(68 + 68)} = \frac{(136)}{(136)} = 1$$

Setelah koefisien reliabilitas didapatkan maka langkah selanjutnya adalah mencari *index of reliability* dengan rumus yang dikembangkan Scott. Rumus ini digunakan untuk memperkuat uji reliabilitas.

TABEL 56
Uji Reliabilitas
Sub Unit Analisis “Significance”
Antara Coder 2 dan Peneliti

Kategori	Frekuensi Persetujuan (f) n = 136	Proporsi dari Total Berita	Kuadrat Proporsi
Ya	136	1	1
Tidak	0	0	0
Jumlah			1

Sumber: coding sheet

$$P_i = \frac{(1-1)}{(1-1)} = \frac{0}{0} = 1$$

Nilai keterandalan yang diperoleh antara *coder* 2 dan peneliti pada sub unit analisis “*significance*” ialah 100%.

Dari kedua penghitungan di atas, maka dapat diperoleh tingkat reliabilitas rata-rata, yakni:

$$P_i \text{ rata - rata} = \frac{P_i \text{ pertama} + P_i \text{ kedua}}{2} = \frac{(1 + 1)}{2} = 1$$

Dengan demikian, tingkat reliabilitas rata-rata yang diperoleh dari kedua *coder* untuk sub unit analisis “*significance*” adalah 1 atau 100%.

29. Uji Reliabilitas untuk Sub Unit Analisis “*Prominence*”

29.1. Uji Reliabilitas antara *Coder* 1 dan Peneliti

Untuk sub unit analisis “*prominence*” antara *coder* 1 dan peneliti diperoleh persamaan (M) sejumlah 68 teks berita. Langkah pertama yang dilakukan ialah metode uji reliabilitas dengan rumus dari Ole R. Holsti, yaitu:

$$CR \text{ (coeficient reliability)} = \frac{2 M}{N_1 + N_2} = \frac{2 (68)}{(68 + 68)} = \frac{(136)}{(136)} = 1$$

Setelah koefisien reliabilitas didapatkan maka langkah selanjutnya adalah mencari *index of reliability* dengan rumus yang dikembangkan Scott. Rumus ini digunakan untuk memperkuat uji reliabilitas.

TABEL 57
Uji Reliabilitas
Sub Unit Analisis “*Prominence*”
Antara *Coder* 1 dan Peneliti

Kategori	Frekuensi Persetujuan (f) n = 136	Proporsi dari Total Berita	Kuadrat Proporsi
Ya	136	1	1
Tidak	0	0	0
Jumlah			1

Sumber: *coding sheet*

$$P_i = \frac{(1-1)}{(1-1)} = \frac{0}{0} = 1$$

Nilai keterandalan yang diperoleh antara *coder* 1 dan peneliti pada sub unit analisis “*prominence*” ialah 100%.

29.2. Uji Reliabilitas antara *Coder* 2 dan Peneliti

Untuk sub unit analisis “*prominence*” antara *coder* 2 dan peneliti diperoleh persamaan (M) sejumlah 68 teks berita. Dengan menggunakan rumus dari Ole R. Holsti, yaitu:

$$CR \text{ (coeficient reliability)} = \frac{2 M}{N_1 + N_2} = \frac{2 (68)}{(68 + 68)} = \frac{(136)}{(136)} = 1$$

Setelah koefisien reliabilitas didapatkan maka langkah selanjutnya adalah mencari *index of reliability* dengan rumus yang dikembangkan Scott. Rumus ini digunakan untuk memperkuat uji reliabilitas.

TABEL 58
Uji Reliabilitas
Sub Unit Analisis “Prominence”
Antara Coder 2 dan Peneliti

Kategori	Frekuensi Persetujuan (f) n = 136	Proporsi dari Total Berita	Kuadrat Proporsi
Ya	136	1	1
Tidak	0	0	0
Jumlah			1

Sumber: coding sheet

$$P_i = \frac{(1-1)}{(1-1)} = \frac{0}{0} = 1$$

Nilai keterandalan yang diperoleh antara *coder 2* dan peneliti pada sub unit analisis “*prominence*” ialah 100 %.

Dari kedua penghitungan di atas, maka dapat diperoleh tingkat reliabilitas rata-rata, yakni:

$$P_i \text{ rata-rata} = \frac{P_i \text{ pertama} + P_i \text{ kedua}}{2} = \frac{(1 + 1)}{2} = 1$$

Dengan demikian, tingkat reliabilitas rata-rata yang diperoleh dari kedua *coder* untuk sub unit analisis “*prominence*” adalah 1 atau 100%.

30. Uji Reliabilitas untuk Sub Unit Analisis “Magnitude”

30.1. Uji Reliabilitas antara Coder 1 dan Peneliti

Untuk sub unit analisis “*magnitude*” antara *coder 1* dan peneliti diperoleh persamaan (M) sejumlah 68 teks berita. Langkah pertama ialah uji reliabilitas Holsti, yaitu:

$$CR \text{ (coefficient reliability)} = \frac{2M}{N_1 + N_2} = \frac{2(68)}{(68 + 68)} = \frac{(136)}{(136)} = 1$$

Setelah koefisien reliabilitas didapatkan maka langkah selanjutnya adalah mencari *index of reliability* dengan rumus yang dikembangkan Scott.

TABEL 59
Uji Reliabilitas
Sub Unit Analisis “Magnitude”
Antara Coder 1 dan Peneliti

Kategori	Frekuensi (f) n = 136	Proporsi dari Total Berita	Kuadrat Proporsi
Ya	100	0,74	0,55
Tidak	36	0,26	0,07
Jumlah			0,62

Sumber: coding sheet

$$P_i = \frac{(1-0,62)}{(1-0,62)} = \frac{0,38}{0,38} = 1$$

Nilai keterandalan yang diperoleh antara *coder* 1 dan peneliti pada sub unit analisis “*magnitude*” ialah 100%.

30.2. Uji Reliabilitas antara *Coder* 2 dan Peneliti

Untuk sub unit analisis “*magnitude*” antara *coder* 2 dan peneliti diperoleh persamaan (M) yakni 65 teks berita. Langkah pertama yang dilakukan ialah metode uji reliabilitas dengan rumus dari Ole R. Holsti:

$$CR \text{ (coeficient reliability)} = \frac{2 M}{N1 + N2} = \frac{2 (65)}{(68 + 68)} = \frac{(130)}{(136)} = 0,96$$

Setelah koefisien reliabilitas didapatkan maka langkah selanjutnya adalah mencari *index of reliability* dengan rumus yang dikembangkan Scott.

TABEL 60
Uji Reliabilitas
Sub Unit Analisis “*Magnitude*”
Antara *Coder* 2 dan Peneliti

Kategori	Frekuensi (f) n = 136	Proporsi dari Total Berita	Kuadrat Proporsi
Ya	97	0,71	0,50
Tidak	39	0,29	0,08
Jumlah			0,58

Sumber: *coding sheet*

$$P_i = \frac{(0,96-0,58)}{(1-0,58)} = \frac{0,38}{0,42} = 0,90$$

Nilai keterandalan yang diperoleh antara *coder* 1 dan dan peneliti pada sub unit analisis “*magnitude*” ialah 90%.

Dari kedua penghitungan di atas, maka dapat diperoleh tingkat reliabilitas rata-rata, yakni:

$$P_i \text{ rata - rata} = \frac{P_i \text{ pertama} + P_i \text{ kedua}}{2} = \frac{(1 + 0,90)}{2} = \frac{1,90}{2} = 0,95$$

Dengan demikian, tingkat reliabilitas rata-rata yang diperoleh dari kedua *coder* untuk sub unit analisis “*magnitude*” adalah 95%.

31. Uji Reliabilitas untuk Sub Unit Analisis “*Source Bias*”

31.1. Uji Reliabilitas antara *Coder* 1 dan Peneliti

Untuk uji reliabilitas sub unit analisis “*source bias*” antara *coder* 1 dan peneliti diperoleh persamaan (M) yakni 65 teks berita. Langkah pertama yang dilakukan ialah metode uji reliabilitas dengan rumus dari Ole R. Holsti, yaitu:

$$CR (\text{coeficient reliability}) = \frac{2 M}{N1 + N2} = \frac{2 (65)}{(68 + 68)} = \frac{(130)}{(136)} = 0,96$$

Setelah koefisien reliabilitas didapatkan maka langkah selanjutnya adalah mencari *index of reliability* dengan rumus yang dikembangkan Scott. Rumus ini digunakan untuk memperkuat uji reliabilitas.

TABEL 61
Uji Reliabilitas
Sub Unit Analisis "Source Bias"
Antara Coder 1 dan Peneliti

Kategori	Frekuensi (f) n = 136	Proporsi dari Total Berita	Kuadrat Proporsi
Ya	89	0,65	0,42
Tidak	47	0,35	0,12
Jumlah			0,54

Sumber: coding sheet

$$Pi = \frac{(0,96 - 0,54)}{(1 - 0,54)} = \frac{0,42}{0,46} = 0,91$$

Nilai keterandalan yang diperoleh antara *coder 1* dan peneliti pada sub unit analisis "source bias" ialah 91%.

31.2. Uji Reliabilitas antara Coder 2 dan Peneliti

Untuk sub unit analisis "source bias" antara *coder 2* dan peneliti diperoleh persamaan (M) yakni 58 teks berita. Langkah pertama yang dilakukan ialah metode uji reliabilitas dengan rumus dari Ole R. Holsti, yaitu:

$$CR (\text{coeficient reliability}) = \frac{2 M}{N1 + N2} = \frac{2 (58)}{(68 + 68)} = \frac{(116)}{(136)} = 0,85$$

Setelah koefisien reliabilitas didapatkan maka langkah selanjutnya adalah mencari *index of reliability* dengan rumus yang dikembangkan Scott. Hal ini dilakukan untuk memperkuat hasil uji reliabilitas di atas.

TABEL 62
Uji Reliabilitas
Sub Unit Analisis "Source Bias"
Antara Coder 2 dan Peneliti

Kategori	Frekuensi (f) n = 30	Proporsi dari Total Berita	Kuadrat Proporsi
Ya	94	0,69	0,48
Tidak	42	0,31	0,10
Jumlah			0,58

Sumber: coding sheet

$$P_i = \frac{(0,85 - 0,58)}{(1 - 0,58)} = \frac{0,27}{0,42} = 0,64$$

Nilai keterandalan yang diperoleh antara *coder 2* dan peneliti pada sub unit analisis “*source bias*” ialah 64%.

Dari kedua penghitungan di atas, maka dapat diperoleh tingkat reliabilitas rata-rata, yakni:

$$P_i \text{ rata-rata} = \frac{P_i \text{ pertama} + P_i \text{ kedua}}{2} = \frac{(0,91 + 0,64)}{2} = 0,78$$

Dengan demikian, tingkat reliabilitas rata-rata yang diperoleh dari kedua *coder* untuk sub unit analisis “*source bias satu sisi*” adalah 78%.

32. Uji Reliabilitas untuk Sub Unit Analisis “*Slant*”

32.1. Uji Reliabilitas antara *Coder 1* dan *Peneliti*

Untuk uji reliabilitas sub unit analisis “*slant*” antara *coder 1* dan peneliti diperoleh persamaan (M) yakni 68 teks berita. Langkah pertama yang dilakukan ialah metode uji reliabilitas dengan rumus dari Ole R. Holsti, yaitu:

$$CR \text{ (coefficient reliability)} = \frac{2M}{N_1 + N_2} = \frac{2(68)}{(68 + 68)} = \frac{(136)}{(136)} = 1$$

Setelah koefisien reliabilitas didapatkan maka langkah selanjutnya adalah mencari *index of reliability* dengan rumus yang dikembangkan Scott. Rumus ini digunakan untuk memperkuat uji reliabilitas.

TABEL 63
Uji Reliabilitas
Sub Unit Analisis “*Slant*”
Antara *Coder 1* dan *Peneliti*

Kategori	Frekuensi (f) n = 136	Proporsi dari Total Berita	Kuadrat Proporsi
Ya	8	0,06	0,0036
Tidak	128	0,94	0,88
Jumlah			0,88

Sumber: *coding sheet*

$$P_i = \frac{(1 - 0,88)}{(1 - 0,88)} = \frac{0,12}{0,12} = 1$$

Nilai keterandalan yang diperoleh antara *coder 1* dan peneliti ialah 100 %.

32.2. Uji Reliabilitas antara *Coder 2* dan *Peneliti*

Untuk sub unit analisis “*slant*” antara *coder 2* dan peneliti diperoleh persamaan (M) yakni 64 teks berita. Langkah pertama yang dilakukan ialah metode uji reliabilitas dengan rumus dari Ole R. Holsti:

$$CR \text{ (coefficient reliability)} = \frac{2 M}{N1 + N2} = \frac{2 (64)}{(68 + 68)} = \frac{(128)}{(136)} = 0,94$$

Setelah koefisien reliabilitas didapatkan maka langkah selanjutnya adalah mencari *index of reliability* dengan rumus yang dikembangkan Scott. Hal ini dilakukan untuk memperkuat hasil uji reliabilitas di atas.

TABEL 64
Uji Reliabilitas
Sub Unit Analisis “*Slant*”
Antara *Coder 2* dan Peneliti

Kategori	Frekuensi (f) n = 136	Proporsi dari Total Berita	Kuadrat Proporsi
Ya	10	0,07	0,0049
Tidak	126	0,93	0,86
Jumlah			0,86

Sumber: *coding sheet*

$$P_i = \frac{(0,94-0,86)}{(1-0,86)} = \frac{0,08}{0,14} = 0,57$$

Nilai keterandalan yang diperoleh antara *coder 2* dan peneliti pada sub unit analisis “*slant*” ialah 57%.

Dari kedua penghitungan di atas, maka dapat diperoleh tingkat reliabilitas rata-rata, yakni:

$$P_i \text{ rata-rata} = \frac{P_i \text{ pertama} + P_i \text{ kedua}}{2} = \frac{(1 + 0,57)}{2} = \frac{1,57}{2} = 0,79$$

Dengan demikian, tingkat reliabilitas rata-rata yang diperoleh dari kedua *coder* untuk sub unit analisis “*slant*” adalah 79%.

33. Uji Reliabilitas untuk Sub Unit Analisis “Representasi Pro-kontra”

33.1. Uji Reliabilitas antara \Coder 1 dan Peneliti

Untuk sub unit analisis “representasi pro-kontra” antara *coder 1* dan peneliti diperoleh persamaan (M) sejumlah 63 teks berita. Langkah pertama yang dilakukan ialah metode uji reliabilitas dengan rumus Holsti:

$$CR \text{ (coefficient reliability)} = \frac{2 M}{N1 + N2} = \frac{2 (63)}{(68 + 68)} = \frac{(126)}{(136)} = 0,93$$

Setelah koefisien reliabilitas didapatkan maka langkah selanjutnya adalah mencari *index of reliability* dengan rumus yang dikembangkan Scott. Rumus ini digunakan untuk memperkuat uji reliabilitas.

TABEL 65
Uji Reliabilitas
Sub Unit Analisis “Representasi Pro-Kontra”
Antara Coder 1 dan Peneliti

Kategori	Frekuensi (f) n = 136	Proporsi dari Total Berita	Kuadrat Proporsi
Ya	45	0,33	0,11
Tidak	91	0,67	0,45
Jumlah			0,56

Sumber: coding sheet

$$Pi = \frac{(0,93 - 0,56)}{(1 - 0,56)} = \frac{0,37}{0,44} = 0,84$$

Nilai keterandalan yang diperoleh antara *coder* 1 dan peneliti pada sub unit analisis “representasi pro-kontra” ialah 84%.

33.2. Uji Reliabilitas antara *Coder* 2 dan Peneliti

Untuk sub unit analisis “representasi pro-kontra” antara *coder* 2 dan peneliti diperoleh persamaan (M) yakni 61 teks berita. Langkah pertama yang dilakukan ialah metode uji reliabilitas dengan rumus Holsti, yaitu:

$$CR \text{ (coeficient reliability)} = \frac{2 M}{N1 + N2} = \frac{2 (61)}{(68 + 68)} = \frac{(122)}{(136)} = 0,90$$

Setelah koefisien reliabilitas didapatkan maka langkah selanjutnya adalah mencari *index of reliability* dengan rumus yang dikembangkan Scott.

TABEL 66
Uji Reliabilitas
Sub Unit Analisis “Representasi Pro-Kontra”
Antara Coder 2 dan Peneliti

Kategori	Frekuensi (f) n = 136	Proporsi dari Total Berita	Kuadrat Proporsi
Ya	45	0,33	0,11
Tidak	91	0,67	0,45
Jumlah			0,56

Sumber: coding sheet

$$Pi = \frac{(0,90 - 0,56)}{(1 - 0,56)} = \frac{0,34}{0,44} = 0,77$$

Nilai keterandalan yang diperoleh antara *coder* 2 dan dan peneliti pada sub unit analisis “representasi pro-kontra” ialah 77%.

Dari kedua penghitungan di atas, maka dapat diperoleh tingkat reliabilitas rata-rata, yakni:

$$P_i \text{ rata - rata} = \frac{P_i \text{ pertama} + P_i \text{ kedua}}{2} = \frac{(0,84 + 0,77)}{2} = \frac{1,61}{2} = 0,81$$

Dengan demikian, tingkat reliabilitas rata-rata yang diperoleh dari kedua *coder* untuk sub unit analisis “representasi pro-kontra” adalah 81%.

34. Uji Reliabilitas untuk Sub Unit Analisis “Personalisasi Tokoh”

34.1. Uji Reliabilitas antara *Coder* 1 dan Peneliti

Untuk sub unit analisis “personalisasi tokoh” antara *coder* 1 dan peneliti diperoleh persamaan (M) yakni pada 61 teks berita. Langkah pertama yang dilakukan ialah metode uji reliabilitas dengan rumus Holsti untuk memperoleh koefisien reliabilitas, yaitu:

$$CR \text{ (coefficient reliability)} = \frac{2 M}{N_1 + N_2} = \frac{2 (61)}{(68 + 68)} = \frac{(122)}{(136)} = 0,90$$

Setelah koefisien reliabilitas didapatkan maka langkah selanjutnya adalah mencari *index of reliability* dengan rumus yang dikembangkan Scott. Rumus ini digunakan untuk memperkuat uji reliabilitas.

TABEL 67
Uji Reliabilitas
Sub Unit Analisis “Personalisasi Tokoh”
Antara *Coder* 1 dan Peneliti

Kategori	Frekuensi (f) n = 136	Proporsi dari Total Berita	Kuadrat Proporsi
Ya	58	0,43	0,18
Tidak	78	0,57	0,32
Jumlah			0,50

Sumber: *coding sheet*

$$P_i = \frac{(0,90-0,50)}{(1-0,50)} = \frac{0,40}{0,50} = 0,80$$

Dengan demikian, besar nilai keterandalan yang diperoleh antara *coder* 1 dan peneliti pada sub unit analisis “personalisasi tokoh” ialah 0,80 atau 80%.

34.2. Uji Reliabilitas antara *Coder* 2 dan Peneliti

Untuk sub unit analisis “personalisasi tokoh” antara *coder* 2 dan peneliti diperoleh persamaan (M) yakni 61 teks berita. Langkah pertama yang dilakukan ialah metode uji reliabilitas dengan rumus Holsti:

$$CR \text{ (coefficient reliability)} = \frac{2 M}{N_1 + N_2} = \frac{2 (61)}{(68 + 68)} = \frac{(122)}{(136)} = 0,90$$

Setelah koefisien reliabilitas didapatkan maka langkah selanjutnya adalah mencari *index of reliability* dengan rumus yang dikembangkan Scott. Hal ini dilakukan untuk memperkuat hasil uji reliabilitas di atas.

TABEL 68
Uji Reliabilitas
Sub Unit Analisis “Personalisasi Tokoh”
Antara Coder 2 dan Peneliti

Kategori	Frekuensi (f) n = 136	Proporsi dari Total Berita	Kuadrat Proporsi
Ya	48	0,35	0,12
Tidak	88	0,65	0,42
Jumlah			0,54

Sumber: *coding sheet*

$$P_i = \frac{(0,90-0,54)}{(1-0,54)} = \frac{0,36}{0,46} = 0,78$$

Nilai keterandalan yang diperoleh antara *coder 2* dan peneliti pada sub unit analisis “personalisasi tokoh” ialah 78%.

Dari kedua penghitungan di atas, maka dapat diperoleh tingkat reliabilitas rata-rata, yakni:

$$P_i \text{ rata-rata} = \frac{P_i \text{ pertama} + P_i \text{ kedua}}{2} = \frac{(0,80 + 0,78)}{2} = \frac{1,58}{2} = 0,79$$

Dengan demikian, tingkat reliabilitas rata-rata yang diperoleh dari kedua *coder* untuk sub unit analisis “personalisasi tokoh” adalah 79%.

35. Uji Reliabilitas untuk Sub Unit Analisis “Penonjolan Emosional”

35.1. Uji Reliabilitas antara *Coder 1* dan Peneliti

Untuk sub unit analisis “penonjolan emosional” antara *coder 1* dan peneliti diperoleh persamaan (M) sejumlah 68 teks berita. Langkah pertama yang dilakukan ialah metode uji reliabilitas dengan rumus Holsti:

$$CR \text{ (coeficient reliability)} = \frac{2M}{N_1+N_2} = \frac{2(68)}{(68+68)} = \frac{(136)}{(136)} = 1$$

Setelah koefisien reliabilitas didapatkan maka langkah selanjutnya adalah mencari *index of reliability* dengan rumus yang dikembangkan Scott. Rumus ini digunakan untuk memperkuat uji reliabilitas.

TABEL 69
Uji Reliabilitas
Sub Unit Analisis “Penonjolan Emosional”
Antara Coder 1 dan Peneliti

Kategori	Frekuensi Persetujuan (f) n = 136	Proporsi dari Total Berita	Kuadrat Proporsi
Ya	0	0	0
Tidak	136	1	1
Jumlah			1

Sumber: *coding sheet*

$$P_i = \frac{(1-1)}{(1-1)} = \frac{0}{0} = 1$$

Nilai keterandalan yang diperoleh antara *coder 1* dan peneliti pada sub unit analisis “penonjolan emosional” ialah 100 %.

35.2. Uji Reliabilitas antara *Coder 2* dan Peneliti

Untuk sub unit analisis “penonjolan emosional” antara *coder 2* dan peneliti diperoleh persamaan (M) sejumlah 68 teks berita. Dengan menggunakan rumus dari Ole R. Holsti, yaitu:

$$CR \text{ (coeficient reliability)} = \frac{2 M}{N1 + N2} = \frac{2 (68)}{(68 + 68)} = \frac{(136)}{(136)} = 1$$

Setelah koefisien reliabilitas didapatkan maka langkah selanjutnya adalah mencari *index of reliability* dengan rumus yang dikembangkan Scott.

TABEL 70
Uji Reliabilitas
Sub Unit Analisis “Penonjolan Emosional”
Antara Coder 2 dan Peneliti

Kategori	Frekuensi Persetujuan (f) n = 136	Proporsi dari Total Berita	Kuadrat Proporsi
Ya	0	0	0
Tidak	136	1	1
Jumlah			1

Sumber: *coding sheet*

$$P_i = \frac{(1-1)}{(1-1)} = \frac{0}{0} = 1$$

Nilai keterandalan yang diperoleh antara *coder 2* dan peneliti pada sub unit analisis “penonjolan emosional” ialah 100%.

Dari kedua penghitungan di atas, maka dapat diperoleh tingkat reliabilitas rata-rata, yakni:

$$P_i \text{ rata - rata} = \frac{P_i \text{ pertama} + P_i \text{ kedua}}{2} = \frac{(1 + 1)}{2} = 1$$

Dengan demikian, tingkat reliabilitas rata-rata yang diperoleh dari kedua *coder* untuk sub unit analisis “penonjolan emosional” adalah 100%.

36. Uji Reliabilitas untuk Sub Unit Analisis “Dramatisasi”

36.1. Uji Reliabilitas antara *Coder* 1 dan Peneliti

Untuk sub unit analisis “dramatisasi” antara *coder* 1 dan peneliti diperoleh persamaan (M) yakni 65 teks berita. Langkah pertama yang dilakukan ialah metode uji reliabilitas dengan rumus Holsti, yaitu:

$$CR \text{ (coefficient reliability)} = \frac{2 M}{N_1 + N_2} = \frac{2 (65)}{(68 + 68)} = \frac{(130)}{(136)} = 0,88$$

Setelah koefisien reliabilitas didapatkan maka langkah selanjutnya adalah mencari *index of reliability* dengan rumus yang dikembangkan Scott.

TABEL 71
Uji Reliabilitas
Sub Unit Analisis “Dramatisasi”
Antara *Coder* 1 dan Peneliti

Kategori	Frekuensi (f) n = 136	Proporsi dari Total Berita	Kuadrat Proporsi
Ya	27	0,20	0,04
Tidak	109	0,80	0,64
Jumlah			0,68

Sumber: *coding sheet*

$$P_i = \frac{(0,88 - 0,68)}{(1 - 0,68)} = \frac{0,20}{0,32} = 0,63$$

Nilai keterandalan yang diperoleh antara *coder* 1 dan peneliti pada sub unit analisis “dramatisasi” ialah 63%.

36.2. Uji Reliabilitas antara *Coder* 2 dan Peneliti

Untuk sub unit analisis “dramatisasi” antara *coder* 2 dan peneliti diperoleh persamaan (M) yakni 65 teks berita. Langkah pertama yang dilakukan ialah metode uji reliabilitas dengan rumus Holsti, yaitu:

$$CR \text{ (coefficient reliability)} = \frac{2 M}{N_1 + N_2} = \frac{2 (65)}{(68 + 68)} = \frac{(130)}{(136)} = 0,88$$

Setelah koefisien reliabilitas didapatkan maka langkah selanjutnya adalah mencari *index of reliability* dengan rumus yang dikembangkan Scott. Hal ini dilakukan untuk memperkuat hasil uji reliabilitas di atas.

TABEL 72
Uji Reliabilitas
Sub Unit Analisis “Dramatisasi”
Antara Coder 2 dan Peneliti

Kategori	Frekuensi (f) n = 136	Proporsi dari Total Berita	Kuadrat Proporsi
Ya	27	0,20	0,04
Tidak	109	0,80	0,64
Jumlah			0,68

Sumber: *coding sheet*

$$P_i = \frac{(0,88 - 0,68)}{(1 - 0,68)} = \frac{0,20}{0,32} = 0,63$$

Nilai keterandalan yang diperoleh antara *coder 2* dan dan peneliti pada sub unit analisis “dramatisasi” ialah 63%.

Dari kedua penghitungan di atas, maka dapat diperoleh tingkat reliabilitas rata-rata, yakni:

$$P_i \text{ rata - rata} = \frac{P_i \text{ pertama} + P_i \text{ kedua}}{2} = \frac{(0,63 + 0,63)}{2} = 0,63$$

Dengan demikian, tingkat reliabilitas rata-rata yang diperoleh dari kedua *coder* untuk sub unit analisis “dramatisasi” adalah 63%.

37. Uji Reliabilitas untuk Sub Unit Analisis “Stereotipe”

37.1. Uji Reliabilitas antara *Coder 1* dan Peneliti

Untuk sub unit analisis “stereotipe” antara *coder 1* dan peneliti diperoleh persamaan (M) sejumlah 67 teks berita. Langkah pertama yang dilakukan ialah metode uji reliabilitas Holsti:

$$CR \text{ (coeficient reliability)} = \frac{2 M}{N_1 + N_2} = \frac{2 (67)}{(68 + 68)} = \frac{(134)}{(136)} = 0,99$$

Setelah koefisien reliabilitas didapatkan maka langkah selanjutnya adalah mencari *index of reliability* dengan rumus yang dikembangkan Scott.

TABEL 73
Uji Reliabilitas
Sub Unit Analisis “Stereotipe”
Antara Coder 1 dan Peneliti

Kategori	Frekuensi (f) n = 136	Proporsi dari Total Berita	Kuadrat Proporsi
Ya	9	0,07	0,0049
Tidak	127	0,93	0,86
Jumlah			0,86

Sumber: *coding sheet*

$$P_i = \frac{(0,99 - 0,86)}{(1 - 0,86)} = \frac{0,13}{0,14} = 0,93$$

Nilai keterandalan yang diperoleh antara *coder* 1 dan peneliti pada sub unit analisis “stereotipe” ialah 93%.

37.2. Uji Reliabilitas antara *Coder* 2 dan Peneliti

Untuk sub unit analisis “stereotipe” antara *coder* 2 dan peneliti diperoleh persamaan (M) yakni 64 teks berita. Langkah pertama yang dilakukan ialah metode uji reliabilitas dengan rumus Holsti, yaitu:

$$CR \text{ (coefficient reliability)} = \frac{2 M}{N_1 + N_2} = \frac{2 (64)}{(68 + 68)} = \frac{(128)}{(136)} = 0,94$$

Setelah koefisien reliabilitas didapatkan maka langkah selanjutnya adalah mencari *index of reliability*. Nilai keterandalan yang diperoleh melalui rumus Scott:

TABEL 74
Uji Reliabilitas
Sub Unit Analisis “Stereotipe”
Antara *Coder* 2 dan Peneliti

Kategori	Frekuensi (f) n = 136	Proporsi dari Total Berita	Kuadrat Proporsi
Ya	8	0,06	0,0036
Tidak	128	0,94	0,88
Jumlah			0,88

Sumber: *coding sheet*

$$P_i = \frac{(0,94 - 0,88)}{(1 - 0,88)} = \frac{0,06}{0,12} = 0,50$$

Nilai keterandalan yang diperoleh antara *coder* 2 dan dan peneliti pada sub unit analisis “stereotipe” ialah 50%.

Dari kedua penghitungan di atas, maka dapat diperoleh tingkat reliabilitas rata-rata, yakni:

$$P_i \text{ rata - rata} = \frac{P_i \text{ pertama} + P_i \text{ kedua}}{2} = \frac{(0,93 + 0,50)}{2} = \frac{1,43}{2} = 0,72$$

Dengan demikian, indeks keterandalan rata-rata pada sub unit analisis “stereotipe” ialah 72%.

38. Uji Reliabilitas untuk Sub Unit Analisis “*Juxtaposition*”

38.1. Uji Reliabilitas antara *Coder* 1 dan Peneliti

Untuk sub unit analisis “*juxtaposition*” antara *coder* 1 dan peneliti diperoleh persamaan (M) yakni 67 teks berita. Langkah pertama yang dilakukan ialah metode uji reliabilitas dengan rumus Holsti, yaitu:

$$CR \text{ (coefficient reliability)} = \frac{2 M}{N1 + N2} = \frac{2 (67)}{(68 + 68)} = \frac{(134)}{(136)} = 0,99$$

Setelah koefisien reliabilitas didapatkan maka langkah selanjutnya adalah mencari *index of reliability* dengan rumus yang dikembangkan Scott.

TABEL 75
Uji Reliabilitas
Sub Unit Analisis “*Juxtaposition*”
Antara *Coder* 1 dan Peneliti

Kategori	Frekuensi (f) n = 136	Proporsi dari Total Berita	Kuadrat Proporsi
Ya	7	0,05	0,0025
Tidak	129	0,95	0,90
Jumlah			0,90

Sumber: *coding sheet*

$$Pi = \frac{(0,99-0,90)}{(1-0,90)} = \frac{0,09}{0,10} = 0,90$$

Nilai keterandalan yang diperoleh antara *coder* 1 dan peneliti pada sub unit analisis “*juxtaposition*” ialah 90%.

38.2. Uji Reliabilitas antara *Coder* 2 dan Peneliti

Untuk sub unit analisis “*juxtaposition*” antara *coder* 2 dan peneliti diperoleh persamaan (M) yakni 67 teks berita. Langkah pertama yang dilakukan ialah metode uji reliabilitas dengan rumus Holsti, yaitu:

$$CR \text{ (coefficient reliability)} = \frac{2 M}{N1 + N2} = \frac{2 (67)}{(68 + 68)} = \frac{(134)}{(136)} = 0,99$$

Setelah koefisien reliabilitas didapatkan maka langkah selanjutnya adalah mencari *index of reliability* dengan rumus yang dikembangkan Scott.

TABEL 76
Uji Reliabilitas
Sub Unit Analisis “*Juxtaposition*”
Antara *Coder* 2 dan Peneliti

Kategori	Frekuensi (f) n = 136	Proporsi dari Total Berita	Kuadrat Proporsi
Ya	5	0,04	0,0016
Tidak	131	0,96	0,92
Jumlah			0,92

Sumber: *coding sheet*

$$Pi = \frac{(0,99-0,92)}{(1-0,92)} = \frac{0,07}{0,08} = 0,88$$

Nilai keterandalan yang diperoleh antara *coder* 2 dan peneliti pada sub unit analisis “*juxtaposition*” ialah 88%.

Dari kedua penghitungan di atas, maka dapat diperoleh tingkat reliabilitas rata-rata, yakni:

$$Pi \text{ rata - rata} = \frac{Pi \text{ pertama} + Pi \text{ kedua}}{2} = \frac{(0,90 + 0,88)}{2} = \frac{1,78}{2} = 0,89$$

Dengan demikian, tingkat reliabilitas rata-rata yang diperoleh dari *coder* 1 dan *coder* 2 untuk sub unit analisis “*juxtaposition*” adalah 89%.

39. Uji Reliabilitas untuk Sub Unit Analisis “*Linkages*”

39.1. Uji Reliabilitas antara *Coder* 1 dan Peneliti

Untuk sub unit analisis “*linkages*” antara *coder* 1 dan peneliti diperoleh persamaan (M) yakni 67 teks berita. Langkah pertama yang dilakukan ialah metode uji reliabilitas dengan rumus Holsti, yaitu:

$$CR \text{ (coeficient reliability)} = \frac{2 M}{N1 + N2} = \frac{2 (67)}{(68 + 68)} = \frac{(134)}{(136)} = 0,99$$

Setelah koefisien reliabilitas didapatkan maka langkah selanjutnya adalah mencari *index of reliability* dengan rumus yang dikembangkan Scott.

TABEL 77
Uji Reliabilitas
Sub Unit Analisis “*Linkages*”
Antara *Coder* 1 dan Peneliti

Kategori	Frekuensi (f) n = 136	Proporsi dari Total Berita	Kuadrat Proporsi
Ya	7	0,05	0,0025
Tidak	129	0,95	0,90
Jumlah			0,90

Sumber: *coding sheet*

$$Pi = \frac{(0,99 - 0,90)}{(1 - 0,90)} = \frac{0,09}{0,10} = 0,90$$

Nilai keterandalan yang diperoleh antara *coder* 1 dan peneliti pada sub unit analisis “*linkages*” ialah 90%.

39.2. Uji Reliabilitas antara *Coder* 2 dan Peneliti

Untuk uji reliabilitas sub unit analisis “*linkages*” antara *coder* 2 dan peneliti diperoleh persamaan (M) yakni 66 teks berita. Langkah pertama yang dilakukan ialah metode uji reliabilitas dengan rumus dari Ole R. Holsti, yaitu:

$$CR \text{ (coeficient reliability)} = \frac{2 M}{N1 + N2} = \frac{2 (66)}{(68 + 68)} = \frac{(132)}{(136)} = 0,97$$

Setelah koefisien reliabilitas didapatkan maka langkah selanjutnya adalah mencari *index of reliability* dengan rumus yang dikembangkan Scott.

TABEL 78
Uji Reliabilitas
Sub Unit Analisis “Linkages”
Antara Coder 2 dan Peneliti

Kategori	Frekuensi (f) n = 136	Proporsi dari Total Berita	Kuadrat Proporsi
Ya	6	0,04	0,0016
Tidak	130	0,96	0,92
Jumlah			0,92

Sumber: *coding sheet*

$$P_i = \frac{(0,97 - 0,92)}{(1 - 0,92)} = \frac{0,05}{0,08} = 0,63$$

Nilai keterandalan yang diperoleh antara *coder 2* dan peneliti pada sub unit analisis “*linkages*” ialah 63%.

Dari kedua penghitungan di atas, maka dapat diperoleh tingkat reliabilitas rata-rata, yakni:

$$P_i \text{ rata - rata} = \frac{P_i \text{ pertama} + P_i \text{ kedua}}{2} = \frac{(0,90 + 0,63)}{2} = \frac{1,53}{2} = 0,77$$

Dengan demikian, tingkat reliabilitas rata-rata yang diperoleh dari kedua *coder* untuk sub unit analisis “*linkages*” adalah 77%.

Program 100 Hari Terkait Infrastruktur



- ▶ Peningkatan kesehatan lingkungan berupa pembangunan sarana air minum 1.379 lokasi kawasan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan pembangunan sanitasi masyarakat di 61 lokasi.
PJ: Departemen PU
- ▶ Penyelesaian audit teknis untuk pengembalian dan pemastian fungsi embung, waduk, bendung, dan bendungan, serta jaringan irigasi secara holistik dan terintegrasi.
PJ: Departemen PU
- ▶ Peningkatan kapasitas jalan lintas di Sumatra dan Sulawesi sepanjang 895 km, sebagai bagian dari pembangunan jalan lintas Sumatra, Jawa, Bali, NTB, NTT, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua sepanjang 19.370 km dalam lima tahun.
PJ: Departemen PU
- ▶ Pembentukan tim penyiapan prasarana penghubung Jawa-Sumatra yang bertugas melakukan studi kelayakan.
PJ: Departemen PU
- ▶ Penyelesaian struktur penampang basah prasarana pengendalian banjir Banjir Kanal Timur Jakarta sehingga dapat mengalirkan air.
PJ: Departemen PU
- ▶ Peningkatan tingkat hunian rusunawa yang sudah/sedang dibangun sekitar 40% menjadi 80% dalam 10 hari.
PJ: Kementerian Perumahan Rakyat
- ▶ Penyelesaian penyediaan akses telepon di 32 provinsi, mencakup 25.000 desa (Desa Berdering).
PJ: Depkominfo
- ▶ Kaji ulang sinkronisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tata ruang.
PJ: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
- ▶ Penyempurnaan standar prosedur operasional pengaturan dan pelayanan perantaraan, mengacu UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
PJ: Badan Pertanahan Nasional
- ▶ Pengembangan Kantor Pertanahan Bergerek (Larasaito).
PJ: Badan Pertanahan Nasional
- ▶ Penyusunan RPP tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan.
PJ: Departemen Kehutanan
- ▶ Perubahan Perpres Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.
PJ: Kementerian PPN/Kepala Bappenas
- ▶ Perubahan Kepres 80/2003 mengenai tata cara pengadaan barang dan jasa pemerintah yang mencakup skema *co-financing* dan kerja sama pemerintah-swasta (*public private partnership*).
PJ: Kementerian PPN/Kepala Bappenas

Sumber: Bappenas Foto: MITERESIA/ANN MELIANA Galis: CAKSONO

Menko Perekonomian Buka Akses Kinerja 100 Hari

PEMERINTAH menjanjikan keterbukaan informasi untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan program 100 hari pemerintahan SBY-Boediono.

Demikian diungkapkan Menko Perekonomian Hatta Rajasa di Jakarta, kemarin. Ia mengatakan agar informasi dapat sampai ke masyarakat, kepada pers diberikan akses yang seluas-luasnya untuk bertanya tentang perkembangan pelaksanaan program 100 hari pemerintah.

"Silakan kalau mau tanya mengenai perkembangan program 100 hari. Kalau mau ke atas kantor saya lantai empat, silakan datang tidak apa-apa," kata Hatta.

Untuk menindaklanjuti program tersebut, pada Senin (16/11) Hatta akan bertemu dengan Menteri Pekerjaan Umum (PU) dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Pertemuan dengan Menteri PU diagendakan membahas revisi Perpres 67 tentang Kerja Sama Pemerintah Swasta dan Infrastruktur Penghubung Jawa-Sumatra.

Sementara itu, untuk meningkatkan kualitas dan pemeliharaan jalan nasional, Departemen PU akan memperlakukan kontrak berbasis kinerja (*performance based contract* / PBC). Sistem kontrak itu akan diaplikasikan pada ruas yang membutuhkan perhatian serius dalam pemeliharaan. Kontrak semacam itu merupakan konsep baru di Indonesia.

"Kontrak ini adalah model yang kami siapkan. Itu masuk dalam program 100 hari kami," kata Menteri PU

Djoko Kirmanto. Sistem kontrak berbasis kinerja didesain menuntun pertanggungjawaban pemeliharaan jalan dari investor



MUSAWIR/ANTO

Hatta Rajasa
Menko Perekonomian

yang memenangi tender. Artinya, dalam jangka waktu tertentu, sesuai kontrak, investor harus menjaga jalan agar ber kondisi baik. "Jangan sampai ada lubang atau kerusakkan lain," ucapnya.

Saat ini, panjang jalan nasional yang ada mencapai 35 ribu km. Sebanyak 3% dalam kondisi rusak berat.

Direktur Bina Program Ditjen Bina Marga Departemen PU Taufik Widjono menambahkan, penerapan sistem kontrak itu akan didahului dengan melakukan uji coba pada dua ruas jalan nasional. "Sekarang sedang disiapkan dua ruas jalan nasional untuk jadi *pilot project*, yakni ruas Demak-Trengguli (Jawa Tengah) sepanjang 12 km dan Ciasem-Pamanukan (Jawa Barat) sepanjang 21 km," kata Taufik.

Diperkirakan pemenang tender baru dapat ditentukan pada Februari 2010. Karena itu pelaksanaan *pilot project* tersebut tidak dapat dirampungkan dalam 100 hari.

Layanan Publik yang kian Mencemaskan

KALAU ada layanan yang terus-menerus digugat mutunya di negeri ini, itulah layanan publik. Hingga saat ini, kepuasan masyarakat terhadap berbagai pelayanan publik yang ada masih sangat rendah, bahkan berada pada level minus.

Alih-alih ada perbaikan mutu layanan publik dari waktu ke waktu, masyarakat malah dihadapkan pada berbagai permasalahan pelayanan publik yang banyak merugikan mereka, baik secara finansial maupun secara psikologis. Krisis listrik yang belum kunjung berakhir, krisis air bersih, krisis kesehatan berupa penyakit yang sudah hilang kini muncul kembali, terus mendera masyarakat tanpa bisa ditanggulangi secara memuaskan.

Begitulah benang merah yang terungkap dalam Diskusi Panel Meja Bundar 100 Hari SBY-Boediono yang digelar Media Group di Grand Studio Metro TV, Selasa (1/12). Kali ini para ahli yang terlibat dalam diskusi adalah Dekan Fakultas Ekonomi UI Firmanzah, narasumber linokunean dari IPB Sur-

tur yang menunjang. Selain itu, suplai energi primer juga sangat terbatas dan jelas tidak mampu mengimbangi kebutuhan listrik saat ini.

Hasil survei Media Group juga memperlihatkan mayoritas responden atau 88,2% responden mengatakan pernah mengalami pemadaman listrik selama tiga bulan terakhir ini. Padahal sebagian besar (63,4%) responden juga menyatakan telah melakukan penghematan listrik. Responden umumnya (57,3%) menilai listrik biarpet lebih disebabkan kesalahan pihak penyedia, dalam hal ini PLN, bukan kesalahan konsumen.

Dalam pandangan Firmanzah, pembangunan tidak akan terjadi jika suplai energi di suatu negara tidak terjamin keberadaannya. Ia mencontohkan negara-negara lain, seperti Amerika, India, dan China yang jauh-jauh hari mempersiapkan berapa kebutuhan listrik bagi pembangunan yang akan mereka lakukan.

Kesiapan dan kepastian pemenuhan energi juga menjadi faktor yang sangat memengaruhi pertumbuhan iklim investasi. Jika terjadi krisis energi li-

hadap pasokan energi tidak terbarukan seperti gas, batu bara, dan minyak bumi harus terus dikurangi. Apalagi potensi EBT Indonesia yang belum dimanfaatkan cukup besar, di antaranya mini/mikrohidro, biomass, energi surya, energi angin, dan energi nuklir.

Mengacu kepada Perpres No 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional, kontribusi EBT dalam bauran energi primer nasional pada 2025 sebesar 17%. Rincian komposisinya, yakni bahan bakar nabati sebesar 5%, panas bumi 5%, biomass, nuklir, air, surya, dan angin 5%, serta batu bara yang dicairkan 2%.

Krisis air

Saat ini akses masyarakat Indonesia terhadap air bersih masih rendah, tidak hanya di perkotaan yang notabene tidak memiliki sumber air sendiri, melainkan lebih ironis karena daerah pedesaan di pegunungan pun sudah mengalami krisis air bersih. Misalnya di kawasan Wonogiri, Gunung Kidul, Toli-Toli, bahkan di Sukabumi, kawasan yang dikenal sebagai daerah utama asal bahan baku indu-

Sabtu, 5 Desember 2009

Reformasi Harus Dimulai dari Kantor Presiden

REFORMASI birokrasi harus menjadi agenda utama duet pemerintahan SBY-Boediono. Namun, program reformasi birokrasi seperti yang dicanangkan pemerintah tak akan berjalan kalau tidak dimulai dari Kantor Kepresidenan.

Hal tersebut mengemuka dalam Seminar Politik & Ekonomi 2010 yang diselenggarakan Media Group di Hotel Dharmawangsa, Jakarta, kemarin.

Pada sesi bidang politik hadir Menko Polhukam Djoko Suyanto (*keynote speech*), Mendagri Gamawan Fauzi, pengamat politik UI Eep Saefulloh Fatah, Rektor Universitas Paramadina Anies Baswedan, dan Ketua Partai Demokrat Hayono Isman. Bertindak sebagai moderator Direktur Pemberitaan *Media*

Indonesia Saur Hutabarat.

Menko Polhukam Djoko Suyanto mengungkapkan pemerintah berkomitmen untuk mewujudkan reformasi birokrasi. Hal itu dimulai dengan menempatkan pemberantasan mafia hukum dan mafia perizinan sebagai prioritas program 100 hari pemerintahan SBY. "Pemerintah menyadari adanya keluhan dari dunia usaha atas kelambanan perizinan," katanya.

Menurut Eep, seharusnya reformasi birokrasi dimulai dari hulunya, yakni Kantor Kepresidenan. "Presiden SBY harus membuktikan terlebih dahulu bahwa kantornya memelopori reformasi. Apa saja yang telah dilakukannya. Ini yang penting," ujarnya.



MINI PFAN

POLITIK 2010: Menko Polhukam Djoko Suyanto menerima cenderamata dari Dewan Redaksi Media Group Toeti Adhitama sesuai menjadi pembicara dalam diskusi Politik dan Ekonomi Indonesia 2010 di Hotel Dharmawangsa, Jakarta, kemarin.

Pada bagian lain, kondisi politik dalam negeri pada 2010 diprediksi semakin dinamis. Hal itu tak lepas dari isu besar di penghujung 2009 yang cukup mengganggu program 100 hari pemerintah, yaitu kasus kriminalisasi pimpinan non-aktif KPK Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah serta skandal pengucuran dana Bank Century. Selain itu, pada 2010 terdapat 246 pilkada.

Kendati begitu, perekonomian 2010 diyakini akan lebih baik daripada tahun ini, meskipun belum kembali ke posisi normal.

Sektor industri dan investasi akan lebih ramai mencatatkan pertumbuhan dengan mulai pulihnya perekonomian global.

(DM/DU/* /X-4)

Metode penelitian: Systematic random sampling

● **Kerangka sampel:** Buku telepon PT Telkom

● **Margin of error:** 4,5% dengan tingkat kepercayaan 95%

● **Jumlah responden:** 500 orang tersebar di 10 kota.

Sumber: Medya Group/GRAFIS: TNYOK

lama masyarakat bisa berada di titik tidak memedulikan kasus tersebut, tapi yang terpenting adalah kasus Century butuh pesakitan yang bisa disalahkan dan harus dihukum.

Ia mencontohkan kasus orang yang mengambil biji kakao saja dihukum sedemikian rupa, apalagi yang mengambil uang Rp6,7 triliun, mestinya dihukum lebih berat. Itulah yang ia sebut keterdesakan sebagai implementasi fasa apatisisme yang semakin menguat di masyarakat terhadap proses hukum yang ada. Radhar berpijak pada kasus Bibit dan Chandra yang berlarut-larut, khususnya keengganan pemerintah menuntaskan rekomendasi Tim 8.

Kalau kondisi tersebut terus terjadi, dan apa yang akan dihasilkan oleh Panitia Khusus DPR soal Angket Bank Century hanyalah normatif dan bukan hal yang fundamental, Pansus Angket hanya akan mendinginkan emosi masyarakat tapi tidak menghasilkan penyelesaian yang tuntas.

Pengaruh investasi

Keterdesakan transparansi tersebut, menurut pakar ekonomi Firmanzah, juga akan memengaruhi para investor dalam menentukan langkah investasi mereka di Indonesia. Masyarakat ingin mengetahui adanya keterbukaan proses *bailout* Century. Terutama soal

Zainal juga mengajak publik untuk mendorong proses hukum di KPK.

Meski diakuinya banyak lembaga penegak hukum yang bisa menangani Century di wilayah hukum, misalnya kejaksaan, semuanya sulit untuk diharapkan. Sebagian besar publik tidak bisa percaya begitu saja dengan kejaksaan setelah mereka secara sekilas langsung mengatakan tidak ada tindak pidana dalam kasus Century. Padahal, audit BPK ketika itu belum selesai. Jadi, KPK menjadi satu-satunya institusi yang bisa menjadi harapan masyarakat untuk menyelesaikan kasus Century di ranah hukum.

Hal senada juga diungkapkan Fir-

besoknya masih positif, tapi saat dana dikururkan sudah minus.

Persoalan ketiga, semua hal-hal yang ada kaitannya dengan memperkaya diri atau orang lain dengan menggunakan uang negara di balik *bailout* Century tentu memiliki motif. Motifnya bisa politik maupun uang. Apalagi, saat *bailout* itu terjadi, waktunya berdekatan dengan pemilu. Ada tendensi politik di balik pengucuran dana talangan itu, lalu uang tersebut lari ke partai politik tertentu. Dari soal itu, muncullah dimensi keempat, yaitu pencucian uang melalui dana kampanye.

Menurut Firmanzah, agar semua tuding itu terjawab, harus ada upaya keras dan tuntas untuk mengusut ke mana aliran dana Century mengalir. Kendati, ia tidak menafikan bahwa situasi saat kebijakan penyelamatan Century diambil tidak mudah. Ia menyebut kondisi ekonomi global yang memburuk, psikologis bank sentral terguncang, juga ekspor turun dan depresiasi rupiah yang tajam hingga mencapai 12.000 per dolar AS, serta kondisi politik yang memanas menjelang pemilu.

Zainal berpendapat, kasus Century harus dibedah. Itu akan membuat semuanya terang-benderang dan aksi serupa di kemudian hari tidak terulang.

Vini Mariyena Rosya/X-10

“

Apa pun yang dihasilkan Pansus Angket Century akan memengaruhi investor untuk menentukan langkah investasi mereka, apakah akan menanamkan uangnya atau tidak.”

DISKUSI PANEL AHLI MEDIA GROUP

Pemberantasan Mafia dan Pemerataan Ekonomi

DIMASUKKANNYA pemberantasan mafia hukum dalam agenda kerja 100 hari pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono merupakan langkah yang sangat tepat. Hal itu menunjukkan bahwa SBY-Boediono beserta jajarannya sudah menyerap dengan baik tema dan persoalan yang sedang riil berlangsung di masyarakat.

Begitulah wacana yang mengemuka dalam diskusi panel ahli Media Group tentang Analisis 100 Hari SBY-Boediono di Grand Studio Metro TV, Jakarta, Selasa (10/11). Para ahli yang terlibat dalam panel diskusi tersebut adalah Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Firmanzah, pakar lingkungan dari IPB Surjono Hadi Sutjahjo, pakar perminyakan ITB Rudi Rubianidini, pakar ekonomi pertanian Unila Bustanul Arifin, dan Andy Agung Prihatna dari Litbang Media Group. Ada empat sektor yang dibahas dalam panel tersebut, yakni lingkungan hidup, energi, ekonomi, dan pertanian.

Dalam pandangan Firmanzah, pertumbuhan iklim investasi memang sangat bergantung pada kepastian hukum. Persoalannya tinggal bagaimana penerapan dan pengawasannya ke depan. Selain kepastian hukum, pertumbuhan ekonomi pun harus terus dijaga, baik dari segi kuantitas maupun kualitas.

Untuk mencapai itu, pemerintah harus menggenjot perekonomian yang merata dan berkeadilan. Daerah penyumbang produk domestik bruto (PDB) nasional masih terlalu terpusat di Pulau Jawa dan Sumatra yang menyumbang PDB 80%. Sumbangan dari Pulau Jawa bahkan mencapai 52% dari total PDB. Jika hal tersebut tidak diperbaiki, jurang antara daerah dan pusat akan terus melebar.

Untuk mencapai pemerataan, pemerintah harus dapat menggenjot sektor riil dan mendor-

ong pengembangan sektor usaha kecil dan menengah (UKM). Setiap daerah harus diberi ruang lebih untuk mengembangkan produk-produk andalan masing-masing.

Untuk itu, Firmanzah mengemukakan, sektor pembiayaan dari perbankan dan fiskal harus diperkuat. Porsi penyerapan stimulus fiskal perlu ditingkatkan. Jika itu dapat terealisasi, Firmanzah memproyeksikan penerimaan devisa dari ekspor nasional tahun depan tumbuh 3%-4%, atau 6% dari total PDB.

Itu membawa dampak yang sangat dirasakan oleh kaum petani, yakni meski terjadi swasembada pangan, petani tetap saja susah untuk sejahtera. Keberpihakan pemerintah kepada para petani, lanjut Bustanul, sangat penting karena sebagian besar petani Indonesia adalah petani gurem atau petani yang hanya memiliki lahan kurang dari 0,5 hektare.

Menurut dia, keseimbangan terhadap keempat aspek ketahanan pangan amat penting. Apalagi permintaan kebutuhan pangan nasional terus

kapasitas produksi pangan dalam negeri.

Hal yang tak kalah penting lainnya adalah stabilitas harga. Pemerintah harus terus berupaya menjaga adanya keseimbangan antara kebutuhan masyarakat dan jumlah pasokan di pasar. Harga-harga bahan kebutuhan pokok harus dijaga agar tidak melambung hingga melampaui daya beli masyarakat.

Kecukupan energi

Sementara itu, di bidang energi, Rudi Rubianidini melihat program prioritas pemerintah masih terlalu muluk-muluk. Ia mencontohkan program percepatan pembangunan pembangkit listrik 10.000 megawatt, yang menurutnya merupakan program terintegrasi, yang untuk mempercepatnya tidak semudah membalik telapak tangan.

Selain pembangunan pembangkit, pemerintah harus tetap mempertahankan suplai pasokan energi. Percuma jika euforia pembangunan sampai melupakan sokongan energi. Apalagi, tukas Rudi, kini PLN sedang tersok-seok. BUMN penyedia listrik itu sedang mendapat sorotan tajam dari masyarakat, terutama industri dan rumah tangga yang menderita kerugian akibat pemadaman listrik secara bergilir.

Hasil riset Media Group pun menabalkan pendapat tersebut. Sebanyak 56,2% masyarakat tidak yakin pemerintah mampu memetakan kekurangan dan ketersediaan listrik di seluruh provinsi. Margin antara keyakinan dan kepuasan terhadap kecukupan energi listrik pun justru meningkat. Angkanya naik 11,6%, yakni dari -9,0% pada survei per 30 Oktober menjadi -0,6% pada 7 November lalu. Untuk memperbesar rasio elektrifikasi dan meningkatkan pasokan listrik, dia mendorong pemerintah untuk mulai mengutamakan penggunaan energi baru terbarukan.

Anindityo Wicaksono/X-10

POLLING LITBANG MEDIA GROUP

A. Segmen Ekonomi dan Kesejahteraan di Tengah Mafia Hukum

Apakah bahan pokok berikut ini harganya mahal, wajar, atau murah? (%)

	Mahal	Wajar	Murah	Tidak tahu
• Beras	44	51,6	3,4	1
• Daging	63,8	31,2	2,2	2,8
• Sayuran	24,4	55	18,4	2,2
• Susu anak	64	24,4	2	9,6

B. Segmen Energi

Apakah pemerintahan SBY-Boediono mempunyai kepedulian untuk mengemban energi alternatif yang bersumber dari: (%)

	Ya	Tidak	Tidak tahu
1. Panas bumi	52,6	36,2	11,2
2. Air	52,2	38,4	9,4
3. Angin	30,8	55,0	14,2
4. Nuklir	28,4	56,2	15,4

Ketahanan pangan

Di sektor ketahanan pangan, Bustanul Arifin membawa konsep pengembangan yang mengutamakan empat aspek penting, yakni produksi bahan, perluasan akses masyarakat miskin terhadap pangan, stabilitas harga, dan pemanfaatan. Selama ini, konsep pemerintah akan sektor pangan masih terjebak pada aspek produksi, yakni terbatas pada persoalan menggenjot produksi semaksimal mungkin.

menunjukkan tren meningkat. Bustanul memproyeksikan kenaikan kebutuhan pangan itu mencapai 4,7% per tahun. Angka tersebut jauh melebihi angka rata-rata laju pertumbuhan penduduk Indonesia yang sekitar 1,4% per tahun.

Gambaran itu menunjukkan betapa diversifikasi pangan turut berperan penting dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Sebagai bagian dari perluasan akses masyarakat, laju pertumbuhan penduduk dapat diimbangi dengan

Kamis, 22 Oktober 2009

Menjaga Stabilitas Memanjakan Sektor Riil

MELAMBUNGNYA harga minyak kembali menjadi tantangan di depan mata tim ekonomi Kabinet Indonesia Bersatu jilid II. Itu sama persis dengan saat Kabinet Indonesia Bersatu I baru saja dilantik pada 2004. Ketika itu, harga minyak dunia terus naik dari kisaran US\$50 per barel ke US\$70 per barel.

Harga minyak mentah dunia yang sempat menyentuh US\$80 per barel awal pekan ini pun mau tidak mau mesti diwaspadai. Karena, asumsi harga minyak di APBNP 2009 yang masih menyisakan dua bulan dipatok di angka US\$61 per barel.

Karena itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sejak dini sudah memberi 'peringatan' akan ancaman harga minyak dunia tersebut terhadap perekonomian kita. "Saat harga minyak naik lagi, bagaimana kita melindungi masyarakat kita, meningkatkan kesejahteraan dan daya beli masyarakat bawah," kata Sri Mulyani usai menghadiri pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 2009-2014 di Gedung MPR, Selasa (20/10).

Untuk itu, kata Menkeu, sangat penting mengedepankan aspek stabilitas ekonomi agar melonjaknya harga minyak dunia tidak terlalu menimbulkan guncangan.

Karena itulah, salah satu fokus utama program 100 hari pemerintahan SBY-Boediono di bidang ekonomi ialah menjaga stabilitas ekonomi dan membenahi sektor riil. "Program 100 hari adalah menyelesaikan tahun 2009, menjaga stabilitas, dan agar program-program prioritas yang ada seperti arus barang dan investasi, misalnya, bisa lancar," ujar Sri Mulyani yang juga Plt Menko Perekonomian.

Sri Mulyani yang juga kandidat menteri Kabinet Indonesia Bersatu jilid II mengatakan

para menteri masih menunggu arahan Presiden dalam sidang kabinet yang segera digelar pekan ini.

Tetapi ia mengakui menteri-menteri diminta membenahi sektor riil seperti membenahan infrastruktur atau sektor lain yang menjanjikan. Selain itu, juga insentif pajak. "Kami akan terus pantau sesuai dengan pembangunan sektor-sektor tersebut," kata Sri Mulyani.

Dalam sambutannya usai dilantik, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta Menteri Keuangan di Kabinet Indonesia Bersatu jilid II untuk fokus menjaga stabilitas. Dengan kondisi stabilitas yang makin baik, diharapkan, program-program pembangunan ekonomi negara bisa berjalan lancar.

"Kebijakan pemerintah sebelumnya sudah sesuai dengan prioritas menjaga kesejahteraan rakyat seperti subsidi untuk peningkatan daya beli kemudian penciptaan kesempatan kerja," ujarnya.

Untuk itu, ujarnya, pemerintah akan terus mencermati fluktuasi harga minyak dunia guna menjaga stabilitas ekonomi.

Ia menyebutkan selama lima tahun terakhir harga minyak memberikan kepada pemerintah banyak pelajaran. Saat itu pemerintah mengalami situasi yang sangat sulit. Yakni, bagaimana menyusun kebijakan subsidi yang di satu sisi tetap melindungi daya beli masyarakat dan denyut ekonomi, tetapi di sisi lain tidak membahayakan APBN.

"Saya rasa kebijakan subsidi (2009-2014) termasuk yang diminta oleh Bapak Presiden kepada saya untuk bisa diformulasikan sehingga tetap bisa melindungi masyarakat tanpa menimbulkan beban APBN yang tidak sesuai," katanya. (Tup/X-10)

Kamis, 22 Oktober 2009

Menekan Kemiskinan hingga 9% di 2014

PENINGKATAN kesejahteraan rakyat menjadi prioritas paling utama pemerintahan SBY-Boediono. Karena itulah, jajaran kementerian kesejahteraan rakyat yang menjadi motor tidak bisa berleha-leha.

Di pundak mereka, berhasil atau gagalnya pemerintahan paling banyak dibebankan. "Saya siap melaksanakan tugas sesuai arahan Presiden," kata Agung Laksono, orang yang disebut-sebut sebagai calon Menko Kesra.

Dia menjelaskan, dalam program 100 hari pertama masa kerjanya, selain meneruskan program-program prorakyat yang telah berjalan sebelumnya, ia juga akan memfokuskan kegiatan pada penanganan bencana, pengentasan rakyat dari kemiskinan, serta meningkatkan taraf pendidikan dan kesehatan.

Salah satu program terdekat yang akan dilaksanakan adalah membuat peta rawan bencana.

Agung juga mengusulkan perlunya pemetaan kemiskinan yang selalu dievaluasi dan diperbarui dalam kurun waktu tertentu.

Pemetaan dilakukan di berbagai wilayah Indonesia, mulai dari pulau-pulau terluar dan perbatasan, daerah rawan konflik, hingga kantong-kantong kemiskinan di perkotaan dan pedesaan sehingga dalam lima tahun ke depan ia menargetkan penurunan angka kemiskinan, dari 14%-15% saat ini menjadi tinggal 9%-10% sebelum 2014.

Di bidang pendidikan, Koordinator Pelayanan Publik Indonesia Corruption Watch Ade Irawan berpendapat masalah internal dalam kementerian pendidikan nasional ialah tata kelola yang tertutup dan sangat bergantung pada konsultan.

"Daripada biaya banyak dikeluarkan untuk membayar konsultan, lebih baik dibuka akses untuk publik dalam memberikan masukan," papar Ade.

Darisi eksternal, lanjut Ade, masih banyak program pendidikan yang menghambat warga untuk menikmati akses pendidikan.

"Intinya komersialisasi di dunia pendidikan harus dihapuskan, serta pemerintah juga perlu mengkaji ulang kebijakan-kebijakan kontroversial yang ada seperti saat ini, yakni ujian nasional," ujar Ade.

Di bidang lingkungan hidup, tugas utama kementerian ini adalah memusatkan diri pada perubahan iklim. Sejumlah negosiasi lingkungan akan diputuskan dunia dalam rentang lima tahun ke depan.

Babak pertama, yakni negosiasi membahas komitmen dunia menghadapi tantangan perubahan iklim yang bakal digelar di Kopenhagen, Denmark, akhir 2009. "Bisa berhasil bisa tidak, apa pun itu Indonesia secara nasional perlu menyusun tindak lanjut efektif," kata mantan Menteri Lingkungan Hidup Emil Salim. (Far/Dik/Ccr/Tlc/X-10)

Kamis, 22 Oktober 2009

Mimpi Negara Industri Maju dan Harmonisasi Kebijakan

INDONESIA yang kaya akan potensi alam dan sumber daya manusia punya cita-cita menjadi negara industri maju. Namun, ada lima kendala yang berpotensi menghambat target tersebut.

Masalah daya saing industri nasional, misalnya. Menurut Fahmi Idris, yang baru saja mengakhiri jabatannya selaku Menteri Perindustrian, daya saing Indonesia masih lebih rendah ketimbang negara-negara lain.

Hal itu disebabkan tingkat produktivitas industri yang belum optimal, serta *skill* atau keahlian sumber daya manusia Indonesia yang terbatas.

"Dari 130 juta angkatan kerja, sebanyak 57%-60% itu berpendidikan SD atau tidak SD. Bagaimana dengan tingkat pendidikan begitu kita berhadapan," ujarnya.

Masalah kedua adalah Indonesia belum memaksimalkan produk unggulannya yang mampu berbicara di pasar lokal dan ekspor. Hal ini berdampak pada adanya intervensi pasar oleh produk-produk luar negeri, baik secara legal maupun ilegal.

Kendala selanjutnya adalah sarana infrastruktur yang belum memadai, seperti infrastruktur jalan, pelabuhan, listrik, maupun irigasi. Sementara itu, birokrasi yang berbelit-belit dan kepastian hukum dalam pelayanan izin investasi masih menjadi momok para calon investor.

"Faktor terakhir adalah masih lemahnya dukungan terhadap inovasi dan penemuan baru yang mendukung sektor industri," ujar Fahmi.

Lima permasalahan tersebut merupakan pekerjaan rumah yang dititipkan Fahmi kepada Menteri Perindustrian periode 2009-2014. Namun, meraih cita-cita menjadi negara industri maju yang dapat menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat, tentunya tidak dapat terlepas

dari sinergi kebijakan dengan Departemen Perdagangan. Bukan rahasia lagi, kalau kebijakan perindustrian era Fahmi Idris kerap tidak satu suara dengan kebijakan perdagangan yang dinakhodai Mari Elka Pangestu.

Produk-produk asing yang dengan leluasa masuk ke Tanah Air dianggap kalangan industri tak sejalan dengan cita-cita menggalakkan penggunaan produk dalam negeri. Apalagi, tak jarang produk asing itu dibanderol dengan harga lebih murah sehingga lebih diminati masyarakat.

Dengan adanya friksi antarkebijakan departemen itu, wajar jika MS Hidayat yang hari ini dilantik menjadi Menteri Perindustrian mendatang segera berkoordinasi dengan Mari Pangestu yang tetap menjabat sebagai Menteri Perdagangan.

Seusai melakukan pertemuan tertutup selama satu jam dengan Mari di Jakarta, kemarin, Hidayat mengungkapkan pada prinsipnya kedua pihak sepakat membuat kebijakan bersama. Kebijakan itu, rencananya, untuk melengkapi kebijakan yang sudah ada di bidang perindustrian dan perdagangan.

"Kita berdua juga sepakat untuk *review* kebijakan dua departemen agar tidak saling bertentangan dan tidak membuat pelaku usaha bingung," kata Hidayat yang selama ini dikenal sebagai Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.

Harmonisasi kebijakan ini, kata dia, ditujukan untuk meningkatkan daya saing industri dan mendorong sektor perdagangan, baik untuk di dalam negeri maupun tujuan ekspor.

"Kami punya kesepakatan untuk tidak memublikasikan lebih lanjut. Nanti akan ada *joint statement* setelah kegiatan Business Forum, 29 Oktober mendatang," ujarnya. (AT/E-3)

Minggu, 25 Oktober 2009

Tim Ekonomi Janjikan Percepatan Infrastruktur

BURUKNYA infrastruktur di negeri ini menjadi problem serius pertama yang bakal diatasi pemerintahan baru dalam lima tahun ke depan.

Untuk mencapai itu, pemerintah serius mencari alternatif pendanaan melalui kebijakan *co-financing* (pembayaan bersama), dalam proyek *public private partnership*. Peralnya, mengandalkan pendanaan dari pemerintah dinilai tidak akan cukup.

"Jangan sampai kita tidak melihat (kehilangan) momentum untuk pertumbuhan ekonomi kita. Kendala infrastru-

tur bisa menjadi sumbatan arus barang jika tidak ditangani," ujar Menko Perekonomian Hatta Rajasa sesuai rapat koordinasi di kantornya, di Jakarta, kemarin.

Ia menyebutkan, salah satu upaya yang dilakukan untuk percepatan pembangunan infrastruktur adalah penyelenggaraan National Summit 29-31 Oktober mendatang di Jakarta. Forum yang melibatkan semua menteri dan gubernur se-Indonesia itu akan membahas program kerja kabinet periode 2009-2014.

"Karena memang program



MASUSAWI

Hatta Rajasa

Menko Perekonomian

percepatan infrastruktur adalah prioritas untuk menggerakkan sektor riil, kita menggunakan momen ini untuk mencapai pertumbuhan," cetusnya.

Menteri Pekerjaan Umum

Djoko Kirmanto menjanjikan akan menyelesaikan proyek infrastruktur yang belum selesai sebagai langkah awal. Selanjutnya, aturan yang selama ini dinilai menghambat pelaksanaan program infrastruktur akan dievaluasi lagi misalnya soal pembebasan tanah dan investasi jalan tol.

Selain proyek jalan raya dan jaringan listrik, infrastruktur yang mendesak dipercepat adalah telekomunikasi. Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring mengatakan upaya ini dapat mendorong penerimaan negara bukan pa-

jak 2010 hingga Rp8,5 triliun. "Ini terkait dengan janji-janji Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wapres Boediono waktu kampanye," ujar Tifatul.

Pihaknya telah mengajukan rencana pembangunan Satelit Palapa Ring untuk Indonesia bagian timur kepada Presiden.

Menteri Perindustrian MS Hidayat menambahkan, pihaknya akan menyiapkan sejumlah pa-yung hukum untuk membuka jalan pertumbuhan infrastruktur. "Dalam 100 hari ini akan dibuat aturan itu," katanya.

(Tup/Rin/* /E-6)

Jumat, 20 November 2009

Kemudahan Pembebasan Tanah Harus Tuntas 100 Hari

PEMERINTAHAN baru ditantang menepati janjinya untuk memberikan kemudahan pembebasan tanah, dalam waktu 100 hari ke depan.

Jika berhasil, kebijakan itu akan menjadi momentum baru pembangunan infrastruktur di Indonesia, di tengah tingkat bunga kredit perbankan yang semakin kompetitif.

"Selama ini soal pembebasan tanah menjadi kendala dalam pembangunan infrastruktur dan sudah seharusnya diperhatikan dalam program 100 hari pemerintah," kata Ketua Umum Asosiasi Kontraktor Indonesia (AKI) Sudarto di Jakarta, kemarin.

Ia menunjuk jalan tol sebagai

salah satu infrastruktur yang pembangunannya terhambat akibat sulitnya pembebasan tanah sehingga membebani penggunaannya melalui tarif.

"Idealnya komponen harga tanah dalam tarif sekitar 10%. Kenyataannya mencapai 40% yang seluruhnya harus dibayarkan pengguna. Padahal kendala seperti ini tidak perlu terjadi," ujarnya.

Saat menjawab hal itu, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto berjanji menghilangkan hambatan yang terjadi dalam pembebasan tanah, sesuai dengan hasil National Summit, beberapa waktu lalu.

Saat ini, imbuhnya, pembangunan proyek tiga ruas tol juga

tengah disebut agar rampung dalam 100 hari.

Ketiga ruas itu yaitu ruas Jakarta Outer Ring Road (JORR) W1 yang menghubungkan Kebon Jeruk-Penjarangan 9,7 km, ruas Kanci-Pejagan 34 km, dan ruas Bogor Ring Road seksi satu 3,8 km.

Ruas tersebut masuk prioritas penyelesaian karena kondisi yang memungkinkan untuk percepatan konstruksinya. Namun, khusus ruas JORR W1 ditargetkan dapat beroperasi pada awal Januari 2010 seperti yang melewat dari target.

"Kalau pengerjaannya hanya *business as usual* sepertinya sulit untuk selesai dalam dua bulan," ucap Djoko. (* / Ant / E-6)



Rabu, 2 Desember 2009

EKONOMIKA

Program 100 Hari Ekonomi masih 60%

PELAKSANAAN program 100 hari dalam bidang ekonomi telah mencapai kemajuan yang signifikan. "Ada beberapa program yang drafnya sudah selesai dan masih ada yang butuh perubahan dalam keputusan presiden serta peraturan pemerintah. Realisasi tinggal 60% yang membutuhkan persetujuan Presiden, namun draf yang selesai di departemennya sudah hampir 100%," ujar Menko Per-ekonomian Hatta Rajasa di Jakarta, kemarin. Menurut dia, program 100 hari yang sedianya berakhir pada 1 Februari 2010 mendatang meliputi soal revitalisasi energi, termasuk soal penyediaan suplai listrik di daerah. "Masalah listrik di Jawa pada 19 Desember akan selesai dan untuk luar Jawa sedang kita selesaikan. Kita juga sedang menyelesaikan bagaimana pembiayaannya. Jika lancar, dalam delapan bulan akan terselesaikan," ujarnya. (Ant/E-3)

National Summit Jadi Ajang Penajaman Program

Pemerintah serius menggarap agar program 100 hari yang telah disusun benar-benar dapat dilaksanakan.

Ririn Radlawati Kusuma
PEMERINTAH berniat merangkul peran masyarakat yang lebih besar dalam menyusutkan pembangunan lima tahun mendatang. Oleh karena itu, pemerintah akan melakukan penajaman atas program-program yang telah disusun dengan meminta masukan publik dalam ajang pertemuan nasional (National Summit) 2009.

Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa, para menteri akan memaparkan program kerja yang disusunnya dalam National Summit yang rencananya akan dilaksanakan pada 29 Oktober hingga 31 Oktober mendatang. "Tiap-tiap kementerian akan membawa program masing-masing dan meminta pendapat kepada publik atau pihak terkait untuk mematangkan program tersebut," kata Hatta sesuai rapat koordinasi di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, kemarin.

Pemerintah agaknya tidak ingin kehilangan momentum untuk memacu pertumbuhan ekonomi ke tingkat yang lebih tinggi dari sekarang ini. Sehingga merasa perlu melibatkan lebih banyak pihak dalam menyusun program kerja yang dijalankan lima tahun ke depan.

Bersama para pelaku usaha, jajaran Kantor Menko Perekonomian akan mengadakan pertemuan bulanan guna mencari solusi jika ditemukan adanya hambatan yang bisa membuat perekonomian berjalan lebih lambat. Sebagaimana diketahui, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menargetkan dapat mencapai 7% dalam lima tahun mendatang. Saat ini ekonomi baru bertumbuh di kisaran 4%.

Hatta Rajasa menambahkan, saat ini pun para menteri masih akan mengadakan rapat koordinasi mengenai penajaman program masing-masing. Setelah itu baru akan disusun secara detail mengenai program tersebut dan dilaporkan ke Wakil Presiden pada Rabu (28/10) malam.

"Prerogative on the pipeline

Hatta Rajasa

Program yang ada akan kita rapatkan kembali



Menteri BUMN
Mustafa Abu Bakar

- Penyelesaian utang-piutang BUMN dan penyelesaian kerugian BUMN.
- Penetapan kesimpangsiuran data pajak BUMN dan meminta keterangan BUMN yang belum membayar pajak.



Menteri Perhubungan
Jero Wacik

- Peningkatan investasi dan pembenahan distribusi dan logistik.
- Peningkatan nilai tambah produk pertanian dan perikanan.
- Penguatan posisi pedagang domestik, pasar tradisional, dan daya tawar Indonesia di forum internasional.
- Peningkatan nation branding untuk produk unggulan kreatif Indonesia.



Menteri PPN/Kepala Bappenas
Armida S Al-Jahabna

- Mempertajam pembangunan kawasan ekonomi khusus (KEK) BUMN.
- Pembenahan regulasi infrastruktur seperti perpu pembebasan lahan untuk pembuatan jalan tol.
- Promosi padat karya sektor unggulan (industri manufaktur, kehutanan, pariwisata, usaha kecil menengah (UKM), industri jasa, transportasi).



Menteri PU
Djoko Kirmanto

- Pembangunan irigasi baru di luar Pulau Jawa.
- Penyediaan air minum serta sistem pelayanan sanitasi terpusat.



Menteri Perdagangan
Mari Elka Pangestu

- Rilisasi kawasan ekonomi khusus.
- Peningkatan kinerja sektor bea cukai dan pajak.
- Perluasan program national single window dan program kawasan ekonomi khusus.



Menteri Keuangan
Sri Mulyani Indrawati

- Menjaga stabilitas APBN.
- Peningkatan kinerja sektor bea cukai dan pajak.
- Perluasan program national single window dan program kawasan ekonomi khusus.



Menteri PPN/Kepala Bappenas
Armida S Al-Jahabna

- Pemilihan RPJMN 2009-2014.
- Pembangunan terkait iklim global.
- Koordinasi keterlibatan stakeholder Indonesia.
- Peningkatan sinergi pembangunan nasional dengan daerah.
- Pengembangan sumber daya manusia tidak hanya pendidikan dasar, tetapi juga pengembangan strategis.

atau yang ada di dalam kementerian masing-masing, itu akan segera kita rapatkan kembali. Nanti dilaporkan kepada Wakil Presiden pada Rabu malam. Itu semua ada di bawah koordinasi menko. Dan tehu Wapres akan melaporkan kepada Presiden pada Kamis (29/10)," jelasnya.

Menurut Hatta, pemerintah juga telah menyediakan tim fasilitator untuk mengkoordinasi pada program yang melibatkan kerja sama antardepartemen. "Agar itu (program antardepartemen) tidak jadi masalah, yang penting itu berdiri dengan baik," lanjutnya.

Rapat koordinasi yang dilakukan pada hari libur itu diikuti oleh 40 personel pemerintah yang terdiri dari 28 menteri dan sejumlah pejabat setingkat menteri.

Harus tegas
Pengamat ekonomi Sri Adiningsih mengatakan pemerintah bisa memanfaatkan National Summit untuk mendengarkan masukan dari berbagai pihak. Hal itu sudah selayaknya dilakukan guna membuat program yang disusun dapat berjalan sesuai rencana.



Menteri Perhubungan
Jero Wacik

- Penunangan angkutan umum transportasi.
- Peningkatan produksi perikanan.



Menteri Pertanian
Suwono

- Perbaikan infrastruktur pertanian.
- Pemberian subsidi kepada pelaku usaha pertanian.
- Pengembangan produksi perikanan.

memberi masukan, antara lain Dewan Perwakilan Rakyat, pemerintah daerah serta para pelaku usaha.

Yang penting, lanjutnya masyarakat bisa diyakinkan bahwa program yang telah disusun oleh pemerintah dapat berjalan.

Pengamat ekonomi Umar Juoni menyarankan agar Hatta Rajasa bersikap tegas dengan meminta me-

nteri-menteri ekonomi lebih spesifik dalam memaparkan program 100 hari.

"Yang penting dalam 100 hari ini eksekusi, implementasi, dan dapat hasil ujanmya. (AT/*/E-2)

Adapun para pemangku kebijakan yang bisa

ririn@mediaindonesia.com

Selasa, 3 November 2009

Depkeu Siapkan Fasilitas PPh untuk Industri Prioritas

Departemen Keuangan menyiapkan penurunan tarif pajak penghasilan bagi perusahaan yang 45% sahamnya milik publik.

Rini Widuri Ragilla

SEUSAI National Summit atau Rembuk Nasional, tim ekonomi Kabinet Indonesia Bersatu II langsung tancap gas. Mereka mulai menyusun sejumlah strategi guna mempercepat gerak ekonomi.

Departemen Keuangan (Depkeu), misalnya, mulai menyiapkan fasilitas pajak penghasilan (PPh) untuk industri prioritas dan industri inovatif tertentu.

"Pemberian fasilitas PPh untuk industri prioritas dan inovatif tertentu itu akan disinergikan dengan hasil Temu Nasional beberapa waktu lalu," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dalam acara Stakeholders Gathering peringatan ke-63 Hari Keuangan di Gedung Depkeu, Serin (2/11) malam.

Hadir dalam acara itu antara lain Mendag Mari Pangestu,

Ketua DPD Irman Gusman, anggota DPK TM Nurlif, serta sejumlah gubernur dan bupati penerima dana insentif.

Menurut Menkeu, pemberian fasilitas PPh untuk industri prioritas tertentu itu merupakan satu dari sekian langkah sangat penting yang akan dilakukan Depkeu dalam waktu dekat ini. "Pada intinya program itu adalah melanjutkan reformasi birokrasi dan meningkatkan peran Depkeu untuk mendukung program pembangunan baik kementerian/lembaga maupun oleh daerah."

Sri Mulyani menyebutkan program penting yang juga segera dilaksanakan Depkeu adalah penurunan tarif PPh menjadi 25%, menurunkan tarif PPh bagi perusahaan yang 45% sahamnya milik publik. "Selain itu pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk produk pertanian/primer."

Langkah penting lainnya

“

Pemberian fasilitas PPh untuk industri prioritas dan inovatif tertentu itu akan disinergikan dengan hasil Temu Nasional.”

Sri Mulyani Indrawati
Menteri Keuangan

berupa pemberian insentif ke pabeanaan di kawasan ekonomi khusus (KEK), insentif untuk sektor energi termasuk panas bumi, dan pemberian subsidi bahan bakar nabati.

"Juga pemberian insentif bea masuk untuk industri yang dipilih (strategis) dan fasilitas impor barang modal untuk investasi," Menkeu memaparkan.

Insentif Industri

Rumusan serupa dikemukakan Departemen Perindustrian. Menteri Perindustrian MS Hidayat mengemukakan ada tiga rekomendasi kebijakan fiskal, yakni bea masuk ditanggung pemerintah (BMDTP), tarif cukai, dan harmonisasi tarif untuk sektor industri, yang disodorkan departemen yang ia pimpin.

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri Dedi Mulyadi menyatakan Deperin akan mengusulkan insentif stimulus BMDTP sebesar Rp1,6 triliun untuk 2010. "Itu untuk 11 sektor," katanya.

Jumlah Rp1,6 triliun tersebut lebih besar jika dibandingkan dengan 2009 yang sebesar Rp1,3 triliun.

Terkait dengan harmonisasi tarif, lanjut Hidayat, sangat mungkin dilakukan perombakan dan disesuaikan dengan kebutuhan industri. Adapun untuk tarif-tarif yang berasal

dari kesepakatan internasional termasuk *free trade agreement* (FTA) masih dimungkinkan untuk ditunda.

Hidayat juga mengatakan saat ini pihaknya masih membicarakan perihal standar nasional Indonesia (SNI). Dalam 100 hari pihaknya diwajibkan menyusun SNI bagi 60 sektor.

Penetapan SNI tersebut, lanjut Dedi, selain untuk membandingkan impor juga karena sebagian besar konsumen meminta agar produk yang beredar telah mendapat standar yang jelas secara nasional.

Enam puluh produk tersebut di antaranya makanan dan minuman, alat pertanian, logam, kimia, karet plastik, mebel, keramik, produk permesinan, alat mesin pertanian, barang dan produk jadi baja, tekstil, serta alat komunikasi digital.

(RR/Tup/Ant/X-10)

rindu@mediaindonesia.com

Mencari Tuan Rumah di Negeri Sendiri

UU No 22/2001 tak hanya memangkas peranan pemerintah dalam pengelolaan serta penjualan hasil migas, tetapi juga mengebiri peran perusahaan minyak nasional.

Jejang Sumantri

"S UATU saat nanti kita dapat bangga menyampaikan kepada generasi penerus, anak cucu kita, bahwa kita mewariskan negara dengan kekayaan yang makin meningkat, kemakmuran yang lebih merata, dan utang yang makin kecil atau bahkan tidak ada."

Demikian diucapkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat berpidato di hadapan Rapat Paripurna Luar Biasa Dewan Perwakilan Rakyat di Jakarta, awal Agustus lampau.

Bicara soal kekayaan, tidak ada yang menyangkal bahwa Nusantara memiliki anugerah sumber daya alam dan energi yang berlimpah. Kekayaan natural Indonesia tersebut selalu menjadi cerita yang meninabobokan masyarakat.

Ironisnya, negeri kaya ini belakangan malah mengalami krisis energi. Listrik biarpet di banyak wilayah. Pun, masyarakat kecil harus kerap antri untuk gas atau minyak tanah.

Apa lacur? Biarpun kaya sumber mentah, produksi minyak dan gas (migas) serta listrik tidak mencukupi kebutuhan yang ada. Maka, wajar jika pemerintah lantas punya prioritas memenuhi kebutuhan di dalam negeri.

Namun, prioritas itu membawa efek samping. Indonesia jadi punya ketergantungan terhadap impor minyak. Pasalnya, produksi migas nasional belum juga mampu menutup kebutuhan konsumsi domestik.

Salah satu sebabnya, pengelola lapangan migas yang mayoritas adalah perusahaan swasta asing punya kebebasan untuk menjual hasil produksinya ke mana pun. Keterbatasan kemampuan kilang pengolahan di dalam negeri juga menjadi faktor yang membuat operator blok migas memilih mengekspor minyak mentah yang dikeruknya dari perut bumi Indonesia.

Dominannya peran kontraktor kontrak kerja sama (KKS) migas asing tercermin dari data Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang menunjukkan penguasaan kontraktor asing atas 329 blok

atau sekitar 65% dari total blok migas di Indonesia. Sebaliknya, perusahaan nasional hanya menguasai 24,27%. Selebihnya, dikuasai konsorsium perusahaan lokal dan multinasional dengan lokal sebagai minoritas.

Memang, dari hasil pengelolaan ladang minyak di Indonesia, rata-rata kontraktor menyetorkan sekitar 85% dari hasil perolehannya kepada pemerintah. Sayangnya, nilai dari perolehan minyak tersebut seolah pupus oleh besarnya biaya pengganti operasional (*cost recovery*) yang harus dibayarkan pemerintah kepada kontraktor.

Sebagai ilustrasi, dari Rp304,3 triliun yang diterima negara melalui sektor migas pada 2008, *cost recovery*

yang dikembalikan pemerintah mencapai US\$13 miliar, atau nyaris mencapai Rp130 triliun.

Belum jawara

Dominasi kontraktor asing di negeri lumbung energi ini menimbulkan pertanyaan besar. Mengapa BUMN energi kita, yaitu PT Pertamina, tak kunjung menjadi jawara di Tanah Air? Dalam kontribusi produksi (*lifting*) minyak nasional per September 2009, Pertamina berada di posisi kedua di bawah Chevron. Untuk produksi gas, dengan kisaran 1.406 juta kaki kubik per hari (*millions of standard cubic feet per day*/MMSCFD), Pertamina nomor dua setelah Total Indonesia (2.550 MMSCFD).

Menurut Direktur Center for Petroleum and Energy Economics Studies Kurtubi, keterbatasan Pertamina ternyata berkaitan erat dengan kehadiran UU No 22/2001 tentang Migas. Ia berpendapat UU Migas ini tak hanya memangkas peranan pemerintah dalam pengelolaan serta penjualan hasil ladang dan sumur migas nasional, namun juga mengebiri peran Pertamina sebagai pelaku bisnis yang membawa kepentingan nasional. "Bahkan sebelum Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan sebagian isinya, UU Migas hanya memberikan jatah setingginya 20% dari produksi untuk dalam negeri. Jika seperti itu, sulit untuk Pertamina bisa berkembang," papar Kurtubi.

Adapun, sebelum deregulasi sektor migas nasional itu, Pertamina memiliki hak istimewa (*privilege*) dalam bentuk Indonesian Participation (IP). Dengan *privilege* itu, Pertamina secara otomatis memiliki jatah 10% dari sebuah ladang migas yang akan dikembangkan. Suatu *privilege* yang lazim dipraktikkan di banyak negara lain. Namun, karena adanya UU Migas, Pertamina kini tak ubahnya seperti kontraktor lain. Asing di negeri sendiri.

"Setelah adanya UU Migas, Pertamina hanya mendapat jatah 10% *participation interest* namun melalui proses akuisisi yang tidak mudah, karena harus melalui mekanisme 'b to b' (*business to business*) dalam waktu

yang tidak singkat," ujar Deputi Direktur Perencanaan dan Evaluasi Direktorat Hulu Pertamina Gunung Sardjono, di Jakarta, Senin (23/11).

Ia menuturkan, memang masih ada mekanisme Pertamina Participation Interest (PPI), yakni kesempatan untuk mendapatkan jatah 15% saham di suatu blok migas. Syaratnya, Pertamina tidak ikut sebagai penawar dalam tender. "Ada juga peluang Pertamina bisa masuk ke blok yang tidak ditawarkan, asalkan 100% Pertamina. Namun masih diperdebatkan. Dalam pandangan pemerintah kita harus masuk sendiri," urainya.

Sementara itu, Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (BP Migas) menyatakan telah berlaku adil terhadap Pertamina sesuai aturan yang ada. "Pertamina memiliki kesempatan yang sama dengan operator lain. Kita harus memberika iklim yang kondusif supaya investor migas tetap berkontribusi signifikan kepada negara," ujar Ketua BP Migas Priyono.

Lima tahu

Seyogianya, keterlibatan Pertamina dalam proyek hulu, menjadi faktor penentu tercapainya target Pertamina sebagai perusahaan minyak nasional kelas dunia. Sebagaimana ditargetkan, BUMN energi itu, dalam lima tahun mendatang menjadi tuan rumah di negeri sendiri.

"Kita hanya meminta ada keberkahan kepada Pertamina terutama proyek hulu, karena pertumbuhan korporasi masih bergantung pada sektor ini. Tidak hanya menambah pendapatan, tetapi juga meningkatkan kapabilitas teknologi dan menambah pengalaman pengelola lapangan migas," urainya.

Perluanya percepatan peningkatan kemampuan perusahaan migas nasional juga diungkapkan Anggota Dewan Energi Nasional Widjaja Partowidagdo. "Misalnya, untuk pangan yang sudah ditemukan tidak mulai dikembangkan dalam jangka waktu tertentu, harus dikembalikan ke pemerintah. Atau, kont yang sudah *expired*, pengelolaan diutamakan," tutur Widjajono. (E

Kemandirian Energi

Kemandirian energi bisa terwujud jika memenuhi tiga faktor, yaitu aksesibilitas energi, daya beli masyarakat untuk energi, dan ketersediaan energi.

Produsen Minyak dan Kondensat (ribu barel/hari)

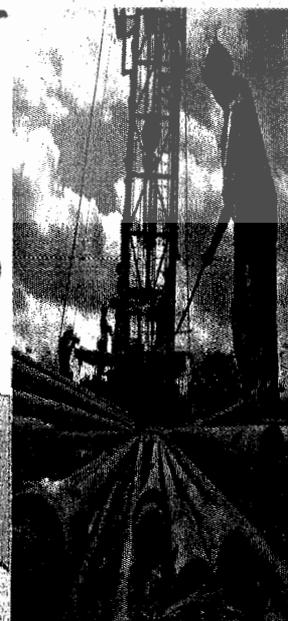
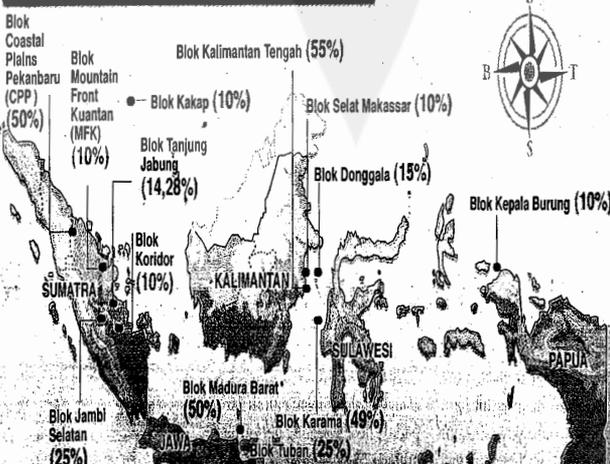
Perusahaan	Produksi (September 2009)
Chevron Pacific Indonesia	288,4
Pertamina	186,4
Total E&P Indonesia	74,8
ConocoPhillips Indonesia	57,6
CNOOC SES	32,7
Chevron Indonesia	18,7

Produsen Gas (MMSCF/hari)

Perusahaan	Produksi (Juli 2009)
Total E&P Indonesia	1.582,3
Pertamina	1.406*
ConocoPhillips (Grissik) Ltd	514,0
Conoco Phillips Natuna Ltd	315,1
Vico Indonesia	270,4

*per September 2009

Wilayah Kerja Pertamina Hulu Energi



Sumber: Pertamina (3D/MFOTO: MAM IRFANGRAFI: TIYOK

Perombakan Lembaga Hukum Menjadi Keniscayaan

DIBUKANYA rekaman yang berisi rekayasa penahanan dua pemimpin nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah semakin memberikan kejelasan betapa buruknya penegakan hukum di Indonesia. Kasus tersebut harus menjadi momentum untuk mendorong reformasi institusi penegak hukum, terutama Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung.

Itulah yang terungkap dalam diskusi dan dialog Panelis Pakar Media Group tentang Kinerja 100 Hari Kabinet Indonesia Bersatu II, yang digelar di Grand Studio Metro TV, Selasa (3/11). Para pakar yang terdiri dari Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM Zainal Arifin Mochtar, pengamat politik UGM Pratikno, dan peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jaleswari Pramodawardhani sepakat masalah tersebut harus menjadi agenda utama di bidang hukum dalam program 100 hari pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono.

Permasalahan yang muncul dan mendesak untuk segera diselesaikan adalah konflik terbuka KPK dengan kepolisian dan kejaksaan. Zainal Arifin Mochtar mengatakan ada tiga tahapan yang bisa dilakukan dalam reformasi lembaga hukum di negeri ini, yakni reformasi personal, reformasi struktural, dan reformasi kultural. Yang paling memungkinkan, dalam jangka waktu 100 hari adalah reformasi personal penegak hukum yang ia nilai sudah sangat buruk.

Menurut Zainal, reformasi personal tidak cukup hanya mengganti atau memutasikan pejabat, tapi harus dilakukan dengan memberhentikan pejabat busuk itu. Hal tersebut untuk memberikan terapi kejut. Sebab, kalau langkah yang ditempuh hanya memutasikan pejabat, misalnya di kejaksaan ada pejabat busuk dimutasikan menjadi staf ahli, hal itu tidak akan memberikan efek jera.

Komitmen Presiden

Untuk mereformasi personal hukum tersebut,

terang Zainal, Presiden memiliki hak prerogatif untuk mengganti semua pejabat penegak hukum yang korup. Langkah itu amat gampang dilakukan, dengan syarat memang komitmen Presiden terhadap penegakan hukum sangat tinggi.

Secara struktural, lanjut Zainal, sistem pelaksanaan dan pengawasan di lembaga-lembaga hukum kita harus dibenahi. Mekanisme kontrol antarlembaga juga wajib dibangun. Di kepolisian sudah ada Komisi Kepolisian Nasional. Di kejaksaan, juga sudah didirikan Komisi Kejaksaan. Di kedua lembaga tersebut pun hampir tidak ada

fondasi dasar dalam tata kehidupan pemberantasan korupsi. Presiden diminta tidak hanya 'berlindung' di balik indeks persepsi korupsi (IPK) yang naik untuk mengukur sukses sebuah pemberantasan korupsi.

Saat ini, pemerintah masih menekankan reformasi di lembaga imigrasi, bea cukai, dan sektor keuangan. Namun, sistem pengadilan kita tetap bobrok. Ini, bagi Zainal, merupakan pikiran sesat karena masih berada dalam lingkai mementingkan IPK, bukan membenahan sistem hukum.

belum mengubah perilaku. Kita masih menghayati kekuasaan dalam cara pikir feodal, yakni kekuasaan yang terus meminta untuk dilayan. Padahal, sistem politik kita telah bergeser menuju sistem politik demokrasi.

Dalam bidang pertahanan dan keamanan pengamat militer LIPI Jaleswari Pramodawardhani mengusulkan lima agenda utama yang harus diprioritaskan oleh pemerintah. Pertama, pengesahan peraturan Menteri Pertahanan untuk pengambilalihan bisnis TNI.

Kedua, perlunya penyelesaian cetak biru pertahanan negara (*strategic defence review*). Ketiga, efisiensi manajemen alat utama sistem persenjataan (*alutsista*). Keempat, mendorong industri strategis pertahanan. Kelima, mendorong proses legislasi Rancangan Undang-Undang (RUU) Rahasia Negara, RUU Kammas, RUU Perlibatan TNI dalam Penanganan Terorisme.

Namun, kata Jaleswari, konteks RUU Rahasia Negara nantinya harus dikaji ulang terlebih dahulu. Substansinya harus dibenahi. Jangan sampai di negara yang sudah mendapat predikat sebagai negara demokrasi ketiga terjadi pengengkangan terhadap media. Yang terpenting adalah suster kerahasiaan negara, terutama terkait dengan pertahanan, harus disusun secara komprehensif.

Sementara itu, periset Media Group Agung Prihatna mengatakan optimisme publik terhadap penegakan demokrasi oleh pemerintahan SBY Boediono cukup tinggi, yakni 59,7%. Untu penegakan pemberantasan korupsi 62,6%, sert penegakan hukum dan keadilan 49,8%.

Namun, dari tingkat kepuasan, justru menurun jauh dari tingkat optimisme tadi. Untu penegakan demokrasi menjadi 46,6%, penegakan pemberantasan korupsi 51,4%, dan penegakan hukum dan keadilan 40,4%.

Rendahnya kepuasan terhadap pemberantasan korupsi jika dibandingkan dengan tingkat optimismenya, kata Agung, disebabkan kasus KPK. Inilah pekerjaan rumah yang harus segera dinahi pemerintahan sekarang. **A Mustain/X-1**

KEYAKINAN DAN KEPUASAN PUBLIK PADA AGENDA GOVERNANCE

KEYAKINAN	KEPUASAN PUBLIK		
Penataan birokrasi	53,3%	Penataan birokrasi	43,6%
Penegakan demokrasi	59,7%	Penegakan demokrasi	46,6%
Pemberantasan korupsi	62,6%	Pemberantasan korupsi	51,4%
Penegakan hukum	49,8%	Penegakan hukum	40,4%
Pertahanan	64,8%	Pertahanan	57,0%

Sumber: Tim Res Media Group

yang tidak diawasi. Tetapi, toh pembusukan penegak hukum tetap terjadi.

Karena itu, jelas Zainal, jika perlu, wacana agar kepolisian berada di bawah Depdagri perlu dikaji lebih dalam. Di samping itu, penyusunan remunerasi harus segera diselesaikan.

Untuk perombakan kultural, Zainal Arifin menilai penggeseran budaya di tubuh Polri, dari institusi yang lekat dengan militer menjadi korps yang tugasnya mengayomi, harus kian ditekan. Dalam bahasa lugas, Zainal mengungkapkan bahwa Polri diciptakan tidak untuk mengibuli, melainkan mengayomi.

Secara umum, Zainal menganggap ada dua agenda mendesak yang harus segera dituntaskan oleh Presiden. Pertama, penguatan komitmen pemberantasan korupsi. Kedua, pembangunan

Selesaikan PR

Pakar politik UGM Pratikno mengungkapkan bahwa utang pemerintah sebelumnya harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum melangkah pada agenda lainnya. Ia menabulasi secara garis besar beberapa persoalan yang belum diselesaikan itu.

Pertama, bagaimana sistem desentralisasi terus diperkuat. Lalu pembenahan sistem pemilihan kepala daerah (*pilkada*), memperkuat koordinasi antara pusat dan daerah yang terus menjadi ganjalan pemerataan pembangunan, serta menyehatkan kembali anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Selama ini, tutur Pratikno, meskipun sistem politik telah berubah, kelembagaan baru telah terbentuk, sistem teknologi informasi telah membuat dunia begitu transparan, nyatanya kita

Jumat, 6 November 2009

Presiden Serukan Ganyang Mafia Hukum

PEMBERANTASAN mafia hukum akan menjadi urutan pertama dalam prioritas 100 hari pemerintahan. Mafia yang berkaitan dengan hukum dalam arti pihak yang melakukan kegiatan yang merugikan pihak lain.

"Yang saya sebut dengan mafia berkaitan dengan hukum dalam arti yang luas adalah mereka yang melakukan berbagai kegiatan yang merugikan pihak lain," ujar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Jakarta, kemarin.

Menurutnya, mafia hukum adalah pihak-pihak yang melakukan kegiatan merugikan pihak lain, seperti makelar kasus, suap-menyuap, pemerasan, jual beli perkara, mengancam saksi, mengancam pihak-pihak lain serta pungutan yang tidak semestinya.

Mafia hukum, lanjutnya, bisa ada di mana saja seperti lembaga kepolisian, kejaksaan,

pengadilan, KPK, departemen-departemen, pajak, Bea dan Cukai, daerah dan lain-lain.

"Ini akan kita jadikan prioritas 100 hari untuk membersihkan mafia hukum. Memang tidak semudah yang dibayangkan, tidak sekali tindakan langsung bersih. Namun, apabila kita gebrak pasti mencapai hasil," ujarnya.

Presiden meminta korban mafia hukum untuk melaporkan diri melalui PO BOX 9949 Jakarta 10000. "Dalam laporan dituliskan kode GM singkatan dari ganyang mafia. Tolong dicantumkan identitas yang jelas supaya bukan ajang fitnah yang jelas, meskipun identitas itu akan saya rahasiakan," ujar Presiden.

Ia meminta dukungan masyarakat dalam program pembersihan sistem hukum dengan membongkar, membersihkan, dan memberantas mafia agar hukum tegak dan

tidak perlu ada lagi korban.

Sementara itu, penanggulangan terorisme berada di urutan ketiga dalam program 100 hari. Terorisme, kata Presiden, merupakan ancaman yang mengakibatkan korban jiwa dan benda milik publik dan masyarakat luas.

Belum lagi generasi muda yang terlibat dalam tindak kejahatan itu. Penanggulangan terorisme jangan semata memajukan operasi militer atau intelijen.

"Kita juga harus memasuki wilayah yang sangat penting, yaitu pencegahan dan penangkalan tindak pidana terorisme," ujar Presiden.

Ia mengajak tokoh, pemuka masyarakat, dan pihak terkait untuk menjadi bagian dari upaya besar pencegahan dan penangkalan terorisme melalui jalur pendidikan dan kegiatan di masyarakat.

(Rin/P-1)

Jumat, 13 November 2009

Jalur Selat Sunda Masuk Program 100 Hari

INFRASTRUKTUR penghubung Selat Sunda masuk dalam program kerja 100 hari Menteri Pekerjaan Umum (PU). Pengerjaan proyek tersebut masih dalam bentuk studi kelayakan yang nantinya dituangkan dalam peraturan presiden.

"Belum dapat kami pastikan infrastruktur yang cocok untuk menghubungkan Selat Sunda karena masih menunggu studi kelayakan," kata Menteri PU Djoko Kirmanto di Jakarta, kemarin, saat menjelaskan program 100 hari Departemen PU.

Oleh karena itu, dalam program kerja sengaja tidak disebut soal bangunan penghubung yang akan dibuat. Apakah bentuknya jembatan, terowongan, atau perluasan dermaga akan ditetapkan dari hasil studi kelayakan.

Terkait dengan sudah ada

swasta yang melakukan studi kelayakan, Menteri PU mengatakan akan memberikan kesempatan pertama dalam tender investasi serta hak-hak khusus. Tapi jika dalam tender kalah, pemerintah akan mengganti semua biaya yang sudah dikeluarkan saat melakukan studi kelayakan sebelumnya.

Wakil Menteri PU Hermanto Dardak mengatakan, untuk jembatan seperti yang telah direkomendasikan, masih harus dikaji terlebih dulu terutama mengenai kecepatan angin. Selain itu, harus dilihat topografi bawah laut untuk menentukan panjang bentang yang harus dibuat karena sangat menentukan besaran biaya yang harus dikeluarkan. Hal lain yang dikaji adalah kekuatan struktur karena kawasan itu termasuk rawan gempa. (* / Ant/E-4)

Kinerja Hatta Rajasa Ungguli Agung-Djoko Suyanto

JAKARTA (SI)—Menko Perekonomian Hatta Rajasa mendapat apresiasi lebih positif dari kalangan media dibandingkan Menko Kesra Agung Laksono dan Menkopolkukam Djoko Suyanto.

Berdasarkan riset analisis media yang di-launching Indo Barometer, 77,2% pemberitaan media massa nasional memberikan apresiasi positif dibanding dua menko lainnya yakni Menko Polhukam Djoko Suyanto 71,7% dan Menko Kesra Agung Laksono 67,6%.

"Sementara berita negatif tentang Hatta lebih kecil yakni 5,4% dibanding Agung 5,9% dan Djoko 6,5%," kata Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari dalam rilisnya kepada *Seputar Indonesia* di Jakarta kemarin.

Launching Indo Barometer ini dilakukan dalam rangka evaluasi terhadap kinerja tiga menko Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II

yakni Menko Perekonomian, Menko Polhukam, dan Menko Kesra dalam 30 hari setelah dilantik. Media yang dianalisis adalah *Kompas*, *Seputar Indonesia*, *Media Indonesia*, *Republika*, *Rakyat Merdeka*, dan *Jurnal Nasional*.

Menurut Qodari, apa yang dilakukannya melalui riset media analisis ini untuk memberi gambaran tentang respons publik terhadap tiga menteri yang diberi tugas untuk mengordinasi masing-masing menteri teknisnya yang terekam dalam pemberitaan media massa nasional. Dengan analisis itu, dia berharap menjadi dasar dan pertimbangan buat para menteri untuk memacu bekerja lebih baik lagi.

"Jadi, apa yang kami sampaikan itu adalah apa yang muncul dan diberitakan di surat kabar. Kami hanya membuat kuantifikasi tentang apresiasi publik dari berita-

berita yang muncul. Dalam analisis media kita, Pak Hatta lebih diapresiasi positif hingga 77,2% dibanding tiga menko lainnya," jelasnya.

Qodari menambahkan, dari tiga menko yang dianalisis, Hatta Rajasa juga memiliki porsi pemberitaan yang cukup besar di enam surat kabar nasional. Hal ini antara lain tergambar dari 145 artikel yang muncul, sedangkan Djoko Suyanto muncul dengan 46 artikel dan Agung Laksono dengan 34 artikel.

Menurut Qodari, alasan Hatta diberitakan lebih banyak dan lebih positif kemungkinan karena dua hal. *Pertama*, isu-isu ekonomi pasca-Presiden SBY dan para menteri-nya dilantik memang sedang mendapat perhatian khusus dari media massa. *Kedua*, Hatta dinilai memiliki kemampuan yang lebih dalam membangun komunikasi dengan media massa.

"Hatta juga dinilai memiliki

kecerdasan dalam mengemas isu-isu yang memiliki nilai berita tinggi. Terutama, melalui pernyataan-pernyataannya yang bersifat gebrakan dan terobosan penting dalam menghadapi berbagai kebutuhan program," ungkapnya.

Qodari menyebut contoh, sikap Hatta dalam mengawali tugasnya sebagai menko perekonomian untuk program 100 Hari KIB II. Dengan tegas, misalnya, Hatta mengampanyekan perang terhadap berbagai kebijakan selama ini yang dinilai sebagai penghambat. Dalam istilah Hatta, kata Qodari, departemen yang di bawah koordinasinya akan memprioritaskan untuk membersihkan "pipa yang tersumbat".

"Secara umum publik juga menangkap kesan kuat bahwa Pak Hatta dengan para menteri di bawahnya lebih 'hidup' ketimbang menko lainnya dalam melakukan

berbagai gebrakan dan terobosan sehingga menteri perekonomian dinilai lebih kompak," paparnya.

Pakar ekonomi Avilliani mengatakan, kemampuan *leadership* dan pengalamannya menjadi menteri di sejumlah departemen di periode kabinet sebelumnya menjadi faktor kunci kenapa saat ini Hatta Rajasa dipercaya sebagai menko perekonomian di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II. Karena itu, meski pengalamannya di bidang ekonomi masih kurang, Hatta memiliki jiwa *leadership* dan kemampuan berkoordinasi yang baik. Menurut Avilliani, ada dua nilai lebih yang dimiliki Hatta yaitu pengalamannya di kabinet dan memiliki hubungan relasi yang bagus di kalangan elite politik. Hal itu diyakini akan membuat para menteri di bawah koordinasinya segen terhadapnya.

(rahmat sahid)

Senin, 23 November 2009

Kasus KPK-Polri Rusak Program 100 Hari

JAKARTA (SI) – Kasus Bibit-Chandra ternyata berimbas negatif bagi program 100 Hari Pemerintahan SBY. Menurut Direktur Lembaga Survei Trust Indonesia (LSTI) Imdadun Rahmat, kasus yang kemudian digeneralisasikan KPK vs Polri itu dipersepsi negatif oleh masyarakat karena penanganannya berlarut-larut.

"Berlarut-larutnya kasus Bibit-Chandra yang sehingga oleh masyarakat digeneralisasikan menjadi perseteruan antara KPK versus Polri sudah merupakan political warrior yang merusak 100 Hari Masa Kerja Pemerintahan SBY-Boediono," kata Imdadun saat diskusi "Cicak vs Buaya; Apa Seharusnya Tindakan Presiden?" yang digelar Lembaga Survei Trust Indonesia di Jakarta kemarin (dian widyanarko)

Program 100 Hari Terganjil Dua 'BC'

Memasuki hari ke-45 dalam pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) Jilid II yang jatuh hari ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mendapatkan ganjilan untuk menyukseskan program 100 harinya yang akan berakhir pada 28 Januari mendatang.

Dua isu kasus hukum mengganjal perjalanan program aksi 100 hari yang menyangkut *distrust* dan *mistrust* masyarakat terhadap pemerintah. Ganjilan yang dihadapi Pemerintahan SBY-Boediono bisa diistilahkan sebagai 2BC. BC pertama adalah kasus Bibit-Chandra dan BC kedua adalah Bank Century.

Selama 45 hari bekerja atau tepatnya sejak dilantik menjadi Presiden RI untuk yang kedua kalinya pada 20 Oktober lalu, Presiden SBY tercatat telah menggelar sidang Kabinet Paripurna maupun rapat terbatas sebanyak lima kali

yaitu sejak tanggal 23 Oktober sampai 18 November lalu.

Dalam sidang kabinet paripurna pertama tanggal 23 Oktober Presiden menjelaskan cara kerja maraton yang harus dilakukan para pembantunya demi suksesnya program 100 hari. Di hadapan para menteri yang mayoritas adalah wajah baru itu, Presiden SBY memaparkan secara detail program 100 harinya yang harus dijadikan sebagai *starting point* untuk program lima tahun ke depan.

Saat itu Presiden juga menugaskan Wapres Boediono untuk berkeliling ke seluruh provinsi di Tanah Air dalam program kerja 100 hari ini. Menurutnya, wapres turun ke daerah untuk mengetahui permasalahan di daerah sekaligus mencari draf solusi permasalahan tersebut.

Rencana aksi pemerintahan selama 100 hari yang dipaparkan panjang lebar oleh presiden sa-

yangnya hanya menjadi sorotan masyarakat pada pekan pertama pemerintahan. Beberapa hari setelah itu, situasi dan kondisi politik di Tanah Air langsung terfokus pada kasus-kasus hukum yang dimulai oleh kasus dua pimpinan KPK, Bibit dan Chandra.

Untuk pertama kalinya setelah 10 hari dilantik menjadi Presiden, SBY menggelar keterangan pers khusus mengenai penjelasan kasus hukum Bibit dan Chandra. Keterangan pers disampaikan Presiden SBY pada 30 Oktober di Kantor Kepresidenan, Jakarta. Menurut Presiden, kasus ini telah memasuki wilayah krusial dan wilayah politik yang bisa menimbulkan keresahan tertentu bila dirinya tidak memberikan keterangan secara langsung.

Sejak hari itu sampai sekarang, Presiden SBY lebih banyak berbicara mengenai kasus hukum yang terjadi akhir-akhir ini, di manapun,

dalam kesempatan apapun, termasuk di berbagai forum pertemuan. Bahkan, dalam sidang kabinet paripurna yang digelar 5 November lalu, Presiden memasukkan agenda pemberantasan mafia hukum yang menjadi prioritas utama dari 15 program pemerintah selama 100 hari. Untuk memberantas mafia peradilan ini, presiden langsung menunjuk Ketua UKP4 Kuntoro Mangkusubroto sebagai pemimpin pemberantasan mafia, dengan terlebih dahulu membentuk sebuah unit satuan tugas.

Selama kurun waktu 1,5 bulan itu pula, Presiden SBY aktif memberikan keterangan tentang dua kasus BC tersebut. Pidato secara khusus pun disampaikan langsung kepada seluruh masyarakat di Tanah Air mengenai sikapnya terhadap status hukum Bibit dan Chandra. Pidato Senin (23/11) malam itu juga sekaligus menyampaikan bantahannya tentang aliran

dana Century yang disebut-sebut ikut mengalir ke tim suksesnya saat berkampanye beberapa waktu lalu.

Dinamika politik yang semakin hari-semakin memanas ini membuat presiden terus menyampaikan pandangannya tentang kasus hukum duo-BC tersebut di berbagai kesempatan, seperti saat bersilatuturahi dengan para pemimpin media massa Minggu (22/11), HUT PGRI pada Selasa (1/12), dan Kongres Wanita Indonesia yang diselenggarakan di Istana Negara Rabu (2/12) lalu.

Bila dihitung-hitung, tanggal 28 Januari 2010 menjadi hari yang ke-100 Pemerintahan SBY-Boediono. Itu artinya, tinggal 55 hari lagi pemerintahan KIB II bisa membuktikan hasil kinerjanya dalam 100 hari tanpa nilai merah. 45 hari yang sudah berjalan ini telah dipenuhi dua ganjilan kasus hukum yang membuat jalan pemerintahan pada 100 hari pertama tidak mulus.

Bahkan, masyarakat mulai mengapresiasi tentang isu perintah seperti penempatan menteri yang cukup banyak dalam kabinet sekarang dan metau kinerja para menteri menjalankan tugasnya. Masyarakat di seluruh Tanah Air saat ini terfokus dengan masalah hukum yang mungkin telah ber- menjadi permasalahan politik.

Bila dalam 55 hari ke depan pemerintahan Presiden SBY hiterfokus pada kasus ini saja, bukan tidak mungkin program hari yang diagendakannya akan mencapai hasil yang maksimal, termasuk pemberantasan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berhasil atau tidaknya program 100 hari ini tentakan menjadi tolak ukur kepercayaan rakyat kepada pemerintah SBY-Boediono untuk memimpin ini dalam lima tahun ke de- (rasasati sye

Sabtu, 5 Desember 2009

Pemerintah Akan Gratiskan Paspor TKI

JAKARTA (SI) - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Patrialis Akbar membolehkan pembuatan paspor tanpa biaya bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang baru pertama kali bekerja ke luar negeri. "Ini salah satu komitmen Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan program kerja seratus hari dengan membuat gebrakan baru yang lebih inovatif dan kreatif," kata Patrialis Akbar pada Rapat Kerja (Raker) Kementerian Hukum dan HAM 2009 di Puncak, Bogor, Jawa Barat, kemarin.

Patrialis menjelaskan bahwa pembuatan paspor itu bukan untuk mencari keuntungan, tetapi bertujuan memberikan bantuan berupa kemudahan pelayanan terhadap masyarakat yang tidak mam-

pu meskipun penerimaan negara bukan pajak (PNPB) mengalami penurunan.

Selain paspor gratis bagi TKI, Depkumham juga membolehkan tarif gratis dalam pengajuan permohonan surat perjalanan Republik Indonesia (SPRI) terhadap WNI tertentu dan WNI yang bermasalah. "Kita sudah menyusun semua program kerja ini dan sudah direalisasikan," jelas dia.

Patrialis menjelaskan apa yang dilakukan tersebut merupakan gebrakan dari pencaangan pelaksanaan program 100 hari kerja di kementerian yang dia pimpin dan sebagai rencana strategis selama lima tahun mendatang.



PATRIALIS
AKBAR

Pada kesempatan kemarin Patrialis juga menginstruksikan agar para kepala kantor wilayah di daerah melakukan reformasi birokrasi pelayanan pembuatan paspor yang mencerminkan kemudahan dan transparansi pembiayaannya. "Selama ini pembuatan

paspor butuh waktu tujuh hari, sekarang harus bisa selesai empat hari," tandasnya. Lebih lanjut Patrialis menyatakan, prioritas pelayanan terhadap masyarakat merupakan bagian kebijakan dari Kementerian Hukum dan HAM agar menduduki posisi yang strategis.

Menteri Tenaga Kerja Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar mendukung langkah Depkumham yang akan mem-

bebaskan biaya paspor bagi TKI yang baru pertama bekerja. Dia menilai kebijakan tersebut akan mengurangi beban bagi TKI. "Prinsip pembebasan biaya paspor TKI itu kami dukung dan Depkumham kini sedang menggodok mekanismenya agar tidak disalahgunakan dan menyebabkan booming permintaan paspor atas nama TKI," katanya di Jakarta kemarin.

Menurut dia, berdasarkan pembicaraannya dengan Menkumham secara intens, Depkumham mengaku siap dengan stok paspor yang ada jika memang ada lonjakan permintaan paspor bagi TKI. "Kini tinggal pembahasan mengenai mekanisme atau prosedurnya agar tidak disalahgunakan," terang Muhaimin.

(m.purwadi/rendra hanggara)

Senin, 14 Desember 2009

Akbar Berharap Tuntas 100 Hari

JAKARTA (SI) - Mantan Ketua DPR Akbar Tanjung berharap, kasus skandal Bank Century bisa selesai secepatnya. Bahkan, bila perlu, semua pihak terkait dalam kasus ini bisa menyelesaikannya sebelum program 100 hari.

"Lebih cepat lebih baik, kalau bisa memang selesai sebelum 100 hari," kata Akbar kepada harian *Seputar Indonesia* kemarin.

Menurut Ketua Dewan Pertimbangan DPP Partai Golkar ini, proses penyelesaian kasus Bank Century harus secepatnya dituntaskan agar penanganan kasus tersebut tidak merambah ke mana-mana dan tidak jelas ujungnya seperti pengalaman pansus-pansus hak angket sebelumnya. Apalagi, kata dia, kasus tersebut juga diikuti atau tidak telah mengganggu program-program pemerintah yang lain.

"Kasus Bank Century harus segera dituntaskan agar lebih fokus. Pansus Century segeralah memanggil pihak-pihak terkait untuk meminta keterangan. Pansus juga harus bekerja secara terbuka, biar publik ikut menyaksikan. Bagi KPK, jika memang menemukan bukti adanya tindak pidana korupsi juga perlu menjadikan kasus ini selesai sebelum 100 hari," ungkapnya.

Meski berharap cepat, Akbar tetap menekankan agar Pansus Angket Century dan KPK tetap bekerja profesional dan proporsional agar masyarakat melihat hasilnya dengan terang.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA menilai, isu anti-korupsi mencapai rekor yang belum pernah terjadi dalam sejarah Indonesia. Lima koran nasional yakni harian *Seputar Indonesia*, *Kompas*, *Koran Tempo*, *Media Indonesia*, dan *Republika* memberitakan isu korupsi pada hari ini (kemarin) dengan total 46 rubrik. Satu koran rata-rata menurunkan sembilan rubrik soal korupsi. Atas dasar itulah, Denny mengajak semua elemen untuk mendorong dan mengawal agar kasus Century diselesaikan sebelum 100 hari Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Menurut dia, dalam kasus Century mustahil muncul gerakan kolektif sedahsyat ini tanpa adanya akumulasi persepsi kolektif bahwa sedang terjadi masalah besar bangsa soal korupsi. Gebrakan ini, kata dia, hanya mungkin terjadi karena ada kasus bersama yang dialami Bank Century.

(rahmat sahid)

Minggu, 25 Oktober 2009

Tim Ekonomi Fokus Infrastruktur

JAKARTA (SI) - Percepatan penyediaan infrastruktur menjadi prioritas tim ekonomi Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II. Infrastruktur yang tidak memadai menjadi penghambat pertumbuhan sektor riil.

Menurut Menko Perekonomian Hatta Rajasa, infrastruktur bisa menjadi penyumbang arus barang jika tidak ditangani dengan baik. Untuk memperbaiki kondisi infrastruktur di Indonesia, pemerintah akan memberikan insentif.

"Kita tidak ingin ada suatu ham-

batan dalam melihat dunia yang telah melihat Indonesia sebagai negara yang memiliki peluang besar," ujar Hatta Rajasa menjelang rapat koordinasi program 100 hari Menteri Ekonomi di Jakarta kemarin.

Hatta menjelaskan, perbaikan dan pengembangan infrastruktur

tidak bisa hanya mengandalkan dana pemerintah. Pemerintah bisa mengajak swasta sebagai mitra untuk membiayai pembangunan infrastruktur.

Selain infrastruktur, pemerintah juga bertekad menghilangkan hambatan lain seperti regulasi. Ketidaksinkronan regulasi serta perbedaan pandangan antara pemerintah pusat dan daerah dipandang bisa menghambat pertumbuhan sektor riil.

Hatta menjelaskan, muara dari

pengembangan infrastruktur adalah sektor riil yang terus bergerak selama lima tahun ke depan. Sektor riil yang semakin bergerak diyakini mampu menggenjot pertumbuhan ekonomi secara signifikan.

Pemerintah menargetkan laju perekonomian sebesar 7% pada 2014. Sementara Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia lebih optimistis melihat perekonomian nasional lima tahun mendatang.

Kadin optimistis pertumbuhan ekonomi mencapai 8% pada 2014.

Target ini, menurut Hatta, bukan sesuatu yang mustahil tercapai mengingat proyeksi perekonomian nasional di mata internasional juga semakin positif. "Jadi jangan sampai peluang emas ini kita sia-siakan. Sekarang ini momentum kita untuk mendorong pertumbuhan," papar Hatta.

Kemitraan

Wakil Kadin juga diundang dalam rapat koordinasi kemarin. Keterlibatan Kadin, ujar Wakil

Ketua Kadin Bidang Fiskal Moneter Haryadi Sukamdani jalan dengan keinginan pemerintah untuk mengedepankan kemitraan dengan swasta pada masa mendatang.

Dalam pertemuan itu, Menko Perekonomian juga mengajak dinas untuk melakukan rapat kerja secara rutin sebulan sekali. Pertemuan ini dipandang perlu untuk mengantisipasi perkembangan ekonomi dunia.

bersambung ke h

Tim Ekonomi Fokus Infrastruktur

Sambungan dari hal 1

Haryadi merasa peranan Kadin diperlukan untuk membuat program kerja pemerintah menjadi lebih baik. Dalam menyusun program kerja, pemerintah perlu mempertimbangkan masukan dari seluruh pemangku kepentingan. "Jangan sampai kebijakan yang diimplementasikan nantinya jauh dari harapan," imbuhnya.

100 Hari

Hampir semua menteri di bawah koordinasi Menko Perekonomian hadir dalam rakor kemarin. Di antaranya Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Menteri Perindustrian MS Hidayat, Meneg Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Syaifuddin Hasan. Lalu Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar, Meneg Perencanaan Pema-

ngunan Nasional (PPN/Kepala Bappenas) Armida S Alisjahbana, Menteri Perhubungan Freddy Numberi, Meneg Perumahan Rakyat Suharso Monoarfa, Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan, Energi dan Sumber Daya Mineral Darwin Zahedy Saleh, Meneg BUMN Mustafa Abubakar, dan Meneg Pembangunan Daerah Tertinggal Helmy Faishal Zaini.

Mengenai program 100 hari, Menteri Perindustrian MS Hidayat, misalnya, memprioritaskan penyusunan aturan-aturan untuk mendorong pertumbuhan industri. Penyusunan aturan ini terutama untuk memuluskan segala hambatan pertumbuhan industri.

Hidayat mencontohkan, pihaknya akan mengubah aturan-aturan yang menghambat proses perizinan. "Begitu juga aturan yang bisa menghambat pertumbuhan sektor industri manufaktur," katanya.

Menteri Negara Pembangunan

Desa Tertinggal Helmy Faishal Zaini merencanakan kunjungan ke daerah-daerah tertinggal, terutama di kawasan Indonesia Timur selama 100 hari pertamanya di Kabinet Indonesia Bersatu II. "Kita ketahui hampir 62% total kawasan tertinggal ini berada di kawasan Indonesia Timur," katanya.

Daerah-daerah di kawasan perbatasan juga masuk dalam agenda kunjungan. Pihaknya akan menginventarisasi seluruh persoalan yang muncul di kawasan perbatasan. Prioritas selanjutnya adalah menyusun rencana strategis kementerian.

Menteri Perhubungan Freddy Numberi mengungkapkan agenda 100 harinya terkait revitalisasi moda transportasi dan infrastruktur pendukungnya.

Di samping membahas upaya-upaya untuk mengurangi kecelakaan. "Masih banyak kele-

mahan yang harus diperbaiki," ujar dia.

Adapun Menkominfo Tifatul Sembiring berjanji mendorong pembangunan teknologi komunikasi dan informatika untuk meningkatkan pendapatan negara. Salah satu targetnya selama lima tahun mendatang dalam pemerintahan adalah meningkatkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor ini hingga mencapai Rp8,5 triliun.

Tifatul menuturkan, dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sekitar Rp2,3 triliun Depkominfo selama ini bisa menghasilkan PNBP di atas Rp6 triliun. "Target kita di tahun berikutnya bisa mencapai Rp8,5 triliun. Ini bisa memperbesar pendapatan negara," ujarnya.

Dia melanjutkan, investasi sebesar 1% pada sektor komunikasi dan informatika akan meningkat-

kan laju perekonomian hingga 3% di suatu negara.

Pengamat ekonomi dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Revrisond Baswir mengatakan tim ekonomi diharapkan serius menangani pembangunan infrastruktur di daerah tertinggal sehingga kesejahteraan masyarakat lebih merata. Penanganan pembangunan infrastruktur selama ini terfokus pada wilayah tertentu dan bukan berdasarkan pendekatan pada masalah.

Dia mengatakan, dalam menangani masalah infrastruktur dibutuhkan perspektif lain seperti konsep pemerataan pembangunan pada daerah-daerah tertinggal. "Pembangunan infrastruktur yang menjangkau daerah tertinggal akan dapat menambah daya tarik investasi di daerah tersebut," tegas Revrisond.

(meutia rahmi/ant)

Agenda 100 Hari Lebih Dipertajam

JAKARTA (SI) - Agenda 100 hari yang sudah disepakati para menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II akan dipertajam dalam Pertemuan Nasional (National Summit) 29-31 Oktober 2009 mendatang.

Penajaman dilakukan demi memuluskan pencapaian target-target dalam agenda 100 hari para menteri. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa menuturkan, agenda 100 hari para menteri akan dipertajam dengan kontrak kerja, program-program kementerian yang sudah berjalan, serta masukan-masukan baru dalam National Summit. "Dengan hal itu, kita berharap pencapaiannya bisa tinggi sekali, bisa 100% ha-

rapannya," ungkap Hatta usai rapat di Kantor Wakil Presiden (Wapres), Jakarta, kemarin.

Wapres Boediono, kemarin, memimpin rapat bersama yang membahas masalah program 100 hari KIB II. Rapat dihadiri hampir seluruh menteri KIB II. Selain penajaman agenda 100 hari, rapat awalnya berencana membahas APBN 2009/2010. Namun, agenda pembahasan APBN akhirnya ditunda lantaran Menteri Keuangan

(Menkeu) Sri Mulyani Indrawati tengah mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN di Hua Hin, Thailand.

Hatta menuturkan, sebelum pelaksanaan National Summit, para menteri KIB II akan kembali menggelar rapat. Hasil rapat akan dilaporkan kepada Wapres pada Rabu malam (28/10) dan Presiden pada Kamis (29/10). "Yang pasti, materi dalam agenda 100 hari para menteri tidak mungkin dikurangi. Agenda itu justru akan ditambah dengan hasil National Summit papir Hatta.

bersambung ke hal 7

Agenda 100 Hari Lebih Dipertajam

Sambungan dari hal 1

Dalam rapat yang berlangsung satu jam, kemarin, Wapres menilai tidak semua program bisa diselesaikan dalam waktu 100 hari. Beberapa program bahkan berkesinambungan hingga lima tahun. "Tadi disampaikan Wapres ada hal yang bersifat statis untuk dilaksanakan pada 100 hari ini, berkesinambungan sampai satu tahun, bisa (juga) berkesinambungan sampai lima tahun. Artinya regulasi dan aturannya itu dimulai pada saat 100 hari itu selesai. Ada juga yang 100 hari selesai programnya," ujar Hatta.

Dalam pelaksanaan agenda 100 hari, pemerintah akan menunjuk fasilitator. Fasilitator ini demi memuluskan sinkronisasi antara departemen dan kementerian. "Kita berharap sinkronisasi antardepartemen atau kementerian itu bisa dilakukan," katanya.

Menko Polhukam Djoko Suryanto menambahkan, agenda 100 hari yang dimaksud pemerintah sebagian besar adalah program-program berkelanjutan sejak 2004 hingga saat ini. Bukan agenda yang dibuat sendiri oleh tiap menteri.

"Jadi itu juga harus merupakan kelanjutan dari program-program sebelumnya dan nanti akan ber-

lanjut sampai 2014. Jadi tidak ada program tersendiri yang 100 hari selesai tanpa ada program lanjutan dari yang lalu dan program lanjutan ke depan. Jadi kesinambungan tetap dijaga," tutur Djoko.

Kendati begitu, menurut Djoko, ada juga program-program baru yang dimungkinkan masuk. Program itu misalnya perbaikan infrastruktur yang rusak akibat gempa. "Tidak ada program yang terputus kecuali yang sangat mendesak atau emergency. Misalnya bencana itu tidak direncanakan. Jadi penanganan bencana kemarin yang tidak direncanakan mungkin bisa di dalam program 100 hari ke depan, contohnya perbaikan rumah," ujarnya.

Ditanya soal kemungkinan pemberantasan terorisme masuk dalam agenda 100 hari, Djoko menuturkan, masalah tersebut akan menjadi salah satu topik dalam National Summit nanti. Namun, menurut Djoko, meski pemberantasan terorisme nantinya masuk dalam agenda, bukan berarti terorisme bisa diberantas dalam 100 hari.

"Salah satu di dalam program (yang) nantinya dikeluarkan (dalam rentang) 100 hari mungkin adalah apa yang bisa kita capai dalam 100 hari? Misalnya penetapan pro-

sedurnya, apakah perlu ada revisi terhadap aturan-aturan? Itu kan bisa dicapai dalam 100 hari," ungkap Djoko.

Ekonom The Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Aviliani mengatakan, tantangan bagi para menteri KIB II untuk mewujudkan agenda 100 hari adalah sinkronisasi kebijakan antardepartemen. Menurutnya, sosok menteri koordinator harus mampu mengoordinasikan kebijakan-kebijakan menteri di bawahnya.

Dia mencontohkan Menko Perekonomian Hatta Rajasa yang mesti melakukan sinkronisasi tim ekonomi. "Selama ini menteri yang berada di bawah komandonya banyak yang berjalan sendiri-sendiri dan mengeluarkan kebijakan yang bertolak belakang," ungkap Aviliani.

Wakil Menteri

Di bagian lain, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan mengumumkan posisi wakil menteri dalam waktu dekat ini. "Sekarang sedang kami pelajari," ujar Presiden seperti dilaporkan wartawan harian *Seputar Indonesia* (SI) Sururi Alfaruq dari Grand Pacific Hotel, Hua Hin, Thailand, tadi malam.

Pos mana saja yang akan diberi

wakil menteri, Presiden tidak menyebutkan departemennya. Presiden hanya memberikan gambaran bahwa dalam lima tahun ini ada sejumlah agenda dan prioritas sangat penting yang harus dijalankan. Agenda penting itu, katanya, menyangkut tugas melakukan revitalisasi di bidang tugas masing-masing agar dalam lima tahun ke depan ini ada penekanan dan penajaman.

Presiden lantas menyebutkan bidang pertanian dan industri yang harus melakukan revitalisasi pada gelombang pertama ini. Demikian juga di bidang pendidikan dan kesehatan, Presiden berharap dilakukan revitalisasi agar ada penekanan yang bisa diwujudkan dalam lima tahun ini. "Maka perlu ada cetak biru yang perlu dibuat tiap departemen," katanya.

Menurut Presiden, departemen-departemen yang memiliki load tinggi ini perlu di-back up agar bisa bergerak penuh. Untuk mengisi pos-pos tersebut diutamakan dari kalangan profesional agar bisa lebih fokus dan maksimal. "Kalau toh dari kalangan parpol, tentu harus diutamakan yang profesional," ujarnya.

Bagaimana dengan posisi De-

partemen Luar Negeri dan Departemen Keuangan? Presiden menjelaskan, dua posisi ini perlu di-back up lantaran termasuk sering keluar negeri.

Menteri Pertanian Suswono yang dicegat usai mendampingi Presiden menyatakan, untuk posisi wakil menteri di departemennya semuanya diserahkan kepada Presiden. "Sebenarnya kalau saya ditanya di departemen saya perlu apa enggak, yang bisa menjawab adalah Presiden. Kalau saya sendiri hal itu sifatnya relatif," katanya.

Dia mengatakan, dalam lima tahun ke depan departemennya akan memfokuskan diri pada upaya swasembada daging sapi, gula industri, dan kedelai. Untuk periode lalu, Departemen Pertanian sudah berhasil menciptakan swasembada beras, gula konsumsi, dan jagung. Untuk mewujudkan swasembada tersebut, menurut Suswono, perlu dukungan departemen lain, misalnya Departemen Pekerjaan Umum (PU), Departemen Kehutanan dan Departemen Keuangan. Tiga departemen tersebut bisa memberikan bantuan di bidang irigasi, lahan, bibit, dan sistem pendanaan.

(maya sofia/didik purwanto)

Sabtu, 31 Oktober 2009

Mendiknas Janji Berikan 10.000 Beasiswa

JAKARTA (SI) – Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Mohammad Nuh berjanji akan memberikan 10.000 beasiswa bagi siswa dari keluarga miskin dan kurang mampu. Mendiknas bahkan memasukkan program ini dalam 100 hari kinerjanya.

"Beasiswa akan diberikan pada 10.000 anak SMA (sekolah menengah atas) atau SMK (sekolah menengah kejuruan) dari keluarga miskin, tapi punya potensi akademik," tegas Mohammad Nuh di sela-sela Temu Nasional (National Summit) di Jakarta kemarin.

Selain memberikan beasiswa, Mendiknas juga berjanji akan meningkatkan kualitas guru dan pengajar. Perbaikan pendidikan di Indonesia tidak hanya butuh peningkatan kualitas sarana, tapi juga kompetensi dan kualitas pengajar. "Kalau pun fasilitas ada, tapi kompetensi guru tidak sesuai standar, akan sia-sia saja semuanya," paparnya.

Mengenai ketersediaan tenaga pengajar dan guru, Mendiknas menegaskan tidak akan menambah jumlah guru. Menurut dia, jumlah guru yang ada saat ini sudah lebih dari cukup. Hanya saja, yang men-

jadi persoalan adalah pola sebaran yang tidak merata. "Jumlah guru kita sudah cukup, tapi masalahnya distribusi tidak merata. Ada daerah yang kelebihan guru dan ada yang kekurangan," paparnya.

Kualitas dan kompetensi guru juga belum merata. Nuh menyatakan, selama ini terjadi disparitas dari segi kewilayahan dan status sosial. "Depdiknas ke depan akan memperkecil disparitas itu tanpa mengorbankan guru yang sudah berkualitas," tandasnya.

Sebelumnya Direktur Profesi Pendidik Depdiknas Achmad Da-

suki menyatakan, saat ini sedang disiapkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pendistribusian Guru. PP ini akan digunakan sebagai landasan hukum untuk pemeratakan sebaran guru. "Sedang disiapkan aturan untuk redistribusi guru. Tanpa PP, Depdiknas tidak bisa mendistribusikan guru-guru ke daerah. Sejak diterapkan desentralisasi, guru itu sepenuhnya milik bupati," kata dia. Achmad mengatakan, jumlah guru yang ada saat ini sebenarnya sudah cukup memadai. Hanya saja, pola sebaran tidak merata.

(rendra hanggara)

Sabtu, 31 Oktober 2009

Depag Siapkan Antisipasi Aliran Sesat

JAKARTA(SI)—Maraknya aliran-aliran keagamaan baru atau yang dianggap sesat membuat Menteri Agama (Menag) Suryadharma Ali memasukkan program antisipasi dalam 100 hari kerjanya.

Salah satu antisipasi yang bakal dilakukan Menag adalah dengan mengaktifkan kembali Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang telah berdiri di setiap provinsi.

FKUB ini terdiri atas para pejabat Depag dan tokoh agama setempat yang berfungsi sebagai wadah dialog antar-umat beragama. "Kami minta jajaran Depag untuk kembali mengefektifkan FKUB mengingat banyak konflik sosial dan SARA (suku, agama, ras, dan adat) bisa teredam dengan program ini," ungkap Suryadharma Ali di sela-sela Temu Nasional (National Summit) 2009 di Jakarta kemarin. (rendra hanggara)

Senin, 2 November 2009

Anggaran Jangan Sampai Bengkok

Program 100 Hari Kabinet Harus Menyesuaikan APBN

SUKABUMI (SI) - Program 100 hari Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II diminta menyesuaikan dengan kapasitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2009.

DPR mengingatkan pemerintah agar program-program tersebut tidak membuat beban anggaran membengkak.

Ketua Badan Anggaran DPR Harry Azhar Azis mengatakan, program 100 hari pasti memakai dana APBNP 2009 dan APBN 2010. "Kalau terjadi perubahan dalam APBNP 2009, presiden tidak bisa mengajukan perubahan kecuali program 100 hari termasuk kategori program darurat," ujarnya dalam diskusi soal pengelolaan APBN 2009 dan tantangannya di 2010 di Sukabumi, Sabtu (31/10) malam.

Harry mengaku, tidak mengetahui persis program 100 hari KIB II. Jika pengajuannya nanti berbeda dengan program yang sudah ada dalam APBN 2010, yang akan digunakan mulai 1 Januari 2010, pemerintah harus mengajukan perubahan. Tetapi, menurutnya, hal ini sulit terealisasi karena pengajuan tersebut memerlukan persetujuan DPR. "Saya tidak tahu bagaimana pemerintah mengakalinya," imbuh dia.

Menko Perekonomian Hatta Rajasa juga mengakui, akan repot jika program 100 hari berimplikasi terhadap anggaran sebab harus

diproses lagi untuk memperoleh persetujuan DPR. "Jadi, sebaiknya program-program (100 hari) memang tidak memerlukan perubahan anggaran atau menambah anggaran baru," kata dia.

Selain anggaran, pemerintah juga mempertimbangkan dampaknya terhadap perekonomian ketika menyeleksi program-program 100 hari KIB II. Dalam hal ini, program tersebut harus berdampak besar terhadap percepatan pembangunan perekonomian.

Terutama untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi berkualitas yang ditandai dengan peningkatan lapangan kerja, penurunan angka kemiskinan, dan pembangunan infrastruktur.

"Pokoknya yang bisa mempercepat program dalam enam

bidang komisi National Summit, yaitu infrastruktur, pangan, energi, industri dan jasa, UMKM, dan transportasi," papar Hatta.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan menyampaikan program-program 100 hari KIB II dalam waktu dekat. Setelah diketuk presiden, Hatta menuturkan, program tersebut akan diumumkan kepada publik supaya bisa dimonitor.

Harga Minyak

Lebih lanjut Harry menilai, APBN 2010 hanya mampu menahan lonjakan harga minyak mentah dunia hingga ke level USD85/barel. "Lebih dari itu, beban subsidi akan semakin besar dan sulit dibiayai oleh APBN 2010," tegasnya.

Menurut Harry, beban subsidi

akan membengkak Rp50 triliun untuk setiap kenaikan harga minyak dunia sebesar USD5 per barel. Kemampuan APBN menahan harga minyak, imbuh dia, sebenarnya hanya sampai USD75 per barel. Itu pun sudah memperhitungkan adanya cadangan risiko fiskal sebesar Rp8,6 triliun pada 2010. Karena itu, dia mengingatkan, APBN mampu bertahan jika kenaikan harga minyak ke level USD85 per barel bersifat jangka pendek.

Dalam APBN 2010, alokasi belanja subsidi bahan bakar minyak (BBM) dipatok Rp59 triliun. Jika ditambah subsidi listrik karena sebagian pembangkit listrik masih menggunakan solar, total alokasi subsidi energi pada 2010 menjadi Rp99,4 triliun.

Terkait celah bagi pemerintah

untuk menaikkan harga BBM bersubsidi, Harry mengatakan, Badan Anggaran akan membahas hal tersebut dengan Menteri Keuangan pekan ini. Namun, dalam Undang-Undang APBN 2010, DPR sudah memberikan ruang kepada pemerintah untuk menyesuaikan harga BBM jika harga minyak dunia 10% di atas asumsi APBN, sebesar USD60 per barel.

Ekonom Sustainable Development Indonesia (SDI) Dradjad H Wibowo menambahkan, harga minyak memang menjadi salah satu faktor yang harus mendapat perhatian. Sebab, kenaikannya dapat mengancam laju inflasi lantaran transmisi yang tidak hanya kepada harga BBM tetapi pada harga barang lain.

(mentia rahmi)

SBY Deklarasikan Ganyang Mafia

PRESIDEN Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) merespon tuntutan reformasi institusi penegak hukum. Bahkan, Presiden akan menjadikannya sebagai bagian program 100 hari. Komitmen ini disampaikan dalam sidang kabinet paripurna, kemarin.

Presiden menegaskan, dalam 100 hari pertama dalam pemerintahannya, perkara yang merugikan masyarakat seperti makelar kasus, suap-menyuap, pemerasan, pungutan liar, pemerasan, jual beli perkara, dan segala bentuk kegiatan yang merusak keadilan akan diberantas.

bersambung ke hal 7

Ganyang Mafia

sambungan dari hal 1

"Mafia ini merusak keadilan dan kepastian hukum dan menimbulkan kerugian serta mendatangkan keuntungan yang tidak legal," katanya.

Menurut Presiden, mafia itu bisa ada di mana-mana. Bisa di lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, KPK, dan di departemen-departemen, termasuk yang berkaitan dengan pajak dan beacukai. Pos-positulah yang akan dijadikan prioritas untuk melakukan langkah-langkah konkret memberantas mafia hukum.

Walaupun pemberantasan mafia kasus tidak semudah yang dibayangkan, Presiden sangat yakin hal ini dapat tercapai bila digerakkan dengan sungguh-sungguh di seluruh lembaga pemerintahan. Kepada masyarakat, Presiden juga menghimbau agar siapa pun yang menjadi korban mafia kasus ini dapat segera melaporkannya ke PO BOX 9949 JKT 10000 dengan menggunakan kode khusus "GM" di ujung amplop.

"GM singkatan dari Ganyang Mafia. Tolong dicantumkan identitas yang jelas siapa pelakunya sehingga tidak menjadi fitnah dan nama itu nanti akan dirahasiakan. Mari kita berantas mafia-mafia ini dan hukum akan menjadi tegak dan pasti," tandasnya.

Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri saat dimintai konfirmasi wartawan menyatakan kesiapannya menindaklanjuti perintah Presiden memberantas mafia hukum yang ada di berbagai lembaga pemerintah.

"Jadi dalam program 100 hari setelah mafia hukum, mafia peradilan, termasuk kejaksaan, kepolisian kita sikapi, akan kita perintahkan jajaran. Itu memang program kita dan mudah-mudahan bisa kita lakukan dalam 100 hari," kata Kapolri se usai sidang kabinet paripurna di Kantor Kepresidenan kemarin.

Dijelaskan, program konkret dari pemberantasan mafia hukum itu antara lain dilakukan dengan menerima laporan dari masyarakat, melakukan proses yang transparan dalam penyidikan, serta segera melakukan tindakan bila ada laporan.

Tuntutan reformasi penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan bergulir seiring munculnya kontroversi rekaman Komisi

Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diungkap dalam sidang uji materi Undang-Undang KPK, Selasa lalu (3/11).

Aspirasi itu bukan hanya datang dari kalangan LSM maupun mahasiswa, tapi juga akan menjadi rekomendasi Tim Delapan. Menurut Ketua Tjm Delapan Adnan Buyung Nasution, kasus Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah menunjukkan bahwa reformasi di bidang hukum belum berjalan.

Hingga kemarin, tuntutan reformasi terus bergulir. Bahkan, di antara tuntutan itu datang dari keluarga besar kepolisian. Sejumlah purnawirawan Jenderal Polisi meminta Polri yang saat ini dipimpin Jenderal Bambang Hendarso Danuri direformasi total.

Permintaan disampaikan karena kisruh yang melibatkan Polri dan KPK yang akhir-akhir ini telah menjelekkan citra Polri di mata publik.

"Kami khawatir dengan keadaan Polri saat ini, untuk itu salah satu caranya mengubah citra dan kepercayaan dari publik dengan cara mereformasi tubuh Polri secara menyeluruh atau total," ujar Inspektur Jenderal Purn Emon Rivai yang hadir dalam pertemuan di sebuah kafe di Jalan Pager Gunung, Kota Bandung, kemarin.

Selain Emon, purnawirawan jenderal lain yang hadir dalam pertemuan itu di antaranya mantan Wakapolda Jabar Brigjen Purn Supriadi Usman, mantan Kapolda Sumut Irjen Purn Bambang Hernawan, dan mantan Kapolda Riau Irjen Purn Herman S Sastrawijaya.

Para purnawirawan itu meminta pimpinan Polri tidak memakai kaca mata kuda dalam menilai suatu kasus, terutama pada kasus KPK. "Hal itu pun seharusnya dilakukan mulai dari Kapolri hingga tingkat kapolsek. Jangan hanya dengar dari satu aspek saja. Siapa yang terlibat harus ditindak dengan tegas," kata Emon yang juga mantan Kapolda Jatim.

Mereka juga menyarankan Kapolri untuk menindak secara tegas dan profesional bawahan yang terlibat suatu kasus yang merugikan masyarakat. "Apalagi yang sudah menyalahgunakan wewenang. Saat ini perilaku mental anggota-anggota bila perlu dikaji ulang secara periodik," ujarnya.

(rarasati syarieff/
yugi prasetyo/ant)

Jumat, 20 November 2009

Kuntoro Rumuskan Tim Pemberantasan Mafia Hukum

JAKARTA (SI) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memberi tugas Ketua Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto untuk merumuskan tim pemberantasan mafia hukum. Unit kerja presiden ini akan mengkoordinasikan lembaga-lembaga pemerintahan lain yang berhubungan dengan upaya pemberantasan mafia hukum.

"Tugas akan segera dirumuskan dalam rencana aksi sehingga dalam waktu dekat sudah bisa terasa dampaknya. Ini adalah tugas yang diberikan oleh Bapak Presiden dalam sidang kabinet tadi (kemarin)," ujar Kuntoro, usai

sidang kabinet paripurna di kantor Kepresidenan Jakarta.

Presiden SBY siang kemarin menggelar sidang kabinet paripurna yang dihadiri seluruh jajaran menteri Kabinet Indonesia Bersatu II. Satu dari tiga agenda yang dibahas adalah pemberantasan mafia hukum.

Rapat yang berlangsung selama hampir 2,5 jam tersebut membahas langkah-langkah yang lebih konkret dalam pemberantasan mafia di bidang hukum. Agenda ini sekaligus menjadi agenda utama dalam reformasi di bidang hukum yang menjadi prioritas utama pro-

gram 100 hari pemerintahan KIBLI.

Menurut Kuntoro, dalam pelaksanaannya tim ini tidak akan memerlukan badan baru karena tugas ini merupakan bagian tugas dari unit kerja Presiden (UKP). "Tapi dalam pengerjaannya tentu UKP tidak bisa bekerja sendiri dan melakukan koordinasi dengan lembaga-lembaga lain, seperti Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, Departemen Hukum dan HAM, Polri, BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan)," ujarnya.

Saat membuka sidang kabinet paripurna, Presiden menyampai-

kan keinginannya agar dalam 100 hari ini langkah-langkah pemberantasan mafia hukum secara keseluruhan dapat dijalankan dengan efektif. Dengan begitu, rakyat dapat merasakan bahwa kehidupan di bidang hukum dan keadilan yang semakin baik.

"Mereka-mereka yang menjalankan sebutlah bisnis mafia itu tidak punya lagi kemewahan, kebebasan atau tindakan-tindakan apapun yang sungguh mengusik rasa keadilan dan juga mendatangkan kerugian bagi masyarakat luas," jelasnya.

Kenyataan tentang adanya mafia hukum ini terungkap saat Mahkamah Konstitusi memperde-

ngarkan rekaman pembicaraan Anggodo Widjaja tentang dugaan rekayasa kasus Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah. Setelah itu, merebak tuntutan agar make-lar kasus (markus) diberantas.

Pakar hukum dari Universitas Andalas Saldi Isra meragukan upaya pemberantasan mafia hukum dibawah koordinasi UKP4 akan berjalan sesuai yang diharapkan. Dia beralasan, tugas lembaga tersebut belum jelas begitu juga wewenang dan fungsinya. Apalagi jika diberikan beban untuk mengkoordinasikan lembaga seperti Polri dan Kejaksaan Agung.

(rarasati syarie/rahmat sahid/ahmad jayadi/red kandi)

serviens

Sabtu, 7 November 2009

RISET LINGKARAN SURVEI INDONESIA

Kasus KPK-Century Berdampak Negatif bagi SBY

JAKARTA (SI) – Kasus dugaan rekayasa kriminalisasi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan kasus Bank Century berdampak buruk bagi citra Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Kesimpulan tersebut diumumkan Lingkaran Survei Indonesia (LSI) berdasarkan riset terbarunya yang dirilis kepada media massa di Jakarta kemarin. "Yang negatif sebanyak 53.85%, sementara yang positif hanya 46.15%," kata Direktur Eksekutif LSI Denny JA dalam publikasi riset Divisi Isu Publik LSI di Jakarta kemarin.

Riset tersebut dilakukan pada 26 Oktober sampai 4 November dengan cara menganalisis lima koran nasional, yaitu harian *Seputar Indo-*

nesia (SI), Koran Tempo, Media Indonesia, Republika, dan Kompas. Selain itu, riset juga dilakukan dengan melakukan *depth interview* terhadap tokoh partai politik, intelektual, dan LSM.

Denny mengutarakan, posisi SBY memang lebih baik ketimbang persepsi terhadap Polri dengan penilaian negatif 60% dan positifnya hanya 30%. Namun, citra SBY lebih buruk dari persepsi atas KPK dengan nilai positif 50% dan negatifnya hanya 19.70%. "Apalagi dibandingkan dengan persepsi atas Bibit-Chandra yang dinilai positif hingga 90% dan negatifnya hanya mendekati 10%," paparnya.

Menurut Denny, hasil riset ini menarik karena citra SBY selama ini cukup kuat. SBY adalah pre-

siden yang terpilih sangat meyakinkan dengan menang satu putaran. Ditambah posisinya di DPR juga sangat kuat. Denny menyatakan hal itu dikarenakan kesalahan posisi SBY dalam kasus KPK-Century yang menyebabkan popularitas atau citranya merosot drastis. "SBY salah posisi ketika memberikan komentar mengenai penahanan Bibit-Chandra oleh pihak kepolisian. Walau mengesankan ingin bersikap netral dan tidak ingin mengintervensi hukum, SBY dianggap tidak peka dengan meluasnya isu rekayasa hukum yang terjadi dengan target pelemahan KPK," jelasnya.

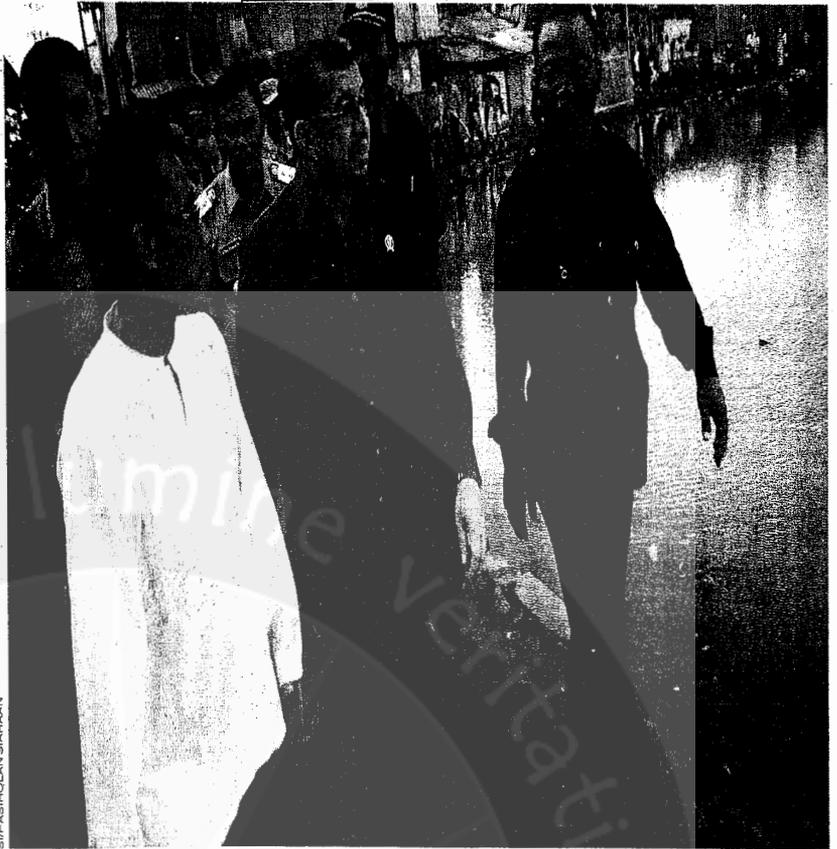
Nama SBY disebut dalam rekaman, meski pihak SBY mengatakan itu dicatut, tetapi pencatutnya

tetap melenggang di luar tahanan. Hal ini ikut menambah persepsi negatif terhadap SBY.

Pengamat politik LIPI Syamsuddin Haris mengatakan, kasus KPK-Century bisa menurunkan citra SBY. Selain itu, hal tersebut bisa menjadi beban di awal pemerintahannya. "Ini akan jadi awal yang kurang baik bagi 100 hari pertama pemerintahannya," ujarnya.

Syamsuddin mengatakan isu tersebut juga bisa membuat popularitas SBY semakin merosot. Apalagi saat ini publik mengarahkan dukungannya pada KPK. "Ini seperti bola salju dan bisa menurunkan citra. Ini kerugian bagi SBY yang sangat peduli pada pencitraan," jelasnya.

(dian widiyankoko)



KUNJUNGAN: Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri mengunjungi Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) di kawasan Plumpang, Jakarta Utara, kemarin. Mensos juga memberikan bantuan kepada anak jalanan dan anak korban eksploitasi ekonomi dan seksual.

Mensos Fokus Tangani Anak Jalanan

JAKARTA (SI) – Kementerian Sosial (Kemensos) akan memfokuskan penanganan anak jalanan melalui program Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) salah satunya menggandeng sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM). Program ini prioritas dari program 100 hari.

Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri mengatakan, lantaran kasus anak telantar, eksploitasi ekonomi anak, dan kekerasan seksual terhadap anak jalanan sudah marak, langkah-langkah strategis untuk memberikan perlindungan bagi anak yang terpaksa bekerja di jalanan sudah diperlukan.

Menurut Salim, hingga saat ini pihaknya telah menggandeng 15 LSM di tujuh kota antara lain Jakarta Utara dan Timur, Depok, Lampung, Cianjur, Kota Bandung, Yogyakarta, dan Makasar. Pada 2009 program PKSA berhasil menjangkau sasaran 1.250 anak dengan bantuan sosial sebesar Rp1,5 miliar. "Khusus 2010, kami sudah alokasikan anggaran sebesar Rp184 miliar untuk 140.000 anak yang mengalami masalah sosial, termasuk anak jalanan sebanyak 3000 anak," kata Salim saat kunjungan kerja di Jakarta kemarin.

Direktur Jenderal Pelayanan

dan Rehabilitasi Sosial Makmur Sanusi mengatakan, program PKSA adalah layanan khusus berupa pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar anak, termasuk kesiapan belajar. PKSA bertujuan memberikan perlindungan terhadap anak yang bukan kategori rumah tangga sangat miskin (RTSM) yang memerlukan perlindungan khusus.

Program PKSA, lanjut Makmur, diprioritaskan bagi anak yang belum pernah atau yang tidak dapat melanjutkan sekolah. Melalui program ini diharapkan masalah sosial anak jalanan atas hak pendidikan dasar dapat ditangani. Anak-anak jalanan yang memerlukan pendidikan khusus juga diharapkan memperoleh kesempatan yang sama, khususnya mengikuti pendidikan dasar dan menengah.

"Untuk itulah, pemerintah mengembangkan program PKSA dengan memperluas sasaran pelayanan," kata Makmur.

Menurut Makmur, dalam program PKSA ini anak jalanan akan dipersiapkan secara fisik, mental, dan sosial untuk mengikuti program layanan transisional. Program ini antara lain berupa program persiapan pendidikan yang mengandung substansi program

persiapan bersekolah baik secara akademik maupun non-akademik. Dengan demikian, anak jalanan yang putus sekolah bisa kembali mengikuti sistem pendidikan. "Selain itu juga ada program pembelajaran remedial sebagai bentuk layanan kesiapan belajar untuk mencegah anak putus sekolah. Juga program pemenuhan kebutuhan dasar anak," kata Makmur.

Sementara itu, Direktur Pelayanan Sosial Anak Kementerian Sosial Raden Harry Hikmat mengatakan, untuk memberikan penguatan atas tiga substansi program, berbagai program layanan dukungan juga disiapkan. Menurutnya, program PKSA menggunakan metode pendampingan yang dilakukan para pendamping PKSA. "Diharapkan nantinya bisa membantu anak jalanan sehingga mau dan mampu mengakses ke pendidikan formal dan nonformal," kata Harry.

Perhatian pemerintah terhadap anak-anak juga ditunjukkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Kementerian Hukum dan HAM. Hal itu terlihat dari disetujuinya penanganan bagi anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Sesuai rencana, anak

yang berhadapan dengan hukum ini tidak perlu dibuahi lagi. Solusinya, mereka cukup dibina di panti sosial.

"Tidak perlu lagi ada penjara. Cukup kembalikan ke pihak keluarga. Selanjutnya, akan dilakukan pembinaan. Kalau tidak, ABH terutama yang di bawah usia 12 tahun tidak serta merta dipenjara, tetapi harus dibina dulu di panti sosial," ungkap Direktur Pelayanan Sosial Anak Kementerian Sosial Raden Harry Hikmat.

Langkah Kemensos ini merupakan tindak lanjut dari keinginan pemerintah untuk mengeluarkan prosedur operasional standar (*standard operational procedure* SOP) bagi penanganan ABH. SOP ini akan digunakan untuk mendukung penerapan model penghukuman yang bersifat restoratif.

Penyusunan SOP ini merupakan tindak lanjut dari surat keputusan bersama (SKB) tentang penanganan ABH yang ditandatangani pada 22 Desember 2009. SKB ini ditanda-tangani oleh Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung, Kapolri, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Sosial, serta Meneg PP dan PA.

(nurulhuda)

Jumat, 15 Januari 2010

100 Hari Bukan Ukuran Kinerja

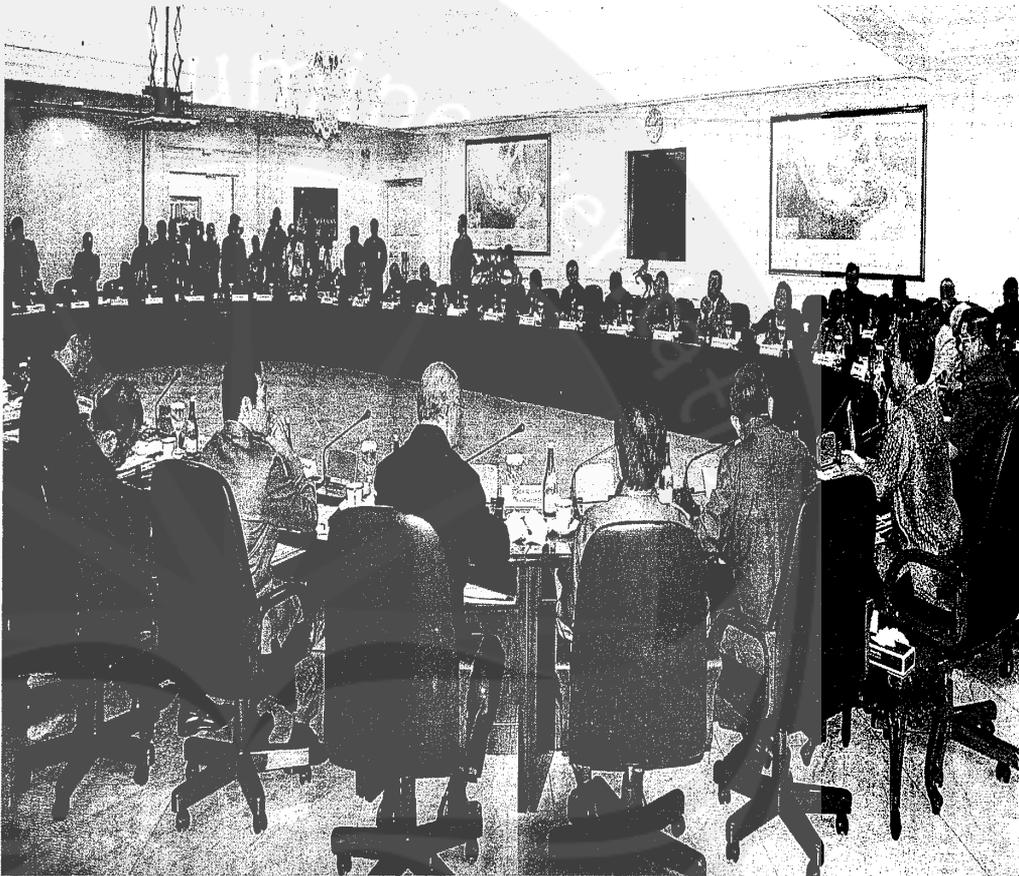
JAKARTA (SI) - Kinerja Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II pada 100 hari kerja tidak bisa dijadikan ukuran keberhasilan atau kegagalan para menteri dalam menjalankan tugas.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menegaskan, untuk bisa sukseskan program kesejahteraan rakyat bukan hanya diukur berdasarkan kinerja pemerintah dalam program 100 hari saja. Program 100 hari merupakan *starting point* KIB II untuk melanjutkan pekerjaannya dalam lima tahun ke depan. "Tentu tidak tepat mengukur kinerja pemerintah untuk lima tahun dari apa yang dilakukan selama 100 hari. Apalagi saya dengar beberapa pernyataan pemerintah dinilai gagal karena 100 hari belum bisa sejahterakan rakyatnya," ujar Presiden SBY saat membuka rapat kabinet paripurna di kantor Kepresidenan, Jakarta, kemarin.

Sebagai diketahui, sejumlah kalangan mulai mewacanakan kemungkinan dilakukannya *reshuffle* kabinet berdasarkan hasil evaluasi program 100 hari. Namun, dari hasil rapat kabinet kemarin, kinerja para menteri dinilai sudah hampir memenuhi target dari 129 rencana aksi yang dicanangkan.

Presiden SBY bersama Wapres Boediono siang kemarin memimpin rapat kabinet paripurna yang membahas tentang kelanjutan program kerja 100 hari. Untuk diketahui, Presiden SBY selalu mengevaluasi para menternya, baik dalam 30 hari masa kerja pemerintahan, 50 hari, dan 75 hari. Sedangkan kabinet paripurna kemarin merupakan hari ke-75 pemerintahan.

"Saya, Pak Boediono, dan kita semua tidak ada yang berjanji bahwa seluruh rakyat Indonesia akan sejahtera dalam waktu 100 hari.



RAPAT PARIPURNA KABINET: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono didampingi Wapres Boediono memimpin Rapat Paripurna Kabinet di Kantor Presiden, kemarin. Rapat Paripurna ini membahas evaluasi program dan kinerja Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II.

Kita bekerja sekuat tenaga ke depan untuk terus sejahterakan rakyat kita," ujarnya.

Presiden menjelaskan, untuk mengukur atau mengevaluasi kinerja pemerintah dalam 100 hari memerlukan kerja keras dan mengaitkannya dengan sasaran yang telah ditetapkan pemerintah. Saat ini beberapa target tersebut telah tercapai, meskipun ada beberapa sasaran lain yang masih belum bisa tercapai.

"Meski program 100 hari ini adalah internal kita, bagaimana memastikan 100 hari pertama kita bisa melaksanakannya sebagai landasan, jalan pintu masuk untuk bekerja lebih baik lagi dalam kurun waktu lima tahun mendatang," tambahnya.

Ketua Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian

Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto mengatakan, hasil evaluasi selama 75 hari kerja bisa mencapai hasil yang cukup bagus. Menurutnya, dari 129 rencana aksi dua di antaranya mengecewakan. Sedangkan 19 dinyatakan berhasil dan bisa dinyatakan selesai sebelum masa kerja 100 hari berakhir.

Salah satu dari dua program yang masih mengecewakan adalah program revitalisasi industri, di Kementerian Perindustrian. "Yang revitalisasi industri saya kira minggu depan sudah selesai, cuma dia terlambat. Yang satunya lagi barangkali perlu di-review kembali," tandasnya. Meski demikian, lanjut Kuntoro, seluruh capaian dalam program kerja kabinet telah mencapai hasil yang menggembirakan. "Semua sudah sinkron dan sudah

sejalan dengan yang sudah direncanakan," tambahnya.

Menurut dia, presiden sangat puas dengan capaian ini dan meminta agar apa yang telah dilakukan dapat dilanjutkan setelah 100 hari pemerintahan berjalan.

Sementara itu, Menteri Kehutanan yang merupakan politikus dari Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengatakan, para menteri sudah punya kontrak politik dengan presiden yang bisa diukur dengan parameter yang jelas apakah programnya berhasil atau tidak. Dalam program 100 hari, kata dia, memang tidak bisa dilihat bahwa hasilnya haruslah sempurna. Tetapi paling tidak, bisa menjadi gambaran bahwa secara bertahap program pemerintah terus mengalami peningkatan keber-

hasilannya. Dengan begitu, maka untuk lima tahun mendatang akan ada perbaikan signifikan yang dihasilkan oleh pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden SBY.

"Kalau kerja kabinet itu, otomatis dievaluasi karena kita punya kontrak kerja. Dalam 100 hari sesuai kontrak kerja memang ada evaluasi. Dalam evaluasi itu akan ada nilai apakah warnanya biru yang berarti bagus, hijau berarti lumayan bagus, atau kuning yang berarti kurang bagus, atau warna merah yang berarti programnya tidak tercapai," jelasnya.

Sejauh ini, kata dia, sebenarnya presiden juga sudah mengevaluasi, mulai 30 hari, 50 hari, dan 75 hari kerja kabinet. Menurut Zulkifli, presiden sudah mengetahui bagaimana program 100 hari serta ha-

silnya seperti apa. "Mungkin media saja yang tidak terlalu menyori keberhasilan dari pemerintah dalam program 100 hari karena lebih tertarik untuk menyori isu besar seperti Century atau Buay versus Cicak. Padahal, banyak program 100 hari yang sebenarnya cukup memuaskan," ujarnya.

Sebelum rapat kabinet, Menkopolhukam Djoko Suyanto mengatakan, pelaksanaan program 100 hari kerja pemerintah untuk sektor polhukam sudah berjalan 100 persen termasuk peningkatan kapasitas desk antiteror. "Termasuk peningkatan kapasitas desk antiteror. Itu kan kita program 100 hari membuat rancangan perpres untuk Badan Koordinasi Pemberantasan Terorisme, sudah jadi, tinggal tekannya," tegasnya. (rasati syarif/rahmat sahid)

Program 100 Hari Terpenuhi

Menakertrans Muhaimin Iskandar Klaim Berhasil

JAKARTA (SI)— Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar mengklaim program 100 hari yang dicanangkan sudah terpenuhi sebagaimana penilaian unit pengawasan dan pembangunan Presiden.

Muhaimin mengatakan program 100 hari kerja sebagai langkah awal peletakan fondasi telah sesuai target yang dicanangkan. "Pantauan unit pengawasan dan pembangunan pada hari ke-75 yang jatuh kemarin dinilai sudah terpenuhi 100% atau sudah memenuhi target," katanya saat berkunjung ke redaksi harian *Seputar Indonesia* (SI) kemarin.

Menurut dia, target yang sudah terpenuhi itu seperti reviu peraturan sistem perlindungan dan penempatan tenaga kerja Indonesia (TKI) yang sudah disurvei dan diuji publik. Melalui langkah itu, lahir sistem perlindungan penempatan tenaga kerja mulai dari perekrutan, pelatihan, penempatan hingga pemulangan kembali. "Titik sumbuatnya adalah pelatihan 200 jam mesti terpenuhi dan tidak boleh ada *mark up* umur," bebernya.

Selain itu, perlindungan TKI di negara penempatan juga sudah memasuki tahap akhir. *Memorandum of understanding* (MoU) dengan Malaysia, misalnya, telah disetujui sehingga pada awal Februari ini moratorium pemberangkatan TKI ke negara ini akan dicabut. Kemudian diikuti pengesahan MoU dengan Kuwait.

Program 100 hari lainnya seperti pola hubungan industrial dinilai semakin kondusif. Tiga isu pokok dalam hubungan industrial, misalnya menyangkut masalah *outsourcing*, saat ini dianggap merugikan



KUNJUNGI REDAKSI

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar saat berkunjung ke kantor redaksi *Harian Seputar Indonesia*, kemarin. Muhaimin menjelaskan capaian program kerja 100 hari Kemenakertrans.

karyawan. Karena itu perlu ada sinergi perbaikan, terutama dengan sektor lain. Sebab, berdasar UU Ketenagakerjaan, sektor pengusaha juga merasa khawatir, terutama menyangkut pesangon.

Karena itu, dia memiliki gagasan untuk membuat UU ketenagakerjaan baru yang lebih komprehensif dan tidak sekadar merevisinya saja. Menurut dia, naskah akademisnya sedang dirintis dan diharapkan masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

Aspek lain dalam program 100 hari Kemenakertrans adalah aspek produktivitas. Lalu program *link and match* antara pendidikan formal dengan dunia usaha. Menurut Ketua UMUM DPP PKB ini, sertifikasi kompetensi menjadi penting sehingga tidak ada lulusan, baik sekolah menengah maupun kejuruan, yang menjadi pengang-

guran baru. "Peran antara pendidikan formal, informal, pelatihan, dan pasar kerja mesti tersambung," tegasnya.

Untuk menjembatani masalah tersebut, pihaknya merevitalisasi balai latihan kerja (BLK) yang bisa digunakan siswa SMK untuk praktik. Bahkan, ke depan lulusan SMK harus memiliki sertifikasi BLK sebagai syarat pencari kerja.

Program *link and match* nantinya akan disinergikan dengan Kemendiknas, terutama dalam penyaluran tenaga kerja. Karena itu, Direktorat Pendidikan Luar Sekolah (PLS) nantinya bisa berjalan saling melengkapi dengan Kemenakertrans.

Di samping itu, program yang tak kalah penting adalah menyangkut transmigrasi. Sebab, animo transmigrasi sangat tinggi. Begitu juga daerah yang antusias untuk

menjadi penempatan transmigran. "Saat ini ada tanah sekitar 900.000 hektare yang siap ditempati," imbuhnya.

Kemenakertrans juga akan mengembangkan agroindustri sebagai salah satu pilihan mata pecaharian bagi transmigran. Agroindustri seperti bioetanol, karet, dan kelapa sawit menurut Muhaimin sangat sukses di Jambi, sebagian Kalimantan, Lampung, dan Sumatera Selatan.

Selain itu juga akan dikembangkan Kota Terpadu Mandiri (KTM). Tahun ini ada 44 KTM yang dibangun antara investor, pemerintah, transmigran setempat dan baru. KTM sendiri diharapkan dapat menggenjot pertumbuhan ekonomi kota di sekitar wilayah transmigrasi.

Anggota Komisi IX DPR RI periode 2004-2009 Hakim Sorimu-

da Pohan mengapresiasi program '100 hari Menakertrans Muhaimin Iskandar. Menurut dia, rekomendasi DPR periode sebelumnya diimplementasikan dengan baik seperti perlindungan TKI di Malaysia dan Kuwait. "Ini pantas diacungi jempol," tandasnya.

Sementara Direktur Eksekutif Migran Care mengatakan, jika MoU dengan Malaysia tersebut diikuti dengan pembenahan prosedur pemberangkatan TKI di dalam negeri seperti penekanan biaya penempatan, kinerja 100 hari menteri akan lebih sempurna. Karena itu, Pemerintah Indonesia pun harus mendesak Pemerintah Malaysia untuk mengeluarkan peraturan perlindungan buruh migran di negerinya. "Sehingga TKI pun dapat dilindungi di negara tempat ia bekerja," jelasnya.

(nenengzubaidah)

Senin, 18 Januari 2010

Ekonom Nilai Program 100 Hari Belum Substansial



SURATMAN S

EKONOM INDONESIA: Sejumlah ekonom Indonesia yang difasilitasi Rizal Ramli (tengah) mendeklarasikan Forum Ekonom Indonesia di Jakarta, kemarin. Dalam pernyataan sikapnya, mereka menilai program 100 hari pemerintah belum menyentuh persoalan substansial terkait kemajuan pembangunan.

JAKARTA (SI) – Sejumlah pakar ekonomi yang tergabung dalam Forum Ekonom Indonesia (FEI) menilai kinerja pemerintah dalam program 100 hari belum memperlihatkan perbaikan ekonomi yang signifikan.

Salah satu penggagas FEI Rizal Ramli menyatakan, cita-cita Indonesia menjadi salah satu raksasa ekonomi Asia setelah China dan India terlalu muluk-muluk. Apalagi jika melihat kinerja pemerintah yang tidak fokus pada masalah-masalah substansial, terutama dalam mengelola industri nasional.

"Struktur industri nasional saat ini sangat lemah dan tidak jelas arahnya ke mana. Rasanya terlalu muluk mendengar tekad Indonesia menjadi raksasa ekonomi baru di Asia setelah China dan India," kata Rizal di Jakarta kemarin.

Ikut bergabung dalam forum ini Rizal Ramli, Iman Sugema, Deni Danuri, Ismet Hasan Putro, Ichsanuddin Noorsy, M Ikhsan Modjo, Ahmad Erani Yustika, Hendri Saparini, Revrison Baswir, dan beberapa ekonom lainnya.

Rizal mengakui bahwa pembenahan ekonomi Indonesia tidak mudah, terutama dalam masalah struktural seperti kemiskinan, pengangguran, kesenjangan, dan sebagainya. Karena itu, lanjut dia, pemerintah harus menetapkan target lalu fokus menjalankannya.

Terkait kritikan tersebut, Ketua DPP Partai Demokrat Jafar Hafsah mengatakan bahwa kinerja tim ekonomi pemerintah sebenarnya sudah berjalan sesuai target. Jika dianggap tidak fokus, lanjut dia, perhatian terhadap apa yang dilakukan tim ekonomi pemerintah kurang diekspos media.

(mohammad sahan)

Senin, 14 Desember 2009

Depbudpar Gelar Festival Sasando

JAKARTA (SI) – Departemen Kebudayaan dan Pariwisata (Depbudpar) akan meluncurkan acara Festival Musik Sasando yang memperebutkan Piala Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). "Musik Sasando keberadaannya mulai pudar, ditinggalkan generasi muda. Karena itu, kami berharap dengan adanya penyelenggaraan ini, musik Sasando bisa terangkat kembali," tegas Menteri Kebudayaan dan Pariwisata (Menbudpar) Jero Wacik di Jakarta kemarin.

Jero mengatakan, penyelenggaraan kegiatan ini merupakan arahan Presiden SBY langsung saat berkunjung ke Kupang pada Juni 2009. Festival Musik Sasando ini juga merupakan salah satu program kerja 100 hari Kabinet Indonesia Bersatu II bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
(rendra hanggara)

Jumat, 6 November 2009



PROGRAM KERJA: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) didampingi Wapres Boediono memberikan pengarahan kepada para menteri Kabinet Indonesia Bersatu II terkait program 100 hari kinerja pemerintah di Kantor Kepresidenan, Jakarta, kemarin. Ada 15 program yang akan menjadi prioritas pemerintah.

SBY Prioritaskan 15 Program

JAKARTA (SI) - Sebanyak 15 program akan menjadi prioritas Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam menjalankan pemerintahannya selama 100 hari mendatang.

Ke-15 program aksi tersebut merupakan prioritas yang akan dilakukan dari 45 program penting lintas sektoral dan regional yang telah ditetapkan dalam sidang kabinet paripurna kemarin.

Presiden menegaskan, 15 program aksi tersebut adalah pembertarikan mafia hukum, revitalisasi industri pertahanan, penanggulangan terorisme, listrik, produksi ketahanan pangan, revitalisasi pabrik pupuk dan gula, pembenahan kompleksitas tanah, infrastruktur, dan UMKM. Selain itu, Presiden juga memprioritaskan pemaksimalan pendanaan atau *financing*, perubahan iklim dan lingkungan, reformasi kesehatan, peningkatan pendidikan, kesiagaan penanggulangan bencana, dan meningkatkan sinergiantarapusat dandaerah.

Presiden SBY didampingi Wakil Presiden (Wapres) Boediono selama enam jam nonstop kemarin

memimpin sidang kabinet paripurna di Kantor Kepresidenan. Rapat tersebut membahas program 100 hari dan program lima tahun mendatang dalam pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II. Sidang kabinet paripurna ini merupakan sidang kedua kali yang digelar Presiden SBY setelah dilantiknya anggota KIB II pada 22 Oktober 2009. Sehari setelah pelantikan pada 23 Oktober 2009, Presiden SBY juga menggelar sidang kabinet paripurna di Gedung Sekretariat Negara. Dalam rapat itu dibahas tentang tugas dan program aksi pemerintahan 100 hari dan lima tahun.

Khusus revitalisasi industri pertahanan dan penanggulangan terorisme yang menjadi agenda prioritas kedua dan ketiga dalam program 100 hari, Presiden mengharapkan akan dapat membawa perubahan yang cukup signifikan.

"Ke depan, penanggulangan terorisme janganlah hanya mengandalkan operasi militer dan intelijen, tetapi harus dengan pencegahan. Kita akan mengajak banyak tokoh masyarakat dan pemuka-pemuka agama untuk bersama-sama melakukan pencegahan aksi terorisme ini," tegas Presiden SBY di Jakarta kemarin.

Terkait dengan peningkatan investasi, Presiden memprioritaskan penyelesaian permasalahan listrik yang selama ini dinilai menghambat perekonomian dan investasi. Presiden mengaku, selama ini listrik menjadi kendala dan hambatan di seluruh provinsi di Indonesia. Namun, menurut dia, seiring dengan meningkatnya pertumbuhan perekonomian, rencana untuk mewujudkan pembangunan tenaga listrik tenaga uap sebesar 10.000 megawatt akan segera terealisasi.

"Sekarang ini akan kita pastikan kapasitas listrik dapat memenuhi industri, rumah tangga, dan keperluan-keperluan lain. Dalam 100 hari ini, kita juga akan melakukan pemetaan wilayah yang

kekurangan listrik sehingga kita bisa menambahnya sesuai kebutuhan di masa mendatang," tandasnya.

Sementara itu, di bidang kesehatan, Presiden menekankan perlunya dihidupkan kembali program kesehatan untuk masyarakat yang sebelumnya telah ada di setiap daerah di seluruh Tanah Air. Presiden menyatakan, saat ini pemerintah akan mengubah paradigma dari berobat gratis menjadi sehat gratis. Dengan demikian, tegas SBY, di setiap daerah nantinya akan kembali didirikan puskesmas, posyandu, dan menghidupkan kembali pekan imunisasi nasional, serta pencegahan penyakit menular.

Mengingat sering terjadinya bencana di Tanah Air, Presiden SBY dalam 100 hari mendatang juga akan membentuk tim yang disebut *Standby Force*. Tim ini akan selalu siaga jika sewaktu-waktu terjadi musibah bencana. Menurut SBY, *Standby Force* ini dibentuk karena posisi geografis Indonesia yang rawan bencana seperti gempa bumi, tsunami, dan meletusnya gunung merapi.

Standby Force, ujar Presiden terdiri atas berbagai unsur seperti TNI, Polri, tim medis, serta satgas yang berkaitan dengan energi atau kelistrikan. "Mereka itu adalah petugas yang sudah siap untuk berjaga atau piket, utamanya bertugas melalui udara dan akan segera menuju lokasi musibah dengan menggunakan pesawat Hercules C-130 bilamana sewaktu-waktu terjadi bencana," tegasnya. Untuk memperlancar tugas

Analisis politik dan kebijakan publik Universitas Indonesia (UI) Andrinof A Chaniago menilai, 15 program yang dijadikan prioritas oleh SBY pada 100 hari pemerintahannya tersebut sudah cukup baik. Namun, Andrinof meragukan komposisi menteri yang berlatar belakang partai politik (parpol) bisa melaksanakannya tepat waktu. "Kalau rencananya sudah bagus. Tapi, apakah aplikasinya nanti di lapangan bisa wujudkan? Saya ragu, khususnya terhadap para menteri yang dari parpol, kalau pun bisa mewujudkan waktunya bisa lewat dari 100 hari," tegasnya. (rarasati syarieff/fahmi faisa)

Sabtu, 7 November 2009

Postur APBN 2010 Aman

JAKARTA (SI) – Program 100 hari Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II tidak akan mengubah postur APBN 2010. Program 100 hari akan diselesaikan dengan memakai APBN-P 2009 dan disambung ke APBN 2010. "Tidak perlu menunggu APBN-P 2010," ujar Menko Perekonomian Hatta Rajasa di Jakarta kemarin.

Namun, dia menambahkan, untuk program-program lanjutan di luar program 100 hari, tidak tertutup kemungkinan memakai APBN-P 2010. Program 100 hari ini tidak terlepas dari rencana pembangunan nasional.

Hatta menegaskan, dalam 100 hari penyumbang pertumbuhan ekonomi harus sudah selesai. Meskipun begitu, kata dia, tidak mungkin seluruh persoalan yang ada sekarang benar-benar selesai 100%. "Mana mungkin kita menyulap sesuatu dalam sehari," imbuhnya.

Dia melanjutkan, program 100 hari merupakan bagian dari keseluruhan program jangka menengah sampai 2014. Program 100 hari ini antara lain mencakup proyek pembangunan, cetak biru, perubahan undang-undang (UU), dan harmonisasi antara peraturan pusat dengan daerah.

Terkait perubahan UU, dia melanjutkan, pemerintah dalam 100 hari ini akan mengajukan draf revisi kepada DPR. "Perubahan aturan itu namanya menjebol sumbatan. Entah itu peraturan pemerin-

tah baru, revisi UU, dan sebagainya," kata dia.

Revisi peraturan ini, menurut Hatta, salah satunya menyangkut pembebasan lahan. Dia menjelaskan, pemerintah saat ini sedang menyiapkan Rancangan Undang-undang (RUU) Pembebasan Lahan. "Dalam 100 hari (draft) itu sudah selesai dan sudah akan masuk ke DPR," katanya.

Selama ini, aturan soal pembebasan lahan baru diatur dalam keputusan presiden (keppres) dan dianggap belum berjalan baik.

Hatta sebelumnya mengungkapkan, terdapat 19 program dengan 53 rencana aksi bidang ekonomi dalam program seratus hari. Program-program ini mencakup berbagai sektor, di antaranya energi, pangan, infrastruktur, dan industri.

Beberapa program yang akan

diselesaikan, tambah Hatta, adalah percepatan revisi Perpres No 67/2005 tentang Kerja Sama Pemerintah-Swasta di Sektor Infrastruktur. Terdapat beberapa hal yang masih dibahas, antara lain adalah kejelasan jaminan pemerintah.

Selain itu, ujarnya, revisi Keppres No 80/2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah juga akan dipercepat. Beberapa hal yang masih menggajal adalah mekanisme lelang.

Sementara itu, Deputi Menko Perekonomian Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bambang Susantono mengatakan, saat ini setidaknya ada tiga aturan pembebasan tanah, yakni Keppres No 36/2005, Keppres 65/2006, dan peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No 3/2007. "Ini semua sekarang akan diintegrasikan," ujarnya.

Bambang menjelaskan, peraturan yang ada sekarang kadang menghambat pembebasan lahan. Investor, menurut dia, selalu menginginkan dua hal terkait masalah lahan, yakni harga yang bisa diprediksi dan kecepatan pembebasan.

Revitalisasi Pabrik Gula dan Pupuk

Menteri Negara BUMN Mustafa Abubakar mengatakan, pemerintah akan mengeluarkan dana sekitar Rp1 triliun untuk menjalankan program revitalisasi pabrik gula. "Ini sudah lebih konkret dengan Depperin sudah sepakat bersama. Insya Allah dalam dua minggu ke depan sudah selesai untuk revitalisasi pabrik gula," kata dia di Jakarta kemarin.

Menurut dia, program tersebut menjadi salah satu dari 15 program prioritas KIB II. Mustafa men-jelas-

kan, dukungannya untuk revitalisasi gula akan ditempuh dengan subsidi bunga. "Supaya perusahaan domain ini punya keberanian untuk mendapat kredit komedi dari perbankan untuk merevisi pabriknya," jelas Mustafa.

Menteri Perindustrian MS Dayat mengakui, sebagai tinjauan lanjut dari program tersebut haknya akan menyusun kor revitalisasi pabrik gula. "Sed disiapkannya konsepnya," ujarnya.

Selain pabrik gula, pemerintah juga akan merevitalisasi pabrik pupuk. Mustafa mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Migas untuk pengadaan gas Permasalahannya tidak besar. Kita nanti akan fokus pada pengadaan gas sebagai bahan pabrik pupuk," kata dia.

(meutia
sandra ka

DISKUSI PANEL AHLI MEDIA GROUP

Dikepung Skandal Bank Century

KASUS aliran dana Bank Century yang mengguncang pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah mencapai titik klimaks keterdesakan. Rasa keadilan masyarakat perlu diobati melihat bagaimana ketimpangan kasus yang dialami masyarakat bawah yang secara tanggap terselesaikan, bahkan berlebihan, dengan kasus kelas kakap yang disebut mantan Wapres Jusuf Kalla sebagai perampokan uang negara sebesar Rp6,7 triliun, itu nyata-nyata terlihat.

Itulah benang merah diskusi panel ahli Media Group tentang analisis 100 hari program kerja pemerintahan SBY-Boediono, pekan ini. Diskusi meja bundar itu menghadirkan pakar ekonomi yang juga Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Firmanzah, pakar hukum Zainal Arifin Mochtar, budayawan Radhar Panca Dahana, dan periset Media Group Andi Agung Prihatna.

Menurut Radhar Panca Dahana, jika persoalan Century berlaut-laut tanpa muara kejelasan, masyarakat tidak akan lagi merasionalisasi kebijakan yang dibuat pemerintah, tapi cukup menuntut penegakan keadilan. Lama-

kenapa dana tersebut dibuka, bagaimana konsekuensinya, serta bagaimana hasil akhir pengucuran dana tersebut. Apa pun yang dihasilkan Pansus Angket Century akan memengaruhi investor untuk menentukan langkah investasi mereka, apakah akan menanamkan uangnya atau tidak.

Bagi pakar hukum Zainal Arifin Mochtar, penyelesaian kasus Century setidaknya harus memerhatikan dua ranah yang harus digarap, yakni politik dan hukum. Untuk ranah politik, penyelesaian kasus Century mengarah ke kebijakan pemerintah dan penyalurannya adalah melalui Pansus DPR. Untuk ranah kedua, yaitu hukum, yang dilihat adalah apakah ada pelanggaran hukum atau tidak, dan itu menjadi lahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyelidikinya.

Ia meminta kedua langkah tersebut berjalan dengan dimensi penyelesaian masing-masing. Jangan sampai proses politik meracuni atau menodai proses hukum, misalnya muncul rekomendasi dari proses politik dengan berkata bahwa proses hukum tidak boleh dilanjutkan. Pada saat yang sama,

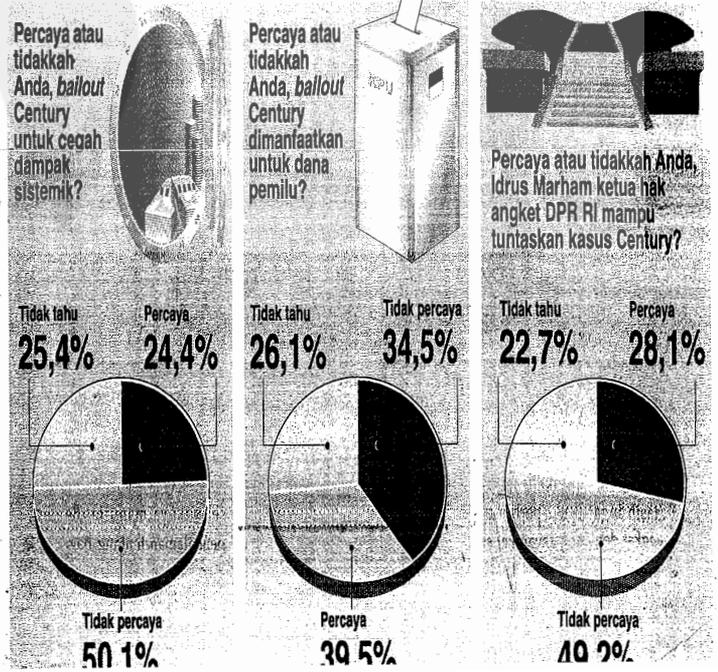
manzah. Ia berharap saat ini sebaiknya jangan ada yang mengadu kedua lembaga, yakni KPK dan DPR, karena memang lahan garapan penyelesaian mereka berbeda.

Meski demikian, semua panelis berpendapat senada bahwa ranah politik dalam penyelesaian kasus Century akan tersendat. Terpilihnya Idrus Marham sebagai Ketua Pansus Angket Century diindikasikan memiliki berbagai kepentingan. Belum lagi rekam jejak DPR yang begitu buruk di mata publik. Karena itu, berbagai kerisauan itu harus dijawab secara nyata oleh Pansus Angket.

Tiga dimensi

Menurut Zainal, ada tiga dimensi pelanggaran dalam penyelamatan Bank Century. Pertama, terkait pelanggaran perbankan. Penyelesaiannya, Robert Tantular yang telah berbuat kriminal dengan menilap uang Century harus dipenjara. Kedua, persoalan korupsi, yakni adanya penyalahgunaan wewenang, misalnya peraturan Bank Indonesia yang bisa berubah seperti menjentikkan jari saja. Itu terkait dengan rasio kecukupan modal Century yang hari ini 8%, lalu

Temuan Survei 100 Hari SBY- Boediono



Jumat, 11 Desember 2009

Program 100 Hari tidak Realistis

PROGRAM kerja 100 hari Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II dinilai tidak realistis. Program yang dicanangkan lebih banyak latak dan salah kaprah dalam merespons tuntutan publik serta tren yang berkembang di era reformasi.

"Di negara lain, program 100 hari itu akan dilihat dari kemajuan atau progresnya. Sementara di Indonesia, pemerintah mencanangkan adanya hasil akhir. Itu sangat tidak realistis," ungkap Muhammad Qodari, Direktur Eksekutif Indo Barometer dalam diskusi bertajuk Program 100 Hari SBY-Boediono yang diselenggarakan Perhimpunan Indonesia Muda (PIM) di Jakarta, kemarin.

Untuk bisa melihat hasil akhir secara utuh, ujar Qodari,



MINGLING

“
Program 100 hari itu dilihat dari kemajuan, bukan hasil akhir.”

M Qodari
Dir Eksekutif Indo Barometer

waktu satu tahun pun masih belum cukup. Apalagi halnya 100 hari dan dalam kondisi yang tidak normal seperti

sekarang. Artinya, dengan dinamika yang menyerpa tatanan politik dan hukum saat ini, sulit bagi pemerintah untuk berhasil dalam 100 hari.

Qodari menilai, SBY memiliki karakter sangat akomodasionis. "Ia tidak mau mengecewakan orang lain, termasuk kebijakan 100 hari," ujarnya.

Hasil media analisis Lingkar Survei Indonesia (LSI) menunjukkan bahwa isu antikorupsi mencapai rekor yang belum pernah terjadi dalam sejarah Indonesia. Lima koran nasional, yakni *Kompas*, *Koran Tempo*, *Media Indonesia*, *Republika*, dan *Sepuluh Indonesia*, memberitakan isu korupsi pada Hari Antikorupsi Internasional, 9 Desember, sebanyak 46 rubrik. Satu koran rata-rata menurunkan sembi-

lan rubrik soal korupsi.

"Isu korupsi menyatukan elemen masyarakat karena adanya akumulasi persepsi kolektif bahwa sedang terjadi masalah besar soal korupsi, yakni kasus Bank Century. Kasus ini harus selesai sebelum 100 hari," kata Direktur Eksekutif LSI Denny JA.

Sementara itu, pengamat ekonomi UI Firmanzah menyatakan rapor kinerja KIB II, khususnya di bidang ekonomi masih mendapat nilai kuning alias pas-pasan. Ekspektasi publik yang tinggi terhadap kabinet terbentuk pada realisasi yang belum nyata dirasakan masyarakat.

"Kinerja kabinet ini di mata publik nilainya kuning. Sekitar 5,5 kalau dinilai dengan angka skala 1-10." (* / P-6)

Jumat, 15 Januari 2010

Rencana Aksi Kementerian Perindustrian Mengecewakan

BERDASARKAN evaluasi kerja 100 hari Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II, kinerja Menteri Perindustrian Mohamad Suleman Hidayat adalah yang paling mengecewakan. MS Hidayat adalah salah satu menteri yang diajukan oleh Partai Golkar.

"Dari 129 rencana aksi, 2 mengecewakan, 19 sudah bisa dinyatakan berhasil sudah selesai," ujar Ketua Unit Kerja Presiden untuk Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto sesuai sidang kabinet di Jakarta, kemarin.

Ia memaparkan, dua rencana aksi dinilai mengecewakan. Salah satunya revitalisasi industri yang masuk dalam program Kementerian Perindustrian. "Yang dua itu, pertama revitalisasi industri di Departemen Perindustrian. Satu lagi saya lupa," ujarnya.(Rin/P-1)

Jumat, 15 Januari 2010

Rapor Biru Kementerian Energi

Kinerja awal yang baik itu pada akhirnya harus mendorong terjadinya kemandirian energi nasional.

Jajang Sumantri

KEMENTERIAN Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mendapat rapor biru atau predikat terpuji (*excellent*) dalam penyelesaian program kerja 100 hari.

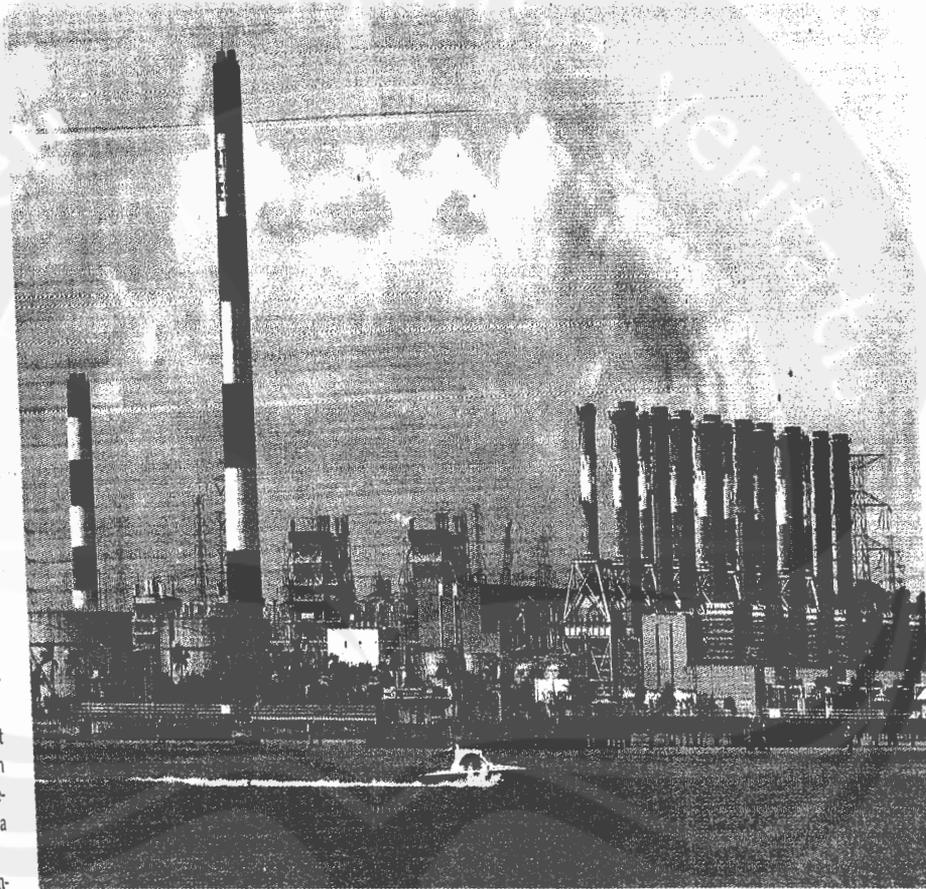
"Memasuki hari ke-75, rapor Kementerian ESDM semuanya biru atau *excellent*. Karenanya, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada tim 100 hari dari Kementerian ESDM yang telah bekerja semaksimal mungkin," kata Menteri Darwin.

Kementerian ESDM mendapat predikat terpuji menurut penilaian juri setelah tim perumus menyelesaikan usulan-usulan program kerja sektor ESDM.

Ada empat program dengan sembilan rencana aksi yang menjadi tanggung jawab Kementerian ESDM.

Secara garis besar status kemajuan dari sembilan aksi hingga hari ke-75 adalah seperti yang terpapar berikut ini. Program jaminan pasokan energi mencapai 80%, perencanaan pasokan gas untuk domestik sudah 92%, penerbitan peraturan pemerintah (PP) dan peraturan menteri (permen) ESDM tentang pasokan batu bara dalam negeri sudah 95%, perpres proyek percepatan Proyek Listrik 10 ribu Mw tahap II sudah 100%.

Dalam program sistem harga energi yang kompetitif dengan rencana aksi, penerbitan perpres tentang harga patokan pembelian listrik



ANTARAFOURI GESANG SHOLEH

PLTU GRESIK: Sebuah speedboat melintas di dekat pembangkit listrik tenaga uap Gresik, Jawa Timur, beberapa waktu lalu. Kementerian ESDM mencatat program jaminan pasokan energi mencapai 80%, perencanaan pasokan gas untuk domestik sudah 92%, penerbitan peraturan pemerintah (PP) dan peraturan menteri (Permen) ESDM, perpres proyek percepatan proyek listrik 10 ribu MW tahap II sudah selesai 100%.

panas bumi sudah selesai 100%. Program ketahanan energi yang meliputi perumusan penyelesaian permasalahan perjanjian pembangunan pembangkit PLN sudah 90%.

Untuk penuntasan reorganisasi PLN dan Pertamina, Kementerian ESDM bekerja sama dengan Kementerian BUMN sebagai penanggung jawab.

Kementerian ESDM juga telah mendorong pemanfaatan gas metana batu bara (*coal bed methane*) melalui

penyusunan perangkat peraturan sehingga bisa menghasilkan energi 2011. Di sisi lain program pengalihan sistem subsidi BBM, pupuk, dan listrik menjadi tanggung jawab bersama dengan Menko Perekonomian.

Berani tinjau kontrak

Status terpuji atau rapor biru dalam penilaian program kerja 100 hari Kementerian ESDM harus mendorong perbaikan signifikan di sektor energi.

Menurut pengamat energi, Effendi Siradjudin tujuan akhir dari seluruh program yang akan direalisasikan selama lima tahun ke depan tersebut harus menuju terciptanya kemandirian energi nasional baik dari sisi pasokan maupun permintaan.

"Sebagus apa pun program kerja itu, Menteri ESDM harus bisa merealisasikannya dalam skenario besar kebijakan yang mengarah pada kemandirian energi dari sisi *supply and demand*," ujar Effendi kepada *Media*

Indonesia, kemarin.

la mencatat beberapa hal yang masih harus dibenahi pemerintah dalam sektor energi. Misalnya pada sisi suplai energi. Effendi mengkritik besarnya produksi migas oleh kontraktor asing. Karena itu, tidak mengherankan apabila migas yang diproduksi dari bumi Indonesia selalu diarahkan ke pasar ekspor. "Karena yang menjadi produsen terbesar adalah kontraktor asing, hampir setengah dari angka *lifting*

ini berorientasi ekspor. Untuk memenuhi konsumsi 1,4 juta bph (barrel per hari), kita tetap harus impor hampir 1 juta bph. Hal yang sama terjadi untuk gas."

Padahal seiring dengan penurunan kemampuan produksi migas, perbenahan di sektor suplai ini akan menentukan keamanan energi dan beban biaya subsidi energi.

Pemerintah, lanjutnya, juga harus berani untuk merevisi kebijakan

“

Menteri ESDM harus bisa merealisasikan skenario besar kebijakan yang mengarah pada kemandirian energi."

Effendi Siradjudin
Pengamat Energi

yang cenderung menganakemaskan kontraktor sektor migas dan pertambangan asing.

Selain itu, juga harus meninjau perpanjangan kontrak migas dan kontraktor asing yang menguasai blok besar, seperti blok gas Mahakam Kalimantan yang dikuasai Total Indonesia dan blok minyak di Riau yang dikuasai Chevron. "Kontrak tidak usah diperpanjang dan serahkan saja kepada Pertamina atau konsorsium perusahaan nasional," tukas Effendi.

Dengan peralihan kontrak ini, imbuh Effendi, produksi nasional diharapkan bisa melonjak terutama apabila orientasi domestik dilakukan untuk produksi migas dari blok-blok tersebut. (E-3)

jajang@mediaindonesia.com

Kamis, 21 Januari 2010

Rapor Menkeu dan Menperin Dinilai masih Merah

KETUA Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangusubroto menyatakan Kementerian Keuangan dan Kementerian Perindustrian memperoleh rapor merah karena ada dua program yang belum berjalan pada evaluasi hari ke-75.

"Mudah-mudahan program mereka akan tercapai pada hari ke-100. Satu, revitalisasi pabrik gula dengan penanggung jawab Kementerian Perindustrian. Satu lagi terbentuknya PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI), yang menjadi tanggung jawab

Kementerian Keuangan," kata Kuntoro di Istana Wakil Presiden, Jakarta, kemarin. Menurut Kuntoro, tidak terbentuknya PT SMI karena persyaratan Bank Pembangunan Asia (ADB) yang sulit untuk bisa diterima. Menurutnya, hal ini masih perlu dinegosiasikan sehingga diharapkan pada hari ke-100 bisa dicapai. PT SMI dibuat untuk mendukung pembangunan-pembangunan infrastruktur, misalnya jalan tol.

Belum tercapainya revitalisasi pabrik gula, karena hal itu memerlukan pertemuan-pertemuan untuk menyiapkan



MEMISAH

Sri Mulyani Indrawati

Menteri Keuangan

cetak biru. Saat ditanya apakah akan ada sanksi untuk dua kementerian yang belum menyelesaikan program itu, menurut Kuntoro, hal itu tidak apa-apa. Ketika ditanya apakah Menkeu



M/FOHAM FUJANTO

MS Hidayat

Menteri Perindustrian

mendapat rapor merah karena ada kasus Bank Century, Kuntoro membantah.

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPi) Kementerian Perindustrian

Dedi Mulyadi mengatakan penilaian itu mengecewakan karena didasarkan atas aktivitas dan bukan substansi.

Menteri Perindustrian MS Hidayat dalam rapat gabungan bersama empat menteri di DPR, kemarin, mengemukakan bahwa salah satu indeks *performance* kinerjanya yang dinilai Presiden adalah revitalisasi industri. "Yang diminta Presiden adalah agar industri diarahkan menjadi industri *processing* dalam waktu lima tahun ke depan. Ada insentif dan disinsentif yang disiapkan bersama Menkeu," ujarnya. (Tup/Zhi/X-9)

Kamis, 28 Januari 2010

Industri Pertahanan Siap Dibangun

Revitalisasi industri pertahanan menjadi salah satu program prioritas dalam Kabinet Indonesia Bersatu II.

Dinny Mutiah

Menteri Pertahanan Purnomo Yudiantoro pun menyatakan saat ini adalah era kebangkitan bagi industri pertahanan.

"End product dari revitalisasi industri pertahanan ini adalah perpres dan keppres. Perpres isinya bagaimana industri pertahanan bisa berkembang dan kepresnya isinya KKIP (Komite Kebijakan Industri Pertahanan)," ujar Purnomo kepada *Media Indonesia* di Jakarta, pekan lalu.

Dia menjelaskan, KKIP bertugas merumuskan langkah langkah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari industri pertahanan. Termasuk untuk memenuhi rencana kekuatan pokok pertahanan pada akhir renstra ketiga pada 2024. Untuk mencapai ke tahapan itu, pemerintah akan membaginya per lima tahun.

Dia memaparkan, pemerintah akan mengedepankan pemenuhan terhadap kebutuhan operasi nirmiliter dan Badan Usaha Milik Negara Industri Pertahanan (BUMNIP) mulai mampu untuk mengembangkannya. Contohnya adalah PT PAL yang sudah mampu membuat *landing platform dock* (LPD) berencana membuat kapal perusak kawal rudal yang ukurannya mencapai 105 meter, PT Dirgantara Indonesia (DI) dengan rencana pembuatan heli serbu Bell 412 dan pengembangan CN 235 untuk angkut dan patroli, dan PT Pindad yang mengembangkan kendaraan tempur panser.

"Prinsip utamanya kalau mau damai kita harus siap perang.

Kalau kekuatan kita kecil, negara lain akan *lecehin*," cetus Purnomo.

Untuk mendukung program pemerintah itu, akan dilakukan penyehatan BUMNIP yang terdiri dari setidaknya enam perusahaan, yakni PT Pindad, PT DI, PT Krakatau Steel, PT Dahana, PT Len Industri, dan PT PAL. Salah satu cara yang diambil adalah dengan menyuntikkan penyertaan modal negara (PMN) sehingga bisa melakukan pinjaman. Pemerintah juga ikut terlibat melalui order yang kontinu dan pengusahaan pendanaan melalui obligasi atau pinjaman dalam negeri, melalui tiga bank pemerintah yang sudah siap untuk berpartisipasi tanpa jamtuan.

"Mandiri, BNI, dan BRI sanggup gantikan peranan KE (kredit ekspor) dari luar negeri sehingga bisa lebih murah biaya pinjamannya," tukasnya.

Menteri Negara BUMN Mustafa Abubakar mengakui kebangkitan industri pertahanan ditandai pengalokasian khusus sejumlah anggaran dari pos pertahanan untuk pembelian alutsista dalam negeri.

"Namun, jangan kemudian perusahaan melaksanakan *business as usual*," kata Mustafa.

Dia menilai BUMNIP telah memiliki modal awal untuk



Indonesia	
- Tentara aktif	: 316.000
- Tentara cadangan	: 680.000
- PDB* (US\$)	: 484 miliar
- Anggaran militer (US\$)	: 3,12 miliar
- Armada udara	: 205
- Armada laut	: 30
- Tank	: 492



Thailand	
- Tentara aktif	: 306.600
- Tentara cadangan	: 358.700
- PDB* (US\$)	: 547 miliar
- Anggaran militer (US\$)	: 5 miliar
- Armada udara	: 474
- Armada laut	: 20
- Tank	: 333



Vietnam	
- Tentara aktif	: 455.000
- Tentara cadangan	: 5 juta
- PDB* (US\$)	: 241,8 miliar
- Anggaran militer (US\$)	: 1,46 miliar
- Armada udara	: 306
- Armada laut	: 13
- Tank	: 1.315



Kamboja	
- Tentara aktif	: 2.185.000
- Tentara cadangan	: 1,5 juta
- PDB*(US\$)	: 28,01 miliar
- Anggaran militer (US\$)	: 1,97 miliar
- Armada udara	: 42
- Armada laut	: -
- Tank	: 150



Myanmar	
- Tentara aktif	: 406.000
- Tentara cadangan	: 72.000
- PDB* (US\$)	: 67,96 miliar
- Anggaran militer (US\$)	: 7 miliar
- Armada udara	: 191
- Armada laut	: 3
- Tank	: 150



Malaysia	
- Tentara aktif	: 109.900
- Tentara cadangan	: 76.200
- PDB* (US\$)	: 384,38 miliar
- Anggaran militer (US\$)	: 3,94 miliar
- Armada udara	: 222
- Armada laut	: 54
- Tank	: 74



Singapura	
- Tentara aktif	: 72.500
- Tentara cadangan	: 356.500
- PDB* (US\$)	: 239,14 miliar
- Anggaran militer (US\$)	: 7,34 miliar
- Armada udara	: 410*
- Armada laut	: 40
- Tank	: 162



Filipina	
- Tentara aktif	: 108.000
- Tentara cadangan	: 171.500
- PDB* (US\$)	: 317,96 miliar
- Anggaran militer (US\$)	: 1,08 miliar
- Armada udara	: 221
- Armada laut	: 38
- Tank	: 490



Brunei	
- Tentara aktif	: 7.000
- Tentara cadangan	: 3.750
- PDB*(US\$)	: 19,7 miliar
- Anggaran militer (US\$)	: 911 juta (2006)
- Armada udara	: 33
- Armada laut	: 41
- Tank	: 42



Laos	
- Tentara aktif	: 29.100
- Tentara cadangan	: 100.000
- PDB* (US\$)	: 13,3 miliar (2008)
- Anggaran militer (US\$)	: sekitar 82,5 juta
- Armada udara	: 12
- Armada laut	: -
- Tank	: 125



Timor Leste	
- Tentara aktif	: 1.286
- Tentara cadangan	: 1.500
- PDB* (US\$)	: 2,52 miliar
- Anggaran militer (US\$)	: 20,1 juta (2008)
- Armada udara	: -
- Armada laut	: 2
- Tank	: tidak diketahui

Kekuatan Militer ASEAN

*Estimasi 2008

bergerak, yaitu fasilitas pabrik yang memadai, *set up* pabrik yang bagus, dan sumber daya manusia yang baik meski kebanyakan bekerja di luar negeri. Tantangan hanyalah masalah pasar dan pembiayaan, tapi itu sudah dicari solusinya dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Menteri

Pertahanan, Meneg BUMN, TNI, dan Polri untuk mengedepankan penggunaan alutsista dalam negeri. Pembiayaan pun terpecahkan dengan kesediaan BNI, Mandiri, dan BRI untuk memberikan kredit kepada BUMNIP.

Mustafa mengakui pihaknya kini sedang menganalisis anatomi

setiap BUMNIP untuk memetakan kelebihan dan kekurangannya. Setiap BUMNIP berkewajiban melakukan evaluasi atas rencana kerja dan anggaran perusahaan (RKAP) dan diselesaikan pada akhir Januari 2010.

"Kalau memang misi BUMN itu profit, ya kita minta tingkatan

profit. Kalau misinya harus memenuhi kebutuhan dalam negeri untuk alutsista dan bisa menampilkan kualitas yang diharapkan tapi tidak berorientasi profit, kita beri kesempatan," pungkas Mustafa. (S-7)

dinny@mediaindonesia.com

Kamis, 28 Januari 2010

Menpora Harus Seriusi Cabang Prioritas

Menpora Andi Mallarangeng diharapkan meneruskan program kerja yang sebelumnya sudah baik.

Eko Suprihatno

SEJUMLAH atlet nasional tanpa ragu mengapresiasi program 100 hari kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga. Mereka meminta pemerintah bersungguh-sungguh merealisasikan program yang sebenarnya sudah baik.

"Hasil di SEA Games XXV/2009, misalnya, sangat baik. Menpora juga dapat merealisasikan pemberian bonus dan program 100 rumah kepada atlet," ujar penembak nasional Erlinawati di Jakarta, kemarin.

Peraih emas SEAG 2009 itu berharap pemerintah tetap memprioritaskan perhatian bukan hanya saat seorang atlet masih aktif, melainkan saat menjelang pensiun.

Hal serupa juga diakui pemanah nasional I Gusti Nyoman Puhito. "Setiap atlet yang berprestasi telah mendapatkan kewajiban masing-masing, yaitu bonus," katanya. "Keberadaan bonus akan memacu peningkatan prestasi tiap atlet sekaligus untuk serius berlatih."

Kalau dua atlet tersebut memuji kinerja kementerian, Sekjen PB PBSI Yacob Rusdianto menuntut Menpora memenuhi janjinya membantu pelatnas Cipayung dalam pengadaan kolam renang.

"Menpora telah melakukan kunjungan ke Cipayung untuk melihat segala fasilitas yang ada. Beliau berjanji membantu PBSI dalam hal ketersediaan kolam renang," tukas Yacob.

Dalam bahasa yang berbeda, Ketua Program Atlet Andalan (PAL) Achmad Sutjipto menilai Menpora Andi Mallarangeng sudah mampu menghadirkan suasana kondusif di perolahragaan Indonesia. "Menpora mampu mendinginkan suasana dan pertentangan yang selama ini menjadi momok bagi



KEPALAN EMAS: Atlet angkat besi Jati Setiadi mengekspresikan kegembiraannya setelah meraih emas SEA Games XXV di Vientiane, Laos, Desember lalu. Jati mampu mengangkat beban 126 kg pada angkatan snatch.

dunia olahraga," ujarnya.

Pertentangan yang dimaksud adalah kurangnya koordinasi antarinduk cabang olahraga dengan para pengurus yang berkedudukan lebih tinggi seperti KON/KOI. Selain itu, ia menilai pengembangan olahraga nasional secara modern lewat *light performance programme* juga mulai digalakkan.

Belum maksimal

Di sisi lain, Komite Olimpiade Indonesia (KOI) terangnya terangkan mengaku belum memahami program 100 hari kementerian. "No comment" dulah karena belum merasakan program yang dilakukan," papar Ketua Divisi Sport Development KOI Djoko Pramono. Hal senada juga dikatakan

Sekjen PB PABBSI Alamsyah Wijaya. Kendati ia mengaku berterima kasih karena menjadikan angkat besi sebagai cabang unggulan, pihaknya menilai pemerintah belum memberikan pelayanan optimal bagi PABBSI sebagai cabang prioritas.

"Kalau boleh dikatakan, cabang prioritas ini hanya tip

service, belum ada perlakuan yang sesungguhnya dari pemerintah," kata Alamsyah.

Ia juga menambahkan, pemerintah belum memberikan dana yang dibutuhkan. "Padahal PABBSI butuh dana yang tidak besar jika dibandingkan dengan olahraga lain, tapi sulit sekali kami mendapatkannya."

Alamsyah berharap ke depannya pemerintah lebih peka melayani pelaku olahraga. Ia menuturkan sering dikecewakan kendati PABBSI yakin bisa menyumbangkan emas untuk Indonesia dalam multiajang.

Hal senada juga dikatakan Sekjen PB PRSI Toni P Sastriharja yang berharap pemerintah memberi prioritas untuk olahraga terukur. Olahraga terukur lebih mudah mendapatkan medali.

Toni menambahkan, pemerintah sebaiknya memperbaiki sistem yang telah ada. "Periodisasi, evaluasi, dan kontrol yang jelas yang belum dilakukan pemerintah," ungkap Toni. Ia melihat selama ini sistem yang ada belum meningkatkan performa olahraga Indonesia.

Cabang olahraga yang masih belum merasakan langsung program 100 hari Menpora adalah PSSI. Sekjen PSSI Nugraha Besoso mengatakan, "Kalau secara langsung, PSSI belum merasakannya. Tapi bukan berarti program kerja 100 hari Menpora tidak berjalan. Buktinya, Menpora Andi Mallarangeng berhasil membawa Indonesia menempati peringkat tiga SEA Games Laos meski itu merupakan program yang dicanangkan Menpora Adhyaksa Dault," katanya.

"Kami berharap untuk ke depannya Menpora bisa menyediakan infrastruktur seperti stadion yang berkualitas di seluruh wilayah daerah tingkat II," cetusnya.

(Iwa/Nav/*/*/*R-5)

suprihatno@
mediaindonesia.com

Seratus Hari ESDM bukan cuma Pemanis

Menteri ESDM yakin seluruh program 100 harinya bisa direalisasikan dalam bentuk kebijakan nyata.

Jajang Sumantri

SERATUS hari pertama masa kerja Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid II, genap di hari ini. Mata rakyat tengah menuju dan menagih janji presiden serta para pembantunya yang terangkum dalam program 100 hari.

Rakyat ingin tahu, apakah program hanya sebatas janji manis di atas kertas, atau memang terealisasi sesuai target. Utamanya, pada sektor-sektor yang menyangkut hajat hidup orang banyak, seperti energi. Soal-soal seperti jaminan pasokan bahan bakar minyak (BBM), gas, hingga ketersediaan listrik, adalah isu sentral di bidang energi. Demikian pula, masalah harga minyak yang kerap berfluktuasi, hingga pola

subsidi yang akan diterapkan.

Namun, Darwin Saleh selaku Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yakin, seluruh program 100 harinya bisa direalisasikan dalam bentuk kebijakan nyata. "Kita masih terus menyempurnakan beberapa program hingga sesuai dengan target yang dipersyaratkan. Alhamdulillah, itu semua akan dapat tercapai," ujarnya saat ditemui sesuai rapat di kantor Menko Perekonomian, Jakarta, Selasa (26/1).

Menko Perekonomian Hatta Rajasa juga menyatakan optimismenya. Program 100 hari bidang ekonomi pada pemerintahan KIB II tuntas, dan tepat waktu. "Semuanya akan 100% selesai, karena produk berupa keppres, perpres atau inpres sudah *final draft*," kata Hatta.

Dalam catatan *Media Indonesia*, di sektor energi, setidaknya ada empat program, dengan sembilan rencana aksi, yang menjadi tanggung jawab Kementerian ESDM.

Yakni, soal jaminan pasokan energi, perencanaan pasokan gas untuk domestik, penerbitan peraturan pemerintah (PP) dan peraturan menteri (permen) ESDM tentang pasokan batu bara, serta Peraturan Presiden (Perpres) proyek percepatan Proyek Listrik 10 ribu Mw tahap II.

Untuk rencana aksi, dalam perbincangannya dengan *Media Indonesia*, Darwin merujuk soal-soal pasokan gas,

roadmap rasionalisasi atau pengurangan subsidi BBM, hingga pengembangan energi baru terbarukan (EBT) sebagai sorotan.

Subsidi langsung

Menurut Darwin, perihal gas, keamanan pasokan utamanya ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan listrik dan industri.

Menurut dia, saat ini, pemetaan pasokan gas bumi untuk keperluan domestik sudah diselesaikan Kementerian ESDM. Pemetaan gas meliputi penyediaan penyusunan neraca gas yang menentukan setiap alokasi pasokan, mana yang untuk pembangkit listrik, dan mana untuk industri pupuk.

Selain neraca gas, pihaknya juga sudah merampungkan rencana induk jaringan transmisi distribusi gas bumi nasional, beserta rancangan permen ESDM tentang penetapan alokasi gas bumi. "Ini akan kita *update* terus dari waktu ke waktu," imbuhnya.

Menyoal perumusan *roadmap* pengurangan subsidi, akan menjadi bagian dari alokasi subsidi BBM, listrik, dan pupuk, yang berada di bawah tanggung jawab Menko Perekonomian.

Melalui *roadmap* ini, lanjut Darwin, pemerintah akan memetakan skema subsidi ke depan, untuk semakin mengarah ke subsidi langsung. Jadi, bukan pada harga seperti yang saat ini berlaku. "Saya kira ini akan lebih baik dan lebih realistik di dalam kalkulasi keekonomian dan sebagainya."

Terkait penga-

manan pasokan energi domestik, fakta bahwa energi fosil semakin terbatas, mendesak pemerintah untuk tak menunda-nunda lagi pengembangan energi terbarukan.

Dalam kaitan itu, pemerintah menerbitkan Perpres No 4/2010. Perpres itu mengizinkan PT PLN untuk melakukan percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik dengan menggunakan EBT, batu bara, dan gas.

Sementara untuk insentif penggunaan EBT, Darwin menetapkan Peraturan Menteri (Permen) ESDM No 32/2009 tentang harga patokan pembelian tenaga listrik oleh PLN dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi.

Berdasarkan catatan, melalui Permen ESDM ini, harga patokan tertinggi (HPT) harga jual listrik dari energi geotermal ditetapkan US\$0,97. Harga itu didapat berdasarkan kesepakatan antara Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi (LPE) Kementerian ESDM dan Asosiasi Panas Bumi Indonesia.

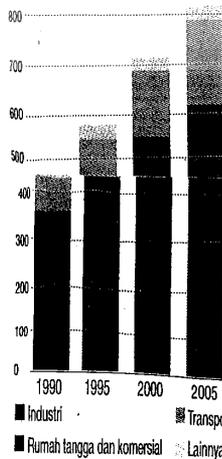
Kementerian ESDM juga telah menerbitkan petunjuk pelaksanaan gas melana batu bara (CBM). Juklak itu ber-

bentuk buku pedoman pengusaha dan penyelesaian draf kontrak tentang penyesuaian syarat dan kondisi.

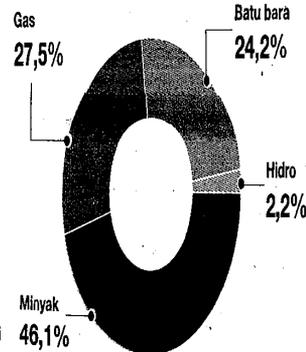
Kini, status terpuji untuk program 100 hari sudah ada di tangan Kementerian ESDM. Program itu tentunya harus direalisasikan selama lima tahun ke depan. Rakyat akan menunggu hasil nyata program tersebut demi terciptanya energi nasional. (* / E-1)

jajang@mediaindonesia.com

Permintaan Energi per Sektor (juta boe*)



Permintaan Energi Primer 2008



Prediksi Permintaan Energi Primer (mtoe**)

	2010	2020	2030
Batu bara	39,4	55,6	68,3
Minyak	79,5	103,2	138,2
Gas	58,1	71,7	86,7
Hidro	0,9	1,3	1,8
Energi baru dan terbarukan	52,9	57,1	65,2
Total	231	289,5	368,6

*boe = barrel oil equivalent

**mtoe = million tons of oil equivalent

Kamis, 28 Januari 2010

Pertamina Dukung Kebijakan Energi Nasional

SELAIN menyumbang hampir 40% pendapatan nasional, sektor energi menjadi vital karena menyangkut kebutuhan hidup orang banyak.

Tak heran jika dalam program 100 hari pemerintah, program Kementerian Energi dan Sumber daya Mineral (ESDM) mendapat sorotan. Demikian pula dengan peran sentral yang harus dijalankan perusahaan migas nasional, PT Pertamina (persero).

Sebagai salah satu tulang punggung kebijakan energi nasional, kinerja maksimal dari korporasi itu ikut menentukan

kesuksesan program 100 hari Kementerian ESDM.

Untuk itu, Pertamina juga menyiapkan program 100 hari. "Kami berkomitmen mendukung pemerintah memperbaiki kebijakan energi nasional dalam jangka 100 hari, setahun, dan lima tahun ke depan. Kita akan mewujudkannya dengan kerja keras," ujar Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan, beberapa waktu lalu.

Inti dari program 100 hari BUMN ini mulai dari penetapan strategi produksi dan alokasi gas alam, perbaikan infrastruktur hingga memaksi-

malkan potensi energi *alternative non fosil*.

Namun, yang menjadi fokus utama adalah keamanan pasokan gas untuk industri dan masyarakat.

Deputi Direktur Perencanaan dan Evaluasi Direktorat Hulu Pertamina Gunung Sardjono menjelaskan, untuk memenuhi kebutuhan gas di dalam negeri, Pertamina harus memperhatikan faktor keekonomian sebagai korporasi. Di sisi lain, pihaknya juga mempertimbangkan investasi infrastruktur gas.

"Kami akan bahu membahu

“

Kami berkomitmen mendukung pemerintah memperbaiki kebijakan energi nasional.”

Karen Agustiawan
Direktur Utama Pertamina

dengan pemerintah untuk terus membangun infrastruktur produksi dan distribusi gas ini,” ujar Gunung.

Pada 2009, rata-rata produksi gas alam Pertamina mencapai 1,3 miliar kaki kubik per hari (*billion cubic feet per day/BCFD*) atau naik 8% dibanding produksi 2008.

Untuk 2010, Pertamina menargetkan peningkatan produksi sekitar 300 juta metrik standar kaki kubik per hari (*million metric standard cubic feet per day/MMSCFD*). Sehingga diharapkan tahun ini produksi gas alam Pertamina akan mendapat 1,4

BCFD. Dari jumlah itu, 1,096 BCFD berasal dari PT Pertamina Eksplorasi dan Produksi (PEP). Sisanya, dari Pertamina Hulu Energi (PHP).

Selain mengamankan pasokan gas, program 100 hari Pertamina juga membantu pencapaian produksi minyak nasional yang dicanangkan 965 ribu barel per hari (bph).

Pertamina menargetkan produksi hingga 195 ribu bph dari realisasi 2009 sebesar 186,4 ribu bph. Diharapkan, PEP bisa menaikkan produksi dari 127 ribu bph ke 131 ribu bph. Lapangan Offshore North

West Java yang diakuisisi dari Beyond Petroleum dan blok SK 305 Malaysia diprediksi akan berkontribusi 55,9 ribu bph. Pun, Blok Cepu yang diharapkan bisa meningkatkan produksi minyak Pertamina dari 1.500 bph ke 9 ribu bph.

Terkait geotermal, guna mendukung proyek pembangkit listrik 10 ribu MW tahap II, Pertamina meningkatkan dana pengembangan geotermal.

"Untuk 2010, kita tingkatkan investasi geotermal dari Rp1,5 triliun di 2009 menjadi Rp2,5 triliun," ujar Gunung. (Jaz/E-6)

Kamis, 28 Januari 2010

Genjot Produksi untuk Jamin Keamanan Pasokan Energi

RAPOR Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) patut diapresiasi karena mendapatkan status *excellent* dalam program 100 hari mereka.

Namun, masih banyak pekerjaan rumah yang menanti di tahun ini. Salah satunya, mengawal keamanan pasokan energi melalui optimalisasi produksi minyak.

Demikian diungkapkan Anggota Komisi VII DPR Sutan Bhatoegana dan pengamat migas Effendi Siradjudin, di Jakarta, kemarin.

Sutan mengatakan, tahun ini pemerintah menaikkan target produksi minyak bumi untuk mengimbangi kenaikan konsumsi energi domestik. Target *lifting* minyak dinaikkan dari 960 ribu barel per hari (bph) menjadi 965 ribu bph.

Menurutnya, diperlukan perbaikan pengaturan dan pengawasan oleh pemerintah

bersama Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (BP Migas) untuk mencapai target *lifting* itu. Tahun lalu, produksi minyak hanya tercapai 949 ribu bph dari target di APBN 2009 sebesar 960 ribu bph.

Salah satu penyebab tidak tercapainya target *lifting* tahun lalu adalah ketidaksiapan infrastruktur penunjang, semisal kilang dan infrastruktur distribusi.

Belajar dari situ, dia mendukung optimalisasi produksi via pembangunan dan revitalisasi kilang minyak, seperti ditempuh PT Pertamina. Untuk mendongkrak suplai minyak, BUMN itu merevitalisasi kilang dan menambah tangki timbun baru.

Demi menjaga keamanan pasokan energi ke depan, pemerintah juga diminta memulainya upaya nasionalisasi seluruh aset migas. Langkah itu diperlukan karena negara-negara



PRODUKSI MINYAK: Suasana di blok Offshore North West Java (ONWJ) lepas pantai Jawa Barat, beberapa waktu lalu. Tahun ini pemerintah menaikkan target produksi minyak bumi untuk mengimbangi kenaikan konsumsi energi domestik. Target *lifting* minyak dinaikkan menjadi 965 ribu barel per hari.

produsen minyak lain juga mengambil kebijakan serupa.

Menurut Effendi, dari total produksi minyak dunia sebesar 85 juta bph, 87% produksinya berasal dari perusahaan minyak nasional (*national oil company*/NOC) di setiap negara. Di antaranya Saudi Arabian Oil Company, Petronas, dan Petrochina. "Sayangnya, porsi produksi Pertamina sebagai NOC di Indonesia hanya 12%. Sisanya, masih dikuasai swasta, baik nasional, multinasional, hingga asing," kata Effendi.

Ketimpangan penguasaan NOC ini bisa menggerogoti kemandirian energi nasional. Tahun lalu, dari konsumsi BBM sebesar 1,4 juta bph, produksi hanya terpenuhi 949 ribu bph. Oleh para kontraktor kontrak kerja sama, hampir separuhnya justru diekspor.

Adapun, jumlah produksi dari ladang domestik yang dinikmati konsumen dalam

negeri hanya 450 ribu bph. "Kita harus mengimpor sekitar 1 juta bph per tahun untuk menutupi defisit pasokan."

Guna menekan impor, pemerintah diimbau merevisi UU No 22/2001 tentang Migas. Pemerintah dituntut berani memberitahukan ke perusahaan migas asing bahwa kontrak mereka akan dinegosiasikan kembali dengan bagi hasil yang lebih besar bagi negara.

Dengan revisi, kontrak blok produksi asing yang habis tidak perlu diperpanjang dan langsung diserahkan kepada Pertamina selaku NOC RI. Semisal, kontrak Total EP di Blok Mahakam yang habis pada 2017 dan Chevron East Kalimantan di Blok East Kalimantan (2017).

"Nantiya Pertamina dapat menggandeng perusahaan-perusahaan swasta nasional untuk membentuk konsorsium," ujarnya. (*/E-6)

Kamis, 28 Januari 2010

Pembenahan Layanan Kesehatan Terus Dilakukan

TANPA terasa, program 100 hari Kementerian Kesehatan telah memasuki tahap evaluasi. Sejatinya memang perlu banyak pembenahan dalam bidang penanganan kesehatan di Indonesia.

Dengan alasan terbatasnya waktu yang tersedia, dalam pakta integritas yang ditandatangani Menteri Kesehatan Endang Rahyu Sedyaningih, Kementerian Kesehatan hanya dibebankan empat tugas prioritas yang diharap bisa dirampungkan kurang dari tiga bulan.

Keempat masalah prioritas itu adalah, peningkatan pembiayaan kesehatan untuk memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakat, peningkatan kesehatan masyarakat untuk mempercepat pencapaian target MDGs, pengendalian penyakit dan penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana, serta yang terakhir peningkatan ketersediaan, pemerataan, dan kualitas tenaga kesehatan terutama di daerah terpencil dan perbatasan.

Lalu sampai evaluasi H-75, bagaimana capaian yang telah didapat Kementerian Kesehatan? Secara mengejutkan Endang mengklaim, sampai 12 Januari 2010 (H-75), instansi yang dia pimpin telah mencapai 85,2% dari target yang dibebankan.

Tolak ukur keberhasilan peningkatan pembiayaan jaminan kesehatan masyarakat dapat dilihat dari upaya kementerian yang terus memperluas akses bagi peserta.

Dengan ditekenya nota kesepahaman pada 17 Desember 2009 dengan Kemendagri, Kemensos, dan Kemenkum dan HAM, maka penghuni lapas, penghuni panti, gelandangan dan pengemis serta korban bencana alam yang miskin praktis telah dapat dijamin masalah kesehatan mereka dengan program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas).

Lantaran kini seluruh rumah sakit sudah dapat melakukan klaim dengan sistem standarisasi tarif Indonesia Diagnostic Related Groups (INA-DRG's), alhasil kata Endang, program Jamkesmas bakal berjalan semakin mantap.

Berkenaan dengan peningkatan kesehatan masyarakat untuk mempercepat pencapaian MDGs, Kementerian Kesehatan telah mengambil strategi pemantapan fungsi posyandu, bidan di desa, dan program Keluarga Berencana (KB). Target pendataan kurang lebih 3 juta ibu hamil di 60 ribu desa diklaim Menkes sudah tercapai.

Sementara itu, Endang menjelaskan, telah diterbitkan Permenkes insentif tenaga kesehatan yang berkarya di wilayah terpencil, dan pemenuhan tenaga strategis sebanyak 131 orang di 35 puskesmas. (Tlc/S-4)

Kamis, 28 Januari 2010

Menanti Sinergi Pendidikan dan Dunia Kerja

Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh mencanangkan 8 program kerja dalam 100 hari. Salah satunya roadmap sinergi lembaga pendidikan untuk atasi masalah ketenagakerjaan.

Sidik Pramono

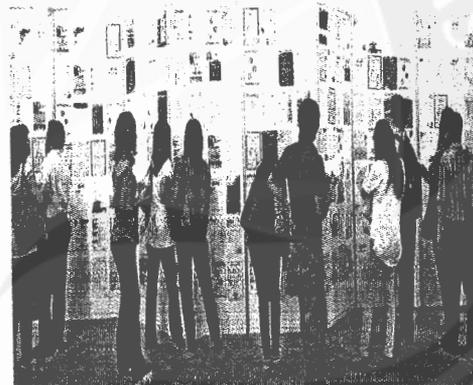
SAAT ini, Mendiknas mengemukakan, untuk menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas diperlukan perubahan *mindset*. Dari pola pikir sederhana menjadi kreatif dan inovatif. Tujuannya, agar tercipta jiwa *entrepreneur*, dan jika digabung dengan teknologi akan menjadi *technopreneur*.

"Indikatornya nanti akan terbentuk pusat-pusat kewirausahaan di kampus-kampus," kata Menteri Pendidikan Nasional saat memaparkan program kerja 100 harinya, November tahun lalu.

Pusat-pusat kewirausahaan itu dirintis dengan memberikan pelatihan kewirausahaan kepada dosen dan mahasiswa. Selain itu, untuk menumbuhkan jiwa kreatif dan inovatif, juga diberikan *block grant* kepada kelompok-kelompok wirausaha di kalangan kampus.

Untuk menjalani hal itu, Kemendiknas melakukan kerja sama lintas sektor dengan sejumlah kementerian seperti Kementerian Agama, serta Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Batas penyelesaiannya dipatok pada Januari 2010.

Kini, setelah mendekati masa 100 hari itu, Mendiknas Mohammad Nuh mengatakan *roadmap* sinergi



BURSA KERJA: Pencari kerja mengamati daftar lowongan pekerjaan pada karier ekspo 2009 di Balai Kartini, Jakarta, beberapa waktu lalu. Bursa yang diikuti sejumlah perusahaan besar ini mampu menyedot antusiasme pencari kerja.

itu dilakukan dengan mengawinkan penyaluran tenaga kerja dan pusat-pusat kewirausahaan. Penyaluran tenaga kerja dimulai dengan analisis wilayah, lingkup kerja, kemudian dibuat perumusannya.

"Hingga saat ini, kita masih terbentuk mata anggaran. Namun, yang terpenting analisis-analisis tersebut telah ditetapkan, sehingga pelaksanaannya tidak tumpang tindih," ujar Mendiknas.

Sedangkan untuk pusat kewirausahaan, Mendiknas mengaku telah melakukan penguatan

kewirausahaan di sejumlah perguruan tinggi. Antara lain, di Universitas Indonesia dengan memberikan pelatihan kepada dosen oleh pengusaha seperti Ciputra.

"Untuk membentuk pusat kewirausahaan itu, yang utama adalah menumbuhkan budaya kewirausahaan terlebih dulu pada kalangan akademisi kampus," kata Mendiknas.

Hal senada juga diungkap Direktur Pembinaan SMP Kemendiknas Didik Suhardi. Dia menekankan bahwa budaya wirausaha harus

menjadi karakter bangsa, yang mesti ditanamkan sejak dini.

Pasalnya, dengan jiwa wirausaha yang ditanamkan pada peserta didik, bisa melahirkan pola pikir yang kreatif dan inovatif.

Pengangguran

Data yang dipaparkan Deputi Bappenas bidang SDM dan Kebudayaan, Nina Sardjunani, berdasarkan Survei Tenaga Kerja Nasional (Sakernas) 2009 terungkap, dari 21,1 juta yang masuk angkatan kerja, ada sebanyak 4,1 juta atau sekitar 22,2% menganggur.

"Tingkat pengangguran terbuka itu didominasi oleh lulusan diploma dan universitas, kisarannya di atas 2 juta orang. Mereka banyak menganggur karena lebih memilih menunggu pekerjaan ketimbang menciptakan pekerjaan," ujar Nina.

Di masa datang, menurut dia, Kemendiknas perlu membangun jiwa *entrepreneurship* pada satuan pendidikan secara menyeluruh dan sejak dini.

Menurut pengusaha properti Ciputra, mata pelajaran *entrepreneurship* wajib dimasukkan pada setiap jurusan, mulai dari tingkat SMA dan SMK hingga perguruan tinggi. Selain itu, perlu ada tambahan pembelajaran *entrepreneurship* selama 3-6 bulan bagi lulusan SMK yang berminat. (S-4)

sidikpr@mediaindonesia.com

Kamis, 28 Januari 2010

Siaga Bencana Jadi Prioritas

Bencana memang selalu datang tanpa rencana, mendadak dan menimbulkan kekacauan, karena tanpa antisipasi yang memadai. Peningkatan kesiapsiagaan menghadapi bencana pun menjadi prioritas.

Amalia Susanti

GEMPA di Padang, Sumatra Barat, berkekuatan 7,6 skala Richter pada 30 November 2009 memperlihatkan hal itu. Bencana tersebut meluluhlantakkan 11 kecamatan di Kota Padang, ribuan bangunan rata dengan tanah, dan ratusan jiwa tewas serta ratusan lainnya luka-luka.

Usia pemerintahan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono sebagai kepala negara dan wakil baru sebulan sejak dilantik pada 20 Oktober 2009. Meski begitu, penanganan pascabencana mutlak merupakan tanggung jawab pemerintah baik pusat maupun daerah.

Direktur Pengurangan Risiko Bencana, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) B Wisnu Widjaja mengatakan Program 100 Hari Kabinet Indonesia Bersatu II terkait penanggulangan bencana fokus ke program peningkatan kesiapsiagaan. Hal itu dilihat dari terbentuknya Satuan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (SRC-PB) yang diresmikan pada 7 Desember 2008 lalu. SRC-PB merupakan gabungan dari 33 departemen dan instansi seperti TNI, Polri, Depkes, Departemen ESDM, Depsos, Badan SAR Nasional, PMI, dan BNPB.

SRC-PB merupakan implementasi Sidang Kabinet RI yang dipimpin Presiden RI pada 5 November 2009 lalu, di antaranya menetapkan 15 prioritas kerja 100 hari Kabinet Indonesia Bersatu II, yang salah satunya adalah bidang kesiapsiagaan penanggulangan bencana.

"SRC-PB adalah prioritas program kerja 100 hari Kementerian Sosial RI 2009/2010 dan bergerak di bawah koordinasi BNPB dengan total 3.000 personel. Terdapat setidaknya 75 orang yang siaga selama 24 jam, dengan tenaga Tagana (Taruna Siaga Bencana) yang meningkatkan kemampuan profesional baik ketika bencana banjir,

gempa bumi dan longsor," ujar Menteri Sosial Salim Segaff Al-Jufri.

Selain itu, terbentuknya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana juga merupakan langkah besar kesadaran bangsa sebagai fasilitas, serta aturan main dalam menanggulangi bencana.

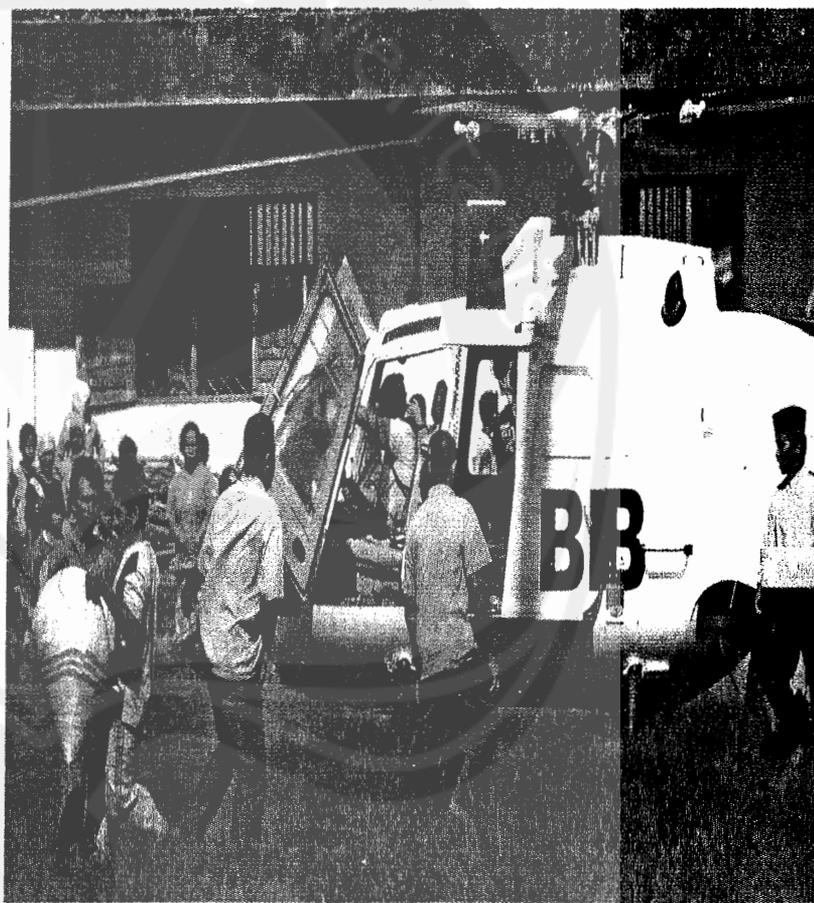
Menurut Wisnu, meningkatkan upaya penanggulangan bencana ialah dengan memperkuat kelembagaan, regulasi, dan membuat *grand design* penanggulangan bencana baik di pusat maupun daerah.

Namun, menurut sosiolog UI Imam Prasodjo, undang-undang tersebut jauh dari ideal, apalagi terdapat peraturan daerah yang tidak dilaksanakan. Di dalam UU terdapat tuntutan untuk menanggulangi bencana daerah yang merupakan ujung tombak terdepan, tapi justru malah banyak yang tidak responsif karena sulitnya anggaran. "Seperti gempa Padang, banyak hal yang tidak lengkap dalam menanggulangi bencana. Saat ini yang terjadi justru anggaran sedikit, namun mencairkannya lama," tambahnya.

Menurut Iman, terdapat empat tahap lingkup manajemen seperti manajemen persiapan, manajemen saat terjadi bencana (*during disaster management*), manajemen setelah terjadi bencana (*post disaster management*) yang merupakan masa rehabilitasi dan rekonstruksi, dan terakhir *empowerment management*.

"Merujuk gempa Padang, pada Januari ini terbukti manajemen pascabencana masih buruk di Padang Pariaman. Banyak korban selamat yang masih tinggal di tenda pengungsian. Seharusnya terdapat batas waktu korban berada di tenda dan dilakukan perbaikan tempat tinggal."

Dalam Program 100 Hari Kementerian Sosial, Mensos menegaskan, penanganan pascabencana justru menjadi fokus kerja sejak hari H hingga H+14 yang ditetapkan menjadi kondisi tanggap darurat. Pada tahap ini merupakan tahap awal yang



UJUNG TOMBAK: Menurut undang-undang, daerah semestinya merupakan ujung tombak terdepan dalam penanggulangan bencana, tapi justru banyak yang tidak responsif karena sulitnya anggaran.

setidaknya terdapat stok 100 ton beras Bulog yang disediakan gubernur setempat, dengan lauk pauk dan tenda pengungsian.

"Untuk anggaran penanggulangan bencana, setiap tahun terdapat dana Rp3 triliun yang dialokasikan untuk penanganan bencana reguler, belum termasuk bencana besar yang tiba-tiba. Namun disayangkan dana tersebut lebih diarahkan untuk pascabencana seperti rehabilitasi dan rekonstruksi. Seharusnya anggaran lebih diutamakan

untuk prabencana karena termasuk dalam investasi pembangunan," kata Wisnu.

Prabencana merupakan investasi karena menjamin pembangunan berkelanjutan, seperti membangun struktur rumah tahan gempa dan infrastruktur yang aman. Seharusnya, sebagian dari dana Rp3 triliun itu dapat diupayakan bekerja sama dengan asuransi yang menjamin pembangunan perumahan dengan cepat.

Menanggapi hal tersebut, Mensos menyambut baik rencana kerja sama

itu. Dia optimistis pada 2010 kerja sama dengan asuransi di bidang perbaikan pascabencana baik rehabilitasi maupun rekonstruksi dapat tercapai. "Cadangan nasional untuk bencana sekitar Rp3-3,5 triliun dapat berkembang menjadi Rp13 triliun bila kerja sama dengan pihak asuransi tercapai. Hal ini akan membantu penanganan bencana di Indonesia," ungkapnya. (S-4)

amalias@mediaindonesia.com

Kamis, 28 Januari 2010

Swasembada Tergantung Dana

Ketahanan pangan sangat penting bagi Indonesia. Swasembada sejumlah komoditas pun menjadi perhatian serius dalam Program 100 Hari.

Sadyo Kristiarto

SEBAGAI negara agraris, upaya untuk meningkatkan kinerja di sektor pertanian sudah menjadi keharusan. Karena itu pula dalam 100 hari pertama Kabinet Indonesia Bersatu II, Kementerian Pertanian mengajukan empat program unggulan.

Program tersebut yaitu penyusunan peraturan pemerintah tentang pertanian pangan skala luas (*food estate*) atau lebih dikenal dengan sebutan PP Usaha Budi Daya Tanaman, pencanangan *food estate* di Marauke, Papua, dan pencanangan program peningkatan daya saing dan nilai tambah produk pertanian dengan pemberian insentif bagi tumbuhnya industri perdesaan berbasis produk (konsep peningkatan daya saing).

Selain itu, penyusunan cetak biru swasembada pangan tahap kedua untuk kedelai, jagung, gula, dan daging sapi.

"Jadi keempat program tersebut terkait dengan ketahanan pangan," jelas Menteri Pertanian Suswono di ruang kerjanya, beberapa waktu lalu.

Menurut Suswono, keempat target program itu berdasarkan evaluasi hari ke-75 pada Program 100 Hari Kabinet Indonesia Bersatu II semuanya sudah tercapai, tinggal penyelesaiannya. Untuk PP soal Food Estate, misalnya, sudah diajukan surat ke Presiden untuk ditandatangani. Selain itu, konsep daya saing dan cetak biru swasembada kedelai, jagung, gula industri, dan daging sapi.

"Program 100 hari ini adalah program yang lebih sebagai landasan kerja untuk lima tahun ke depan dan langkah-langkah apa saja yang akan dilakukan lima tahun ke depan. Jadi lebih pada penyiapan cetak birunya, sekaligus *roadmap*-nya. Tahun

pertama kita mau mencapai apa, tahun kedua apa. Jadi lebih kepada penyiapan langkah-langkah kerja lima tahun ke depan," jelas Suswono.

Upaya swasembada komoditas kedelai memang menjadi keharusan, karena hingga saat ini Indonesia masih mengimpor 1,2 juta ton kedelai per tahun. Komoditas kedelai di Tanah Air produktivitas masih rendah sekitar 1,2 ton per hektare. Padahal potensinya mencapai 2-2,5 ton per hektare.

Demikian juga dengan gula industri yang masih diimpor sekitar 2 juta ton. Khusus untuk swasembada gula akan bergantung pada upaya dari setidaknya

Langkah tersebut tidak mungkin dilakukan di Jawa, karena akan terjadi *trade off* lahan pertanian pangan.

Buka Lahan

Kementerian Pertanian dipastikan akan membuka lahan di luar Jawa bekerja sama dengan Kementerian Kehutanan.

"Kementerian Kehutanan memiliki komitmen menyediakan lahan 500 ribu hektare. Sementara lahan yang sudah terdektesi ada di Lampung, Sumatra Selatan, Bengkulu, dan Jambi. Kemungkinan juga Sulawesi."

Sementara itu, untuk swasembada

pasokan daging," jelasnya.

Upaya pencapaian target swasembada daging sapi kali ini semakin penting, karena target tersebut sudah dikoreksi hingga tiga kali. Rencana terdahulu target pencapaian swasembada daging adalah pada 2005, kemudian dikoreksi jadi 2010 dan saat ini target itu digeser ke 2014. Menteri Pertanian memperkirakan tahun ini pihaknya perlu tambahan Rp1 triliun khusus untuk menyelamatkan sapi betina produktif dari ancaman para pedagang.

Selain mengupayakan swasembada dari sisi peningkatan

melalui upaya yang tidak efisien, sehi seluruh kalah bersaing dengan produk negara lain. "Karena itu industri prim yang selama ini ditangani Kementerian Perindustrian, kita akan tarik ke Kementerian Pertanian," jelas Suswono

Terlepas dari semua persiapan tersebut, dia menilai, kebutuhan

Target Indikator Makro Pertanian 2010-2014

Indikator Makro	2010	2011	2012	2013	2014	Rerata
■ Pertumbuhan PDB Pertanian Semipta (%)	4,60	5,00	5,10	5,25	5,50	5,10
■ Penyerapan Tenaga Kerja (ribu orang)	45.130	46.323	47.608	48.532	49.600	47.439
■ Tambahan Lapangan Kerja (ribu orang)	930	1.193	1.285	924	1.068	1.080
■ Nilai Tukar Petani	110	112	114	116	119	114
■ Investasi PMDN (Rp miliar)	4.604	6.558	8.674	11.238	14.112	9.000
■ Investasi PMA (US\$ juta)	382	500	750	1.000	13.000	3.127
■ Neraca Perdagangan Pertanian (US\$ miliar)	20.600	23.901	32.659	38.062	44.700	31.984

Sumber: Kementerian Pertanian 2010/GW415/FREDD

dua kementerian yaitu Kementerian Perindustrian dan Kementerian Pertanian. Tugas Kementerian Perindustrian adalah untuk merevitalisasi pabrik gula yang sudah tua untuk meningkatkan rendemen rata-rata. Sedangkan langkah Kementerian Pertanian untuk mempercepat swasembada gula dengan meningkatkan produksi gula melalui ekstensifikasi lahan tanam tebu.

daging sapi juga mendesak dilakukan karena hingga kini Indonesia masih impor sekitar 70 ribu ton daging sapi dan impor sapi bakalan 630 ribu ekor.

"Konsekuensi bila tidak bisa swasembada daging adalah, setiap tahun 200 ribu ekor sapi betina produktif ikut dipotong. Padahal sapi betina memegang peran penting untuk peningkatan populasi demi kecukupan

produksi, Kementerian Pertanian juga mendorong diversifikasi pangan. Tujuannya agar konsumsi masyarakat tidak hanya bergantung pada beras dan beralih pada bahan pokok pangan yang ada di daerahnya.

Langkah lainnya adalah peningkatan daya saing, nilai tambah, dan ekspor. Produk pertanian Indonesia dihasilkan

dana untuk mewujudkan semua program unggulan Kementerian Pertanian tidak memadai. Saat ini anggaran Kementerian Pertanian hanya Rp8,03 triliun. Dia berharap anggaran Kementerian Pertanian mampu meningkat dua kali lipat pada pengajuan APBN-P mendatang. (S-5)

sadyo@mediaindonesia.com



Kamis, 28 Januari 2010

Percepatan Infrastruktur Kuatkan Daya Saing

Ketersediaan infrastruktur setidaknya memiliki dua aspek penting, yaitu sebagai penyedia kebutuhan dasar bagi masyarakat dan sebagai alat dukung peningkatan daya saing ekonomi nasional.

Ahmad Punto

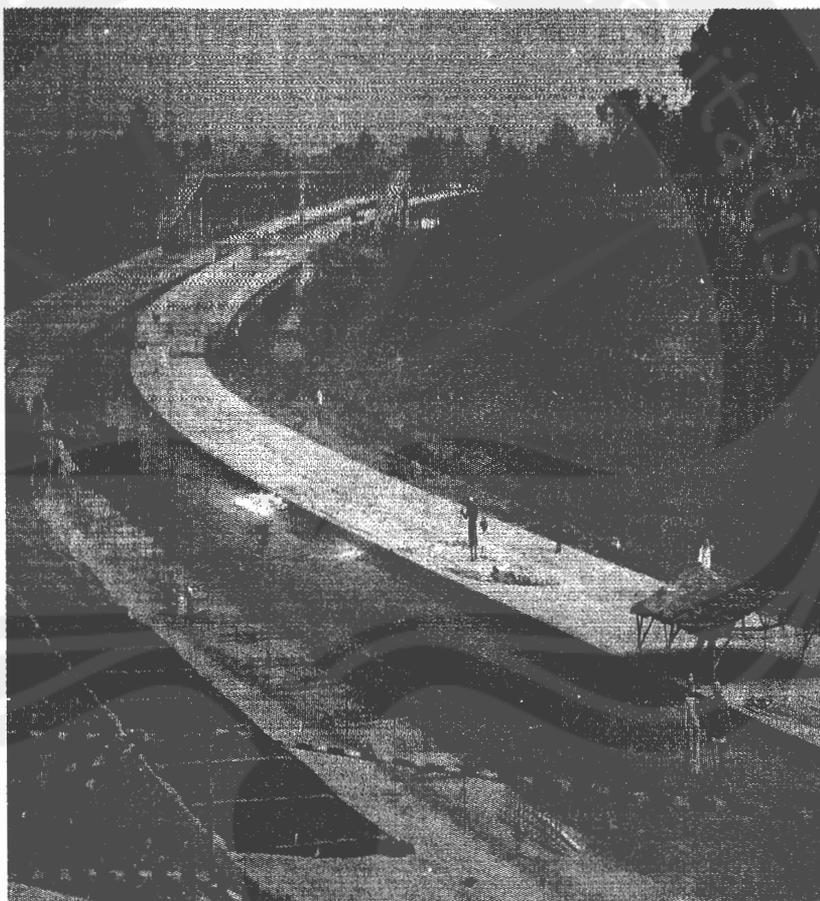
Ditulah sebetulnya nilai strategis dari pemenuhan infrastruktur, dan itu praktis berlaku untuk semua negara. Pertumbuhan ekonomi di negara mana pun tidak akan pernah bisa dilepaskan dari fasilitas infrastruktur yang mereka siapkan. Karena, itu akan terkait dengan kelancaran arus barang dan jasa di dalam lingkup negara tersebut.

Indonesia, diakui atau tidak, infrastrukturnya tertinggal jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Keteringgalan itu sangat mencolok terlihat, terutama di sektor transportasi jalan yang pertumbuhannya boleh dikategorikan lambat. Inilah yang kemudian banyak dikeluhkan kalangan dunia usaha, karena lambatnya pengembangan infrastruktur jalan telah menghambat arus distribusi dan transaksi mereka.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto mengakui bahwa pengembangan infrastruktur memang perlu percepatan yang lebih. Karena, tanpa upaya (*effort*) yang ekstra, jangankan untuk mengejar ketertinggalan dari negara-negara lain, untuk bisa memenuhi kebutuhan masyarakat pun barangkali akan sulit.

Untuk itu, menteri menyebut upaya percepatan ini akan dilakukan dan dikawal dari proses di hulu sampai hilir. Dari mulai aturan hingga implementasi akan terus dikontrol untuk bisa mencapai kecepatan pembangunan infrastruktur seperti yang diharapkan. Isu percepatan ini pun secara implisit masuk ke beberapa rencana aksi program 100 hari Kabinet Indonesia Bersatu II. Khusus rencana aksi yang menjadi tanggung jawab Kementerian PU, Djoko mengklaim telah mencapai progres 95% hingga tujuh hari sebelum berakhirnya 100 hari yang jatuh hari ini (28/1).

"Program 100 hari hanya bagian kecil



HARUS CEPAT: Pembangunan infrastruktur di Indonesia termasuk jalan tol memerlukan kecepatan yang lebih tinggi untuk bisa meningkatkan daya saing ekonomi nasional.

dari program lima tahun. Namun bila ini berhasil akan menjadi modal sangat baik untuk merealisasikan target selanjutnya. Program 100 hari menjadi pemecah kemampuan sehingga selanjutnya lebih lancar," ungkap Djoko, pekan lalu.

Pemecah kemampuan itu antara lain terlihat pada keberhasilan PU meningkatkan kapasitas jalan lintas di Sumatra dan Sulawesi sepanjang 695 kilometer. Ini akan menjadi modal yang bagus untuk mengawali target peningkatan

kapasitas jalan lintas pulau sepanjang 19.370 km dalam lima tahun.

Begitu juga dengan pengoptimalan fungsi Kanal Banjir Timur (KBT) yang kini sudah mampu mengalirkan air, meski masih ada beberapa lokasi yang terkendala pembebasan tanah.

Dua problem besar

Harus diakui, problem infrastruktur di Indonesia tidaklah ringan. Ada dua persoalan besar dari pembangunan

infrastruktur di negeri ini yang kini keduanya menjadi fokus penyelesaian Kementerian PU, yaitu masalah pembebasan tanah dan pendanaan.

Dalam National Summit pada Oktober 2009 lalu, pembebasan tanah untuk kepentingan umum juga mengemuka menjadi masalah besar yang harus diatasi. Untuk itu, kini aturan yang lebih tinggi tentang pembebasan lahan untuk kepentingan umum tengah disusun. Ini juga masuk program 100 hari KIB

II dengan penanggung jawab Badan Pertanahan Nasional (BPN). Menteri PU memberikan masukan untuk mengi draf aturan yang nantinya akan keluar dalam bentuk undang-undang.

Djoko Kirmanto menegaskan UU yang ditargetkan selesai 2010 ini akan sangat membantu, mempercepat, dan mempermudah PU dalam membebaskan tanah untuk kepentingan pembangunan jalan, bendungan atau infrastruktur lain.

Sementara itu, dalam hal pendanaan, keterbatasan anggaran yang menjadi alasan. "Ada keterbatasan pendanaan jika dibandingkan dengan *demand* masyarakat dan dunia usaha dalam ran meningkatkan daya saing mereka," kata Wakil Menteri Pekerjaan Umum Hema Dardak kepada *Media Indonesia*, di ruang kerjanya, Kamis (21/1).

Saat ini anggaran yang diperoleh Kementerian PU sekitar Rp35 triliun. Padahal, lanjut Hermanto, sebetulnya untuk mendorong percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur setidaknya PU membutuhkan Rp52 triliun.

Kekurangan ini yang menuntut Kementerian PU lebih inovatif dalam menyusun skem-skem pendanaan untuk lebih menarik keterlibatan swasta dalam pembangunan infrastruktur, terutama di sektor jalan tol. "Kami akan terus cari alternatif pendanaan untuk proses percepatan ini."

Ke depan, Hermanto menambahkan, dalam hal pendanaan ini pemerintah bisa memanfaatkan lembaga pembiayaan infrastruktur PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), termasuk anak perusahaannya Indonesia Infrastructure Finance Facility (I3FF). "Semua ini merupakan sumber-sumber pendanaan yang bisa dimanfaatkan di luar kapasitas yang bisa ditanggung fiskal pemerintah," paparnya. (S-4)

punto@mediaindonesia.com

Kamis, 28 Januari 2010

Tugas Berat Merumahkan Rakyat

Dari 15 program prioritas Kabinet Indonesia Bersatu II, ada empat program terkait penyediaan rumah bagi masyarakat berpendapatan rendah.

Ahmad Punto

KEEMPAT program prioritas itu mencakup tanah dan tata ruang, infrastruktur, pembiayaan, serta sinergi pusat dengan daerah.

Empat hal tersebut memang merupakan persoalan utama sektor perumahan dan permukiman di negeri ini. Aneka masalah dalam pengembangan perumahan sering kali timbul dan bersumber dari sana.

Di sektor rumah susun sederhana milik (rusunami), misalnya. Program yang mulai digalakkan pada era kabinet yang lalu itu, hingga kini masih saja terkendala oleh persoalan tidak satu suaranya pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam memandang sebuah program nasional.

Akibatnya sering terjadi proses perizinan pembangunan ke pemda justru menciptakan ekonomi biaya tinggi, pada akhirnya membebani konsumen. Penyerapan unit rusunami ini juga kerap terhadang permasalahan pembiayaan, terkait dengan pengucuran subsidi yang sering terhambat.

Sementara itu, program penyediaan rumah sederhana sehat (RSh) juga masih berkuat dengan problem minimnya dukungan infrastruktur, terutama listrik dan air, yang terjadi di beberapa tempat. Belum lagi dengan kian berkurangnya minat pengembang membangun RSh dengan dalih hanya menghasilkan sedikit keuntungan.

Ini semua, ditambah persoalan-persoalan lain seperti rumitnya merumahkan kawasan kumuh, suku bunga kredit perbankan yang masih tinggi dan lain-lain, akan terus menjadi pekerjaan rumah bagi Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) dalam upaya mereka menyediakan rumah layak huni bagi

masyarakat.

Kemenpera sendiri menargetkan pembangunan rumah untuk 836 ribu keluarga hingga 2012, atau pada tiga tahun pertama masa kerjanya. Terdiri dari 685 ribu unit *landed house* (RSh), 180 *tower* rusunami dan 650 *townblock* rumah susun. Selain itu melakukan percepatan peremajaan permukiman kumuh melalui pembangunan rumah susun.

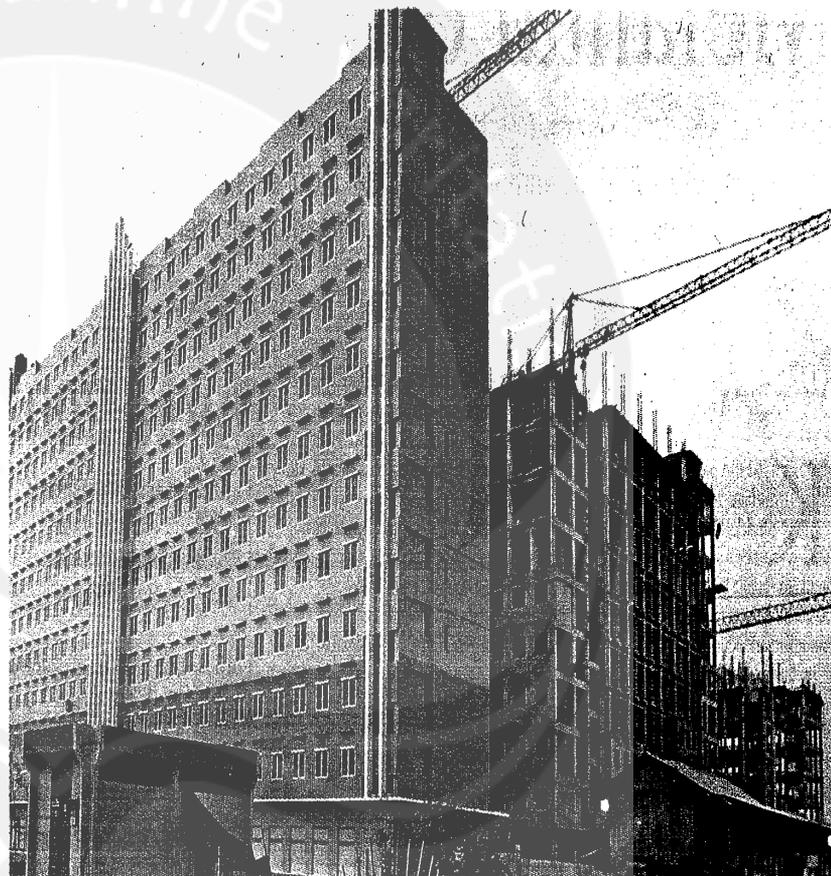
Subsidi likuiditas

Jika melihat 100 hari pertama masa kerja Kabinet Indonesia Bersatu II, harus diakui problem-problem itu masih mengantung. Belum ada yang tertangani secara tuntas, karena memang masalah-masalah tadi bukanlah hal yang gampang diselesaikan. Namun setidaknya ada beberapa terobosan yang ditawarkan Menteri Perumahan Rakyat Suharso Monoarfa untuk memecah kebuntuan awal.

Salah satu terobosan di awal masa kerja kabinet yang paling mendapat perhatian adalah rencana Menpera untuk membuat kebijakan pembiayaan perumahan jangka panjang, dengan suatu mekanisme fasilitas likuiditas.

Kebijakan ini sekaligus akan mengubah pola penyaluran subsidi perumahan secara drastis. Jika pada pola yang lama subsidi diberikan dalam bentuk subsidi selisih bunga dan uang muka, ke depan dana subsidi dari APBN ini akan diserahkan kepada bank penyalur atau lembaga pembiayaan nonbank untuk menambah likuiditas.

Selain dari pemerintah, Menpera juga berharap Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan (Bapertarum) PNS, Jamsostek, dan lembaga asuransi juga bisa mengucurkan modal penyertaan. Dana-dana itu akan di-*blended* menghasilkan dana murah untuk membiayai KPR rumah



TEROBOSAN: Perlu terobosan besar dari pemerintah untuk menyukseskan program pembangunan rusunami di kota-kota besar Indonesia.

layak huni buat masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Idealnya memang tabungan perumahan masyarakat sudah harus dikembangkan. Kalau ini ada, dana yang bisa dikumpulkan bisa sangat besar untuk mendanai fasilitas likuiditas ini," imbuhnya.

Menurut Menpera, pola subsidi yang baru ini akan lebih menguntungkan daripada pola subsidi yang lama. Setidaknya, jumlah unit rumah yang bisa dibiayai akan lebih banyak dan MBR bisa menikmati kredit pemilikan rumah (KPR) dengan suku bunga yang rendah selama jangka waktu kredit, bukan hanya 4-6 tahun seperti pada pola lama.

Kalangan perbankan dan pengembang sudah menyatakan siap mendukung

pola baru ini. Namun karena sistem baru ini betul-betul berbeda dari sistem yang lama, mereka menuntut kepastian aturan main dan kejelasan waktu penerapannya. Perlu juga masa transisi untuk memberi kesempatan bank penyalur, pengembang, maupun konsumen menyesuaikan sistem baru.

"Selama ada kejelasan dan kebijakan itu mampu meningkatkan keterjangkauan masyarakat, perbankan khususnya BTN akan menyambut baik," kata Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara Tbk Iqbal Latanro.

Di pihak lain, Ketua Umum DPP Realstat Indonesia (REI) Tegus Satria lebih menyoroti perlunya masa transisi sebelum pola baru penyaluran subsidi itu

diterapkan.

Diakui atau tidak, baru wacana perubahan konsep subsidi itu yang banyak mendapat sorotan publik dan media. Sebaliknya progres-progres lainnya belum tampak menonjol, rata-rata masih sebatas pada inventarisasi masalah dan penyelesaian sumbatan (*bottle neck*).

Ada harapan besar dari masyarakat kecil selain melihat antusiasme dan optimisme Menpera dalam memandang industri perumahan sebagai salah satu penggerak roda ekonomi.

Mereka menginginkan hak mereka atas papan (rumah) bisa segera dipenuhi penyelenggara negara ini. (S-4)

punto@mediaindonesia.com

Kamis, 28 Januari 2010

Keberhasilan KUR Tergantung Sosialisasi

PERHATIAN pemerintah terhadap sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) terus ditingkatkan. Pencapaian target penyaluran KUR Rp100 triliun dalam lima tahun jadi salah satu acuan.

Angka Rp100 triliun yang direncanakan pemerintah untuk pembiayaan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memang merupakan angka yang fantastis. Maklum, selama ini sektor UMKM paling tinggi hanya sempat menikmati dana alokasi dari pemerintah sebatas ratusan miliar rupiah.

Selain fantastis dalam jumlah, optimisme Kementerian Koperasi dan UKM untuk menggerakkan sektor ekonomi yang telah teruji tahan krisis itu cukup tinggi untuk menyalurkannya.

"KUR ini kan targetnya Rp20 triliun dalam satu tahun. Sementara itu, Program 100 Hari Kabinet kan sampai 1 Februari. Jadi, kita kehilangan waktu satu bulan untuk penyalurannya. Namun, pada 2010 kan dari Januari sampai Desember, kita akan tingkatan penyalurannya pada Februari ini," kata Menteri Koperasi dan UKM Syarifuddin Hasan, beberapa waktu lalu.

Meski begitu, jelas Syarif, semua yang diprogramkan dalam Program 100 Hari Kabinet Indonesia Bersatu II sudah selesai pada hari ke-75, termasuk program KUR tersebut. Kredit untuk rakyat (KUR) merupakan salah satu program unggulan pada Program 100 Hari Kabinet Indonesia Bersatu II.

Menteri Koperasi dan UKM memperkirakan kendala dalam penyaluran KUR diperkirakan adalah sosialisasi ke masyarakat. Proses sosialisasi itu mencakup banyak hal, seperti sosialisasi dari internal penyalur KUR (perbankan) dan sosialisasi kepada masyarakat.

"Langkah sosialisasi ini sangat menentukan. Sosialisasi termasuk bagaimana masyarakat kita giring menjadi tertarik untuk mengakses perbankan. Itu yang menjadi intinya."

Pasalnya, selama ini masyarakat juga belum secara utuh menerima informasi tersebut. Apalagi, di internal perbankan informasi yang diterima mereka tidak utuh.

Perluas basis

Pada perkembangan terakhir, untuk mendorong cuaran KUR pemerintah memperluas basis debitur program KUR hingga nasabah kredit konsumtif. Bank penyalur KUR pun juga ditambah. Selain bank penyalur yang sudah ada seperti BRI, BNI, Bank Mandiri, BTN, Bank Bukopin, dan Bank Swariah Mandiri, ada 13 bank



DOK KEMENKOP &

PRODUK LOKAL: Pemerintah siap mengucurkan dana bagi para pengusaha lokal di bidang usaha mikro, kecil, dan menengah.

pembangunan daerah (BPD) yang akan bergabung.

Saat ini, nasabah yang sudah mengajukan kredit rumah, kredit kendaraan roda dua, dan kartu kredit dimungkinkan mendapat alokasi KUR.

Kemudahan lain adalah calon debitur KUR mikro (kurang dari Rp5 juta) tidak perlu lagi melalui pengecekan data BI dalam proses pengajuan kredit. Sebab kewajiban sistem informasi debitur kini ditiadakan untuk KUR mikro. Periode pengembalian KUR pun diperpanjang dari tiga tahun menjadi enam tahun.

Sementara itu, bunga KUR mikro

dipangkas dari 24% menjadi 22%.

Sementara itu, bunga KUR ritel (Rp5 juta-Rp500 juta) turun dari 16% menjadi 14%.

Dengan sejumlah kemudahan itu, Menkop UKM khawatir potensi kredit macet di sektor UKM akan meningkat.

Saat menanggapi hal itu, Direktur Utama BRI Sofyan Basir menilai kekhawatiran akan penyalahgunaan KUR bisa diantisipasi bank dengan melakukan evaluasi setiap bulan. "Kan bank akan lihat, dipakai untuk apa, bagaimana usahanya, apakah mereka mampu membayar kreditanya," jelas Sofyan.

Dia meneaskan, BRI tetap berkomitmen

menyalurkan KUR kendati tren NPL-nya tengah naik. Kondisi itu ia nilai masih wajar karena mayoritas penerima KUR adalah debitur yang baru pertama kali memperoleh kredit.

Di sisi lain, pengamat perbankan Krisna Wijaya mengatakan pemerintah perlu mengubah persepsi KUR di masyarakat guna mengurangi potensi *moral hazard*. "Masyarakat menganggap (KUR) ini dari pemerintah sehingga tidak bayar tidak apa-apa. Makanya, cara pemasaran KUR harus diubah," paparnya.

Menurut Krisna, seyogianya pemasaran KUR jangan terlalu melibatkan pemerintah

dan lebih diserahkan kepada bank-bank terkait. "Pemerintah cukup mengatakan kalau ada kredit yang membantu usaha kecil pada bank-bank tertentu," kata dia.

Dalam Program 100 Hari Kementerian Koperasi dan UKM juga mengedepankan program pemberdayaan usaha skala mikro dan pengembangan lembaga keuangan mikro (LKM), peningkatan kapasitas UKM dalam kerangka pengembangan (*or village one product/OVOP*), industri kreatif revitalisasi, dan penataan pasar tradisional serta memperluas program diklat dan pendidikan *vocational* pelaku UKM.

(Sad/S-5)



Kebijakan dan Program tidak Konsisten

Arah Kebijakan Anggaran Pemerintah

- Mendukung kegiatan ekonomi nasional dalam memacu pertumbuhan (*pro-growth*).
- Menciptakan dan memperluas lapangan pekerjaan (*pro-employment*).
- Mengurangi kemiskinan (*pro-poor*).

Sumber: Foto Presiden/Presiden/00: HEDJENS

Fakta Program tidak Prorakyat

- Membeli pesawat kepresidenan VVIP jenis Boeing 737-400 **Rp200 miliar**
- Renovasi pagar halaman dan sistem keamanan untuk Istana Presiden dan Istana Wakil Presiden **Rp22,55 miliar**
- Pembelian mobil mewah Toyota Crown Saloon untuk pejabat negara, dan menteri
- Menaikkan anggaran belanja pegawai pada 2010 **Rp161,7 triliun**
- Subsidi rakyat miskin berkurang sebesar 10% menjadi **Rp15,5 triliun**
- Bantuan sosial berkurang 11% **Rp8,6 triliun**

Sumber: Foto Pelantikan Presiden/ Foto: RUMGAPRES/ Grafik: CAKSONO

Masih Jalan di Tempat

Kamis, 28 Januari 2010

Menilai arah pembangunan Indonesia lima tahun ke depan sebenarnya bisa dilihat dari 100 hari pertama kinerja pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu II.

Fardiansah Noor

IBARAT mendirikan sebuah rumah, 100 hari pertama adalah waktu untuk membangun fondasi alias mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang memutuskan kerja pemerintah ke depannya.

Namun, saat ini, Susilo Bambang Yudhoyono menjadi presiden bukan untuk kali pertama. Presiden Yudhoyono tentu tinggal melanjutkan program-program unggulannya yang pada periode 2004-2009 dan mengevaluasi program-program yang tidak berjalan.

Oleh karena itu, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Anis Matta menyatakan pada dasarnya tidak ada alasan yang memadai secara politik untuk membuat program 100 hari bagi sebuah pemerintahan yang sudah terpilih dua kali. Pemerintahan tinggal berjalan melanjutkan program unggulan dan melakukan penyempurnaan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

"Selain itu, 100 hari tentu saja tidak cukup bagi kabinet untuk menyelesaikan program-programnya. Apalagi di tengah perjalanannya mendapat gangguan sosial politik yang begitu banyak," kata Anis.

Dia menilai yang paling mungkin dicapai pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu II dalam 100 hari pertama adalah menetapkan arah kebijakan baru atas hasil evaluasi yang komprehensif pada periode pemerintahan 2004-2009. "Setelah itu lakukan konsolidasi tim kerja kabinet. Toh, mandat mereka lima tahun, bukan 100 hari," cetus Anis.

Dalam konteks itu, lanjutnya, evaluasi atas kinerja 100 hari Kabinet Indonesia Bersatu II hanya dapat dilakukan untuk melihat sinyal peluang sukses dari tim kabinet. Misalnya, tim ekonomi dengan merujuk pada arah kebijakan dan proses konsolidasi yang sedang berlangsung pada tim tersebut.

Pakar Ilmu Pemerintahan Universitas Padjajaran Bun Yamin Ramto malah menilai pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu II hingga 100 hari pemerintahannya masih jalan di tempat. Padahal, ada tiga kementerian yang dipimpin orang yang sama, dan banyak menteri yang hanya pindah tempat.

Seharusnya karena Presiden Yudhoyono sudah memimpin untuk periode kedua, program-program unggulan tiap kementerian tinggal dijalankan, terutama program jangka menengah dan panjangnya.

"Apalagi Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. Menteri-nya sama, jadi kerjanya seharusnya sudah terprogram dan tinggal melanjutkan."

Namun, tambahnya, fakta menunjukkan Menteri Perdagangan tidak bisa menenangkan hati rakyat yang khawatir akan era perdagangan



ANIS MATTA

“

Yang paling mungkin dicapai pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu II dalam 100 hari pertama adalah menetapkan arah kebijakan baru.”

Anis Matta

Wakil Ketua DPR



BUN YAMIN RAMTO

“

Rata-rata nilainya masih enam. Ada kementerian yang cukup baik, tapi masih banyak yang lambat kerjanya.”

Bun Yamin Ramto

Pakar Ilmu Pemerintahan

bebas, terutama menghadapi produk-produk China. Menteri Perindustrian tampak belum *tune in* dengan tugas-tugasnya, padahal dia adalah praktisi di lapangan yang seharusnya tahu kebijakan yang dibutuhkan untuk menghidupkan industri dalam negeri.

Semua industri, baik menengah, sedang, dan besar masih terpuruk utamanya industri tekstil. Kemajuan hanya terlihat pada Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata dengan mulai maraknya promosi dan kehadiran wisatawan mancanegara.

"Rata-rata nilainya masih enam. Ada kementerian yang cukup baik, tapi masih banyak yang lambat kerjanya," pungkas Bun Yamin. (S-4)

fardiansah@mediaindonesia.com

Jumat, 23 Oktober 2009

Tim Ekonomi Mulai Konsolidasi

Iklm Investasi Kondusif Jadi Fokus Utama

JAKARTA (SI) - Tim ekonomi di kabinet baru dibentuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mulai bersiap. Menciptakan perekonomian yang berdaya tahan serta iklim investasi yang kondusif jadi fokus utama.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan, dia dipesani secara lisan empat hal oleh Presiden SBY dalam menjalani tugasnya selama lima tahun mendatang. "Pertama, Presiden berharap Departemen Keuangan (Depkeu) terus menjaga martabat Indonesia di forum internasional," ujarnya saat serah terima jabatan (sertijab) Menko Perekonomian di Jakarta kemarin.

Pesan kedua, Presiden menghendaki agar seluruh formulasi kebijakan Depkeu berorientasi pada upaya menyejahterakan dan meminimalkan tekanan yang dihadapi masyarakat. Termasuk memangkas biaya tinggi yang mungkin muncul dari proses birokrasi.

Pesan ketiga, Presiden menghendaki agar Depkeu terus menjaga pengelolaan anggaran. "Pengelolaan anggaran negara harus bersinergi dengan anggaran daerah dan partisipasi sektor swasta," ujar Menkeu. Adapun pesannya keempat, Presiden ingin melihat kelanjutan reformasi birokrasi di Depkeu.

Sedangkan Menteri Perindustri

(Menperin) MS Hidayat melangkah lebih maju dengan membuat kesepakatan bersama Menteri Perdagangan (Mendag) Mari Elka Pangestu. Mereka bersepakat mengharmoniskan kebijakan yang selama ini bertentangan antara Departemen Perindustrian (Depperin) dan Departemen Perdagangan (Depdag).

Hidayat juga berencana memajukan program 100 hari Depperin dengan *roadmap* ekonomi yang telah dibuat Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin). "Itu merupakan hasil pemikiran perspektif dunia usaha, setelah lima tahun kami sebagai praktisi, mudah-mudahan itu sebagian besar dijalankan karena dalam lima tahun kedepan pertumbuhan ekonomikita harus ditopang sektor riil," tuturnya.

Hidayat menambahkan, Depperin akan melakukan koordinasi dengan Mendag dan Menkeu untuk menyinkronkan regulasi yang mendukung tujuan tersebut. Hidayat berjanji akan menghapus segala bentuk aturan yang selama ini menjadi penghambat para pelaku industri dalam menjalankan

usahanya.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Darwin Hedy Saleh menyatakan, prioritas utama di departemennya ada melakukan percepatan realisasi investasi di sektor energi. "Kita harus percepat realisasi investasi baik dalam kaitan eksplorasi dalam rangka produksinya, maupun dalam rangka infrastruktur ujanjarnya."

Meneg BUMN Mustafa Abubakar menyatakan, dia baru akan merumuskan program 100 hari kementerian yang dipimpin pada awal pekan depan. "Kita (besok) menyelesaikan rapat dengan kabinet, Sabtu (24/10) bertemu Wapres. Senin (26/10) baru mulai merumuskan program 100 hari," tuturnya.

Di tempat terpisah, Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa menyatakan akan segera menggelar rapat koordinasi menteri-menteri perekonomian untuk mulai mengkoordinasi dan mengkonsolidasi kerja-kerja tim ekonomi. Secara umum, program utamanya yakni menjaga perekonomian yang mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yang mampu menyerap tenaga kerja, serta menerobos hambatan di sektor (mentuarat sandra kar mayasofia/je)

SERAH TERIMA JABATAN
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
SRI MULYANI INDRAMATI KEPADA M. HATTA RAJASA

Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Hatta Rajasa (kiri) didampingi mantan Plt Menko Perekonomian Sri Mulyani Indrawati (kanan) memberikan sambutan dalam acara serah terima jabatan di Jakarta, kemarin.

SERTIJAB

Sabtu 24 Oktober 2009

SBY Ingatkan Tak Ada Keputusan Wapres

JAKARTA (SI) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan menugasi Wakil Presiden (Wapres) Boediono berkeliling ke seluruh provinsi demi mengetahui permasalahan di daerah sekaligus mencari draf solusi permasalahan tersebut dalam program kerja 100 hari pertama. Selanjutnya, Presiden akan memutuskan berbagai langkah berikutnya.

"Semua keputusan Presiden, tidak ada keputusan Wapres. Keputusan Presiden dan kami akan satu atap," ujar Presiden SBY dalam pengarahannya kepada seluruh menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II dalam sidang paripurna perdana di Gedung Sekretariat Negara, Jakarta, kemarin.

Presiden menegaskan, program 100 hari menjadi titik awal kebijakan lima tahun ke depan



SIDANG KABINET PARIPURNA: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono memimpin sidang kabinet di Gedung Sekretariat Negara, Jakarta, kemarin.

agar menjadi lebih lancar. Demi mendukung kerja Presiden dan Wapres tersebut, lokasi kantor Wapres ditempatkan tidak jauh dari kantor Presiden. Dengan lokasi yang berdekatan, aktivitas Presiden dan Wapres diharapkan

lebih sinergis dan kompak. "Kompak dalam arti tidak pecah kongsi. Kalau pecah kongsi kan yang susah Saudara (menteri). Jadi kalau kami klop, semua happy," tandasnya.

bersambung ke hal 7

SBY Ingatkan Tak Ada Keputusan Wapres

Sambungan dari hal 1

Presiden SBY kemarin pagi menggelar sidang paripurna pertama kalinya setelah melantik 34 menteri dan dua pejabat setingkat menteri, Kamis lalu (22/10). Sidang yang dihadiri Wapres Boediono serta seluruh menteri KIB II membahas berbagai agenda 100 hari ke depan pemerintahan serta program jangka panjang. Presiden selama hampir 1,5 jam memberikan arahan tentang berbagai bidang, termasuk menjawab berbagai isu aktual yang akhir-akhir ini sedang ramai diberitakan media.

Presiden pada kesempatan itu juga menjelaskan *tagline* KIB II yang bisa disebut sebagai semboyan untuk mengingatkan tugas-tugas ke depan. Ketiga *tagline* KIB II itu adalah *change and continuity, debottlenecking, acceleration, and enhancement*; serta *unity together we can*.

Presiden menekankan 11 agenda utama yang harus dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja ekonomi. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi dapat men-

capai 7% atau lebih di tahun 2014 dengan asumsi tidak ada gejolak dunia seperti saat-saat terakhir ini. Selain meningkatkan pertumbuhan, beberapa sasaran yang harus dicapai dalam lima tahun ke depan adalah perbaikan tata kelola pemerintahan, penegakan pilar demokrasi, reformasi pendidikan, pembangunan infrastruktur, serta iklim investasi dan bisnis.

Demi mencapai program kerja tersebut, Presiden mengingatkan kembali para menternya untuk loyal kepada negara dan bukan loyal kepada partai. Komunikasi pun diharapkan dapat tetap terjalin antara Presiden, Wapres, dan para menteri.

"*Hotline* antara Presiden, Wapres, dan para menteri harus baik. Saya paling tidak suka menghubungi menteri satu jam, dua jam belum juga bisa dihubungi, *nggak boleh itu*," tandasnya.

Wapres Boediono pada kesempatan itu menegaskan bahwa dirinya sangat yakin bahwa Presiden dalam mengambil keputusan akan selalu meminta pertimbangan dari

Wapres dan para menteri. Dengan demikian, Wapres sebagai ban serep, menurutnya, tidak relevan.

"Jadi kalau sudah diputuskan, itu tentu menjadi suatu keputusan Presiden. Wapres akan selalu mengikuti, termasuk para menteri. Jadi tidak relevan wapres itu ban serep atau tidak karena merupakan bagian dari mobil itu secara utuh," kata Boediono.

Berdasarkan pengalaman lima tahun lalu, Wapres meminta kerja sama dalam tim kabinet, baik antarmenteri maupun antarmenteri koordinator, dapat bisa lebih ditingkatkan. Termasuk di antaranya memanfaatkan Unit Kerja Presiden untuk melaksanakan berbagai tugas pemerintahan.

Menko Perekonomian Hatta Rajasa menambahkan, demi mencapai target program kerja 100 hari, mulai hari ini Wapres Boediono beserta jajaran menteri bidang perekonomian akan melakukan rapat koordinasi. Rapat tersebut antara lain membahas *National Summit* yang akan diselenggara-

kan akhir Oktober.

"Rapat pagi ini bertempat di Kantor Wapres, kemudian dilanjutkan lagi di Kantor Menhub. Rapat juga akan membahas masalah infrastruktur, pangan yang terkait dengan energi, transportasi, industri, serta UKM dan jasa," paparnya.

Lebih Solid

Ketua Fraksi PKS di DPR Mustafa Kamal mengatakan, dalam sistem presidensial, presiden bertanggung jawab penuh dalam menjalankan pemerintahan. Itu berarti kebijakan yang dibuat haruslah tidak bertentangan satu dengan lainnya. Dengan demikian, sudah sewajarnya semua keputusan dibuat oleh presiden. "Tidak ada yang dilanggar dengan hal itu. Memang sudah sepatutnya kebijakan itu dibuat oleh presiden. Dia adalah pemimpin eksekutif. Wakil presiden bertugas untuk membantu menjalankan tugas itu," katanya.

Menurut Mustafa, dengan penegasan presiden itu, pemerintah akan lebih solid karena punya satu suara

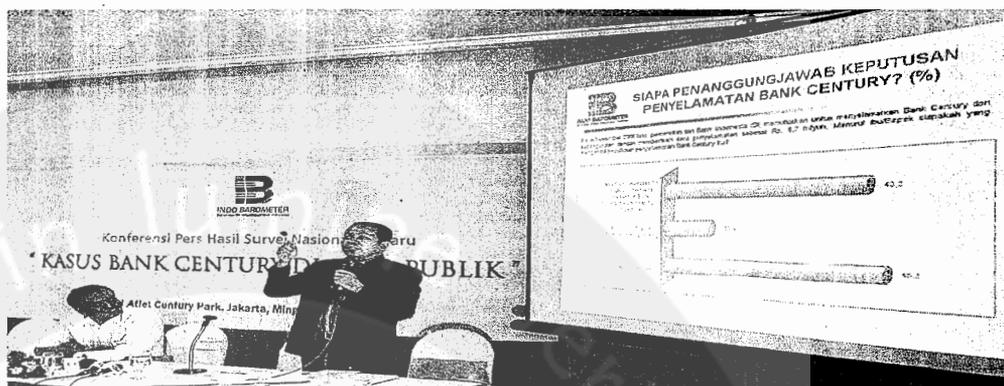
dan satu sikap. Dengan dilarangnya wakil presiden mengeluarkan kebijakan, tidak diartikan bahwa peran wapres akan dikedirikan. Wapres tetap penting, terutama dalam memberikan masukan-masukan dan pertimbangan sebelum presiden membuat kebijakan, terutama hal-hal yang lebih bersifat teknis.

"Wapres akan tetap berperan dan penting. Pertimbangan dan masukan dia akan sangat diperhatikan oleh presiden. Hanya saja, mungkin itu tidak banyak diketahui publik, tetapi pasti presiden akan meminta itu sebelum membuat kebijakan," paparnya.

Menurut Mustafa, pernyataan SBY itu juga tidak akan membuat pemerintah akan lamban dalam menyikapi sebuah persoalan. Dia meyakini bahwa dengan penegasan itu, koordinasi antara presiden dan wapres akan lebih baik. Terlebih, kini kantor presiden dan wapres telah disatukan sehingga koordinasi dan konsultasi bisa dilakukan sewaktu-waktu.

(*rarasatasyarief/helmi firdaus*)

Senin, 25 Januari 2010



CENTURY DI MATA PUBLIK: Direktur Indo Barometer M Qodari saat memaparkan hasil survei bertem "Kasus Bank Century di Mata Publik" di Senayan, Jakarta, kemarin.

100 Hari Gagal Dimanfaatkan

JAKARTA (SI) – Sejumlah elemen gerakan mahasiswa yang tergabung dalam Kelompok Cipayang Plus menilai pemerintahan baru gagal memanfaatkan momentum 100 Hari kerja. Ekspektasi rakyat terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menengsatu putaran tak dilakukan dengan maksimal. Sebaliknya, hanya digunakan untuk langkah-langkah reaktif terkait berbagai macam kasus yang meliputinya.

"Filosofinya, program 100 hari itu pemerintah bisa memberikan harapan yang pasti kepada rakyat. Tapi, faktanya harapan itu tidak ada. Pemerintah juga tidak membangun optimisme tapi sebaliknya pesimisme yang justru lebih banyak dimunculkan," kata Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB-HMI) Arip Musthopa di Jakarta Media Center (JMC) kemarin. Kelompok Cipayang Plus me-

rupakan gabungan elemen organisasi kemahasiswaan yang terdiri dari HMI, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Hikmahbudhi, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), KAMMI, KMHDI, dan Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI).

Arip menambahkan, indikator kegagalan pemerintahan baru dalam memenuhi harapan bisa dilihat dari berbagai aspek, meliputi pendidikan, ekonomi, politik, dan hukum. Penyebab kegagalannya karena SBY-Boediono dinilai terlalu sibuk menaruh perhatian terhadap kasus skandal Bank Century dan kriminalisasi pimpinan KPK.

"Selain kasus Century, juga kasus Bibit-Chandra yang menyebabkan konsentrasi pemerintah tidak terarah. Bahkan, pemerintah cenderung tidak memenuhi janji-

janjinya saat kampanye Pilpru 2009 lalu, khususnya masalah kesejahteraan sosial, demokrasi dan keadilan," kata Arip yang è daulat Jurubicara Gerakan Ekstraparlemen Kelompok Cipayang.

Terkait hal tersebut, rencana Cipayang Plus akan menggelar aksi untuk menuntut pertanggungjawaban pPemerintahan SBY-Boediono pada 28 Januari 2010 di Istar Negara, Jakarta. Bahkan, merek juga sudah menginstruksikan kepada jajaran organisasi tingkat provinsi untuk menggelar aksi serupa di daerah masing-masing.

"Kami sudah instruksikan ke semua elemen organisasi tingkat cabang (provinsi) untuk aksi pada 2 Januari di DPRD provinsi. Khusus aksi di Jakarta, kami sepakat akan mengepung Istana Negara, bil perlu mendudukinya," tegas Ketua Bidang Politik GMKI, Sutrisno.

(nurul huda)

Century Tenggelamkan Program 100 Hari

JAKARTA (SI)—Sejumlah kalangan menilai program 100 hari pertama Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono tenggelam akibat fokus pemberitaan media massa pada kasus Bank Century.

Menurut Pengamat Politik Sukardi Rinakit, kasus Bank Century dan perseteruan Polri dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menenggelamkan program 100 Hari Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono. Akibatnya, Pemerintahan SBY pada 100 hari pertama ini tidak berhasil memunculkan optimisme publik. Sejumlah program yang sebelumnya dianggap dapat meraih kepercayaan dan simpati publik justru mengundang keraguan publik terhadap kredibilitas pemerintah.

Menurut dia, munculnya dua kasus yang menyedot perhatian publik itu menjadi penyebab menurunnya kinerja pemerintah. Dia juga menyebutkan, jika dibandingkan antar pemerintahan SBY-JK dan SBY-Boediono, terlihat bahwa harmonisasi pemerintahan serta kekompakan pasangan presiden dan wakil presiden lebih baik saat KIB I ketimbang periode kedua. "SBY terlihat lebih nyaman di jilid I dalam menjalankan pemerintahan dan JK pun cukup banyak meng-counter

kata Sukardi saat diskusi "Evaluasi Program 100 Hari Kabinet Bidang Ekonomi, Politik, dan Hukum" yang diselenggarakan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FE UI) di Jakarta kemarin.

Sukardi mengatakan, jika dibandingkan dengan Boediono yang cenderung kalem, SBY memiliki dominasi sangat luas sebagai seorang presiden yang memiliki seorang wakil. Harmonisasi pemerintahan pun memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Bahkan, pihaknya memberikan nilai 5 plus untuk KIB II selama jalannya 100 hari pemerintahan. "Lulus namun masih banyak catatan," katanya.

Hal serupa dikatakan Direktur Eksekutif Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, Zaenal Arifin Muchtar. Menurut dia, program terobosan yang menonjol selama 100 hari pemerintahan SBY-Boediono terkait dengan temuan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum. "Satu-satunya terobosan yang muncul di 100 hari Pemerintahan SBY-

Pemberantasan Mafia Hukum dengan sidak ke lapas," katanya.

Meski demikian, Zaenal mengingatkan bahwa pola sidak gaya Satgas Pemberantasan Mafia Hukum harus ada *blue print* yang jelas terkait perbaikan lapas. Karena jika hanya sekedar sidak, justru hanya memperpanjang masalah. "Kalau sekedar sidak tapi tidak ada perbaikan atas masalah, justru akan perpanjang masalah. Harus ada *blue print* dari satgas," tegasnya.

Pada prinsipnya Zaenal menilai, secara umum program 100 Hari Pemerintahan SBY-Boediono di bidang hukum, termasuk pemberantasan korupsi, belum ada terobosan baru. Indikasinya terlihat dari dua institusi penegak hukum, yaitu kepolisian dan kejaksaan, yang tidak memiliki terobosan baru.

Sementara itu, Transparency International Indonesia (TII) menganggap bahwa program 100 Hari pemerintah tenggelam akibat kasus *bailout* (dana talangan) Bank Century. Bahkan, berita penyelenggaraan National Summit pun surut di waktu 100 hari tersebut, saat Mabes Polri menahan Bibit dan Chandra serta permasalahan mafia hukum.

Menurut Sekjen TII Teten Masduki, dua kasus tersebut muncul

rintah untuk menyelesaikan sejumlah kasus. Padahal, seharusnya program 100 Hari ini bisa menjadi momentum pemberantasan korupsi karena mendapatkan dukungan luas dari masyarakat. "Ini bisa menjadi pengungkit program pemberantasan korupsi lima tahun mendatang," katanya.

Rapor Biru

Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono menayangkan pemberitaan kasus Bank Century seakan menenggelamkan hasil 100 hari kerja para menteri di bawah koordinasinya. Padahal, hampir seluruh program kerja yang direncanakan hasilnya cukup baik. Bahkan, pada hari ke-75 ada beberapa program kerja yang tuntas 100%.

"Namun, berbagai capaian kerja yang telah dilaksanakan tidak terdengar publik sebab pemberitaan media fokus ke kasus Bank Century," ujar Agung di kediaman pribadinya, Jakarta, kemarin.

Dia mencontohkan, hasil kerja Kantor Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat banyak yang sukses pada kurun waktu 100 hari pertama kinerja Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) Jilid II. Misalnya, sosialisasi dan bantuan Program



Barbagai capaian kerja yang telah dilaksanakan tidak terdengar publik sebab pemberitaan media fokus ke kasus Bank Century.

AGUNG LAKSONO
Menko Kesra

syarakat (PNPM) mandiri dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi di Sumatera Barat dan Jawa Barat telah selesai menjelang hari ke-75.

Agung mengatakan, pada saat yang sama kementeriannya telah menyelesaikan program pengembangan bantuan sosial terhadap ber-

revitalisasi lembaga penanganan bencana. Selain itu, telah selesai dengan baik program penyelenggaraan ibadah haji. Pada 2009 lalu komplain jamaah atas pelayanan haji jauh menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Sedangkan program peningkatan daya saing pendidikan tinggi, capaian sudah melampaui target rencana atau terealisasi 128-143%. Setidaknya, dari 35 program kerja telah rampung 16 program pada hari ke-75.

Kerahkan 20.000 Massa

Aksi besar-besaran kembali akan digelar besok, Kamis (28/1), oleh Gerakan Indonesia Bersih (GIB). Aksi beberapa elemen masyarakat ini melaporkan akan memobilisasi sekitar 20.000 massa ke Istana Negara, Jakarta. Massa akan bergerak dari air mancur patung kuda di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, mulai pukul 13.00 WIB.

Agenda utama aksi yang akan diikuti puluhan organisasi massa (ormas) dan mahasiswa ini terkait evaluasi program 100 Hari Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono. Hingga kemarin tercatat 64 kelompok dari elemen mahasiswa dan ormas memastikan ikut bergabung. "Organisasi yang

syarakat, seperti elemen keagamaan, buruh, tani, dan tentunya elemen mahasiswa," kata juru bicara Gerakan Indonesia Bersih Adhie Massardi saat rapat koordinasi aksi 100 hari Pemerintahan SBY di Kantor PPM Muhammadiyah, Jakarta, kemarin.

Direktur Lingkaran Madani untuk Indonesia Ray Rangkuti mengatakan, aksi ini merupakan aksi damai dengan tuntutan mengenai kekecewaan mereka pada kinerja 100 hari Pemerintahan SBY. "Kegagalan sudah nyata di lima bidang penting, yakni pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum, lingkungan hidup, dan korupsi," kata Ray.

Dari Bandung, sebanyak 3.000 mahasiswa asal 17 kampus siap berangkat ke Jakarta dan ikut serta dalam unjuk rasa 28 Januari. Setiap kampus mengutus sekitar 100 sampai 200 mahasiswa. "Kita sudah koordinasikan," kata Presiden Mahasiswa Universitas Islam Bandung Ahmad Hidayat di Bandung, kemarin.

Dia mengatakan, saat ini ratusan mahasiswa yang berasal dari enam kampus di Bandung sudah berada di Jakarta. Dia mengungkapkan, agar aksi keberangkatan mereka tidak dicegat di perjalanan, mereka akan berpecah-

(nurluhuda/mshahlan/krisiandi@kawisastra)



ANTARA/RASETYO UTOMO

KINERJA 100 HARI: Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia (TII) Teten Masduki (kiri) didampingi Ketua Dewan Pengurus TII Todung Mulya Lubis (tengah), dan anggota TII Kuswartini Suhel memberikan keterangan pers mengenai evaluasi kinerja Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II di Jakarta kemarin.

Satgas Angkat Citra Pemerintah

PEMBENTUKAN Satgas Pemberantasan Mafia Hukum dinilai mengangkat citra pemerintah khususnya dalam program penegakan hukum pada 100 hari. Pembentukan satgas ini juga bisa menjadi pemicu dan indikator perbaikan di bidang hukum bagi pemerintah ke depan.

Menurut Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD, kinerja pemerintah dalam 100 hari di bidang hukum dapat dilanjutkan dan dijadikan pijakan untuk kebijakan pemerintah. Di hari-hari menuju 100 hari pemerintahan pemerintah sudah berusaha memperbaiki keadaan hukum di Indonesia. "Adanya satgas adalah sebagai peletak dasar pembenahan hukum. Selain itu, pembenahan di Polri menjadi salah satu dasar pembenahan," katanya di Gedung MK, Jakarta, kemarin.

Mahfud mengatakan, apa yang dilakukan satgas adalah awal yang bagus dalam memperbaiki hukum di Indonesia. Namun, dia mengungkapkan, tidak mudah untuk

menilai sebuah pemerintahan dalam waktu 100 hari. "Nggak mungkin lah penilaian dalam 100 hari. Waktu 100 hari itu hanya sebagai awalan saja," jelas Mahfud.

Sekadar diketahui, awal Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono di bidang hukum diwarnai dugaan kasus kriminalisasi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Saat itu dua Wakil Ketua KPK, Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah, ditetapkan sebagai tersangka. Karena kasus itu, muncullah tim delapan yang dibentuk Presiden SBY. Tim Delapan tersebut merekomendasikan pada presiden agar kasus Bibit dan Chandra dihentikan dan berlanjut dikeluarkannya surat ketetapan penghentian penuntutan (SKPP) oleh kejaksaan.

Terkait laporan Tim Delapan pula, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membentuk satuan tugas pemberantasan mafia hukum. Satu contoh tindakan satgas adalah inspeksi mendadak (sidak) ke Rutan Pondok Bambu. Tin-

dakan tersebut sekaligus memberikan gambaran tentang kondisi lembaga pemasyarakatan kita. Dari sidak tersebut diketahui jika beberapa tahanan mempunyai ruang tahanan yang mewah dengan berbagai perlengkapannya. Misalnya, ada pendingin udara dan tempat karaoke.

Pengamat Hukum Tata Negara Irman Putra Sidin menilai program 100 Hari Pemerintahan SBY-Boediono hanya terselamatkan oleh gebrakan Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum.

"Saya mengapresiasi temuan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum soal lembaga pemasyarakatan (lapas) di Pondok Bambu, Jakarta Timur. Meski telat dan bukan dari orisinalitas presiden karena itu merupakan rekomendasi Tim Delapan," kata Irman.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPR Benny Harman mengatakan, di 100 hari pemerintahan memang ada satu prestasi yang patut ditingkatkan di bidang hukum. "Adanya satgas adalah satu langkah untuk

merespons agar ada perbaikan di dunia hukum," jelas Benny.

Tanggapan berbeda diutarakan Wakil Ketua Komisi III Aziz Syamsuddin. Dia mengatakan, pembentukan satgas pemberantasan mafia hukum justru menjadi salah satu pertanyaan di masa 100 hari Pemerintahan SBY.

Dia mempertanyakan bagaimana sebuah lembaga yang dibentuk dengan keputusan presiden (keppres) namun ada anggota yang berasal dari lembaga yang kedudukannya diatur dengan UU. "Kedudukan hukum sebagai anggota satgas kan dipertanyakan," jelasnya.

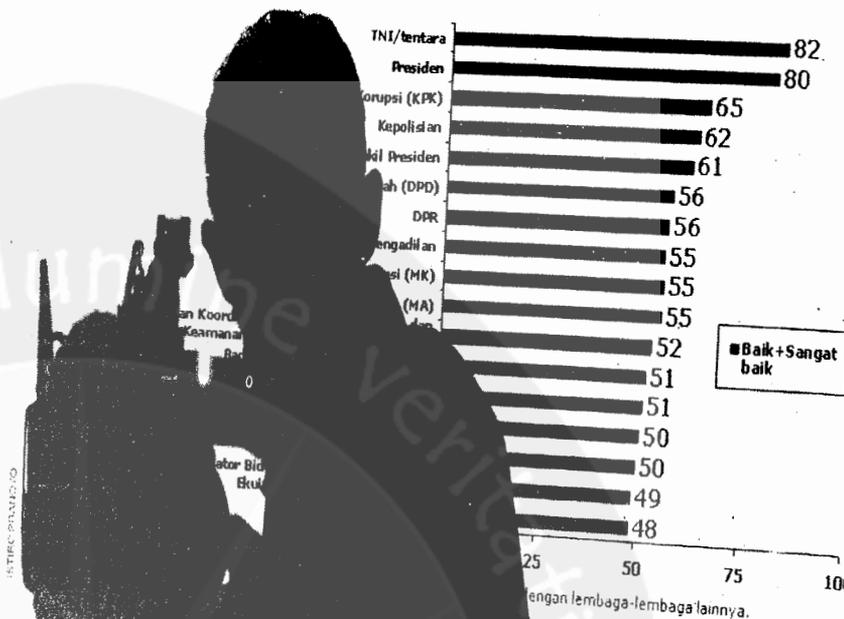
Sekadar diketahui, beberapa anggota satgas berasal dari institusi penegak hukum, seperti Wakil Jaksa Agung Darmono dan Herman Effendi dari Polri. Padahal, Kejaksaan Agung dan Polri adalah lembaga yang pembentukannya didasari UU. Sementara, satgas didasari keppres yang kedudukannya di bawah UU.

(kholil)

Kamis, 28 Januari 2010



Kinerja Lembaga Negara (Baik atau Sangat Baik (%))



SURVEI KINERJA PEMERINTAH: Seorang juru kamera berdiri di dekat papan survei saat Lembaga Survei Indonesia (LSI) melansir hasil surveinya mengenai kinerja 100 hari pemerintah di Jakarta, kemarin.

Kepuasan terhadap Kinerja Pemerintah Turun

JAKARTA (SI) - Lembaga Survei Indonesia (LSI) melansir hasil survei terbarunya mengenai tingkat kepuasan masyarakat atas kinerja pemerintah turun 15% dari survei sebelumnya yang mencapai 85%.

Penurunan tingkat kepuasan publik tersebut dipicu kasus dugaan kriminalisasi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan skandal *bailout* Bank Century. Dalam survei LSI tersebut, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah hanya 70%, atau menurun dibanding survei LSI pada Juli 2009. Survei yang dilakukan pada 7-20 Januari 2010 di seluruh Indonesia itu memakai teknik *multistage random sampling* dengan metode tatap muka terhadap 2.900 responden. Survei tersebut memiliki tingkat kepercayaan 95% dengan margin *ojek* kurang lebih 2%.

Direktur Eksekutif LSI Kuskrindo Anbari menyebutkan, pemberitaan kasus Bank Century dan kriminalisasi KPK memengaruhi tingkat kepuasan kinerja SBY dan Boediono. Dari 2.900 yang menjadi responden, 44% menyatakan mengikuti kasus Bibi Samud Rianto dan Chandra M Hamzah, sementara 42% responden mengaku mengikuti kasus Century. "Responden yang mengikuti kedua kasus ini cenderung tidak puas terhadap kinerja

SBY dan Boediono," katanya. Dodi-panggilan Kuskrindo Anbari-menjelaskan, pada survei yang dilakukan di seluruh Indonesia ini, 70% warga menyatakan puas terhadap kinerja SBY dan Boediono, 27% tidak puas, dan 4% tidak menjawab. Sementara kepuasan kinerja itu mempunyai korelasi positif dengan kepuasan ekonomi, penegakan hukum, dan stabilitas politik. "Korelasi tingkat kepuasan dengan kondisi ekonomi cukup tinggi. Jadi kalau memang ingin tingkat kepuasannya tinggi, harus membuat kondisi ekonomi menjadi baik," tuturnya.

Meski mengalami penurunan, Dodi menilai penurunan ini masih bisa ditoleransi publik. Selain masih dalam kisaran yang tinggi, tingkat kepuasan ini masih jauh jika dibandingkan tingkat kepuasan saat Juni 2008 lalu di mana SBY mencapai titik terendah, yaitu 45%. "Tetapi, penurunan ini harus dicermati. Karena, perubahan-perubahan itu dinamis. Segala hal bisa terjadi dalam politik," tuturnya.

Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar, Jeffrey Geovani menilai, hasil survei ini masih menunjukkan bahwa kinerja pemerintah tidak terlalu buruk di mata publik. Namun, peringatan ini tidak bisa diabaikan begitu saja.

"Jadi penurunan itu tidak bisa

diprediksi. Siapa tahu ada kejadian luar biasa yang bisa membuat kepercayaan terhadap pemerintah menurun drastis. Sebagai partai pendukung pemerintah, kita tidak ingin pemerintahan ini digulingkan di tengah jalan," katanya.

Anggota DPR dari Fraksi PDIP Ganjar Pranowo menilai wajar penurunan kepuasan terhadap kinerja pemerintahan menjelang 100 hari ini. Ganjar menilai, sikap pemerintah yang tidak transparan, terutama terkait dua kasus KPK dan Polri serta kasus Bank Century, membuat kepercayaan masyarakat menurun. Apalagi, pemerintah menyikapinya dengan mengeluarkan hal-hal sebagai tameng, salah satunya isu pemakzulan presiden.

Sementara itu, anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Hayono Isman mengkritik Juru Bicara (Jubir) Kepresidenan Julian Aldrin Pasha di sela-sela peluncuran survei LSI kemarin. Julian dinilai terlalu defensif dalam menyikapi kritik terhadap Pemerintahan Presiden SBY.

Hayono tiba-tiba meminta waktu dua menit kepada Julian usai menyampaikan pendapatnya terkait hasil survei tersebut. Saat itu Julian meminta izin meninggalkan acara karena harus kembali menjalankan tugas. "Kalau ada masukan berupa kritikan terhadap neme-

ntah, jangan membela diri dengan mengajukan hal-hal yang baik. Pemerintah berbuat baik itu sudah seharusnya. Kalau jelek itu selalu dikritik. Kritikan ini *kan* opini publik," kata Hayono kepada Julian.

Menurut Hayono, yang penting untuk diperhatikan adalah kemampuan melakukan komunikasi publik, terutama terkait dengan pengelolaan konflik yang dialami oleh pembantu-pembantu presiden. Hayono mencontohkan, kasus Cicak-Buaya yang lebih ke persoalan pribadi kemudian menjadi kasus besar yang mendapat sorotan publik. Ini kemudian merembet pada kasus Bank Century.

Selama Hayono menyampaikan kritikan itu, Julian hanya diam. Tidak ada upaya dari Julian dalam forum itu untuk melakukan balasan atas kritikan yang disampaikan oleh Hayono. "Saya tidak perlu memberikan komentar atas itu. Saya *no comment*," ujarnya.

Menanggapi hal itu, Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat Soetan Batoeghana menilai, pemerintah harus mulai terbiasa untuk menerima kritikan jangan kemudian menutup diri atau terlalu defensif. Hanya, kritikan yang disampaikan itu harus bersifat konstruktif dan memberikan solusi."

(helmi firdaus)

Rabu, 16 Desember 2009

PDP Minta SBY Tegas Berantas Mafia Hukum

JAKARTA (SI) – Pimpinan Kolektif Nasional Partai Demokrasi Pembaruan (PKN PDP) meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tegas dalam mewujudkan pemberantasan mafia hukum atau mafia peradilan. Apalagi gagasan pemberantasan mafia hukum menjadi salah satu program 100 hari Pemerintahan SBY.

"Kami minta Presiden SBY tegas soal itu (pemberantasan mafia hukum). Prinsipnya kami siap mendukung langkah itu dan tentunya harus dengan langkah yang konkret," kata Ketua Pelaksana Harian PKN PDP Petrus Selestinus saat peringatan Hari Ulang Tahun Ke-4 PDP di Jakarta kemarin.

Menurut dia, hingga saat ini partainya melihat tidak adanya tanggapan positif dari institusi kejaksaan, kepolisian, KPK, bahkan DPR untuk memberantas mafia hukum. Hal ini bisa dibuktikan dengan tidak adanya langkah maju penanganan kasus Anggodo Widjaja. (nurul huda)

Sabtu, 2 Januari 2010

Kasus Century Tak Ganggu Program 100 Hari

JAKARTA (SI) - Penyelidikan kasus Bank Century oleh Panitia Khusus Angket Bank Century dinilai tak mengganggu program 100 hari pemerintah. Beberapa fraksi dari partai koalisi pendukung pemerintah mengatakan, pengungkapan kasus Bank Century tak relevan jika dianggap mengganggu kinerja kabinet Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Hal itu menjawab pandangan Partai Demokrat yang menilai program 100 hari kabinet terganggu dengan adanya imbauan Pansus Century yang meminta Wapres Boediono dan Menkeu Sri Mulyani untuk nonaktif sementara.

Menurut Sekretaris Fraksi PAN DPR Viva Yoga Mauladi, kurang tepat jika mitra koalisi di legislatif dinilai mengganggu program 100 hari pemerintahan SBY. Sebagai mitra koalisi pemerintah di legislatif, fraksi-fraksi wajib mengawasi agar pemerintahan bisa jadi pemerintahan yang bersih. "Rasanya kurang tepat kalau dibilang mengganggu. Koalisi ini kan dibangun untuk membuat sebuah pemerintah yang bersih. Apa yang dilakukan mitra koalisi itu semata untuk itu, tidak ada hal-hal yang lain," katanya di Jakarta kemarin.

Menurut dia, fraksi memiliki dinamika masing-masing. Dinamika ini selalu berkaitan dengan fungsi-fungsi yang melekat di fraksi. Perbedaan pandangan atau sikap masing-masing fraksi jangan selalu dihadapkan dengan koalisi. "Saya rasa itu cara yang kurang bijaksana. Ketika fraksi menjalankan fungsinya selalu dihadapkan dengan koalisi. Itu akan membuat fungsi DPR secara keseluruhan juga tidak akan berjalan optimal," ungkapnya.

Hal senada diungkapkan Ketua Fraksi PKS DPR Mustafa Kamal. Dia menilai tidak ada hubungannya antara program 100 hari SBY diganggu oleh mitra koalisi terkait skandal Century. Menurut Mustafa, kasus Bank Century tidak berkaitan dengan koalisi yang seka-

rang atau pemerintahan sebelumnya. Century adalah sebuah kejadian di mana semua pihak sepakat menyelesaikannya secara tuntas. "Saya melihatnya tidak ada hubungannya," katanya.

Dalam pandangan Mustafa, 100 hari pemerintahan SBY berjalan cukup baik. Hampir semua kementerian menunjukkan semangat tinggikan program yang baik agar pemerintahan berjalan mulus dan rakyat bisa lebih sejahtera. Para menteri pun menunjukkan kematangan dalam menghadapi persoalan-persoalan yang muncul di departemen mereka masing-masing.

Sebelumnya, Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat M. Jafar Hafshah menilai koalisi yang dibangun itu disepakati di eksekutif, legislatif untuk pusat dan daerah. Namun, koalisi di legislatif tidak signifikan koalisi yang di eksekutif. Dia menilai, gangguan 100 hari pemerintahan SBY datang dari imbauan Pansus Angket Century agar SBY menonaktifkan Wapres Boediono dan Menkeu Sri Mulyani. Jafar menilai langkah ini tidak diperlukan dan seharusnya anggota pansus yang berasal dari fraksi anggota koalisi menolaknya. "Tim seharusnya tidak bermanuver sendiri-sendiri. Anggota pansus itu kan direkomendasikan oleh fraksi masing-masing jadi waktu di pansus seharusnya mereka berbicara atas nama fraksi," kata Jafar.

Menurut dia, karena persoalan itu, program 100 hari pemerintahan SBY tidak cukup terinformasikan dengan baik ke publik. Perhatian publik, terutama media, banyak tercurah kasus Bank Century. Padahal 100 hari pemerintahan SBY berjalan cukup baik, banyak program kementerian mengarah pada arah yang tepat untuk lima tahun depan. Dikatakan, kepercayaan dan etika penting karena koalisi harus diikat kesepakatan dan tidak diikat dasar hukum sama sekali.

(helmi firdu)



Sabtu, 2 Januari 2010

Program Depsos Jangan Basa-basi

JAKARTA (SI) – Anggota Komisi VIII DPR Jazuli Juwaini meminta program Departemen Sosial (Depsos) tidak sekedar basa-basi dalam menyelesaikan masalah sosial masyarakat. Namun, hingga saat ini DPR menilai kinerja Depsos dibawah Menteri Sosial Salim Segaf Aljufri dalam program 100 hari cukup bagus dan sukses. Depsos dinilai banyak melakukan terobosan program terkait kesejahteraan rakyat.

“Saya kira cukup bagus dan perlu diapresiasi. Ke depan diharapkan program Depsos tidak sekedar basa-basi, tapi harus betul-betul bisa menyelesaikan masalah sosial yang saat ini ada,” katanya. (nurul huda)

Jumat, 8 Januari 2010

Menteri Kelautan Klaim Sukses 100 Hari

JAKARTA (SI) – Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad mengklaim telah sukses menjalankan program 100 hari yang sebelumnya dicanangkan mencapai 95%. Menurut Fadel, dalam program 100 hari, setidaknya tiga program utama yang akan dilakukan yaitu penyediaan sarana prasarana fisik sistem rantai dingin pada 20 lokasi sentra perikanan, koordinasi terkait pemenuhan kebutuhan air bersih serta jalan untuk sektor kelautan dan perikanan.

“Selain itu, kami berhasil membuat kebijakan kemudahan berusaha di sektor kelautan dan perikanan, pemberantasan *illegal fishing*, penyiapan peraturan perundangan bidang kelautan dan perikanan,” katanya. (nurul huda)

Sabtu, 9 Januari 2010

Mensos Klaim Program 100 Hari Sukses

JAKARTA (SI) – Menteri Sosial (Mensos) Salim Segaf al-Jufri mengklaim telah sukses menjalankan program 100 hari. Menurut dia, banyak program yang sudah dilaksanakan, antara lain penyaluran bantuan langsung pemberdayaan sosial kepada 3.907 kelompok usaha bersama (kubek) di 80 kabupaten atau 32 provinsi.

"Selain itu, juga pemberian bantuan untuk rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni sebanyak 2.346 unit dan sarana lingkungan 40 unit di 13 provinsi, 22 kabupaten/kota, serta dana stimulan kubek LKM di 15 kabupaten/kota," kata Salim di Jakarta kemarin. Dia juga menilai, serapan realisasi anggaran tahun 2009 hingga 17 Desember 2009 sebesar Rp3,14 triliun atau 91,66% dari total anggaran sebesar Rp3,43 triliun. (nurulhuda)

PDIP Nilai Program 100 Hari Hanya Pencitraan

JAKARTA (SI) - PDI Perjuangan menilai program kerja pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono hanya sebatas citra yang sengaja diciptakan untuk menimbulkan efek kejut. Namun dari segi realisasi, hampir semua program tidak ada yang terealisasi.

"Program 100 hari dengan 45 program pokok dan 129 rencana aksi bersifat impresif, hanya menciptakan kesan dan menimbulkan efek kejut, tetapi hasilnya apa ya nggak ada," kata Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan Bambang Wuryanto saat jumpa pers di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.

Menurut Bambang, berdasarkan kontrol yang dilakukan fraksinya di DPR dari Komisi I hingga Komisi XI, klaim 95% keberhasilan dalam program 100 hari adalah omongkosong. Bahkan, kata dia, apa yang dilakukan Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II ini bisa dikatakan hanya menghasilkan program kertas saja karena tidak ada realisasinya. "Bahkan ada juga yang hanya meneruskan program-program kabinet sebelumnya," ungkapnya.

Di tempat sama, Ketua Kelompok Fungsi Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin memaparkan, dari sisi pertahanan dan keamanan 100 hari kinerja pemerintahan SBY

■ Kriminalisasi Pimpinan KPK

Peristiwa berawal dari ditetapkannya dua pimpinan KPK, Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah, sebagai tersangka kasus suap. Kurangnya transparansi kepolisian membuat publik mencurigai adanya kriminalisasi terhadap KPK. Tim khusus pun dibuat presiden dengan nama Tim Delapan untuk mengklarifikasi fakta-fakta tersebut. Akhirnya, berdasarkan rekomendasi Tim Delapan dan didorong oleh dukungan publik, Bibit-Chandra dibebaskan dengan keluarnya SKPP dari kejaksaan.

■ Peringatan Hari Antikorupsi 9 Desember

Terjadi aksi unjuk rasa dalam skala besar memperingati hari antikorupsi sedunia. Aksi demo itu menuntut pemerintah untuk lebih tegas dalam memberantas korupsi. Aksi terjadi di hampir seluruh kota besar seperti di Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Makassar, Yogyakarta dan Palembang. Di Jakarta, jumlah massa mencapai lebih dari 20.000 orang yang dimotori Gerakan Indonesia Bersih (GIB), dengan pengamanan melibatkan sekitar 14.000 personel kepolisian.

■ Buku Gurita Cikeas

George Junus Aditjondro, pengamat yang dikenal kritis terhadap kebijakan rezim, meluncurkan buku yang mengemparkan Istana. Buku bertajuk "Di Balik Gurita Cikeas" berisi paparan terkait dugaan korupsi yang terjadi di sejumlah yayasan yang berafiliasi dengan Partai Demokrat dan SBY. Buku itu juga menyoal dugaan keterlibatan SBY dalam skandal Century. Belakangan sejumlah buku terbit untuk meng-counter isi buku George Aditjondro.

■ Renovasi Pagar Istana

Rencana renovasi pagar Istana Presiden dan Wapres senilai Rp22,5 miliar memicu kontroversi. Pembangunan pagar yang dilengkapi alat pengaman berteknologi tinggi di itu dinilai berlebihan dan memboroskan anggaran, meski sudah dianggarkan di dalam Sekretariat Negara.

■ Royal Crown Pejabat

Pemerintah menyediakan 79 unit mobil baru bermerek Toyota Royal Crown kepada pejabat setingkat menteri dan pimpinan lembaga tinggi. Mobil seharga Rp1,3 miliar dan berkapasitas mesin 3.000 cc itu sebagai pengganti Toyota Camry. Pembelian mobil mewah tersebut dianggap sebagai pemborosan dan tidak sensitif terhadap kondisi rakyat.

■ Sel Mewah Artalyta

Artalyta Suryani, narapidana kasus suap kejaksaan, menikmati sel mewah di Rutan Pondok Baru, Jakarta Timur. Sel yang dilengkapi berbagai fasilitas seperti sofa dan karaoke diketahui setelah dilakukan sidak oleh Tim Satgas Pemberantasan Mafia Hukum dan memicu reaksi dari masyarakat.

■ Demonstrasi 100 Hari Pemerintahan SBY

Ribuan massa gabungan elemen mahasiswa, buruh, dan LSM menggelar sejumlah aksi di Istana Presiden, Istana Wapres, Kantor KPK, dan Gedung DPR/MPR. Dalam aksi yang melibatkan pengamanan 50.000 lebih personel kepolisian, massa mengangkat sejumlah isu, di antaranya ketidakberhasilan Pemerintahan SBY mewujudkan janji program 100 hari. Selain di Jakarta, aksi juga digelar di sejumlah daerah.



■ Bailout Century

Bermula dari kebijakan pemerintah mengucurkan dana talangan (bailout) kepada Bank Century, kasus ini kembali mencuat setelah ditemukan beberapa kejanggalan berdasarkan audit BPK. DPR kemudian mengajukan hak angkat dan membentuk Pansus untuk menyelidiki apakah ada pelanggaran dalam kebijakan bailout yang membengkak hingga Rp7,2 triliun itu. Kasus ini menyeret sejumlah pejabat, di antaranya Wakil Presiden Boediono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Sejak resmi dilantik memimpin pemerintahan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono-Wakil Presiden Boediono menghadapi sejumlah persoalan politik dan aksi demonstrasi. Dinamika yang muncul itu bukan hanya mengganggu keberlangsungan Program 100

DINAMIKA MEWARNAI 100 HARI SBY-BOEDIONO

dari program yang dikampanyekan, pemerintah memang terkesan punya bayangan yang sangat tinggi untuk mencapai program-programnya, tetapi realisasinya sama sekali belum ada. "Saya mengistilahkan program 100 hari di bidang pertahanan dan keamanan lebih banyak takabur. Karena banyak hal dan pasti tidak bisa diselesaikan dalam 100 hari sehingga bisa dipastikan hasilnya ngawur," katanya.

Wakil Ketua Komisi I DPR ini lalu memaparkan program penye-

masuk dalam program 100 hari. Kenyataannya, kata dia, hingga saat ini DPR sama sekali belum mendapatkan laporan apa saja yang sudah dialihkan, dialihkan ke mana, dan nilai aset yang dialihkan. "Pengalihan bisnis TNI yang akan dituntaskan dalam 100 hari awalnya kami bersyukur karena berarti reformasi TNI akan segera selesai. Tapi apa yang dialihkan dan dialihkan kepada siapa, lalu aset yang dialihkan itu berapa nilainya, kita lihat nol hasilnya,"

Sementara dari program pendidikan, Ketua Kelompok dan Fungsi Komisi X Heri Akhmadi menilai, program 100 hari yang disusun hanya menjadi upaya tebar pesona karena secara substantif tidak menyelesaikan masalah pendidikan. Heri mencontohkan bagaimana hingga saat ini pemerintah belum bisa menyelesaikan masalah status guru bantu menjadi PNS. "Tetapi kenyataannya target yang dijanjikan selesai pada 2009 itu malah tidak masuk dalam program 100 hari

Sebelumnya, Lembaga Survei Indonesia (LSI) melansir tingkat kepuasan masyarakat atas kinerja pemerintah turun dari survei terdahulu yang mencapai 85%. Penurunan tingkat kepuasan publik tersebut dipicu kasus dugaan kriminalisasi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan skandal Bailout Bank Century. Dalam survei LSI tersebut, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah hanya 70%, atau menurun dibanding survei LSI pada

Sejumlah kalangan juga menilai bahwa program 100 hari pertama pada pemerintahan SBY-Boediono tenggelam akibat kasus bailout Bank Century dan perseteruan Polri dengan KPK. Akibatnya, pemerintahan SBY pada 100 hari pertama ini tidak berhasil memunculkan optimisme publik. Sejumlah program yang sebelumnya dianggap dapat meraih kepercayaan dan simpati publik, sebaliknya justru mengundang keraguan publik terhadap kredibilitas pemerintah.

Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono menyayangkan pemberitaan kasus Bank Century seakan menenggelamkan hasil 100 hari kerja para menteri di bawah koordinasinya. Padahal, hampir seluruh program kerja yang direncanakan, hasilnya cukup baik. "Namun berbagai capaian kerja yang telah dilaksanakan menjadi tidak terdengar publik. Penyebabnya media massa seakan terfokus pemberitaannya pada kasus Bank Century ketimbang hasil-hasil kerjanya," ujar Agung.